

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 177 TAHUN 2018
TENTANG MASTER PLAN PROBOLINGGO
SMART CITY TAHUN 2019 – 2023



MASTER PLAN PROBOLINGGO SMART CITY TAHUN 2019 – 2023

Terdiri dari :

1. Analisis Startegis Probolinggo Smart City
2. Masterplan Probolinggo Smart City
3. Executive Summary Masterplan Probolinggo Smart City



BUKU #1

Masterplan Probolinggo Smartcity



ANALISIS STRATEGIS SMART CITY KOTA PROBOLINGGO

2018
DISKOMINFO KOTA PROBOLINGGO

DAFTAR ISI

BAB I

ANALISIS MASA DEPAN	1
1.1 Perkembangan Kota Probolinggo	1
1.1.1 Letak Geografis	1
1.1.2 Demografis	3
1.1.3 Pertanian	5
1.1.4 Perkebunan	6
1.1.5 Peternakan	6
1.1.6 Perikanan	7
1.1.7 Industri dan Perdagangan	8
1.1.8 Pariwisata	10
1.1.9 PDRB.....	11
1.2 Analisis Masa Depan	16

BAB II

ANALISIS KESIAPAN DAERAH	23
2.1 Analisis Struktur Kota Probolinggo	23
2.1.1 Analisis Sumber Daya Manusia	23
2.1.2 Analisis Sumber Daya Pemerintahan	25
2.1.3 Analisis Keuangan Daerah	27
2.2 Analisis Infrastruktur Kota Probolinggo	29
2.2.1 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah	29
2.2.2 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah	31
2.2.3 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah	36
2.3 Analisis Suprastruktur Kota Probolinggo	38
2.3.1 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah	38
2.3.2 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah	40
2.3.3 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah	43

BAB III

ANALISIS GAP	44
--------------------	----

BAB IV

ANALISIS VISI PEMBANGUNAN SMART CITY	48
4.1 Sasaran Smart City Daerah	48
4.1.1 Smart Governance	48
4.1.2 Smart Branding	50
4.1.3 Smart Economy	52
4.1.4 Smart Living	53

4.1.5 Smart Society	59
4.1.6 Smart Environment	60
4.2 Analisis Visi Pembangunan Daerah	61
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Pembagian Wilayah Administrasi Tahun 2017	2
Tabel 2	Jumlah penduduk per Kecamatan dan jenis kelamin Tahun 2017	3
Tabel 3	Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2016 - 2017	4
Tabel 4	Penduduk berdasarkan pendidikan terakhir Tahun 2016-2017	4
Tabel 5	Data Hasil Produksi Bahan Makanan 2016 – 2017	6
Tabel 6	Luas Panen dan Produksi Perkebunan Kota Probolinggo Tahun 2016 -2017	6
Tabel 7	Data Produksi Peternakan Tahun 2016-2017	7
Tabel 8	Data Produksi Perikanan Tahun 2016 - 2017	7
Tabel 9	Data Profil Industri Tahun 2016-2017	8
Tabel 10	Perkembangan Pasar dan Toko di Kota Probolinggo Tahun 2016-2017	9
Tabel 11	Perkembangan Investasi di Kota Probolinggo Tahun 2017	9
Tabel 12	UMKM Tahun 2016-2017	9
Tabel 13	Potensi Wisata Kota Probolinggo Tahun 2017	10
Tabel 14	Hunian Hotel dan Penginapan Kota Probolinggo Tahun 2017	11
Tabel 15	Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2013-2017	12
Tabel 16	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo Menurut Lapangan Usaha 2014 – 2017	14
Tabel 17	Capaian dan target Infrastruktur Kota Probolinggo Tahun 2014-2019	17
Tabel 18	Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo	22
Tabel 19	Backlog Perumahan Kota Probolinggo	22
Tabel 20	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo Tahun 2010-2016	24
Tabel 21	Data PNS Daerah Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 2018	25
Tabel 22	Data Pegawai Berlatar Belakang Pendidikan TIK	26
Tabel 23	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah	28
Tabel 24	Total Belanja TI Pemerintah Kota Probolinggo	29
Tabel 25	Capaian Indeks Infrastruktur Kota Probolinggo	29
Tabel 26	Capaian Infrastruktur Digital Kota Probolinggo	31
Tabel 27	Data aplikasi yang sudah diimplementasikan di Kota Probolinggo	32
Tabel 28	Data Capaian Infrastruktur Sosial di Kota Probolinggo	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Administrasi Kota Probolinggo	1
Gambar 2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2010 - 2017	13
Gambar 3	Perbandingan Laju Inflasi Kota Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur	13
Gambar 4	PDRB Perkapita (Juta Rp), 2012 - 2017	15
Gambar 5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo Tahun 2012-2016 (Metode Baru)	24

BAB I ANALISIS MASA DEPAN

1.1 Perkembangan Kota Probolinggo

1.1.1 Letak Geografis

Kota Probolinggo adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak sekitar 100 km sebelah tenggara Surabaya, Kota Probolinggo terletak di wilayah tapal kuda Jawa Timur dan menjadi jalur utama pantai utara yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Secara geografis, Kota Probolinggo merupakan dataran rendah dengan ketinggian 4-36 meter diatas permukaan laut, terletak antara 7°43'41" sampai dengan 7°49'04" Lintang Selatan dan 113°10' sampai dengan 113°15' Bujur Timur dengan luas wilayah 56,667 Km². Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur kota) : Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat kota) : Pasuruan, Malang, Surabaya. Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi :

- a. Sebelah Utara : Selat Madura
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, Sumberasih Kabupaten Probolinggo
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo



Gambar 1 Peta Administrasi Kota Probolinggo

Wilayah administrasi Kota Probolinggo terbagi dalam 5 (lima) wilayah Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan terdapat 5 Kelurahan, Kecamatan Kademangan terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok terdapat 6 Kelurahan dan Kecamatan Kanigaran terdapat 6 Kelurahan (Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan) Adapun pembagian luas wilayah, jumlah Kelurahan, Jumlah RT dan RW dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Pembagian Wilayah Administrasi Tahun 2017

KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km ²)	JUMLAH KELURAHAN	RW	RT
1. Kademangan	12,754	6	33	175
2. Kedopok	13,624	6	35	143
3. Wonoasih	10,981	6	39	189
4. Mayangan	8,655	5	42	258
5. Kanigaran	10,653	6	51	260
Jumlah	56,667	29	200	1,025

Sumber : BPS Kota Probolinggo, 2017

Pada Umumnya wilayah Kota Probolinggo beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan tertinggi di bulan Januari sebesar 411 mm sedangkan hari hujan terlama terjadi pada bulan Januari selama 13 hari hujan. Curah hujan terendah pada bulan Agustus, dengan temperatur terendah mencapai 26°C dan tertinggi mencapai 32°C.

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal musim penghujan berada pada bulan Nopember hingga April, sedangkan musim kemarau berada pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober setiap tahunnya. Kota Probolinggo juga dipengaruhi terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang dari arah tenggara ke barat laut, yang populer dengan sebutan “Angin Gending”.

Secara umum kondisi dan struktur tanah Kota Probolinggo cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pengairan yang cukup, sehingga memungkinkan pengembangan lahan sawah untuk tanaman pangan maupun hortikultura, khususnya bawang merah. Pola penggunaan tanah di Kota Probolinggo ternyata masih terdapat lahan sawah seluas 1.792,50 hektare. Lahan bukan sawah seluas 917,25 hektare yang terbagi atas lahan tegal/kebun seluas 627,50 hektare, lahan ditanami pohon/hutan rakyat seluas 106,52 hektare dan lahan lainnya (tambak, kolam, pekarangan, ditanami tanaman pertanian dll) seluas 183,24 hektare, bukan lahan pertanian seluas 2.956,17 hektare. Melihat potensi dan pemanfaatan wilayah demikian itu banyak

alternatif yang bisa dipilih untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan potensi daerah terutama dibidang pertanian.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kota Probolinggo mempunyai ketinggian terendah dengan 0-4 meter diatas permukaan laut yaitu Kecamatan Mayangan. Kecamatan Wonoasih merupakan kecamatan dengan jarak terjauh yaitu 7,7 km. Semakin ke wilayah selatan , ketinggian dari permukaan air laut semakin besar. Wilayah Kota Probolinggo dialiri oleh 6 sungai yaitu sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah dan Pancur dengan rata-rata panjang aliran 3,80 Km, yang terpanjang adalah sungai Legundi dengan panjang aliran 5,439 Km.

1.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kota Probolinggo berdasarkan data dari konsolidasi bersih Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo pada Tahun 2017 sebanyak 235.440 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 yaitu sebanyak 232.285 jiwa. Dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 116.887 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 118.553 jiwa, maka jumlah penduduk Kota Probolinggo mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 3.155 jiwa dalam satu tahun. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Probolinggo pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,35 %, yakni dari 1,04 % di tahun 2016 meningkat menjadi 1,35 % di tahun 2017. Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk Kota Probolinggo pada Tahun 2017 adalah 4.155 jiwa/Km² artinya setiap 1 km² terdapat 4.155 orang yang tinggal di area tersebut . Berikut ini tabel 1.02 adalah jumlah penduduk Kota Probolinggo berdasarkan Kecamatan dan jenis kelamin Tahun 2017.

Tabel 2 Jumlah penduduk per Kecamatan dan jenis kelamin Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kademangan	21.138	21.428	42.566
3	Wonoasih	17.342	17.392	34.734
3	Mayangan	31.620	32.183	63.803
4	Kanigaran	29.600	30.230	59.830
5	Kedopok	17.187	17.320	34.507
Kota Probolinggo		116.887	118.553	235.440

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017

Apabila diperhatikan dalam tabel 1.02 Jumlah penduduk perempuan di Kota Probolinggo sebanyak 118.553 jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki di Kota Probolinggo sebanyak 116.887 jiwa, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki yaitu selisih 1.666 jiwa.

Adapun gambaran penduduk berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2016 - 2017

No	Usia (th)	2016	2017
1	0-4	9.357	12.796
2	5-9	18.685	15.954
3	10-14	18.491	32.696
4	15-19	19.481	20.057
5	20-24	18.929	18.887
6	25-29	17.844	17.775
7	30-34	18.169	18.055
8	35-39	19.371	19.264
9	40-44	17.992	17.910
10	45-49	18.135	17.992
11	50-54	15.661	15.402
12	55-59	13.064	12.785
13	60+	26.106	15.867
	Total	232.285	235.440

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2017

Apabila diperhatikan dalam tabel 1.03 sekitar 67,16 persen penduduk Kota Probolinggo termasuk usia produktif (15–60 tahun) dan sekitar 32,84 persen masuk dalam kelompok penduduk usia non produktif (0-14 tahun) dan (60 tahun keatas). Berdasarkan komposisi penduduk tersebut maka relatif cukup baik dan tentunya didukung dengan kualitas sumber daya manusianya (kualitas jasmani rohani).

Adapun gambaran penduduk berdasarkan pendidikan terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 Penduduk berdasarkan pendidikan terakhir Tahun 2016-2017

No	Kelompok umur	2016	2017
1	Tidak/ belum sekolah	47.988	49.265
2	Belum tamat SD	19.586	20.436
3	Tamat SD	56.946	56.286
4	Tamat SLTP	31.189	31.625
5	Tamat SLTA	58.453	59.284
6	Diploma I/II	1.356	1.299
7	Diploma III	2.596	2.649
8	Sarjana (S1)	13.122	13.513
9	Sarjana (S2)	1.030	1.061
10	Sarjana (S3)	19	22
	Total	232.285	235.440

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2017

Penduduk berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016 untuk lulusan SLTP, SLTA, Diploma III, Sarjana sampai dengan tingkat doktor, hal ini menggambarkan kualitas sumber daya manusia (pendidikan) penduduk Kota Probolinggo semakin meningkat dan berkualitas. Dan Kota Probolinggo memiliki daya tarik tersendiri guna peningkatan layanan jasa pendidikan formal maupun informal.

1.1.3 Pertanian

Pertanian merupakan roda penggerak ekonomi nasional, selain bertujuan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat, sektor pertanian juga berguna untuk mendongkrak citra Indonesia dimata dunia, sektor pertanian terus memberi kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Pada wilayah selatan jumlah luasan lahan pertanian masih bisa dioptimalkan untuk mendukung total produksi pangan. Namun demikian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menunjukkan trend yang tidak begitu baik. Hal ini dimungkinkan karena berkembangnya sektor lain dalam perekonomian Kota Probolinggo, juga dipengaruhi oleh menurunnya jumlah luasan lahan pertanian, hal ini merupakan faktor lain yang cukup berpengaruh. Sektor pertanian meliputi tanaman pangan.

Komoditas tanaman pangan memiliki peranan pokok dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri yang setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk, sehingga dari sisi ketahanan pangan nasional fungsinya menjadi amat penting dan strategis. Komoditas tanaman pangan di Kota Probolinggo antara lain yaitu padi, jagung dan bawang merah. Jagung adalah komoditas potensial di Kota Probolinggo, Kota Probolinggo cocok untuk ditanami jagung baik dari segi tanah, air dan cuaca. Didukung dengan pola tanam padi dan jagung maka membuat produksi jagung melimpah sehingga banyak masyarakat yang berusaha melakukan pengolahan jagung menjadi marning jagung yaitu di Kelurahan Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih. Bawang merah merupakan tanaman hortikultura yang potensial ditanam di Kota Probolinggo, karena rasa dan warnanya tidak dimiliki oleh produk bawang merah dari daerah lainnya. Adapun komoditi tanaman pangan di Kota Probolinggo pada tahun 2017, tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5 Data Hasil Produksi Bahan Makanan 2016 – 2017

Jenis	Produksi (ton)		luas panen (ha)		Rata-rata produksi (kw/ha)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Padi	17.742,00	15.880,20	2.590,00	2.388,00	68,50	66,50
Jagung	35.000,00	29.736,72	5.000,00	4.212,00	70,00	70,60
Bawang Merah	722,00	3.680,00	147,00	396,00	49,14	92,90

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2017

1.1.4 Perkebunan

Secara ekonomi Kota Probolinggo tidak termasuk kategori yang memiliki lahan perkebunan, sehingga usaha perkebunan rakyat hanya sebatas usaha sampingan sebagai penunjang kehidupan keluarga akan tetapi sektor perkebunan diupayakan pengembangan dan peningkatan produksinya oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Berikut Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Komoditinya Tahun 2016-2017 :

Tabel 6 Luas Panen dan Produksi Perkebunan Kota Probolinggo Tahun 2016 -2017

Komoditi	Luas Panen (ha)		Produksi (ton)	
	2016	2017	2016	2017
Tembakau	210	-	1,86	-
Tebu	27,24	28,54	2.446,47	2.824,00
Kelapa	5,48	5,48	21,71	21,73
Kapuk Randu	2,06	1,89	0,55	0,56

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2017

1.1.5 Peternakan

Peternakan merupakan sektor yang memiliki peluang sangat besar untuk dikembangkan sebagai usaha dimasa depan, untuk itu Pemerintah Kota Probolinggo berupaya mengembangkan usaha pembibitan sapi lokal peranakan ongole (PO) dengan pendekatan agribisnis. Sapi Peranakan Ongole (PO) merupakan salah satu sumberdaya genetik lokal yang telah terstandarisasi dan memiliki acuan SNI tersendiri. Kondisi secara nasional saat ini menunjukkan bahwa populasi sapi PO semakin menurun. Sapi PO yang ada di masyarakat saat ini secara genetik telah bercampur dengan genetik dari ras-ras sapi lainnya karena kurang terkontrolnya fase perkawinan. Keadaan ini menyebabkan semakin lama produktifitas sapi PO semakin menurun baik dalam hal performans eksterior, produksi maupun reproduksinya. Karena itu dilakukan upaya pemurnian genetik sapi PO dalam rangka meningkatkan produktifitas sapi PO ini sekaligus untuk melestarikan sumber daya

genetik. Ternak sapi PO bantuan pemerintah yang dipercayakan dikelola kelompok ini telah berkembang sangat signifikan dari 18 ekor pada tahun 2006 menjadi 85 ekor pada tahun 2011 ini. Dengan ditambahkan beberapa induk-induk baru, pada akhir tahun 2015, populasi sapi PO di kelompok ini telah menjadi sekitar 205 ekor. Adapun data hasil Peternakan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Data Produksi Peternakan Tahun 2016-2017

Jenis Ternak	Jumlah Populasi (ekor)		Daging (Ton)		Telur (Ton)		Susu (Ton)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Sapi Potong	9.592	9.983	468.079	472.108				
Sapi Perah	217	218					438.905	441.373
Kambing	7.703	7.858	29.757	31.164				
Kuda	12	12						
Ayam Buras	78.761	80.355	89.839	92.187	53.164	54.240		
Ayam Ras Petelur	11.550	11.850	1.353	1.422	77.339	120.159		
Ayam Ras Pedaging	36.325	39.350	1.563.841	1.566.511				
Itik	800	842	20.461	21.170				

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2017

1.1.6 Perikanan

Wilayah Kota Probolinggo secara geografis terletak disebelah utara Pulau Jawa berbatasan langsung dengan Selat Madura dengan panjang pantai sekitar 7 Km, potensi di sektor perikanan Kota Probolinggo boleh dibilang berlimpah, hal ini juga ditunjang dengan sarana Pelabuhan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan sebagai potensi pengembangan bisnis perikanan laut. Selain itu, Pemerintah Kota Probolinggo juga berusaha mengoptimalkan perikanan air payau yaitu melalui perikanan tambak dan kolam. Berikut ini data produksi perikanan di Kota Probolinggo pada tahun 2016-2017 :

Tabel 8 Data Produksi Perikanan Tahun 2016 - 2017

Jenis	2016	2017
Perikanan Tangkap		
Jumlah Produksi	19.748,586 Ton	19.249.600 Ton
Nilai Produksi	Rp. 419.394.901.500	Rp. 408.165.295.300
Perikanan Budidaya		
Jumlah Produksi	487,21 Ton	461,430 Ton
Nilai Produksi	Rp. 10.314.660.000	Rp. 10.437.030.000

Sumber : Dinas Perikanan, 2017

Produksi perikanan tangkap dan budidaya pada Tahun 2017 mengalami penurunan . Untuk perikanan tangkap, selain disebabkan oleh cuaca buruk juga disebabkan oleh jumlah armada perikanan (Kapal Balai) yang mengalami penurunan. Sedangkan penurunan produksi budidaya dikarenakan sering terjadi hujan deras yang mengakibatkan pematang tambak jebol sehingga terjadi gagal panen dan menyebabkan produksi budidaya air payau tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berbanding terbalik dengan jumlah produksinya, nilai produksi budidaya mengalami kenaikan dikarenakan komoditas yang mempunyai harga yang tinggi seperti udang vanamel mengalami kenaikan produksi, disaat komoditas produksi budidaya yang lain mengalami penurunan jumlah produksi

1.1.7 Industri dan Perdagangan

Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi di suatu negara sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Keunggulan-keunggulan sektor indudtri tersebut diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan. Sektor industri diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional dan telah menempatkan industri manufaktur sebagai penghela sektor riil. Kegiatan sektor industri di Kota Probolinggo cukup berpotensi, baik industri besar, industri menengah, industri kecil maupun industri rumah tangga (home industry). Berikut ini keadaan industri Kota Probolinggo berdasarkan kelompok industri :

Tabel 9 Data Profil Industri Tahun 2016-2017

Jenis	2016	2017
Industri agro dan kimia (IAK)	941	946
Industri logam, mesin, tekstil dan aneka (ILMTA)	167	158
Industri alat transportasi, elektronika dan telematika (IATT)	2	11
Total Industri	1.110	1.115
Nilai produksi	5.319.032.842.300	3.297.448.097.316
Nilai Investasi	260.254.100.400	139.970.900.889

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang di Kota Probolinggo. Kontribusinya terhadap PDRB juga terus mengalami peningkatan. Sektor Perdagangan turut memainkan peran penting dalam menggerakkan dan membangkitkan roda perekonomian di Kota Probolinggo, Hal ini dibuktikan oleh besarnya kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan

PDRB Kota Probolinggo. Menyadari hal tersebut maka Pemerintah Kota Probolinggo mendorong penataan dan pembangunan pusat-pusat perdagangan yang ada di wilayah ini. Berikut ini data perkembangan pasar dan toko di Kota Probolinggo.

Tabel 10 Perkembangan Pasar dan Toko di Kota Probolinggo Tahun 2016-2017

Jenis	2016	2017
Pasar Tradisional / Rakyat (Milik Pemerintah Kota Probolinggo)	11	11
Pasar Tradisional /Rakyat (Milik Perorangan/swasta)	5	5
Toko Modern /swalayan	33	49
Pasar Ikan	1	1
Pasar Hewan	1	1

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Sedangkan investasi di Kota Probolinggo relatif mengalami peningkatan sejak tahun 2012-2017.

Tabel 11 Perkembangan Investasi di Kota Probolinggo Tahun 2017

No	Tahun	Nilai	Investor
1.	2012	1.308.446.333.336,00	47
2.	2013	744.400.016.381,00	40
3.	2014	2.670.411.503.680,00	43
4.	2015	1.824.377.467.566,00	48
5.	2016	740.612.581.171,00	64
6.	2017	4.121.827.395.289,68	69

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2017

Tabel 12 UMKM Tahun 2016-2017

No	Uraian	2016	2017
1.	Usaha Mikro	5.480	5.505
2.	Usaha Kecil	41	41
3.	Usaha Menengah	16	16
	Jumlah	5.537	5.562

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian, 2017

1.1.8 Pariwisata

Sebagai kota transit yang menghubungkan kota-kota di sebelah barat dan timur di Provinsi Jawa Timur dan sebagai tempat transit bagi wisatawan yang sedang melakukan perjalanan dari kota-kota di Jawa dan Bali maka Kota Probolinggo telah berkembang menjadi kota tujuan wisata, hiburan dan kuliner, dengan berbagai fasilitas yang tersedia bagi para wisatawan. Dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan pariwisata di Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo berusaha untuk ,mengembangkan yaitu wisata budaya, wisata religi dan wisata buatan yang diharapkan dapat menjadikan Kota Probolinggo sebagai tempat tujuan wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara.

Jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2017 sebanyak 969.203 wisatawan, yang terdiri dari 965.555 wisatawan domestik dan 3.648 wisatawan mancanegara. Jika dibandingkan dengan Tahun 2016 jumlah wisatawan sebanyak 543.786 wisatawan, maka terjadi peningkatan sebanyak 425,417 wisatawan atau 43,89%. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan disamping adanya peningkatan kualitas pelayanan wisata di beberapa daya tarik wisata seperti obyek wisata Bee Jay Bakau Resort (BJBR) yang merupakan obyek wisata primadona di Kota Probolinggo, juga dikarenakan adanya peningkatan angka kedatangan kapal pesiar ke Kota Probolinggo sebanyak 6 kali selama Tahun 2017 ini. Juga dengan kegiatan promosi bersama dengan pelaku pariwisata antara lain biro perjalanan wisata dan pengelola obyek wisata swasta serta informasi pariwisata melalui media cetak dan media elektronik. Berikut potensi wisata yang ada di Kota Probolinggo.

Tabel 13 Potensi Wisata Kota Probolinggo Tahun 2017

No	Daerah Tujuan Wisata	Alamat	TOTAL	
			Wisman	Wisnus
1	Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL)	Jl. Basuki Rachmad Probolinggo	-	98,014
2	Museum Probolinggo	Jl. Suroyo Probolinggo	1,201	20,078
3	Museum Dr. Moh Saleh	Jl.DR.Moh.Saleh No 1 Probolinggo	16	6,096
4	Gereja Merah	Jl. Suroyo No.32 Probolinggo	1,027	5,120
5	Klenteng Tri Dharma	Jl. Wr. Supratman No.127 Probolinggo	891	2,204
6	Pelabuhan Perikanan Pantai	Pelabuhan PPP Probolinggo	23	641,326
7	Kolam Renang Bayuangga	Jl. Hayam Wuruk Probolinggo	-	67,268
8	Kolam Renang Olympic	Jl. Mastrip Probolinggo	-	29,949
9	Bee Jay Bakau Resort (BJBR)	Pelabuhan PPP Mayangan, Kota Probolinggo	490	95,500
		Jumlah	3,648	65,555

Sumber : Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2017

Sedangkan tingkat hunian hotel dan penginapan di Kota Probolinggo sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 14 Hunian Hotel dan Penginapan Kota Probolinggo Tahun 2017

No	Nama Hotel	Alamat Hotel	Kelas	Jml Kamar	TOTAL	
					Wisman	Wisnus
1	Hotel MORONYOTO	Jl. Raya Bromo No.100A	Melati	57	38	1595
2	Hotel TAMPIARTO	Jl. Suroyo No.15	Bintang 1	81	45	2507
3	Hotel BROMO PARK	Jl. Dr. Sutomo No.79	Bintang 1	22	5613	29087
4	Hotel LAVA-LAVA	Jl. Raya Bromo Km.05	Melati	63	200	945
5	Hotel BROMO VIEW	Jl. Raya Bromo Km.05	Melati	31	111	8056
6	Home Stay HADI"S	Jl. Raya Bromo Km.04	Melati	28	27	930
7	Home Stay WIDURI	Jl. Sukarno Hatta	Melati	11	0	1270
8	Home Stay EBONY	Jl. Gubernur Suryo	Melati	24	0	3778
9	Home Stay DARMO	Jl. Butono No.03	Melati	37	289	690
10	Home Stay DIPONEGORO	Jl. Diponegoro	Melati	45	117	2375
11	Home Stay WAHIDIN	Jl. Dr. Wahidin No.07	Melati	21	290	5639
12	Home Stay ANGGREK	Jl. Anggrek No.02	Melati	16	0	446
13	Hotel RATNA	Jl. Panglima Sudirman No.16	Melati	39	84	1125
14	Hotel BROMO PERMAI II	Jl. Panglima Sudirman No.237	Melati	35	24	1775
15	Home Stay SINAR HARAPAN	Jl. Bengawan Solo No.100	Melati	16	105	952
16	Hotel PARAMITHA	Jl. Siaman No.07	Melati	40	11	2296
17	Home Stay HASRAT MULIA	Jl. Lingkar Utara	Melati	15	0	442
18	Bungalow BJBR	Jl. Pelabuhan Perikanan Pantai	Melati	10	37	3156
19	Home Stay CLOVER	Jl. Mawar Merah No.8	Melati	22	1018	420
20	Home Stay PINK HOUSE	Jl. Mawar	Melati	21	11	418
21	SURYA Guest House	Jl. Gubernur Suryo No.02	Melati	23	56	600
22	PASEBAN SENA Hotel	Jl. Suroyo No.50-53	Melati	20	36	1870
23	Home Stay BROMO SUNRISE	Jl. Raya Bromo	Melati	18	243	1016
24	Home Stay HARI'S	Jl. Raya Bromo Km.05	Melati	22	915	1839
25	FEMALE Guest House	Jl. Ahmad Yani	Melati	14	8	1660
26	Home Stay Suyoso	Jl. Suyoso	Melati	32	117	169
	JUMLAH				9395	75056

Sumber : Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2017

1.1.9 PDRB

Melalui penghitungan baru sesuai SNA2008, angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Probolinggo Atas Dasar Harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 4 tahun terakhir masing-masing adalah pada Tahun 2013 adalah sebesar 6,56 triliun rupiah, Tahun 2014 sebesar 7,26 triliun

rupiah, Tahun 2015 sebesar 8,07 trilyun rupiah dan tahun 2016 sebesar 8,88 trilyun rupiah. Tahun 2017 diestimasikan sebesar 9,83 trilyun rupiah. Perubahan tahun dasar dari 2000 ke 2010 menyebabkan perubahan nilai PDRB yang dihitung atas dasar konstan. Sementara angka PDRB Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Kontan (ADHK) Tahun 2010 selama kurun waktu 4 tahun terakhir adalah sebesar 5,91 trilyun rupiah di Tahun 2013, Tahun 2014 sebesar 6,26 trilyun rupiah, Tahun 2015 sebesar 6,63 trilyun rupiah dan Tahun 2016 sebesar 7,02 trilyun rupiah. Tahun 2017 diestimasikan sebesar 7,42 trilyun rupiah. Secara rinci Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2012- 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

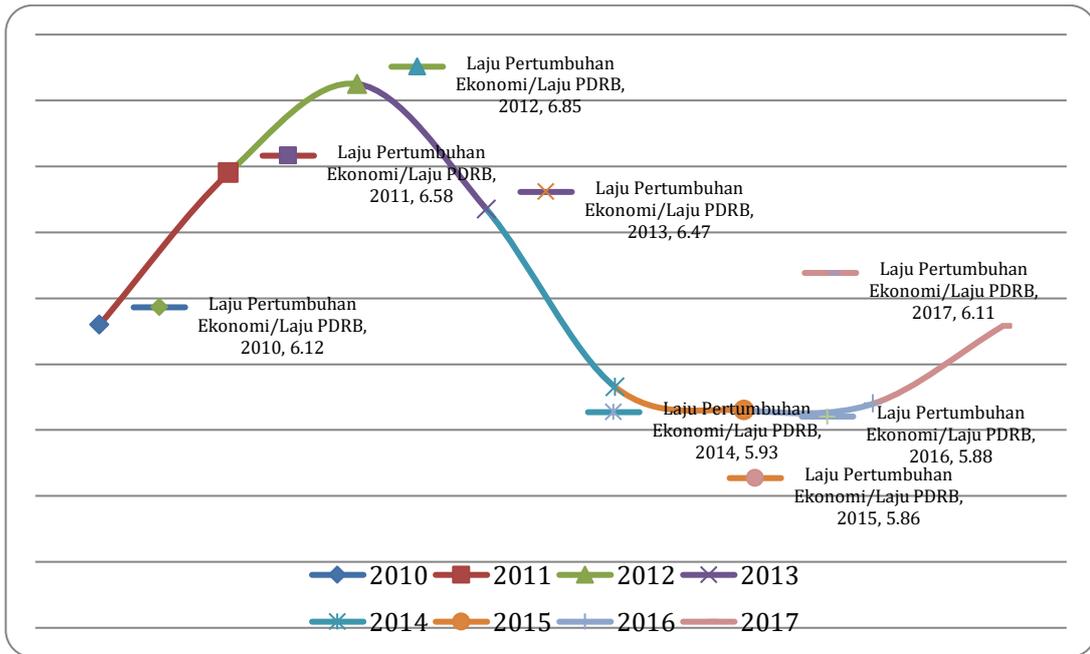
Tabel 15 Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB (ADHB) juta Rp	6.563.967,59	7.260.721,51	8.072.103,96	8.888.108,89	9.808.523,17*
PDRB (ADHK) juta Rp	5911290,95	6.261.886,47	6.628.754,75	7.018.290,81	7.446.025,33*
Laju Pertumbuhan Ekonomi/Laju PDRB	6,47	5,93	5,86	5,88	5,88
Jumlah Penduduk (jiwa)	223.881	226.777	229.013	231.112	235.440
PDRB ADHB per kapita (Rp)	2.931.900	3.201.701	3.524.736	3.845.802	41.660.394*
Inflasi (persen)	7,98	6,79	2,11	1,53	3,18
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,48	5,16	4,01	3,72*	3,42*

Sumber : BPS, 2017

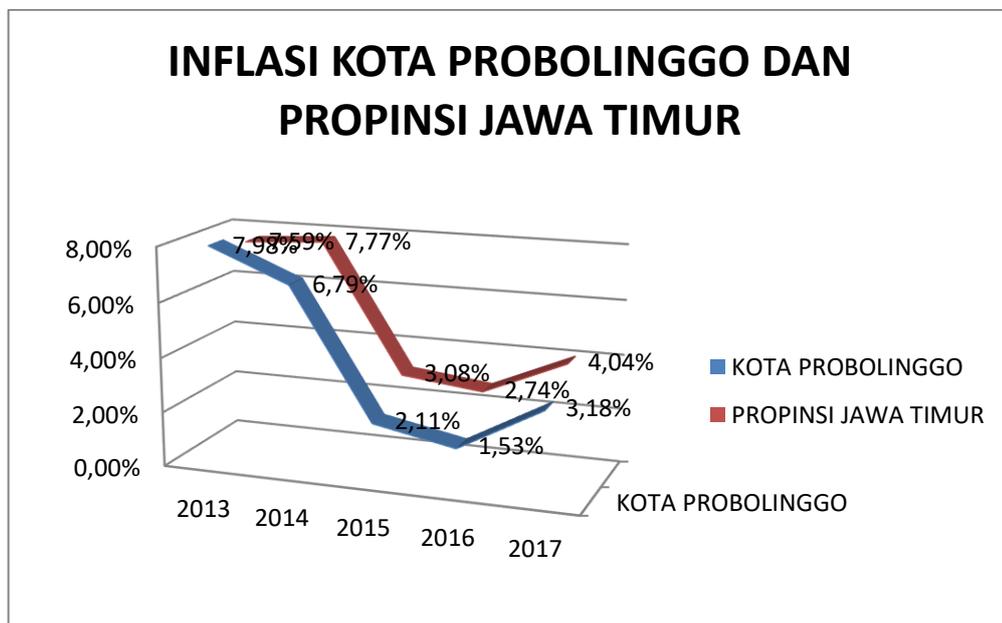
Keterangan : * Estimasi Bappeda Litbang Kota Probolinggo (belum ada rilis data BPS)

Menurut data dari BPS laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 4,10%, kemudian tahun 2013 perekonomian melambat pertumbuhannya menjadi sebesar 6,47 (menurun 5,54%) dan melambat kembali hingga sebesar 5,93 pada tahun 2014 dan 5,86 pada tahun 2015. Baru pada Tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 5,88 (mengalami peningkatan 0,34% dari tahun 2015. Untuk Tahun 2017 berdasarkan perhitungan sementara dikarenakan belum adanya rilis data dari BPS, laju pertumbuhan ekonomi diestimasikan kembali meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 6,11. Estimasi peningkat pertumbuhan ekonomi dimaksud dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010-2016. Untuk menggambarkan trend pertumbuhan ekonomi selama 8 (delapan) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2010 - 2017

Menurut data dari BPS Kota Probolinggo inflasi di Kota Probolinggo pada tahun 2016 mencapai 1,53 % mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2017. Inflasi tahun 2017 mencapai 3,18 %. Terjadinya kenaikan karena ada komoditi transportasi pada bulan Juni menjelang Hari Raya Idul Fitri yang menyumbang inflasi cukup besar, juga disebabkan adanya penyesuaian tarif listrik dan biaya perpanjangan STNK. Berikut ini Inflasi Kota Probolinggo dan Propinsi Jawa Timur:



Gambar 3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur

Menurut data dari BPS Tahun 2014 - 2016 terdapat 7 sektor ekonomi yang tercatat mengalami pertumbuhan positif yang menunjukkan adanya perkembangan struktur perekonomian Kota Probolinggo dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Struktur perekonomian dominan Kota Probolinggo yaitu : (1) Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (24,36%), (2) sektor industri pengolahan (16,59%), dan (3) sektor transportasi dan pergudangan (13,59%). Berdasarkan hasil estimasi untuk Tahun 2017 mengingat belum adanya rilis dari BPS, laju pertumbuhan ekonomi masing-masing lapangan usaha masih tetap sama dengan Tahun 2014-2016 dengan pertumbuhan positif dari 7 sektor, yaitu : Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Tabel 16 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo Menurut Lapangan Usaha 2014 – 2017

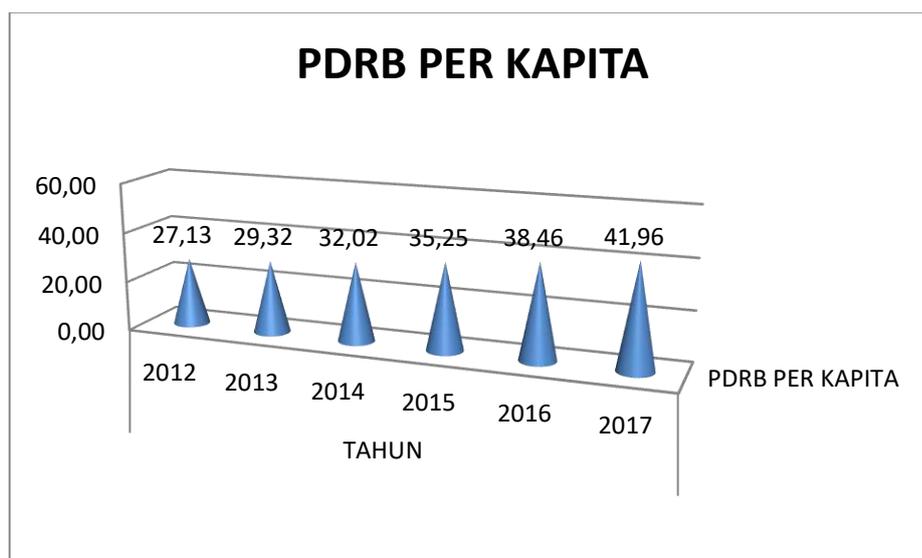
Lapangan Usaha		ADHK				ADHB			
		2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.56	6.42	6.17	5,98	6.94	6.82	6.71	6,60
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
C	Industri Pengolahan	16.74	16.68	16.59	16,52	15.75	15.72	15.35	15,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.12	0.12	0.11	0,11	0.10	0.10	0.10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.25	0.24	0.23	0,22	0.24	0.22	0.21	0,20
F	Konstruksi	6.17	6.05	6.10	6,07	6.16	5.97	5.97	5,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24.04	24.17	24.36	24,52	24.44	24.73	25,4	25,89
H	Transportasi dan Pergudangan	13.45	13.57	13.59	13,66	13.17	13.40	13.46	13,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.16	3.25	3.33	3,42	3.47	3.66	3.85	4,06
J	Informasi dan Komunikasi	5.78	5.86	6.03	6,16	5.04	4.94	4.90	4,83
K	Asuransi	5.96	6.03	6.14	6,23	6.58	6.68	6.94	7,13
L	Real Estat	3.08	3.08	3.11	3,13	2.99	3.02	3.02	3,04
M,N	Jasa Perusahaan	0.64	0.64	0.63	0,63	0.65	0.63	0.62	0,61

Lapangan Usaha		ADHK				ADHB			
		2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.93	4.87	4.68	4,56	5.19	4.99	4.82	4,65
P	Jasa Pendidikan	4.71	4.69	4.68	4,67	4.97	4.86	4.88	4,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.87	0.88	0.89	0,90	0.89	0.88	0.89	0,89
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.56	3.46	3.35	3,25	3.43	3.37	3.24	3,15
	Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo	100							

Sumber : BPS, 2017

Keterangan : * Tahun 2017 : Estimasi Bappeda Litbang Kota Probolinggo (belum ada rilis data BPS)

Satu indikator yang dapat digunakan mengukur kesejahteraan masyarakat adalah besaran PDRB dan pendapatan perkapita. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kota Probolinggo mencapai 38,46 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 PDRB per kapita diestimasikan naik sebesar 41,96 juta rupiah .



Gambar 4 PDRB Perkapita (Juta Rp), 2012 - 2017

Dari gambar diatas tampak bahwa dalam selang enam tahun terakhir, terjadi peningkatan nilai PDRB per kapita Kota Probolinggo tiap tahunnya. Hal inimenunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo dari tahun ke tahun semakin membaik.

1.2 Analisis Masa Depan

Arah pembangunan smart city Kota Probolinggo diwujudkan melalui pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, pembangunan sosial, pemerintahan yang smart, pembangunan infrastruktur terintegrasi dan dukungan teknologi komunikasi dan informasi terbaru.

Tabel 17 Capaian dan target Infrastruktur Kota Probolinggo Tahun 2014-2019

No	Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Perhitungan Capaian dan target Infrastruktur									
				2014		2015		2016		2017		2018	2019
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target
1	Jaringan Jalan	Kondisi jalan	Prosentase kondisi jalan (baik, sedang)	74.28	63.58	75.00	65.82	80.00	65.82	85.00	95.94	95.00	97.00
		Fasilitas pelengkap jalan	Prosentase panjang jalan dengan fasilitas perlengkapan jalan	35.00	34.17	35.00	34.03	42.00	40.70	68.00	67.18	69.00	71.00
		Prasarana transportasi	Prosentase jumlah prasarana transportasi (terminal, halte/shelter, pengujian kendaraan bermotor, jembatan timbang)	85.00	84.62	90.00	88.46	93.00	92.31	95.00	96.15	98.00	100.00
		Tingkat konektivitas	Prosentase konektivitas jalan	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00
Jaringan Jalan				70.82	67.84	72.25	69.33	76.00	71.96	84.25	87.07	87.75	89.25
2	Angkutan Umum	Jumlah ijin trayek	Prosentase perpanjangan ijin trayek	90	88.37	91.00	87.75	92.00	92.65	93.00	86.27	94	96
		Angkutan Umum (cakupan layanan)	Prosentase Ruas Jalan yang dilalui angkutan umum	55	54.59	55	54.59	55	54.59	55	54.59	55	55

No	Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Perhitungan Capaian dan target Infrastruktur									
				2014		2015		2016		2017		2018	2019
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target
		angkutan umum)											
Angkutan Umum				72.50	71.48	73.00	71.17	73.50	73.62	74.00	70.43	74.50	75.50
3	Air Bersih	Tingkat pelayanan air bersih	Prosentase Penduduk dengan akses air bersih aman	94.00	87.38	95.00	91.04	96.00	96.07	97.00	98.04	98.50	100.00
			Prosentase RT atau terlayani Air Bersih (perpipaan PDAM)	45	43.85	50	49.10	55	47.33	60	57.90	65	70
Air Bersih				69,5	65,615	72,5	70,07	75,5	71,7	78,5	77,97	81,75	85
4	Limbah	Tingkat pelayanan air limbah	Prosentase penduduk yang terlayani tangki septik, MCK komunal, SPAL terpusat	75.00	74.53	80.00	78.24	90.00	85.23	90.00	85.93	90.00	100.00
		Tingkat pelayanan jaringan persampahan	Prosentase sampah masuk TPA	27.00	25.80	30.00	26.69	33.00	29.18	35.00	33.95	37.00	40.00
			Prosentase penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah	73.00	72.19	75.00	73.31	77.00	70.82	79.00	62.93	80.00	82.00
			Prosentase Pengoperasian TPA	70.00	68.00	70.00	68.00	75.00	70.00	75.00	72.00	75.00	80.00

No	Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Perhitungan Capaian dan target Infrastruktur										
				2014		2015		2016		2017		2018	2019	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	
Air Limbah				61.25	60.13	63.75	61.56	68.75	63.81	69.75	63.70	70.50	75.50	
5	Irigasi dan drainase	Tingkat pelayanan irigasi	Persentase saluran irigasi, sungai, drainase dalam kondisi mantap	81.00	80.77	83.00	80.77	85.00	83.08	87.00	85.39	89.00	91.00	
			Prosentase luas tanam irigasi teknis	53.00	49.03	55.00	51.06	58.00	53.06	60.00	55.10	65.00	70.00	
			Prosentase Luas daerah rawan genangan	42	42	43	42	44	42	45	33,23	46	47	
Irigasi dan Drainase				58.67	57.27	60.33	57.94	62.33	59.38	64.00	60.83	66.67	69.33	
6	Komunikasi dan informasi	Tingkat jaringan informasi dan komunikasi	Prosentase jumlah BTS berijin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Komunikasi dan informasi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Fasilitas Publik	Tingkat pelayanan RTH Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prosentase luasan RTH publik yang tersedia	4.50	4.77	4.50	4.77	5.00	7,34	5.50	7.35	8.00	8.50	
			Prosentase layanan posyandu	100.00	99.54	100.00	99.54	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Prosentase layanan apotik eksisting	100.00	80.00	100.00	80.00	100.00	83.33	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00

No	Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Perhitungan Capaian dan target Infrastruktur									
				2014		2015		2016		2017		2018	2019
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target
			Prosentase layanan pusekmas eksisting	100	75.00	100	75.00	100	75.00	100	75.00	100	100
			Prosentase layanan Dokter (umum+spesialis)	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300
			Prosentase layanan TT Rumah Sakit/jumlah penduduk	100.00	150.44	100.00	148.47	100.00	147.19	100.00	140.50	100.00	100.00
		Tingkat pelayanan fasilitas pendidikan	Prosentase layanan SD	100	97.4	100	96.4	100	97.6	100	86.4	100	100
			Prosentase layanan SMP	85	84.7	90	85.9	92	87.2	95	87.1	90	100
			Prosentase layanan SMA	85	86.8	90	85.9	90	87.2	90	87.1	90	95
			Ratio Murid SD/Kelas SD	100	88	100	81	100	81	100	84	100	100
			Ratio Murid SMP/KelasSMP	100	83	100	83	100	83	100	83	100	100
			Ratio Murid SMA/Kelas SMA	100	86	100	75	100	81	100	81	100	100
		Tingkat pelayanan fasilitas umum penunjang perekonomian	Prosentase layanan fasilitas perekonomian (pasar) yang dilengkapi fasilitas kamar mandi, WC, sarana persampahan,	55.00	54.55	56.00	54.55	57.00	54.55	58.00	54.55	59.00	60.00

No	Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Perhitungan Capaian dan target Infrastruktur									
				2014		2015		2016		2017		2018	2019
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target
			kebakaran, ruang parkir, aman, terdapat bedak permanen, dengan sekat tembok dan penutup bedak, fasilitas pos jaga satpam										
			Prosentase layanan koperasi berijin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Prosentase layanan bedak yang dihuni	94.00	92.86	95.00	92.86	96.00	92.86	97.00	92.86	98.00	98.00
Fasilitas Publik				88.23	98.87	89.03	98.83	89.33	99.72	89.70	99.32	89.67	104.10
8	IMB	Penerbitan IMB	Prosentase IMB terbit	5.50	5.19	6.00	5.72	6.50	6.41	7.00	6.41	8.00	9.00
Indeks IMB				5.50	5.19	6.00	5.72	6.50	6.41	7.00	6.41	8.00	9.00

Sumber: Bappeda Litbang, 2018

Selain indeks infrastruktur, kinerja infrasturktur juga tergambar dalam kinerja perumahan dan permukiman sebagai berikut.

Tabel 18 Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017	Keterangan
1	Pengurangan Luasan Lingkungan Permukiman Kumuh (Hektar)	148,26 Ha	Realisasi capaian ini tidak tercapai dikarenakan luas kawasan perumahan dan permukiman kumuh sesuai SK Walikota Nomor: 188.45/414/KEP/425.012/2015 sekota hanya memiliki luasan 193,56 Ha, sedangkan target pengurangan luasan permukiman kumuh pada Tahun 2017 sebanyak 324,93 Ha.
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	97,13%	Capaian ini melebihi target dikarenakan adanya tambahan anggaran yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya
3	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)	16,64%	Realisasi ini tidak tercapai dikarenakan masih ada beberapa PSU yang masih perlu adanya peningkatan maupun pemeliharaan dan kedepan perlu adanya dukungan anggaran yang memadai.

Sumber: LKPJ, 2018

Tabel 19 Backlog Perumahan Kota Probolinggo

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2017 (jiwa)	Jumlah KK 2017 (jiwa)	Jumlah Rumah 2017	Backlog
Kademangan	42.566	14.189	11.186	-3.003
Wonoasih	34.734	11.578	9.197	-2.381
Mayangan	63.803	21.268	15.920	-5.348
Kanigaran	59.830	19.943	14.777	-5.166
Kedopok	34.507	11.502	9.725	-11.149
Total	235.440	78.480	60.805	-77.037

Sumber :

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2018

BAB II

ANALISIS KESIAPAN DAERAH

Analisis kesiapan smart city daerah merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai kondisi daerah saat ini guna mendapatkan gambaran kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menerapkan program-program pembangunan smart city. Di dalam analisis kesiapan smart city daerah, terdapat tiga aspek utama yang menjadi komponen kajian, yaitu :

- a. Struktur, atau komponen inti dari sebuah daerah, yaitu sumber daya manusia, kapasitas keuangan daerah, dan sumber daya pemerintah daerah;
- b. Infrastruktur, atau komponen sarana dan prasarana fisik daerah yang terdiri dari infrastruktur sosial, infrastruktur digital, dan infrastruktur fisik lainnya;
- c. Suprastruktur, atau komponen kelembagaan dan non-fisik yang terdapat di daerah seperti lembaga sosial dan pemerintahan, regulasi dan kebijakan, dan hubungan antar-lembaga.

Untuk melakukan analisis di dalam kesiapan smart city daerah, perangkat analisis yang dapat digunakan adalah analisis kesiapan berdasarkan nilai atau kondisi dan interpretasi-nya seperti atau kondisi tersebut dituliskan pada kolom interpretasi dengan menggunakan tanda checklist dibawah hasil pemaknaan dari nilai atau kondisi berdasarkan tingkat Baik, Sedang atau Buruk.

2.1 Analisis Struktur Kota Probolinggo

Analisis struktur daerah dilakukan untuk mengetahui kondisi dari unsur utama yang menjadi penggerak dalam pembangunan sebuah daerah. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Analisis kualitas sumber daya manusia
- b. Analisis Sumber Daya Pemerintahan
- c. Kapasitas Keuangan Daerah

2.1.1 Analisis Sumber Daya Manusia

Analisis kualitas sumber daya manusia daerah dilakukan untuk mengukur tingkat kapasitas masyarakat di daerah dalam menerima konsep *smart city*. Beberapa informasi yang perlu diketahui di dalam analisis ini adalah tingkat literasi masyarakat terhadap *smart city* yang nanti akan sangat membutuhkan partisipasi aktif dan positif dari masyarakat di daerah. Oleh karena itu, di dalam analisis ini diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pengukuran terhadap kondisi masyarakat di daerah dalam menghadapi era *smart city* di masa depan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai oleh semakin meningkatnya capaian indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat dilihat dari tiga bidang utama, yakni pendidikan,

kesehatan dan daya beli masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya (2012-2016). Di samping itu, IPM Kota Probolinggo berada di atas rata-rata IPM Propinsi Jawa Timur. Peningkatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Dengan IPM Kota Probolinggo mengalami trend positif hal ini dapat menjadi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. IPM Kota Probolinggo tahun 2012-2016 disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo Tahun 2012-2016 (Metode Baru)



Berikut ini disajikan kontribusi indikator-indikator dari pencapaian IPM hingga tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 20 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo Tahun 2010-2016

Komponen IPM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AHH	69.35	69.41	69.46	69.50	69.52	69.72	69.79
Indeks Kesehatan	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.77
EYS	11.91	12.91	12.42	12.97	13.29	13.32	13.54
MYS	8.17	8.17	8.17	8.42	8.44	8.46	8.47
Indeks Pendidikan	0.60	0.61	0.62	0.64	0.65	0.65	0.66

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka, 2018

Berbagai program telah dilaksanakan guna dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Probolinggo yang ditandaidengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan taraf pendidikan penduduk yang meningkat secara bertahap.

2.1.2 Analisis Sumber Daya Pemerintahan

Analisis terhadap sumber daya pemerintahan dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan program smart city dimana di dalamnya dituntut adanya integrasi dan interoperabilitas di dalam proses bisnis pemerintah daerah. Disamping itu, sebagai unsur yang menjadi penggerak dari smart city, kesiapan pemerintah daerah di dalam melaksanakan smart city merupakan faktor kunci keberhasilan smart city. Sehingga di dalam analisis terdapat lebih banyak butir-butir informasi yang perlu ditelaah lebih lanjut di dalam analisis kesiapan pemerintah daerah.

Tabel 21 Data PNS Daerah Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 2018

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PENDIDIKAN								TOTAL
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	
1	Sekretariat Daerah	4	6	60	0	0	11	29	28	138
2	Sekretariat DPRD	0	1	15	1	0	2	12	4	35
3	Inspektorat	0	0	8	0	0	1	17	5	31
4	Bappeda dan Litbang	0	0	10	0	0	3	14	16	43
5	BPPKAD	0	2	26	0	0	12	16	19	75
6	BKPSDM	1	3	12	0	0	3	10	9	38
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	11	0	0	1	7	4	24
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7	32	213	10	114	13	891	113	1393
9	Dinas Kesehatan	4	3	52	1	0	145	59	5	269
10	RSUD dr. Mohammad Saleh	4	6	72	0	0	231	61	27	401
11	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1	6	27	0	0	4	6	12	56
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	9	0	0	3	8	5	25
13	Dinas Sosial	0	1	17	0	0	2	8	6	34
14	Dinas Tenaga Kerja	0	0	12	0	0	3	16	6	37
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	1	0	16	0	0	0	13	9	39
16	Dinas Lingkungan Hidup	20	21	57	0	0	7	14	13	132
17	Dinas Kependudukan dan Capil	0	0	8	1	0	5	4	7	25
18	Dinas Perhubungan	0	2	25	0	4	6	6	8	51
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	1	7	0	0	8	10	15	41
20	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	6	7	33	0	0	6	17	10	79
21	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	0	12	0	0	4	7	12	36
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2	0	11	0	0	4	8	9	34

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PENDIDIKAN								TOTAL
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	13	0	0	4	7	9	33
24	Dinas Perikanan	1	2	16	0	0	1	11	7	38
25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	0	11	0	0	2	24	14	52
26	Satuan Polisi Pamong Praja	3	5	35	0	0	1	11	6	61
27	Kecamatan Kademangan	5	3	30	0	0	2	29	2	71
28	Kecamatan Kanigaran	2	4	34	0	0	2	23	11	76
29	Kecamatan Kedopok	2	4	36	0	0	2	23	6	73
30	Kecamatan Mayangan	1	3	24	0	1	2	18	9	58
31	Kecamatan Wonoasih	2	2	35	0	1	0	22	6	68
32	BPBD	0	0	13	0	0	1	1	5	20
33	Sekretariat KPU	0	0	6	0	0	0	1	1	8
TOTAL		68	115	966	13	120	491	1403	418	3594

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Probolinggo, 2018

Dalam rangka mendukung smart city, maka diperlukan kecukupan SDM Aparatur dengan latar belakang pendidikan TIK.

Tabel 22 Data Pegawai Berlatar Belakang Pendidikan TIK

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	JENIS JABATAN				TOTAL	KET
		Struk	JFU	JFT	Non PNS		
1	Sekretariat Daerah	2		4	5	11	Prakom
2	Sekretariat DPRD	1	1		1	3	
3	Inspektorat			1		1	Prakom
4	Bappeda dan Litbang	1	1	3	1	6	Prakom, Arsiparis (1)
5	BPPKAD	1	1	5	7	14	Prakom, Analis keuangan (1)
6	BKPSDM	2	2	3	1	8	Prakom
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		1			1	
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		7	13	1	21	Guru (19), TU, Sekolah, Prakom
9	Dinas Kesehatan		1	3		4	Prakom
10	RSUD dr. Mohammad Saleh	1	1			2	Perekam Medis (1)
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1		1	1	3	Prakom
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				1	1	
13	Dinas Sosial	1		1		2	Prakom

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	JENIS JABATAN				TOTAL	KET
		Struk	JFU	JFT	Non PNS		
14	Dinas Tenaga Kerja			2	1	3	Instruktur (2)
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB				1	1	
16	Dinas Lingkungan Hidup			1	1	2	Prakom
17	Dinas Kependudukan dan Capil		2	2	1	5	Prakom
18	Dinas Perhubungan			2	1	3	Prakom
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	0	5	3	12	Prakom
20	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	1		2	1	4	Prakom
21	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			2	1	3	Prakom
22	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	2	1			3	
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					0	
24	Dinas Perikanan			1	1	2	Prakom
25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			1	1	2	Prakom
26	Satuan Polisi Pamong Praja				1	1	
27	Kecamatan Kademangan				1	1	
28	Kecamatan Kanigaran	1		1	1	3	Prakom
29	Kecamatan Kedopok	1			1	2	
30	Kecamatan Mayangan	1				1	
31	Kecamatan Wonoasih	1			1	2	
32	BPBD				1	1	
33	Sekretariat KPU					0	
	TOTAL	21	19	52	36	128	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Probolinggo, 2018

2.1.3 Analisis Keuangan Daerah

Analisis terhadap kapasitas keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui seberapa besar sumber daya yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mensukseskan pelaksanaan smart city. Melalui analisis ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memperkirakan alokasi sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan dan keuangan yang dapat dialokasikan untuk program smart city. Disamping itu melalui analisis ini, pemerintah daerah juga didorong untuk dapat mulai mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif atau sumber pembiayaan pihak ketiga lainnya sebagai sumber daya dalam hal keuangan untuk menjalankan program smart city.

Realisasi APBD Kota Probolinggo tahun 2017 pada sisi Pendapatan Daerah berjumlah Rp. 910.819.469.658,04 melampaui sebesar Rp. 6.694.285.054,38 dari target/anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 904.125.184.603,66 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.633.049.261,52 (2,78%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 berjumlah Rp. 886.186.420.396,52.

Realisasi Pendapatan tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 disebabkan terjadi kenaikan pada Pendapatan asli daerah, yaitu sebesar Rp. 171.307.335.436,52 pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 203.905.251.918,04 dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016 sedangkan realisasi Dana Perimbangan mengalami penurunan.

Seperti pada periode sebelumnya, realisasi Pendapatan Daerah tahun 2017 masih didominasi oleh transfer fiskal dari Pemerintah Pusat seperti pada Grafik 3.02 berikut.

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

NO.	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAMBAH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 (4 - 3)	6 (5 : 3)
1.	Pendapatan Asli Daerah				
	- Target (Rp)	149.643.487.460,00	183.605.221.900,66	33.961.734.440,66	122,70%
	- Realisasi (Rp)	171.307.335.436,52	203.905.251.918,04	32.597.916.481,52	119,03%
	- Capaian (%)	114,48%	111,06%		
2.	Dana Perimbangan				
	- Target (Rp)	649.218.708.988,00	654.119.867.000,00	4.901.158.012,00	100,75%
	- Realisasi (Rp)	678.661.726.960,00	624.680.854.085,00	-53.980.872.875,00	92,05%
	- Capaian (%)	104,54%	95,50%		
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
	- Target (Rp)	35.760.241.000,00	66.400.095.703,00	30.639.854.703,00	185,68%
	- Realisasi (Rp)	36.217.358.000,00	82.233.363.655,00	46.016.005.655,00	227,06%
	- Capaian (%)	101,28%	123,85%		
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH					
	Target (Rp)	834.622.437.448,00	904.125.184.603,66	69.502.747.155,66	108,33%
	Realisasi (Rp)	886.186.420.396,52	910.819.469.658,04	24.633.049.261,52	102,78%
	Capaian (%)	106,18%	100,74%		

Sumber Data : BPPKAD Kota Probolinggo (unaudited)

Pemerintah Kota Probolinggo memberikan perhatian yang baik terhadap pengembangan teknologi informasi. Hal itu terbukti anggaran pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun anggaran 2017 mencapai jumlah 14 milyar rupiah atau sebesar 3,41% dari total belanja modal dan barang/jasa. Dana sebesar itu dipergunakan untuk belanja internet dan belanja infrastruktur teknologi informasi. Rincian belanja teknologi informasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 24 Total Belanja TI Pemerintah Kota Probolinggo

No	Jenis Belanja	Total Belanja
1	Belanja Internet	Rp. 1.590.556.000,-
2	Belanja Infrastruktur TI	Rp. 13.222.408.000,-
	Total Belanja TI	Rp. 14.812.964.000,-

Pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Kota Probolinggo mengalokasikan anggaran untuk belanja modal dan barang/jasa sebesar Rp. 434.788.976.509,28. Dengan demikian total belanja teknologi informasi mencapai 3.41% dari total belanja modal dan barang/jasa. Hal ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo sangat peduli dengan pengembangan teknologi informasi.

2.2 Analisis Infrastruktur Kota Probolinggo

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur daerah dilakukan untuk mengukur kesiapan kondisi infrastruktur daerah yang dikategorikan ke dalam tiga dimensi, yaitu :

- a. Infrastruktur Fisik;
- b. Infrastruktur Digital;
- c. Infrastruktur Sosial;

2.2.1 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur fisik daerah dilakukan untuk mengukur kondisi sarana dan prasana fisik daerah yang menjadi titik tolak dalam pembangunan smart city daerah. Dengan mengetahui posisi saat ini dalam hal infrastruktur fisik, maka pemerintah daerah akan dapat mengukur seberapa banyak pembangunan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mencapai visi smart city daerah.

Berikut adalah tabel capaian indeks infrastruktur fisik di Kota Probolinggo.

Tabel 25 Capaian Indeks Infrastruktur Kota Probolinggo

Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Capaian Indeks Infrastruktur				SKPD	Sumber
			2014	2015	2016	2017		
Jaringan Jalan	Kondisi jalan	Prosentase kondisi jalan (baik, sedang)	63,58	65,82	65,82	95,94	DPUPR	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014
	Fasilitas pelengkap jalan	Prosentase panjang jalan dengan fasilitas perlengkapan jalan	34,17	34,03	40,70	67,18	Dinas Perhubungan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014

Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Capaian Indeks Infrastruktur				SKPD	Sumber
			2014	2015	2016	2017		
	Prasarana transportasi	Prosentase jumlah prasarana transportasi (terminal, halte/shelter, pengujian kendaraan bermotor, jembatan timbang)	84,62	88,46	92,31	96,15	Dinas Perhubungan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014
	Tingkat konektivitas	Prosentase konektivitas jalan	89,00	89,00	89,00	89,00	Dinas Perhubungan	AI Dami
Kondisi Jalan (%)			67,84	69,33	71,96	87,07		
Angkutan Umum	Angkutan Umum (cakupan layanan angkutan umum)	Prosentase Ruas Jalan yang dilalui angkutan umum	54,59	54,59	54,59	54,59	DPUPR	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014
	Jumlah ijin trayek	Prosentase perpanjangan ijin trayek	88,37	87,75	92,65	86,27	DPUPR	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014
Angkutan Umum (%)			71,48	71,17	73,62	70,43		
Air Bersih	Tingkat pelayanan air bersih	Prosentase RT atau terlayani Air Bersih (perpipaan PDAM)	43,85	49,01	47,33	57,90	PDAM	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014
		Prosentase Penduduk dengan akses air bersih aman	87,38	91,04	96,07	98,04	Dinas Kesehatan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014
Air Bersih(%)			65.62	70.03	71.70	77.97		
Limbah	Tingkat pelayanan air limbah	Prosentase penduduk yang terlayani tangki septik, MCK komunal, SPAL terpusat	74,53	78,24	85,23	85,93	Dinas Kesehatan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014
	Tingkat pelayanan jaringan persampahan	Prosentase sampah masuk TPA	25,80	26,69	29,18	33,95	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014
		Prosentase penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah	72,19	73,31	70,82	62,93	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014

Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Capaian Indeks Infrastruktur				SKPD	Sumber
			2014	2015	2016	2017		
		Prosentase Pengoperasian TPA	68,00	68,00	70,00	72,00	Dinas Lingkungan Hidup	
Limbah (%)			60,13	61,56	63,81	63,70		
Irigasi dan drainase	Tingkat pelayanan irigasi	Persentase saluran irigasi, sungai, drainase dalam kondisi mantap	80,77	80,77	83,08	85,39	DPUPR	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014
		Prosentase luas tanam irigasi teknis	49,03	51,06	53,06	55,10	DPUPR	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014
		Prosentase Luas daerah rawan genangan	41,99	41,99	41,99	33,23	BPBD	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014
Irigasi dan Drainase (%)			57,27	57,94	59,38	60,83		

Sumber : Kajian Indeks Infrastruktur, 2018

2.2.2 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur digital daerah diperlukan untuk mengukur kesiapan daerah dalam melaksanakan program smart city, mengingat di dalam konsep smart city, teknologi merupakan enabler yang dapat memberikan percepatan terhadap hasil capaian dari smart city. Berikut ini beberapa capaian infrastruktur digital Kota Probolinggo.

Tabel 26 Capaian Infrastruktur Digital Kota Probolinggo

Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Capaian Indeks Infrastruktur				SKPD	Sumber
			2014	2015	2016	2017		
Komunikasi dan informasi	Tingkat jaringan informasi dan komunikasi	Prosentase jumlah BTS berijin	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informasi	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014
Komunikasi dan Informasi (%)			100	100	100	100		

Adapun Infrastruktur TIK yang dimiliki kota Probolinggo antara lain:

- Bandwidth 110 Mbps dedicated dan 1,5 Mbps backup;
- Jaringan LAN/WAN Hightspeed Wireless, mencakup area 29 kelurahan dan 39 OPD;
- Data Center;
- Probolinggo Command Center;
- Banger Telecenter dengan akses wifi-id up to 100 Mbps;
- Hotspot internal masing-masing OPD dan 12 titik hotspot akses publik;
- Cyber Park;
- Suroyo Super Koridor;
- Kampung Cyber.

Selain itu, ada juga Suroyo Super Koridor adalah Program Penyediaan Akses internet gratis di sepanjang Jalan Suroyo bagi warga Probolinggo dan UKM. Sampai tahun 2018, Pemerintah Kota Probolinggo telah mengimplementasikan 101 software aplikasi. Nama software aplikasi yang sudah diimplementasikan terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 27 Data aplikasi yang sudah diimplementasikan di Kota Probolinggo

No	Nama Software Aplikasi	Fungsi Software Aplikasi
1	Aplikasi Manajemen Surat	Menginput data surat masuk dan surat keluar
2	SIMRAL	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian dan peyusunan kebijakan nasional dibidang pengkajian dan penerapan teknologi • Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT • Pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintahan dan swasta dibidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas serta membina alih teknologi • Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga
3	SMEP	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi untuk Monitoring dan Evaluasi hasil Pembangunan (realisasi fisik dan keuangan)
4	Quantum GIS	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan Data Spasial (Peta) dan Atributnya
5	SIMDA BMD	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui aset barang milik daerah
6	SIM Gaji PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk informasi Gaji PNS
7	SIM Persediaan Barang Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui ketersediaan persediaan barang daerah (atk, alat kebersihan, cetak, materai)
8	SI ALAY (Bagian Adm Pembangunan)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sistem dokumentasi berkas paket pengadaan beserta surat-menyurat

No	Nama Software Aplikasi	Fungsi Software Aplikasi
9	AMA (Aplikasi Management Arsip)	• Untuk penyimpanan file arsip bagian humas dan protokol
10	SIMAYA	• Untuk penginputan surat masuk, dan surat keluar
11	SIRUP	• Untuk Penginputan Pengadaan Barang pada Bagian Humas dan Protokol
12	SIM KESRA	• Memberikan informasi data yang dibutuhkan dalam bidang kesejahteraan masyarakat
13	Aplikasi Anjab	• Untuk melakukan analisis jabatan tiap OPD diseluruh Kota Probolinggo
14	SAKIP	• Penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
15	Web Bagian Umum	• Sebagai Saluran Informasi Bagian Umum kepada masyarakat
16	Si JinGGo (Sistem Jaringan Informasi Good Governance)	• Pelaporan dan Pusat Data tentang Monografi Kelurahan, Evaluasi Perkembangan Kelurahan, dan Laporan Kependudukan
17	Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	• Sebagai aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan
18	Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Pembangunan	• Sebagai evaluasi hasil pembangunan
19	Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	• Aplikasi memuat data- data statistik daerah
20	SIMKASDA	• Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
21	APLIKASI PAJAK DTH RTH	• Rekapitulasi Transaksi Harian dan Daftar Transaksi Harian
22	SISMIOP	• Sistem Administrasi pembayaran pajak pbb-p2
23	MAPINFO	-
24	SMARTMAP	• Berkaitan dengan pengelolaan peta sismiop dan sistem informasi geografis
25	PERDIN	-
26	HIBAH BANSOS	-
27	Website BPPKAD	-
28	SIMPADA (Pajak Daerah) milik BPPKAD	Sistem Informasi Pajak Daerah
29	Cell Plan	Pengajuan Lokasi Pembangunan Menara Seluler
30	SIMPUSTRONIK Puskesmas	Perekaman pelayanan di puskesmas (UKP)
31	SISKIA	Catatan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas di seluruh fasyankes yang melayani
32	SIDEKA Pro	Pelaporan data kesehatan dari klinik dan rumah sakit
33	SIP	Pelaporan capaian data kesehatan untuk diluar gedung puskesmas (UKM)
34	SARAPATI (Kominfo)	Surat Menyurat
35	SIPADU	Pelayanan Perizinan
36	DAPODIK	Data Pokok Pendidikan
37	Laporan Individu	Laporan Kondisi Sekolah

No	Nama Software Aplikasi	Fungsi Software Aplikasi
38	VERVAL PTK	Memperbarui Data Pendidik
39	SIM Tunjangan	Manajemen Tunjangan Profesi Guru
40	E-Gotik	Data Kepegawaian / ASN
41	SIM PMP	Mengetahui Ketercapaian Mutu Pendidikan
42	SIM BIOUN SD & SMP	Mendata Peserta UN SD & SMP
43	SIM PIP	Mendata Siswa Miskin Berprestasi
44	SIM Akreditasi	Mendata Akreditasi Sekolah
45	SIM BIOUN PAKET A B C	Mendata Peserta UN Paket A B C
46	DAPODIK MASIF	Data Pokok Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif
47	Satu Data KKP	Data produksi perikanan secara nasional
48	INLIS LITE	Penyelenggaraan layanan perpustakaan mulai dari pengolahan bahan pustaka, pendaftaran anggota perpustakaan, peminjaman, sampai dengan pengembalian buku
49	Aplikasi Pemantau CCTV	Live streaming CCTV pada kota Probolinggo
50	SIM PKB (Penguji Kendaraan Bermotor)	Pengujian kendaan bermotor lebih cepat dan akurat serta mecegah human error
51	Sisko TLKN	Rekom/Mutasi paspor calon TKI
52	Aplikasi AKI	Kartu AKI / Kuning
53	BKOL	Bursa kerja online
54	KIOS 3IN1	Pelatihan , Sertifikasi
55	E-Formasi	Mengupate data kebutuhan pegawai
56	PUPNS	Mengupdate data pribadi PNS
57	SIP2DK	Mengupdate data ketenagakerjaan
58	Aplikasi Pendataan E-TLH	Mendata E-TLH
59	SIMLUHTANI	Entry data-data kelompok petani dan gapoktan se-kota probolinggo
60	E-proposal Kementerian Pertanian	Pengajuan Anggaran APBN di Kementerian Pertanian
61	SIPD	Sebuah jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, realtime dan online di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien.
62	Software Jembatan Timbang	Menghitung dan Mencatat Berat Kendaraan Masuk TPA
63	Aplikasi Fingerspot	Pencatatan absensi pegawai
64	SIAK	Untuk pencatatan administrasi kependudukan
65	SIMRAL e-Musrenbang	Entry data usulan hasil musrenbang baik di kelurahan maupun di kecamatan
66	Benroller	Perakaman E-KTP
67	BCardMGMT	Untuk pencarian biometric dan aktivasi e-KTP
68	SIPATEN	Untuk menerbitkan surat keterangan
69	LPSE Kota Probolinggo (lpse.probolinggokota.go.id/eproc4)	Upload rencana umum pengadaan dan proses pengadaan barang/jasa/lelang
70	SITI KENCANA	Sistem Informasi Keluarga Berencana Kota Probolinggo

No	Nama Software Aplikasi	Fungsi Software Aplikasi
71	Website Portal Kota Probolinggo (portal.probolinggokota.go.id/)	Sebagai Layanan Informasi Website Kota Probolinggo
72	Website bag-organisasi.probolinggokota.go.id/	Website Sekretariat Bagian organisasi Kota Probolinggo
73	Website perekonomian.probolinggokota.go.id	Website Sekretariat Bagian Administrasi Perekonomian Kota Probolinggo
74	Website bag-pemerintahan.probolinggokota.go.id/	Website Sekretariat Bagian pemerintahan Kota Probolinggo
75	Website bag-hukum.probolinggokota.go.id/	Website Sekretariat Bagian Hukum Kota Probolinggo
76	Website bag-kesra.probolinggokota.go.id/	Website Sekretariat Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Probolinggo
77	Website humasprotokol.probolinggokota.go.id/	Website Sekretariat Humasprotokol Kota Probolinggo
78	Website bag-pembangunan.probolinggokota.go.id/web	Website Sekretariat Administrasi Pembangunan Kota Probolinggo
79	Website bappedalitbang.probolinggokota.go.id/	Website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo
80	Website bkpsdm.probolinggokota.go.id/	Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Probolinggo
81	Website bpbd.probolinggokota.go.id/	Website Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo
82	Website bakesbangpol.probolinggokota.go.id/	Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo
83	Website https://dinsos.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Sosial Kota Probolinggo
84	Website dpu.probolinggokota.go.id/web/	Website Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo
85	Website dispenduk.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Kependudukan dan Capil Kota Probolinggo
86	Website dikpora.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo
87	Website disnaker.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo
88	Website dkupp.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo
89	Website dkp.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Perikanan Kota Probolinggo
90	Website dinkes.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Kesehatan Kota Probolinggo
91	Website disbudpar.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo
92	Website dishub.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
93	Website disperta.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo
94	Website diskominfo.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Komunikasi & Informatika Kota Probolinggo
95	Website blh.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo

No	Nama Software Aplikasi	Fungsi Software Aplikasi
96	Website dpmptsp.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo
97	Website perpustakaan. arsip.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo
98	Website dppakb.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana Kota Probolinggo
99	Website inspektorat.probolinggokota.go.id/	Website Inspektorat Kota Probolinggo
100	Website satpolpp.probolinggokota.go.id/	Website Satpol PP Kota Probolinggo
101	Website dprd.probolinggokota.go.id/	Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo

2.2.3 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

Analisis kesiapan infrastruktur sosial di daerah dilakukan untuk mengukur kondisi kesiapan infrastruktur di daerah yang terkait dengan kewargaan. Kebutuhan akan sarana prasarana sosial merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan partisipasi dan keguyuban warga kota disaat smart city akan dan mulai melaksanakan.

Berikut ini beberapa capaian infrastruktur sosial di Kota Probolinggo :

Tabel 28 Data Capaian Infrastruktur Sosial di Kota Probolinggo

Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Capaian Indeks Infrastruktur				SKPD	Sumber
			2014	2015	2016	2017		
Fasilitas Publik	Tingkat pelayanan RTH	Prosentase luasan RTH publik yang tersedia	4.78	4.78	7.34	7,35	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014
	Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prosentase layanan posyandu	99,5	99,5	100	100	Dinas Kesehatan	SNI 03-1733-2004
		Prosentase layanan apotik eksisting	80	80	83,33	90	Dinas Kesehatan	SNI 03-1733-2004
		Prosentase layanan puskesmas eksisting	75	75	75	75	Dinas Kesehatan	SNI 03-1733-2004
		Prosentase layanan Dokter (umum+spesialis)	300	300	300	300	Dinas Kesehatan	SNI 03-1733-2004
		Prosentase layanan TT Rumah Sakit/jumlah penduduk	150,44	148,47	147,19	140,50	Dinas Kesehatan	SNI 03-1733-2004

Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Capaian Indeks Infrastruktur				SKPD	Sumber
			2014	2015	2016	2017		
	Tingkat pelayanan fasilitas umum penunjang perekonomian	Prosentase layanan fasilitas perekonomian (pasar) yang dilengkapi fasilitas kamar mandi, WC, sarana persampahan, kebakaran, ruang parkir, aman, terdapat bedak permanen, dengan sekat tembok dan penutup bedak, fasilitas pos jaga satpam	54.55	54.55	54.55	54.55	DKUPP	Permen PU No 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya dan SNI 03-1733-2004
		Prosentase layanan koperasi berijin	100	100	100	100	DKUPP	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014
		Prosentase layanan bedak yang dihuni	92.86	92.86	92.86	92.86	DKUPP	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014
Tingkat pelayanan fasilitas pendidikan	Prosentase layanan SD	97.4	96.4	97.6	86.4	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	SNI 03-1733-2004	
	Prosentase layanan SMP	84.7	85.9	87.2	87.1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	SNI 03-1733-2004	
	Prosentase layanan SMA	86.8	85.9	87.2	87.1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	SNI 03-1733-2004	
	Ratio Murid SD/Kelas SD	88	81	81	84	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	SNI 03-1733-2004	
	Ratio Murid SMP/KelasSMP	83	83	83	83	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	SNI 03-1733-2004	
	Ratio Murid SMA/Kelas SMA	86	75	81	81	Dinas Pendidikan,	SNI 03-1733-2004	

Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Capaian Indeks Infrastruktur				SKPD	Sumber
			2014	2015	2016	2017		
							Pemuda, dan Olahraga	
Fasilitas Publik (%)			93.87	92.49	93.48	92.92		
IMB	Penerbitan IMB	Prosentase IMB terbit	5,19	5,72	6,41	6,41	DPUPR	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014
Indeks IMB (%)			5,19	5,72	6,41	6,41		

Di Kota Probolinggo terdapat hanya satu perpustakaan daerah yang lokasinya menyatu dengan kantor Bidang Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo, namun demikian setiap kelurahan mempunyai perpustakaan kelurahan dan demikian juga di setiap sekolah yang ada, taman baca di kantor kecamatan, di Puskesmas, Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup (IPLH), Lembaga Pemasyarakatan dan Taman Posyandu. Di samping itu, ada layanan satu unit Mobil Perustakaan Keliling (MPK) yang secara berkala mengunjungi titik-titik baca. Pada tahun 2017 ini direncanakan ada 130 lokasi yang dikunjungi oleh MPK diantaranya 38 Taman Kanak Kanak, 29 Kelurahan, 50 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan 13 di sudut baca lainnya.

2.3 Analisis Suprastruktur Kota Probolinggo

Suprastruktur atau aspek kelembagaan dan kebijakan di daerah merupakan suatu perangkat yang akan menjamin lancar tidak pelaksanaan smart city, khususnya smart city yang dimulai dan didorong dari inisiatif pemerintah daerah seperti yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, analisis terhadap dimensi suprastruktur atau kebijakan dan kelembagaan dilakukan terhadap tiga aspek, yaitu :

- a. Kesiapan Kebijakan Daerah
- b. Kesiapan Kelembagaan Daerah
- c. Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

2.3.1 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

Aspek kebijakan merupakan salah satu aspek yang diperlukan bagi pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan sebuah program pembangunan. Begitu pun dengan inisiatif smart city yang dilaksanakan di daerah, memerlukan seperangkat kebijakan untuk menjamin

pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar dan berkelanjutan. Untuk itu, analisis terhadap aspek kebijakan di daerah perlu dilakukan.

Kebijakan merupakan salah satu aspek yang diperlukan bagi pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan sebuah program pembangunan. Begitu pun dengan inisiatif *smart city* yang dilaksanakan di daerah, memerlukan seperangkat kebijakan untuk menjamin pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar dan berkelanjutan. Berikut ini kesiapan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo :

a. Peraturan Walikota

1. Perwali 35/2010 tentang Masterplan e-Government Kota Probolinggo 2010-2029;
2. Perwali 17/2013 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Perwali 18/2013 Tentang Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
4. Perwali 19/2013 Tentang Pendayagunaan Situs Web Resmi Pemerintah Kota Probolinggo Dan Situs Web SKPD ;
5. Perwali 32/2015 Tentang Pengelolaan Sistem Administrasi Kelurahan (SIAKEL) Dil Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
6. Perwali 33/2015 Tentang Standar Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
7. Perwali 34/2017 Tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan;
8. Perwali 54/2017 Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo;
9. Perwali 57/2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Online;

b. Keputusan

1. SK No.29/2014 Tentang Tim Peningkatan e-Government Kelurahan; *(Diperbarui setiap tahun s/d Sekarang)*
2. SK No.33/2014 Tentang Pengelola Banger Telecenter Tahun 2014; *(Diperbarui setiap tahun s/d Sekarang)*
3. SK No.41/2015 Tentang Tim Chief Information Officer (CIO) Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2015; *(Diperbarui setiap tahun s/d Sekarang)*

c. Edaran

1. SE No. 555/1794/425.113/2013 tentang Penggunaan Alamat e-mail Resmi Pada Instansi Pemerintah Daerah;

2. SE No. 555/60/425.113/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Website;
3. SE No. 555/2501/425.113/2013 tentang Panduan Standar Dan Content Website Resmi Instansi/SKPD;
4. SE No. 555/2363/425.113/2014 tentang penyelenggaraan SiMaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
5. SE No. 555/2221/425.113/2015 tentang Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kelurahan (SIAKEL) Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
6. SE No. 555/2363/425.113/2014 tentang penyelenggaraan SiMaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

2.3.2 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

Kelembagaan daerah merupakan perangkat non-fisik selanjutnya setelah kebijakan yang sangat menentukan keberlanjutan pelaksanaan smart city di daerah dari sisi pengelola kota, yaitu pemerintah daerah. Di dalam aspek kelembagaan ini, nantinya akan diatur pembagian peran dalam pelaksanaan smart city. Oleh karena itu, aspek kelembagaan menjadi salah satu bagian dari analisis kesiapan smart city di daerah.

Berdasarkan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 188.45/361/KEP I425.AL2/2018 Tanggal 4 Juni 2018 telah dibentuk Dewan Smart City Kota Probolinggo. Tugas dari Dewan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memberi masukan terhadap kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan Probolinggo Smart City melalui Master Plan Probolinggo Smart City berbasis RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Probolinggo Tahun 2015-2025 dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 ;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap implementasi Probolinggo Smart City; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada walikota Probolinggo.

Anggota Dewan Smart City Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

No	Tugas	Nama Jabatan / Instansi
1.	Pengarah	1. Walikota Probolinggo
		2. Ketua DPRD Kota Kota Probolinggo
2	Ketua Dewan	Wakil Walikota Probolinggo
3	Wakil Ketua 1	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo
	Wakil Ketua II	Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

No	Tugas	Nama Jabatan / Instansi
4	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo
	Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
5	Anggota (Pakar dan Praktisi)	1. Direktur AMIK Taruna Probolinggo
6	Anggota (Pemkot Probolinggo)	2. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
		5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		6. Kepala Dinas Kesehatan
		7. Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
		8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		11. Kepala Dinas Perhubungan
		12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		13. Kepala Dinas Perikanan
		14. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		16. Kepala Bagian Pemerintahan
		17. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
		18. Kepala Bagian Hukum
		19. Kepala Bagian Kerjasama dan Administrasi Wilayah
		20. Para Camat Se-Kota Probolinggo
		21. Para Lurah Se-Kota Probolinggo

Walikota Probolinggo juga telah membentuk Tim Teknis Dewan Smart City di Kota Probolinggo seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 188.45/362/KEP/425.012/2018.

- a. Menyusun Master Plan Probolinggo Smart City tahun 2019-2023;
- b. Menyusun dasar hukum implementasi Probolinggo smart city;
- c. Menganalisis kebutuhan sistem informasi, solusi, mendesain dan menyelaraskan sistem informasi pendukung Smart City di Kota Probolinggo;
- d. Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien;
- e. Mengembangkan sistem informasi sesuai kebutuhan serta mengintegrasikan sistem informasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

- f. Menyediakan layanan Help Desk dan Transfer Knowledge; dan
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta membuat laporan.
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Probolinggo.

PELAKSANA	
Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
Wakil Ketua I	Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA LITBANG Kota Probolinggo
Wakil Ketua II	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA LITBANG Kota Probolinggo
Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pembiayaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pada BAPPEDA LITBANG Kota Probolinggo
Tim Perencanaan dan Pengembangan Smart City	
Koordinator	Kepala Seksi Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang Bangunan dan Lingkungan Serta Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Probolinggo
Anggota	Kepala Seksi Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Permukiman Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Pembangunan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Pcrmukiman Kota Probolinggo
	Kcpala Seksi Tata Kelola E-Govcrnmcnt Bidang Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
	Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem E-Govcrnmcnt Bidang Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
Tim Pengelola dan Pelaksanaan Smart City	
Koordinator	Kepala Bidang Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
Wakil Koordinator	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
Anggota	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Bidang Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
	Fitrianingsih, S.Kom
	Yoga Adetya, A.Md
	Ahmad Basyar
	Andre Junanto, A.Md
Yona Eka Yuliawan	

Dalam pelaksanaan program kerja Walikota Probolinggo, berbagai kegiatan dan kerja sama telah berhasil dilaksanakan dan beberapa penghargaan juga berhasil dicapai oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Beberapa kegiatan, kerjasama dan penghargaan yang telah diterima antara lain:

- Penghargaan KLA Pratama dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak [22 Juli 2017]
- Pengembangan Pariwisata Kota Probolinggo Berbasis Kearifan Lokal untuk Kembangkan Wisata Berkelanjutan [05 Januari 2017]
- Sekda Kota Probolinggo dr Bambang Agus Suwignyo (kiri) ketika menerima penghargaan kota sehat kali ke-3 sejak tahun 2013 [28 Nopember 2017]
- Pemerintah Kota Probolinggo kedatangan Working Group dari Helsingborg Swedia, sebagai tindak lanjut kerjasama SymbioCity [24 Oktober 2017]
- Peresmian Pelabuhan Tanjung Tembaga oleh Menteri Ignasius Jonan, merupakan satu-satunya pelabuhan yang dikelola pemerintah [24 Des 2015]
- Sekda Kota Probolinggo Johny Haryanto menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Utama yang diserahkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya di Ruang Auditorium Sekretariat Wapres RI [31 Januari 2017]
- Wali Kota Rukmini saat menerima penghargaan TOP Leader on IT Leadership dari Mensesneg Pratikno di Balai Kartini, Jakarta [31 Okt 2017]
- Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menyerahkan penghargaan "Innovative Government Award (IGA)" 2017 kepada Wali Kota Probolinggo di Jakarta [18 Desember 2017]

2.3.3 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

Disamping aspek kebijakan dan kelembagaan, terdapat satu aspek non-fisik selanjutnya yang akan menjadi penentu dari keberlanjutan *smart city* di daerah. Aspek tersebut adalah aspek organisasi di masyarakat sipil. Aspek ini menjadi salah satu aspek dalam kesiapan *smart city* karena di dalam sebuah *smart city*, aspek partisipasi masyarakat yang digerakkan di dalam organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu inti dari *smart city*. Di Kota Probolinggo terdapat beberapa perguruan tinggi, antara lain:

- STIA Bayuangga
- STAI Muhammadiyah
- STIKES Bhakti Bangsa

BAB III ANALISIS GAP

Analisis dengan metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and threats*) dilakukan dengan tujuan untuk memetakan kondisi pengembangan dan penerapan e-government di Pemerintah Kota Probolinggo dengan meninjau berbagai faktor internal berupa kekuatan dan kelemahannya, serta faktor-faktor eksternal berupa peluang dan tantangan pada saat ini. Ada beberapa komponen pokok yang akan di analisis yaitu kelembagaan atau organisasi, hukum dan kebijakan, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur teknologi informasi yang mencakup perangkat keras serta jaringan komputer, dan sistem informasi yang mencakup basis data serta aplikasi komputer. Kelima komponen tersebut di analisis dari 4 (empat) sisi yaitu letak kekuatannya (*strengths*), titik kelemahannya (*weaknesses*), peluang yang tersedia (*opportunities*), dan tantangan atau ancaman yang ada (*threats*). Analisis swot ini digunakan sebagai dasar penentuan dalam penyusunan smart city bagi Pemerintah Kota Probolinggo.

Dari analisis ini maka dapat dilakukan evaluasi diri demi melakukan pembenahan diri dalam membangun smart city yang efektif, efisien, handal, transparan, dan akuntabilitas. Selain itu, dengan analisis SWOT tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian untuk dapat mencapai kondisi yang memungkinkan untuk membangun dan mengembangkan smart city di Pemerintah Kota Probolinggo.

Analisis SWOT yang disusun berikut selain dari hasil kuisioner juga hasil dari survey dan wawancara langsung terhadap wakil-wakil dari instansi pemerintah dan masyarakat, serta hasil survey terhadap dokumen-dokumen pendukung (data-sekunder) yang terdapat di Pemerintah Kota Probolinggo. Berikut adalah hasil dari penyusunan analisis swot terhadap komponen smart city di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo :

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pimpinan - Sarana dan prasarana yang mendukung - Adanya produk hukum daerah yang mendukung iklim inovasi (Perwali Inovasi) - Desentralisasi kewenangan pimpinan dalam pembangunan - tersedianya sarana IT (internet, Komputer PC, Server) - Tersedianya peraturan atau regulasi tentang TIK 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terintegrasinya system dan data - Ketersediaan anggaran untuk mewujudkan smart city belum memadai - Kepedulian masyarakat terhadap pembangunan kurang - SDM praktisi TIK masih belum merata dan dioptimalkan untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK - Belum adanya regulasi yang mengatur tentang integrasi data dan aplikasi

<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya SOTK Organisasi yang mendukung implementasi smart city - Memiliki beberapa aplikasi e Government, yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo maupun OPD lain - Adanya fasilitas pembangunan system IT dari diskominfo - Adanya lembaga fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui TIK - Sudah tersedia akses jaringan internet ke seluruh OPD maupun kelurahan - SDM dan SDA yang memadai - Pengembangan inovasi daerah yang berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya tersedia Master Plan Pengembangan TIK Kota Probolinggo - Smart city belum dituangkan dalam RPJP dan RPJM Kota Probolinggo - Kurangnya partisipasi masyarakat - Belum sepenuhnya menggunakan jaringan Fiber Optic (FO) - Koordinasi OPD dengan Dinas Kominfo dalam pengembangan TIK belum optimal - Platform pengembangan TIK di masing-masing OPD yang beragam
--	---

PELUANG	ANCAMAN
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya institusi pendidikan yang mendukung program smart city baik secara jumlah dan kualitas - Peningkatan peran e-government dalam pembangunan kota - Adanya kerjasama dengan lembaga baik regional, nasional maupun internasional - Adanya forum kreatif dari pihak di luar pemerintahan - Tersedianya beragam media (sosial, cetak, elektronik) - Banyaknya SDM Kota Probolinggo yang mumpuni dalam menunjang smart city - Perguruan Tinggi memiliki program Pengabdian Masyarakat yang mendukung Smart City - Akses broadband sudah mencakup seluruh wilayah - Perkembangan TIK berbasis mobile - Banyaknya penyedia jaringan internet 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya gangguan yang mengancam stabilitas ideology, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dan agama - Kemampuan hacker yang dapat menembus system keamanan data dan informasi - adanya gangguan system (virus) - adanya peluang penyalahgunaan hak akses oleh pegawai - Perkembangan teknologi informasi yang cepat, belum diimbangi dengan kecepatan pembaharuan kapasitas SDM - Meningkatnya jumlah urbanisasi yang tidak memiliki keahlian dan pendidikan yang cukup

Untuk mengatasi tingkat ketimpangan antara tujuan masa depan yang ingin dicapai dengan kondisi saat ini yang dapat dilihat pada analisis kesiapan daerah, maka ada beberapa strategi yang perlu dirumuskan sebagai berikut :

STRATEGI S - O

- Mendorong pimpinan yang peduli dengan e-Gov untuk meningkatkan peran TIK pada tata kelola pemerintahan
- Optimalisasi kewenangan SKPD Kominfo untuk melengkapi berbagai regulasi
- Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang berlaku untuk semua unit kerja
- Adanya kebijakan pengarahannya dari pimpinan daerah, serta alat kontrol dan monitoring untuk implementasi e-govt
- Pengembangan aplikasi pendukung pelayanan publik berbasis mobile system
- Replikasi pengembangan smart city dari daerah lain
- Kolaborasi antar pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha dan akademisi untuk pengembangan smart city
- Reposisi SDM TIK yang sesuai dengan kompetensi untuk mendukung Smart City

STRATEGI S - T

- Penyusunan regulasi untuk akses dan pengamanan data
- Membentuk Tim Administrasi TIK yang solid
- Diseminasi informasi tentang smart city kepada seluruh stake holder
- Memperkuat hubungan kerjasama antar pimpinan lembaga dan instansi untuk memperkecil resiko ancaman

STRATEGI W - O

- Mengoptimalkan seluruh potensi pemerintah dan akademisi untuk integrasi data dan system aplikasi
- Membuka peluang kerjasama dengan pihak lain untuk mewujudkan smart city
- Memanfaat pers/media untuk mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan regulasi
- Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain yang menjadi penyangga
- Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan TIK antara OPD dengan Dinas Kominfo
- Distribusi SDM TIK yang lebih merata di seluruh OPD
- Membangun jaringan kabel Fiber Optic (FO) di seluruh instansi pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan intranet
- Memberikan panduan tentang penggunaan platform dalam pengembangan TIK

STRATEGI W - T

- Meningkatkan kemampuan masyarakat dan kapasitas kelembagaan untuk menangkal ancaman
- Menyusun regulasi untuk integrasi antar system yang ada di pemerintahan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan TIK secara aman dan sehat
- Menyusun Masterplan smart city
- Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan kota
- Membangun sistem pengamanan dan *backup* data yang kuat

Dari analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and threats*) tentang rencana implementasi smart city di Kota Probolinggo di atas, maka daya dukung Kota Probolinggo relatif cukup memadai untuk melaksanakan program smart city. Pada dasarnya, pengelolaan kota secara cerdas telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo melalui pengembangan program inovasi dan berkelanjutan. Daya dukung TIK juga telah dikembangkan sedemikian rupa untuk pengelolaan kota secara cerdas ini. Tentunya, pengembangan inovasi dan berkelanjutan dengan optimalisasi pemanfaatan TIK ditujukan untuk semakin memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan yang baik dan memberikan manfaat yang semakin luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV

ANALISIS VISI PEMBANGUNAN SMART CITY

4.1 Sasaran Smart City Daerah

Smart City Probolinggo bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Probolinggo dengan pengimplementasian teknologi informasi dan komunikasi. Adapun sasaran Smart City Probolinggo berdasarkan pilar smart city adalah :

4.1.1 Smart Governance

Sasaran :

1. Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik bebas korupsi
2. Mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, kolaboratif dan berkarifan lokal melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terintegrasi
4. Menciptakan sistem manajemen pengelolaan kota dengan mewujudkan tata pemerintahan daerah yang Inovatif, Komunikatif, dengan melakukan Improvement yang berkelanjutan dengan mengadopsi Teknologi yang Smart.

Adapun target dari smart governance ini adalah:

a. Pelayanan Publik (*Public Service*)

- 1) Pelayanan administrasi kepada masyarakat: meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen - dokumen resmi seperti SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, dan lain sebagainya. (yang tergabung dalam SI PADU Online di DPMPTSP)
- 2) Peningkatan monitoring ketersediaan dan penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat dengan membangun sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan (TPIID).
- 3) Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain.
- 4) Menghadirkan pelayanan public yang efektif, efisien, transparan dan terukur

- 5) Memudahkan masyarakat dalam memperoleh/mengakses layanan dokumen kependudukan dan menjadikan identitas kependudukan sebagai basis data dalam pelayanan publik
- 6) Adanya pelayanan kesehatan gratis
- 7) Adanya pelayanan pendidikan gratis
- 8) Adanya Pelayanan publik langsung ke rumah (Si LAJU) DPM PTSP
- 9) Adanya peningkatan pelayanan di kelurahan
- 10) Adanya pengembangan pelayanan publik terpadu di kecamatan
- 11) modernisasi pelayanan pajak dan distribusi
- 12) pengembangan akses internet pada ruang publik
- 13) Pelayanan administrasi berbasis on line dan berarifan lokal.
- 14) Aksesibilitas pelayanan oleh semua lapisan masyarakat termasuk berkebutuhan khusus (difabel).
- 15) Tersedia ruang terbuka hijau, ruang ramah anak dan ruang laktasi disetiap tempat pelayanan publik
- 16) Pelayanan publik yang efektif, efisien, proaktif, integratif dan transparan. Contoh: Pelayanan 3 G. Pelayanan Pemasangan Baru PDAM dll
- 17) Pengawasan dan pengamatan masyarakat melalui media sosial yang terkoneksi dengan unit layanan publik

b. Manajemen Birokrasi Yang Efisien (*Bureaucracy*)

- 1) Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (fairness), bertanggung-jawab (accountability) dan keterbukaan (transparency). Misalnya: sistem e-planning, e-budgeting, e-monev, e-tax dan lain-lain.
- 2) Pengembangan aplikasi e-gov harus diarahkan menuju integrated & interoperability e-gov atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan Smart e-Gov. Pelayanan Smart e-Gov ini perlu didukung dengan sebuah "City Operation Center (COC)".
- 3) Birokrasi yang bersih, transparan, melayani dan berintegritas
- 4) Optimisasi TIK dalam pengelolaan manajemen birokrasi
- 5) Pelaksanaan dan pengawasan implementasi standar operasional pelayanan bagi setiap level birokrasi
- 6) peningkatan etos dan kinerja aparat RT/RW
- 7) penguatan badan usaha milik daerah

- 8) Birokrasi yang bersih, melayani dan berintegritas. Contoh: Tersedianya finger scan di semua SKPD se Kota Probolinggo, e-procurement
 - 9) Optimalisasi TIK dalam pengelolaan manajemen birokrasi. Contoh: Sistem informasi manajemen transportasi darat, monitoring kondisi kawasan
 - 10) Pengelolaan Anggaran Kota yang Kredible dan Transparan melalui sistim Online.
- c. Efisiensi Kebijakan Publik (*Public Policy*)
- 1) Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan. (LAPOROREK)
 - 2) Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. (JDIH) bag. Hukum
 - 3) Transparansi proses penyusunan kebijakan public
 - 4) Memanfaatkan data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan analisa dalam penetapan dan pemilihan keputusan yang sesuai.
 - 5) Pemanfaatan hasil Musrenbang sebagai data dan informasi awal dalam perumusan kebijakan
 - 6) Kerjasama media dalam kebijakan publik. Contoh: Berita dan hasil kajian media menjadi bahan dalam analisis kebijakan publik
 - 7) Memudahkan masyarakat dalam memperoleh/mengakses layanan dokumen kependudukan
 - 8) Menyajikan data kependudukan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembanguna disemua bidang
 - 9) Menjadikan Nomor Induk Kependudukan sebagai dasar pemberian layanan oleh seluruh lembaga layanan publik.

4.1.2 Smart Branding

Konsep branding daerah difokuskan pada perwujudan jati diri karakteristik kota dalam rangka meningkatkan niai daerah yang dapat mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kota Probolinggo berusaha menimbulkan kesan positif yang dapat memicu pertumbuhan kota kea rah yang lebih baik. Dengan kata lain, Kota Probolinggo akan terus berupaya untuk meningkatkan daya saing dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Smart branding dilakukan pada beberapa indikator :

- a. Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*)
 - 1) Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke tempat wisata gedung tua peninggalan jaman penjajahan yang memiliki kaitan sejarah dengan wisatawan mancanegara
 - 2) Mengidentifikasi potensi dan sejarah lokal guna pengembangan kepariwisataan yang mempertimbangkan keunikan, kekhasan, lokalitas dan keutuhan etika
 - 3) Membangun budaya yang ramah melalui sosialisasi dan pelatihan keramahtamahan (*hospitality training*) bagi para pelaku pariwisata
 - 4) Mengembangkan budaya pandalungan sebagai budaya percampuran berbagai latar belakang budaya.
 - 5) Menjadi daerah transit yang nyaman dan ramah bagi wisatawan khususnya wisatawan mancanegara dalam rangka mengunjungi daerah wisata internasional gunung Bromo
- b. Membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (*business branding*)
 - 1) Ekspose produk daerah melalui web probolinggokota.go.id dan Probolinggo Single Window (PSW)
 - 2) Updating ekspose konten pariwisata Kota Probolinggo untuk jenis wisata kota pusaka, wisata hiburan, wisata kuliner, wisata kawasan pesisir dan mangrove, wisata cinderamata, wisata hotel, wisata melalui travel agent.
 - 3) Membangun dan mengembangkan produk ekonomi daerah berbasis digital dan mobile
 - 4) Menumbuhkan kelompok ekonomi kreatif dan mendorong tumbuhnya usaha start up
 - 5) Menggiatkan ekonomi melalui even-even tertentu seperti kegiatan Morning on Panglima Street (MPS), Semarak Pagi Kecamatan (SPK) di tiap-tiap kecamatan dan pasar Minggu.
- c. Membangun dan memasarkan wajah kota (*city appearance branding*)
 - 1) Mengukuhkan jatidiri Kota Probolinggo sebagai Kota Heritage (Kota Pusaka) yang memiliki bangunan-bangunan bernilai tinggi sejarah yang ditopang oleh arsitektur kota yang post-modern, kombinasi dari arsitektur modern yang dibalut oleh arsitektur klasik kolonial.
 - 2) Mewujudkan Kota Probolinggo sebagai Kota Seribu Taman yang dapat menjadi sentra kegiatan masyarakat dan wisata taman yang ramah anak, ramah lansia dan ramah hobby.

- 3) Membangun dan mengembangkan sistem informasi destinasi wisata dan pusaka Kota Probolinggo berbasis teknologi multimedia dan berbasis mobile

4.1.3 Smart Economy

Dimensi ketiga dalam Smart City adalah Smart Economy atau tata kelola perekonomian yang pintar. Smart Economy dalam Smart City dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Sasaran dari dimensi Smart Economy di dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*.

Ekonomi cerdas merupakan pendekatan pemecahan masalah ekonomi daerah dengan membuka akses informasi yang luas sehingga meningkatkan peluang warga untuk melakukan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien dengan mereduksi biaya operasional lebih minimal, lebih produktif dan mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Tujuan Smart Economy ini adalah meningkatkan perekonomian dengan menguatkan peran dari sector industry, UMKM, koperasi, pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, dan usaha jasa lainnya. Tujuan ini selaras dengan Agenda Prioritas Kota Probolinggo yaitu :

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui akselerasi pengembangan industri, perdagangan, UMKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata

Sasaran :

- Menciptakan iklim perokonomian dengan peningkatan ekomomi kerakyatan melalui pemberdayaan badan usaha lorong dan UKM
- Menciptakan kondisi investasi yang kondusif.
- Pengurangan pengangguran
- Meningkatkan inovasi-inovasi untuk menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal
- Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini.
- Pelatihan keterampilan dan pemberian dana bergulir

Adapun target dari smart economy ini adalah:

- a. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*Industry*).
 - 1) Membangun sistem perijinan yang terbuka, akuntabel, online dan terpadu (PTSP-Online)
 - 2) Mengembangkan ekonomi kreatif
 - 3) Memberikan pelatihan kewirausahaan berbasis e-commerce kepada para pelaku usaha.
 - 4) Membuat dan mengembangkan forum wirausaha
- b. Mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare*)
 - 1) Membangun sentra UMKM yang nantinya diintegrasikan dengan layanan digital
 - 2) Mengintegrasikan informasi peluang kerja dan peluang peningkatan kapasitas warga melalui layanan digital – kios 3 in 1 dan bursa kerja online
 - 3) Revitalisasi pasar
- c. Membangun ekosistem transaksi keuangan (*Transaction*)
 - 1) Tersedianya kebijakan yang mendukung sistem transaksi keuangan digital
 - 2) Merancang dan mengembangkan sistem transaksi pembayaran non tunai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyerapan kegiatankegiatan yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan danbelanjadaerah (APBD).
 - 3) Mewujudkan masyarakat yang bankable dan memiliki akses terhadap permodalan.

4.1.4 Smart Living

Terkait perwujudan smart living, salah kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 adalah Misi Pembangunan keempat, yaitu : mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota jasa yang ramah lingkungan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Adapun tujuan dari misi tersebut yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah **(1) meningkatkan ketersediaan infrastruktur kota guna menunjang upaya peningkatan produktivitas ekonomi dan pelayanan dasar, (2) meningkatkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan kota.**

Secara konseptual, smart living adalah lingkungan kota (yang diwujudkan dalam sistem perkotaan) yang nyaman untuk tinggal dan beraktivitas dengan melibatkan masyarakat serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun visi berkaitan dengan smart city adalah: ***Probolinggo Kompak dan Livable dengan dukungan Teknologi (KLIT)***, dan Misi :

- Mewujudkan kota kompak melalui harmonisasi antara perencanaan tata ruang dengan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Mewujudkan livable city dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai serta pelibatan aktif masyarakat.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi guna mewujudkan smart living.

Pembangunan Smart Living diantaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

a. Harmonisasi tata ruang wilayah (*Harmony*)

- 1) Sebagai komitmen Kota Probolinggo untuk mewujudkan kota hijau, pada tahun 2012 dengan fasilitasi Kementerian Pekerjaan Umum dilakukan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), Kota Probolinggo terlibat dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sebagai salah satu langkah nyata Pemerintah Pusat bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten dalam memenuhi ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terutama terkait pemenuhan luasan RTH perkotaan, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim di Indonesia. Beberapa hasil dari kegiatan P2KH adalah: Master Plan RTH, green map, serta pembangunan 3 taman (Maramis 1 dan 2 serta Semeru).

Sebagai jawaban tantangan global terkait perwujudan kota layak huni, pada tahun 2016 dilakukan kajian tingkat kelayakhunian Kota Probolinggo berdasar data kinerja pemerintah (obyektif) serta persepsi masyarakat (subyektif). Hasil dari kajian tersebut adalah:

- a) Livabilitas Kota Probolinggo secara subyektif berdasarkan persepsi masyarakat adalah sebesar 79,47. Variabel yang memiliki nilai terendah secara subyektif (berdasar persepsi masyarakat) adalah variabel ekonomi. Demikian pula secara obyektif (berdasar penilaian kinerja pemerintah) variabel ekonomi memiliki nilai terendah.
- b) Faktor kritis dan memerlukan prioritas penanganan adalah indikator-indikator dengan nilai livabilitas subyektif rendah, livabilitas obyektif rendah yang

meliputi: ketersediaan fasilitas pejalan kaki, ketersediaan angkutan umum, kepadatan bangunan, ketersediaan PDAM, kualitas RTH, keamanan terhadap bencana, tingkat pendapatan, pengentasan kemiskinan.

- c) Faktor-faktor demografis yang mempengaruhi livabilitas adalah: usia dan penghasilan. Namun demikian korelasi antara faktor-faktor tersebut dengan livabilitas cenderung lemah.
- 2) Lebih lanjut, sebagai komitmen mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota layak huni, pada Tahun 2017 dilakukan FGD (Focus Group Discussion) “Mewujudkan Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Huni” yang melibatkan unsur pemerintah serta masyarakat. Beberapa kesepakatan dalam FGD adalah:
- a) Guna mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota layak huni diperlukan kolaborasi antara semua stakeholder kota. Kenyamanan hidup berkota adalah hak setiap warga kota, oleh karena itu Pemerintah sebagai pihak yang diberi mandat oleh warga harus berusaha untuk merencanakan, membangun dan mengendalikan kawasan perkotaan demi terciptanya lingkungan perkotaan yang nyaman untuk dihuni. Di sisi lain, warga juga harus paham dan menjalankan kewajiban sebagai warga kota yang turut serta mewujudkan kenyamanan kota.
 - b) Bahwa kota layak huni merupakan sebuah bentuk warisan bagi anak cucu.
 - c) Beberapa usulan strategi mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota layak huni adalah:
 - Aspek sosial budaya: perlu mengakomodasi upaya peningkatan kesehatan masyarakat dalam visi dan misi kepala daerah serta pengalokasian anggaran yang memadai pada sektor kesehatan masyarakat.
 - Aspek ekonomi: perlu pengembangan investasi melalui promosi dan perbaikan iklim investasi sehingga diharapkan terjadi multiplier effect berupa penyerapan tenaga kerja dan terbukanya peluang usaha baru sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
 - Aspek fisik: perlu peningkatan infrastruktur transportasi berupa: peningkatan jaringan jalan, penyediaan pedestrian serta peningkatan ketersediaan dan kualitas angkutan umum.
- 3) Pembangunan taman cyber

- 4) Penyediaan Sistem Informasi Terpadu (big data) Berbasis Data Spasial
- 5) Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh
- 6) Perluasan Jaringan PDAM
- 7) Pengembangan Kota Kompak Berbasis TOD
- 8) Pengembangan Kampung Tematik Berbasis Partisipasi
- 9) Pembangunan Pilot Project Smart Building
- 10) Penyediaan Hunian Murah

b. Mewujudkan prasarana kesehatan (*Health*)

- 1) 7,2% ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh Kota Probolinggo tidak hanya berfungsi sebagai sarana cadangan oksigen diperkotaan, beberapa ruang terbuka hijau dikota Probolinggo seperti taman manula, taman maramis, RTH Kedopok, Alun-alun RTH-IPLH dapat digunakan sebagai sarana rekreasi, sarana peningkatan ekonomi masyarakat Kota Probolinggo, dan sarana aktivitas sosial dan berinteraksi mulai dari anak anak, remaja, dewasa hingga manula.
- 2) Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Sejak tahun 2012 Kota Probolinggo telah mempunyai Peraturan Daerah No 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok serta Peraturan Walikota Probolinggo nomor 40 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok. Hal ini disebabkan, kebiasaan merokok di Kota Probolinggo telah merambah hingga kalangan anak dan remaja akibat dari gencarnya promosi rokok di berbagai media massa. Berdasarkan Perda No.12 Tahun 2009, ada 5 kawasan yang ditetapkan Kawasan Tanpa Merokok (KTR), yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan tempat lainnya yang ditetapkan. Sedangkan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) terdapat 3 kawasan yakni tempat kerja, tempat umum dan angkutan umum. Penerapan KTR dan KTM di Kota Probolinggo masih relatif belum ideal. dilihat dari hasil kegiatan tipiring, monitoring, dan sidak KTR dan KTM pada Mei 2010 s.d. Desember 2017 menunjukkan masih banyaknya pelanggaran dilakukan.
- 3) Dinas Kesehatan Kota Probolinggo telah membangun aplikasi SIMPUSTRONIK Puskesmas untuk merekam pelayanan di puskesmas, SISKIA untuk pencatatan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani, SIDEKA Pro untuk pelaporan data kesehatan dari klinik dan rumah sakit, dan SIP untuk pelaporan capaian data kesehatan untuk di luar gedung

kesehatan (UKM). Sistem informasi di lingkungan Dinas Kesehatan ini juga telah menggunakan data interoperabilitas dengan data kependudukan (SIAK). Puskesmas di Kota Probolinggo berjumlah 6 dengan layanan unggulan masing-masing yakni:

- Puskesmas Sukabumi dengan layanan kesehatan mata (operasi katarak)
- Puskesmas Ketapang dengan layanan UGD, yang beroperasi selama 24 jam karena terletak di jalan nasional
- Puskesmas Kanigaran dengan layanan kesehatan gigi
- Puskesmas Jati dengan layanan akupunktur dan bekam
- Puskesmas Kedopok dengan layanan santun lansia
- Puskesmas Wonoasih dengan layanan Ibu hamil dan bersalin

c. Menjamin ketersediaan sarana transportasi (*Mobility*)

- 1) Digital transportation atau transportasi online mulai masuk di wilayah Kota Probolinggo seperti go-jek dan grab. Keberadaan go-jek atau grab pada dasarnya mampu mendorong terciptanya smart living melalui penyediaan transportasi yang transparan dan relatif lebih cepat. Masyarakat juga merespon positif adanya transportasi online ini. Namun, keberadaannya belum sepenuhnya dapat diterima atau berdampingan dengan transportasi konvensional lain yang telah lama dan lebih dulu ada seperti angkutan perkotaan (angkota) dan becak. Transportasi online dimungkinkan masih dapat beroperasi sepanjang tidak melakukan jasa pengantaran orang, namun lebih kepada pengantaran makanan, minuman dll.
- 2) Pemerintah Kota Probolinggo giat melakukan pengaspalan kembali di jalan-jalan protokol dalam kota sehingga kualitas prasarana jalan mengalami peningkatan yang lebih baik
- 3) Pemerintah Kota Probolinggo juga melakukan pengaspalan *hotmix* di jalan-jalan lingkungan sehingga kualitas jalan lingkungan relatif lebih baik.
- 4) Jalur transportasi angkutan perkotaan (angkota) perlu dilakukan penataan kembali mengingat kondisi sebaran pemukiman telah mengalami perkembangan yang pesat. Banyak daerah atau kawasan-kawasan permukiman yang baru tumbuh yang belum dilewati jalur transportasi perkotaan.
- 5) Pemberian subsidi kepada angkutan perkotaan (angkota) untuk menjadi armada angkutan anak sekolah. Dengan demikian, anak sekolah tidak mengalami kesulitan untuk mengakses transportasi dalam rangka mendukung kegiatan belajar mengajar.

- 6) Pembangunan pedestrian yang representatif dan juga fungsional bagi kaum diffabel.
- 7) Pemasangan *Intelligent Traffic Light Management* dan alat-alat pemantau CCTV pada *traffic light*.
- 8) Kantong-kantong parkir
- 9) Pengembangan e-parking

Berdasarkan analisis SWOT maka diperlukan strategi yang progresif guna mewujudkan smart living.

a. Strength (S)

- Kebijakan perencanaan pembangunan yang mendukung perwujudan smart living.
- Kinerja infrastruktur yang baik (di atas rata-rata) untuk: jaringan jalan, air bersih, komunikasi dan informasi, fasilitas publik.
- Ketersediaan RTRW sebagai instrumen perencanaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Komitmen dalam upaya mewujudkan green city dan livable city.

b. Weakness (W)

- Morfologi Kota Probolinggo tersebut belum kompak dan dapat menyebabkan urban sprawl.
- Kinerja infrastruktur yang belum baik (di bawah rata-rata) untuk: angkutan umum, air limbah, irigasi dan drainase, IMB.
- Masih terdapat permukiman kumuh seluas 193,56 Ha.
- Banyaknya kendaraan pengguna jalan dan tonase kendaraan bermotor angkut barang yang melampaui muatan sumbu terberat.
- Kurangnya partisipasi warga dalam pemenuhan sanitasi secara mandiri dan kurangnya kepedulian warga terhadap lingkungan karena kurangnya pemanfaatan sanitasi yang baik.
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketaatan terhadap RTRW.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media partisipasi dalam formulasi dan pengambilan kebijakan.

c. Opportunity (O)

- Dukungan kebijakan nasional, baik perencanaan pembangunan maupun penataan ruang, dalam mewujudkan smart living.

- Dukungan trend global dalam mewujudkan smart living.
- d. Threat (T)
- Belum optimalnya kebijakan pengembangan compact city dalam perencanaan tata ruang secara nasional sebagai acuan di daerah.

4.1.5 Smart Society

Sasaran dari smart society dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi.

Sasaran Smart Society ini selaras dengan agenda prioritas Kota Probolinggo yakni :

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang berkeadilan

Sasaran :

1. Pengurangan Pengangguran
2. Menciptakan masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab
3. Pemberian jaminan social keluarga

Target dari smart society ini adalah :

- a. Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (*Community*)
 - 1) Sumber daya manusia yang ada di Kota Probolinggo memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi "*smart people*".
 - 2) Dalam hal transparansi pengelolaan anggaran, masyarakat dapat berpartisipasi dengan akses melihat nilai-nilainya berapa melalui website pemerintah probolinggokota.go.id
 - 3) Penggunaan fasilitas publik Layanan pengaduan online dapat membantu untuk pemerintah memantau keamanan masyarakat sehingga masyarakat aman dan tertib
 - 4) Mengakomodasi dan memfasilitasi kegiatan komunitas yang produktif dan bersinerg dengan visi misi Kota Probolinggo
 - 5) Memfasilitasi komunitas
- b. Membangun ekosistem belajar yang efisien (*Learning*)
 - 1) Dalam membangun ekosistem belajar yang efisien, di kota Probolinggo telah dilaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online, untuk jenjang pendidikan SD, SMP

- 2) Dari persepsi teknologi, pembangunan ekosistem belajar yang cerdas mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sertainternet, Digital School
- c. Mewujudkan sistem keamanan masyarakat (*security*)
- 1) Mewujudkan individu, keluarga dan masyarakat yang memiliki ketangguhan mental, social dan spiritual
 - 2) Menciptakan ketentraman, dan ketertiban serta penegakan kesadaran hukum pada masyarakat.
 - 3) Menindak tegas pelanggar sesuai dengan aturan yang ada
 - 4) Terciptanya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan umumnya perda
 - 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya
 - 6) Meningkatkan intensitas sosialisasi dan simulasi kebakaran dan bencana lainnya di masyarakat
 - 7) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang tentram dan tertib serta perlindungan masyarakat
 - 8) Terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat
 - 9) Penanggulangan PMKS
 - 10) Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar warga miskin
 - 11) Identifikasi potensi sumber kesejahteraan sosial

4.1.6 Smart Environment

- a. Mengembangkan program proteksi lingkungan(*Protection*)
- 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, di dalam struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup tetap dipertahankan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan. UPT ini berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisa serta memberikan rekomendasi tentang pencemaran lingkungan. UPT laboratorium Lingkungan ini telah memiliki sertifikat terakreditasi ISO 17025. Dengan adanya sertifikatat ini maka diharapkan pengelolaan pencemaran lingkungan dapat dikelola secara efektif dan efisien sehingga tingkat pencemaran lingkungan di Kota Probolinggo dapat ditekan sampai dengan batas terendah. Secara umum, untuk kualitas udara di Kota Probolinggo relatif masih cukup baik.

- 2) Sampai dengan tahun 2018, Kota Probolinggo telah memiliki 7,2 % Ruang Terbuka Hijau. Sebagai Kota Sedang yang memiliki luas wilayah sekitar 57.000 m², jumlah Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 7,2 persen merupakan pencapaian yang relatif kurang baik, masih belum mencapai setengah dari 20% yang diamanatkan menurut UU Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang. Ke depan, Ruang Terbuka Hijau publik akan terus ditingkatkan sampai mencapai batas ideal. Ruang terbuka hijau ini diharapkan sebagai salah satu upaya pengendalian lingkungan, memberikan ruang kecukupan oksigen, ruang rekreasi publik serta ruang berinteraksi warga. Ruang Terbuka Hijau yang berkecukupan akan mendukung terlaksananya Probolinggo Smart City.
- b. Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah (*Waste*)
- 1) Pemerintah Kota Probolinggo saat ini tengah mengoptimalkan pengolahan sampah berbasis masyarakat melalui program bank sampah, dan tempat pengolahan sampah terpadu 3R, untuk mengatasi permasalahan persampahan. Untuk pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola persampahan, maka sudah dibentuk Forjamansa (Forum Jaringan Manajemen Sampah), eco pesantren, Paguyuban Peduli Sampah (Papesa), Komunitas Pelestari Keanekaragaman Hayati (Komtari Kehati) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas). Pengelolaan sampah organik juga sudah mampu memproduksi kompos/pupuk.
 - 2) Untuk pengelolaan sampah plastik, maka limbah plastik dicacah/dihancurkan dan sudah tersedia pengepul untuk didaur ulang. Saat ini juga sudah dijalankan program aspal dengan menggunakan bahan sampah plastik. Setiap 4 ton sampah plastik yang sudah dicacah mampu mengcover jalan 1,3 km.
 - 3) Untuk edukasi sejak dini tentang penanganan limbah sungai, maka dilaksanakan program kegiatan Dik-Sun atau Detektif Sungai, yakni dengan memberdayakan anak-anak sekolah SD atau setingkatnya yang ditunjuk sebagai peneliti dan pemerhati lingkungan sungai.
- c. Mengembangkan tata kelola energi yang bertanggungjawab (*Energy*)
- 1) Dalam rangka pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), Kota Probolinggo melalui Dinas Lingkungan Hidup mengembangkan limbah tahu bagi warga sekitar di daerah sekitar IPAL tahu. Pemanfaat dari pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah sebanyak 45 KK teraliri energi listrik.
 - 2) Untuk penerangan jalan umum (PJU), sebagian sumber energi juga telah menggunakan panel surya (solar cell). Dengan pemanfaatan energi matahari ini,

maka mendukung program pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Pemerintah Kota Probolinggo juga menggalakkan program kegiatan hemat energi di sarana-prasarana perkantoran, dengan menggunakan alat-alat elektrik yang hemat energi.

4.2 Analisis Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintah daerah. Pada hakikatnya membentuk visi daerah adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat. Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerah akan mampu menjadi akselerator kinerja bagi daerah tersebut.

Untuk menjabarkan Visi Misi tersebut diatas ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2014-2019, dengan Visi dan Misi jangka menengah sebagai berikut:

“Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan berkeadilan”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Maju** : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan social masyarakat toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamaiaka perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan local, ditopang oleh ketahanan ekonomi dan social.
- Sejahtera** : adalah sikap dan kondisi masyarakat Kota Probolinggo yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman, tenteram dan makmur dalam menjalani kehidupan.
- Berkeadilan** : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Kota Probolinggo

Kota Jasa : adalah konsep untuk mewujudkan Probolinggo sebagai kota yang akselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang dan jasa dalam skala regional maupun internasional serta memadukan wilayah pengembangan kota dalam suatu system tata ruang yang terintegrasi didukung infrastruktur, system transportasi dan system teknologi informasi yang memadai

Dalam rangka mencapai visi dimaksud dirumuskan misi yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandate yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat Kota Probolinggo Yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kompetitif, Kokoh dan Berkeadilan ;
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Akuntabilitas Profesionalitas dan Perluasan Patisipasi Publik;
4. Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan;
5. Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal.

LAMPIRAN







BUKU #2

Masterplan Probolinggo Smartcity



**MASTERPLAN
SMART CITY KOTA PROBOLINGGO**

2018
DISKOMINFO KOTA PROBOLINGGO

KATA SAMBUTAN



Kota diprediksi akan menjadi kawasan hunian bagi sebagian besar penduduk Indonesia di masa mendatang. Seiring kota yang semakin lama akan semakin membesar maka permasalahan yang dihadapi kota juga akan menjadi semakin kompleks, sedangkan sumber daya dan energi akan semakin terbatas. Saat dihadapkan pada realita tersebut, kami yakin bahwa pengembangan konsep dan Implementasi *Smart City* adalah jawabannya. Dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Integrasi yang terjalin pada semua Organisasi Perangkat Daerah akan menjadikan kehidupan perkotaan menjadi lebih baik lagi.

Konsep *Smart City* ini dapat memberikan pengaruh positif yang besar dari mulai menyelesaikan kemacetan, keamanan warga kota, penumpukan sampah, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Kota Probolinggo mengetengahkan tatanan kota yang akan memudahkan warga kota untuk mendapatkan informasi dan pelayanan dengan tepat dan cepat. Selanjutnya, tentu bisa dikembangkan lebih jauh lagi sehingga informasi yang diberikan juga bisa bertambah.

Masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Probolinggo memiliki minat yang sangat tinggi terhadap teknologi, utamanya teknologi informasi. Dari hal tersebut, pembangunan *smart city* memang tidak perlu untuk ditunda lagi. Sebaliknya, akan lebih baik jika pembangunannya semakin cepat. Sesuai dengan Visi Kota Probolinggo yaitu **Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan** dengan pengembangan kota dalam suatu sistem tata ruang yang terintegrasi didukung infrastruktur, sistem transportasi dan sistem teknologi Informasi yang memadai.

WALIKOTA PROBOLINGGO

HJ. RUKMINI, SH, M.Si

KATA SAMBUTAN



Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. *Smart city* adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Konsep ini menekankan pada tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua, mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien dan ketiga, *smart city* diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga.

Dapat diambil garis besar dari mengartikan Konsep Smart City sebagai konsep yang telah melalui penyempurnaan-penyempurnaan dari konsep yang telah terlebih dahulu berkembang dengan menambal kekurangan-kekurangan yang ada dan mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin belum ada pada konsep-konsep berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah muncul sebelumnya. Konsep ini pada akhirnya tidak hanya mendasarkan pembangunan dan pengelolaan kota dalam dimensi teknologi, namun juga mencakup dimensi manusia dan dimensi institusional.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PROBOLINGGO

AMAN SURYAMAN, AP, MM

Bagian Awal

Halaman cover	
Halaman Kata Sambutan Kepala Daerah	ii
Halaman Kata Sambutan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Probolinggo	iii
Halaman Daftar Isi, daftar Gambar, Daftar Tabel	iv

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	2
- Latar Belakang	2
- Maksud dan Tujuan	4
- Landasan Hukum	4
- Kerangka Pikir Smart City	5
2. Visi Smart City Daerah	17
- Visi	17
- Misi	18
Rencana Strategis Pengembangan Teknologi Informasi	21
- Prinsip Smart City Di Kota Probolinggo	23
- Mengupas Prioritas	23
- Tantangan Untuk Kota Probolinggo Menjadi Kota Cerdas.....	24
3. Strategi Pembangunan Smart City.....	27
- Smart Governance	48
- Smart Branding.....	50
- Smart Economy	51
- Smart Living.....	53
- Smart Society	55
- Smart Environment.....	57
4. Rencana Aksi Smart City Daerah	60
- Penetapan Quick Wins Smart City.....	60
- Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Smart City Daerah	61
- Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City	75
- Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City.....	83
- Rencana Penguatan Literasi Smart City Daerah.....	99
5. Peta jalan Pembangunan Smart City Daerah	101
6. Penutup.....	112

Bagian Belakang

Lampiran.....	114
---------------	-----

Daftar Tabel

Tabel 1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2014-2019	19
Tabel 2	Rekapitulasi Kegiatan CSR Perusahaan di Kota Probolinggo Tahun 2017	30
Tabel 3	Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2013- 2017	32
Tabel 4	Penduduk berdasarkan pendidikan terakhir Tahun 2016-2017	36
Tabel 5	Data Kinerja Layanan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016	40
Tabel 6	Strategi dan Program Smart Governance	49
Tabel 7	Strategi dan Program Smart	51
Tabel 8	Strategi dan Program Economy	52
Tabel 9	Strategi dan Program Living	54
Tabel 10	Strategi dan Program Society	55
Tabel 11	Strategi dan Program Environment	57
Tabel 12	Quicks Wins Smart City	61
Tabel 13	Analisa Kesenjangan Organisasi dan Manajemen TIK di Semua OPD	63
Tabel 14	Analisa Kesenjangan Organisasi dan Manajemen TIK di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo	70
Tabel 15	Jenis Pekerjaan Organisasi dan Manajemen TIK Mendatang	73
Tabel 16	Time Table Tahapan Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK Pemerintah Kota Probolinggo Selama 5 (lima) Tahun	82
Tabel 17	Daftar Aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo	84
Tabel 18	Permasalahan dan Harapan Aplikasi Eksisting di Pemerintah Kota Probolinggo	92
Tabel 19	Daftar Target Aplikasi Yang Akan Dikembangkan	94
Tabel 20	Jenis Aplikasi yang akan dikembangkan di Kota Probolinggo	96
Tabel 21	Peta Alur Pengembangan Aplikasi di Kota Probolinggo Periode 5 Tahun	97

Daftar Gambar

Gambar 1	Elemen Smart City Readiness	6
Gambar 2	Dimensi Smart City	6
Gambar 3	Smart Governance	7
Gambar 4	Smart Branding	9
Gambar 5	Smart Economy	10
Gambar 6	Smart Living	11
Gambar 7	Smart Society	13
Gambar 8	Smart Environment	14
Gambar 9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2010 - 2017	33
Gambar 10	Perbandingan Laju Inflasi Kota Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur	33
Gambar 11	PDRB Perkapita (Juta Rp), 2012 – 2017	34
Gambar 12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo	

Tahun 2012-2016 (Metode Baru)	35
Gambar 13 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo	62
Gambar 14 Tinjauan Infrastruktur Jaringan TIK	76
Gambar 15 Jalur pembangunan serat optic pada tiap wilayah kerja Pemerintah	78
Gambar 16 Pembangunan serat optic wilayah Timur	79
Gambar 17 Pembangunan serat optic wilayah Selatan	79
Gambar 18 Pembangunan serat optic wilayah Barat	80
Gambar 19 Pembangunan serat optic wilayah Utara	80
Gambar 20 Rancangan topologi jaringan secara umum pada data centre dan seluruh titik jaringan	81



impressive
PROBOLINGGO
C I T Y

1 PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kota merupakan pusat peradaban dan pusat kehidupan manusia. Keberadaan kota terus berubah dan mengalami perkembangan signifikan serta membawa pengaruh besar dalam pola hidup manusia. Perkembangan teknologi yang semakin pintar membuat konsep *smart* tidak hanya diterapkan pada berbagai perangkat, tetapi juga pada berbagai sistem atau tatanan. Salah satunya yang mencuat akhir-akhir ini adalah konsep *smart city*.

Konsep yang disebut sebagai kota pintar ini adalah sebuah konsep tatanan kota cerdas berbasis pelayanan, bersifat transparan dan berperan dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat, dimana dalam hal ini kota memberikan pelayanan publik yang mudah diakses tanpa terbatas lokasi dan waktu. Selain itu, konsep kota pintar ini juga memang dihadirkan sebagai jawaban untuk pengelolaan sumber daya secara efisien. Dukungan aplikasi yang terus berkembang serta terciptanya ekosistem kreatif di bidang teknologi, merupakan langkah awal yang baik menuju kota pintar. Namun pada kenyataannya *smart city* tidak hanya berkaitan dengan teknologi. Konsep ini merupakan kombinasi antara teknologi baru dengan pola pikir cerdas tentang penggunaan teknologi dalam sebuah organisasi.

Kota Probolinggo atau juga dikenal juga dengan sebutan Kota Mangga dan Anggur merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki potensi pembangunan ekonomi yang cukup baik, disamping kultur budaya yang masih kental, Kota Probolinggo juga memiliki wilayah yang sangat strategis, diantaranya sebagai jalan lintas utara atau lintas pantura yang menuju ke Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur dan menuju Pulau Bali. Di samping pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat serta banyaknya pembangunan di berbagai bidang seperti pusat perbelanjaan yang sudah mulai bermunculan, jasa penginapan maupun tempat-tempat-tempat hiburan untuk bercengkrama bersama keluarga. Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 217.000 jiwa ini, Kota Probolinggo juga mempunyai tempat pelabuhan sendiri yang masih bergeliat sampai sekarang, semakin nyata bahwa Kota Probolinggo nantinya merupakan daerah yang potensial untuk tujuan investasi di masa depan.

Semakin berkembangnya pembangunan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, baiknya diikuti juga dengan perkembangan trend teknologi yang semakin hari semakin maju, misalnya konsep kota yang di dalamnya sudah terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lain, dengan nuansa sentuhan teknologi yang dinamakan dengan konsep kota berbasis *Smart City*. Salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mempermudah mobilitas yang dilakukan oleh para pelaku yang ada didalamnya. Konsep kota dengan basis *Smart City* harus didukung oleh semua pihak, baik itu dari kalangan masyarakat

maupun dari kalangan pemerintah itu sendiri, keduanya akan menjadi bagian utama dari konsep kota yang berbasis *Smart City*. Apalagi, saat ini dan ke depannya, masyarakat akan menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean / MEA. Tentunya hal ini membuat kita sadar bahwa persaingan di semua bidang nantinya akan semakin sulit jika pemerintah tidak cepat mengambil langkah untuk meningkatkan skill atau kemampuan masyarakatnya untuk menghadapi tantangan yang sudah di depan mata, terutama mengembangkan kemampuan dibidang teknologi.

Pemerintah dan masyarakat Kota Probolinggo harus mulai berbenah untuk menghadapi tantangan zaman di era digital saat ini yang semakin mengadopsi teknologi diberbagai bidang terutama konsep kota yang berbasis Smart City. Sebuah kota yang mengusung konsep Smart City harus didukung oleh semua pihak baik itu dari masyarakat yang akan menjalankan maupun dari pemerintah sebagai penyelenggara atau pelaku utama. Konsep kota yang bernuansa Smart City tidak lain mempunyai tujuan yang sama yaitu dapat memberi rasa aman, nyaman dan membuat hidup lebih baik lagi.

Konsep yang diusung Smart City pada Kota Probolinggo dapat dimulai dari beberapa langkah seperti berikut ini :

Pemerintah dan Masyarakat seharusnya mulai membuat dan menerapkan program sederhana tentang pengenalan penggunaan teknologi bisa dimulai dari Lingkungan Keluarga. Program ini bisa diterapkan pada setiap keluarga atau yang lebih dikenal dengan Konsep Keluarga Pintar (*Smart Family*). Konsep keluarga pintar lebih fokus untuk mengenalkan dan menerapkan teknologi untuk kehidupan sehari-hari, misalnya saja mengenalkan penggunaan teknologi pada anak secara bijak dan benar, orang tua seharusnya mampu memperkenalkan penggunaan teknologi pada anak sejak dini, memberitahukan dampak baik dan buruknya, selalu mendampingi anak setiap menggunakan teknologi.

Pemerintah Kota Probolinggo juga harus mampu membangun wadah atau tempat untuk masyarakat kreatif yang ingin memberikan ide atau gagasan mengenai terwujudnya kota yang bernuansa Smart City, khususnya untuk para penggiat atau komunitas Opensource di Kota Probolinggo

Jika merasa bahwa menggunakan teknologi membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membeli sebuah lisensi, maka Aplikasi Opensource menjadi alternatif yang dapat digunakan. Tentunya hal ini juga harus didukung oleh Pemerintah. Diharapkan Pemerintah juga harus mendukung komunitas-komunitas penggerak Opensource serta menggalakan pemakaiannya pada Lembaga-lembaga di Pemerintahan supaya mereka terbiasa dalam penggunaan aplikasi ini, mungkin dengan langkah itu Pemerintah dapat menanamkan kesadaran pada masyarakat bahwa menggunakan sebuah teknologi tidaklah ribet apalagi dicap mahal, bahkan dengan aplikasi Opensource sendiri masyarakat lebih kreatif dalam mengembangkan aplikasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Pemanfaatan Teknologi diharapkan mampu untuk menangani masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat seperti penanganan hama, informasi tentang argobisnis, dengan

bantuan teknologi juga masyarakat dapat mengetahui prakiraan cuaca yang akan dihadapi untuk musim nanti.

Pengembangan UKM lewat teknologi informasi yang tersebar di tingkatan kelurahan-kelurahan untuk dapat mempermudah akses pelaku usaha/UKM untuk mengembangkan pengetahuan dan media promosi lewat teknologi informasi, serta permasalahan yang lainnya yang dapat ditangani dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

Dari semua unsur di atas, unsur masyarakatlah yang sangat berperan penting dalam setiap kebijakan apapun yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Karena masyarakat yang nantinya diharapkan dapat menjaga dan memelihara infrastruktur untuk Smart City, oleh karena itu kesadaran masyarakat akan pentingnya peran sebuah teknologi dalam kehidupan sehari-hari harus ditanamkan sejak dini dimulai dari lingkungan keluarga kita sendiri.

Membangun 100 titik akses koneksi internet berbasis *wireless* melalui @wifi.id di berbagai lokasi di Kota Probolinggo

Membangun fasilitas atau tempat untuk masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi yang ada di Kota Probolinggo, misalnya informasi mengenai tempat-tempat perbelanjaan yang ada di Kota Probolinggo, tempat-tempat wisata, tempat-tempat peninggalan sejarah, museum, tempat rekreasi untuk keluarga, rumah sakit terdekat, informasi tempat-tempat hotel-hotel/penginapan yang ada di Kota Probolinggo, dengan fasilitas ini Kota Probolinggo akan semakin dapat dikenal oleh masyarakat secara global.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Masterplan Smart City ini adalah untuk membuat acuan dan pedoman perencanaan pembangunan dan pengembangan smart city yang berupa inisiatif-inisiatif program beserta peta jalannya bagi Organisasi Perangkat Daerah di Kota Probolinggo.

Penyusunan Master Plan Smart City bertujuan untuk memberikan arahan percepatan strategi, kebijakan dan program pembangunan Kota Probolinggo yang telah tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kota Probolinggo dengan pendekatan perencanaan 6 (enam) pilar smart city yaitu *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society* dan *smart environment*.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 07)
12. Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Smart City di Indonesia.

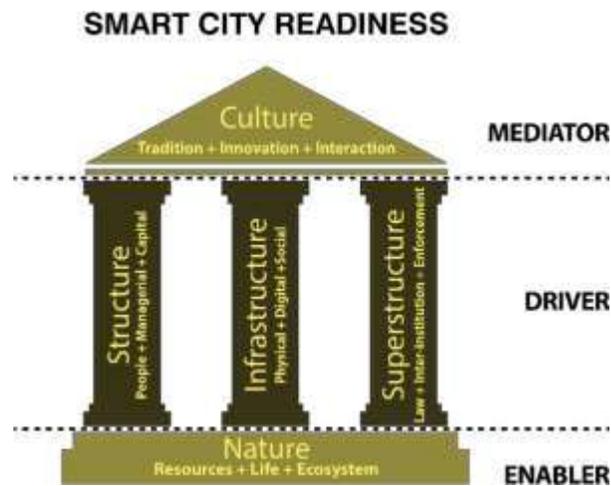
KERANGKA PIKIR SMART CITY

Kerangka pikir (*frameworks*) Smart City (Kota Cerdas) dalam Masterplan Smart City ini disesuaikan dengan kerangka pikir yang telah dipaparkan dalam Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City 2017 – Gerakan Menuju 100 Smart City yang diterbitkan oleh Kementerian Kopmunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2017.

Istilah lain dari Smart City yang digunakan oleh Kota Probolinggo adalah Kota Cerdas. Dalam upayanya membangun Smart City, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika melalui surat Nomor: B-217 KOMINFO/DJAI/AI.01.05/04/2018 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Assessment Gerakan Menuju 100 Smart City menilai Kota Probolinggo telah memiliki Kesiapan Daerah Cerdas atau *Smart City Readiness*.

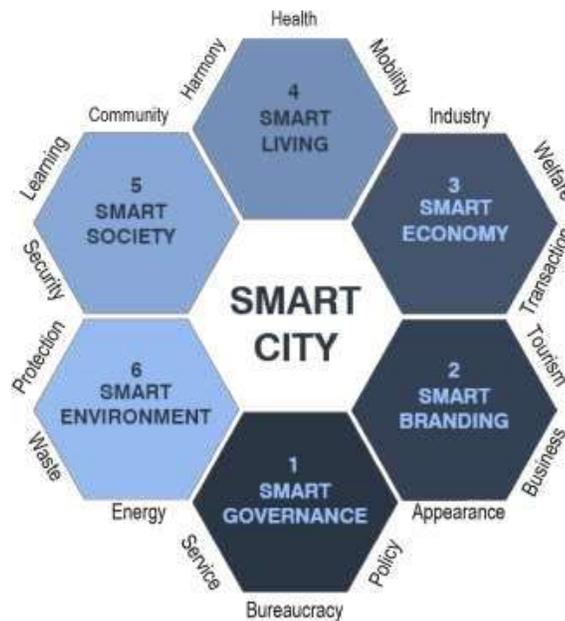
Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah cerdas, yaitu potensi alam (*nature*); struktur daerah (*structure*); infrastruktur (*infrastructure*); suprastruktur (*superstructure*); dan budaya (*culture*). Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian *Smart City Readiness* difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan daerah cerdas tersebut dapat dilihat pada Gambar 1

- **Struktur;** pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (*people*) dan penerima manfaat Smart City, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
- **Infrastruktur;** pembangunan infrastruktur pendukung Smart City yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur sosial untuk kepentingan umum;
- **Suprastruktur;** penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan Smart City.



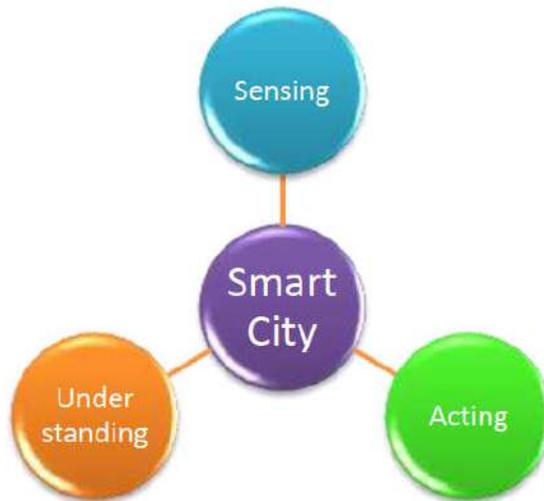
Gambar 1. Elemen Smart City Readiness
 Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN).

Kerangka pikir berikutnya dari sebuah Smart City adalah dimensi-dimensi yang terdapat di dalam Smart City itu sendiri.



Gambar 2. Dimensi Smart City
 Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN).

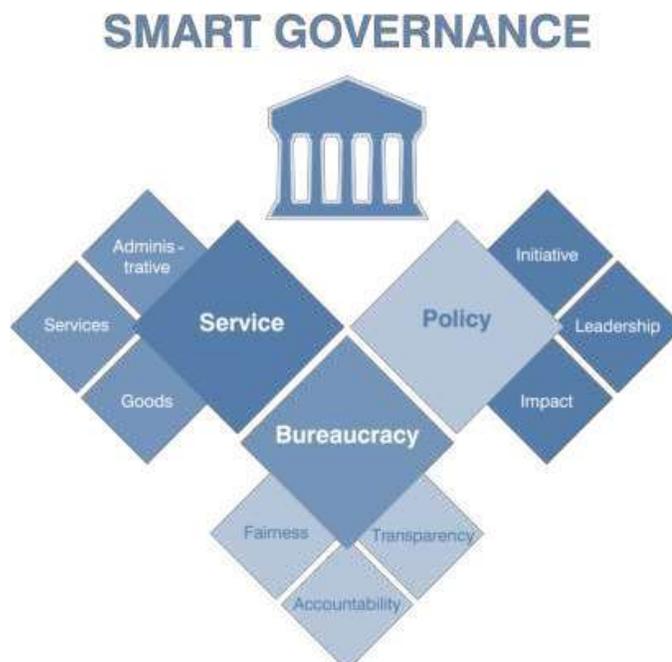
Smart city sebagai bentuk pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi tentunya harus melalui proses pemetaan (*sensing*), memahami (*understanding*) dan eksekusi yang efisien dan efektif (*acting*). Tentunya didampingi oleh mekanisme controlling yang baik, efisien dan efektif. Berikut adalah kerangka keterkaitan antara dimensi, area kerja dan indikator dari tiap dimensi sebagaimana gambar di atas.



I. Smart Governance

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang cerdas, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga Smart Governance di dalam dimensi Smart City merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan

Sasaran dari Smart Governance adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.



Gambar 3. Smart Governance
 Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Tentu saja dalam melakukan perubahan pola-pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan percepatan terhadap perubahan tersebut. Smart Governance harus

dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*). Inisiatif pembangunan Smart Governance dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

a. Pelayanan Publik (*Public Service*)

- Pelayanan administrasi kepada masyarakat: produk ini meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya.
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain.
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain.

b. Manajemen Birokrasi Yang Efisien (*Bureaucracy*)

- Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (*fairness*), bertanggung-jawab (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*)

Misalnya: sistem e-planning, e-budgeting, e-monev dan lain-lain
Pengembangan aplikasi e-gov harus diarahkan menuju integrated & inter-operability e-gov atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan Smart e-Gov. Pelayanan Smart e-Gov ini perlu didukung dengan sebuah “*City Operation Center (COC)*”

c. Efisiensi Kebijakan Publik (*Public Policy*)

- Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan.
- Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

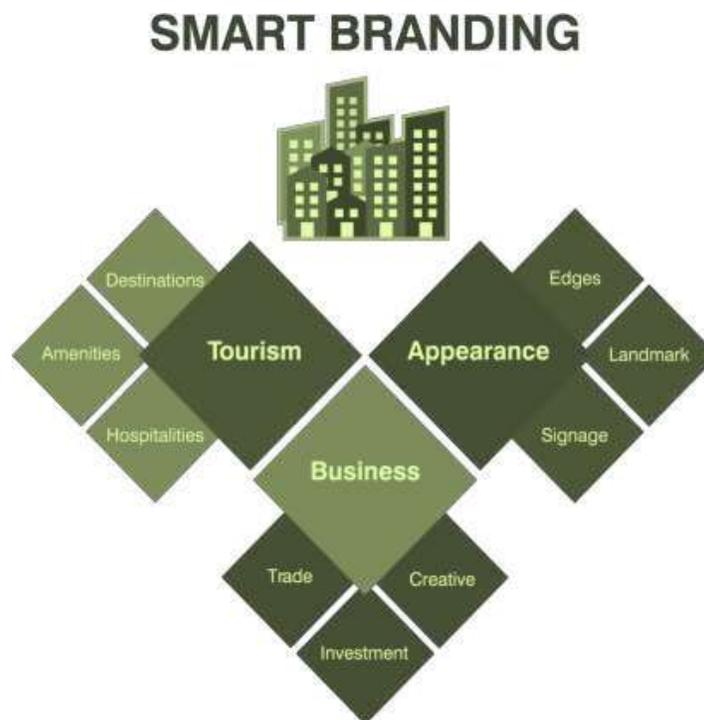
II. Smart Branding

Dimensi kedua dalam Smart City adalah Smart Branding, yaitu branding daerah yang pintar. Yang dimaksud dengan Smart Branding adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.

Smart Branding menjadi salah satu dimensi dalam Smart City karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu

menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya.

Sehingga pada dasarnya konsep branding daerah memiliki kemiripan dengan konsep branding di dalam korporasi, hanya saja perbedaannya adalah apabila di dalam branding korporasi tujuannya adalah meningkatkan brand value perusahaan yang berujung pada meningkatnya income dan profit perusahaan, pada branding daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan brand value daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat



Gambar 4. Smart Branding
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari smart branding adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Inisiatif pembangunan Smart Branding dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

a. Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (*Tourism Branding*)

- Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (*destination*).
- Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan (*amenities*) misalnya jalan, transportasi, hotel/motel/bedding & breakfast (B&B), restoran, dan lain-lain.
- Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung (*hospitality*) termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan tour-guide dan lain-lain.

b. Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (*Business Branding*)

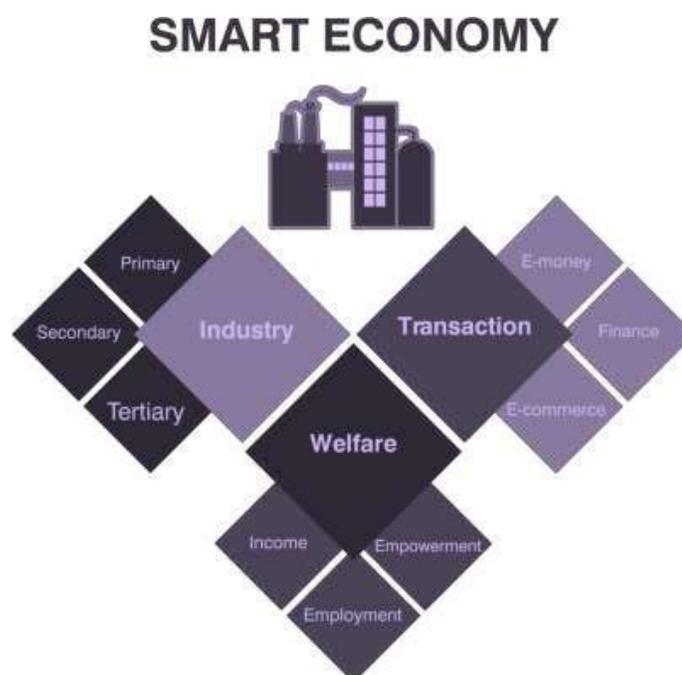
- Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya market place daerah.
- Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya Investment Lounge, Dashboard, dan Portal Investasi Daerah.
- Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah misalnya kuliner, kriya, fashion, digital, dan lain-lain

c. Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (*City Appearance Branding*)

- Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.
- Membangun batas wilayah (*edge*), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (*landmark*), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (*signage*), struktur jalan yang teratur (*path*), dan titik simpul kota (*node*) seperti alun-alun, simpang dan lain-lain.

III. Smart Economy

Dimensi ketiga dalam Smart City adalah smart economy atau tata kelola perekonomian yang pintar. Smart economy dalam dalam Smart City dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini.



Gambar 5. Smart Economy
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari dimensi smart economy di dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam smart economy, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan. Inisiatif pembangunan Smart Economy dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

a. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*Industry*)

- Membangun daya saing industri daerah pada leading sector industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lainlain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, packaging dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah)

b. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (*Welfare*)

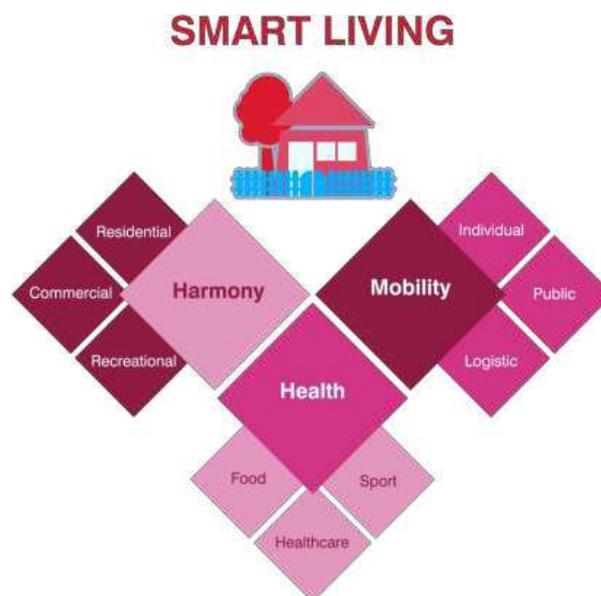
- Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*)
- Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (*employment*)
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (*empowerment*).

c. Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (*Transaction*)

- Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang less cash
- Mewujudkan masyarakat yang bankable dan memiliki akses terhadap permodalan
- Mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industry *e-commerce* dan market place.

IV. Smart Living

Smart living menjadi salah satu dimensi dalam Smart City untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah Smart City.



Gambar 6. Smart Living
 Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari smart living di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Inisiatif pembangunan Smart Living dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

a. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*)

- Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (*residential*), lingkungan pusat kegiatan bisnis (*commercial*) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (*recreational*).

b. Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*)

- Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (*food*), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (*healthcare*), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (*sport*).

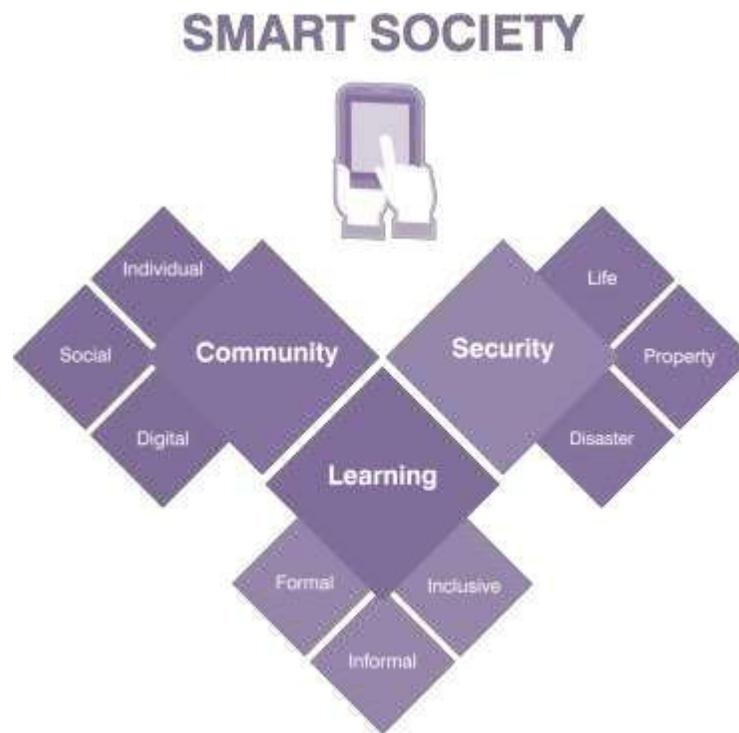
c. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*)

- Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (*mobility*) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.

V. Smart Society

Smart society sebagai bagian dari Smart City merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah Smart City, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosioteknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.

Sasaran dari smart society dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran dari smart society tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam smart society, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*). Inisiatif pembangunan Smart Society dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:



Gambar 7. Smart Society

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

a. Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (*Community*)

- Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Contoh: berbagai program untuk mendukung berbagai kemajuan Smart City misalnya program-program kepemudaan, peningkatan keahlian UKM dan lain-lain.
- Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif. Misalnya edukasi tentang market place dan lain-lain.

b. Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (*Learning*)

- Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluasluasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat yang *disable*.
- Membangun platform edukasi bagi masyarakat misalnya *smart school*, *smart campus*, *smart pesantren*, *smart training program* dan lain-lain.

c. Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*)

- Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau *Internet of Thing (IoT)*.

VI. Smart Environment

Dimensi keenam dalam sebuah Smart City adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari smart environment di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang Smart City yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.



Gambar 8. Smart Environment
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari smart environment adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

a. Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (*Protection*)

- Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada *Internet of Thing (IoT)*.
- Membangun ruang terbuka hijau
- Melakukan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi
- Mengendalikan polusi udara

b. Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*)

- Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (*household*)
- Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (*industrial*)
- Mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (*public*)

- Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggungjawab.

c. Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab (*Energy*)

- Pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggung jawab
- Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) dan berkelanjutan (*sustainable*) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan lain-lain.



impressive
PROBOLINGGO
C I T Y

VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi kota berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 yaitu tahap pementapan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Kota Probolinggo. Adapun visi tersebut berbunyi “**Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan**”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Maju : Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal, ditopang oleh ketahanan ekonomi dan sosial. Dengan demikian kondisi masyarakat yang maju akan bermakna kondisi masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitas yang didukung dengan penerapan nilai-nilai dan norma agama serta pengamalan nilai-nilai 4 (empat) pilar kebangsaan. Kondisi masyarakat yang maju dengan rumusan demikian itu sangat diperlukan untuk mampu mendukung upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo sebagaimana arah visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Sejahtera : Adalah sikap dan kondisi masyarakat kota Probolinggo yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman, tenteram dan makmur dalam menjalani kehidupan. Masyarakat kota Probolinggo yang terwujud kesejahteraannya karena keberhasilan upaya pementapan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Sikap dan kondisi masyarakat demikian tadi selaras dengan tuntutan Kota Probolinggo yang terus berusaha untuk mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraannya. Sejahtera menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Probolinggo yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.

Berkeadilan : Adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Kota Probolinggo. Pembangunan berkeadilan adalah pembangunan untuk semua, dengan orientasi pada pemerataan distribusi hasil pembangunan, yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Berkeadilan berarti tercipta kondisi yang adil di segala bidang kehidupan yang pasti didambakan oleh seluruh masyarakat warga Kota Probolinggo. Berkeadilan berarti dapat diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajibannya, berarti juga

terwujudnya kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam bidang hukum dan pemerintahan. Pembangunan yang berkeadilan juga bermakna pembangunan yang tidak hanya dinikmati hasilnya pada masa sekarang saja tetapi juga dapat terus terjaga keberlanjutannya sehingga dapat bermanfaat pula bagi masyarakat di masa mendatang. Pembangunan yang demikian mensyaratkan adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana arah visi Kepala Daerah terpilih.

Kota Jasa Berwawasan Lingkungan : Adalah konsep untuk mewujudkan Probolinggo sebagai kota yang akselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang dan jasa dalam skala regional maupun internasional serta memadukan wilayah pengembangan kota dalam suatu sistem tata ruang yang terintegrasi didukung infrastruktur, sistem transportasi dan sistem teknologi Informasi yang memadai. Kota jasa (sebagaimana arah dari visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih) mengandung arti bahwa Kota Probolinggo mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi sesuai dengan karakteristik kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan (dengan tidak meninggalkan potensi lainnya) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Dalam konteks ini secara khusus yang menjadi arah visi adalah kota jasa yang berwawasan lingkungan, artinya aspek kelestarian lingkungan hidup menjadi perhatian utama dan sekaligus pengendali dalam operasionalisasi kegiatan perdagangan, jasa dan investasi.

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 tersebut, maka dalam RPJMD ini ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dielaborasi sebagai berikut :

MISI I : Membangun Masyarakat Kota Probolinggo Yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing. Misi ini adalah untuk menciptakan sosok masyarakat Kota Probolinggo tahun 2019 yang berkualitas dan berdaya saing, yakni masyarakat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit membangun dan siap untuk berkompetisi dan memiliki kesiapan untuk menghadapi era globalisasi bidang politik-keamanan, ekonomi dan sosial budaya (*Asean Community*).

MISI II : Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kompetitif, Kokoh dan Berkeadilan. Misi ini adalah untuk menciptakan sosok perekonomian Kota Probolinggo tahun 2019 yang kokoh dan berkeadilan, yakni sosok perekonomian kota yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya, kokoh dan kuat dalam menghadapi berbagai turbulensi perekonomian namun tetap berorientasi pada perekonomian yang berkeadilan.

MISI III : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Akuntabilitas, Profesionalitas dan Perluasan Partisipasi Publik. Misi ini adalah untuk menciptakan sosok Pemerintahan Kota Probolinggo Tahun 2019, yakni sosok pemerintahan yang berkinerja tinggi,

profesional, amanah dan bertanggungjawab dalam bingkai tatakelola pemerintahan yang baik guna melaksanakan fungsi pelayanan, pengaturan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, amanah dan demokratis.

MISI IV : Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan. Misi ini untuk menciptakan sosok Kota Probolinggo Tahun 2019 yang telah terpenuhi infrastruktur kota yang mampu dan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

MISI V : Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal. Misi ini untuk menciptakan sosok kehidupan sosial kemasyarakatan Kota Probolinggo Tahun 2019 yang harmonis melalui peningkatan peran generasi muda, pembinaan olah raga, pengembangan seni dan budaya serta pengembangan rasa kesetiakawanan sosial terutama bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kota Probolinggo pada tahun 2019 melalui pelaksanaan 5 (lima) Misi sebagaimana telah ditetapkan di atas maka diperlukan adanya kerangka yang jelas dalam bentuk penjabaran setiap misi pembangunan kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut. Dengan demikian maka pelaksanaan misi akan dapat lebih terukur dan dapat dikendalikan pelaksanaannya. Selanjutnya dengan penjabaran setiap misi ke dalam tujuan dan sasaran juga sekaligus akan dapat diberikan gambaran tentang keterkaitan elemen-elemen perencanaan, khususnya keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Pola keterkaitan antar elemen perencanaan tersebut akan memperkuat penerapan sistem lacak performansi, yang sangat diperlukan dalam mengoperasionalkan manajemen berbasis kinerja. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2014-2019

Visi : Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan

Misi	Tujuan	Sasaran
<p>Misi Pertama : Membangun masyarakat Kota Probolinggo yang berkualitas dan berdayasaing.</p>	<p>Mewujudkan sumber daya manusia masyarakat Kota Probolinggo :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Mampu berkarya produktif dan kompetitif 3. Memiliki ketahanan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses layanan yang terjangkau dan merata. 3. Meningkatnya kemandirian masyarakat melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan hak dasar manusia 4. Semakin kokohnya ketahanan keluarga sebagai basis terwujudnya ketahanan sosial

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi Kedua : Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kokoh dan Berkeadilan	1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah kota yang sangat berarti dan diperlukan bagi pembangunan perekonomian berkualitas	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi guna memperkuat pembangunan ekonomi kota. 2. Meningkatnya kualitas dan kondusifitas iklim usaha dan investasi.
	2. Mengembangkan sektor riil pada Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi untuk semua sektor usaha	1. Meningkatnya kemandirian Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kooperasi. 2. Meningkatnya daya saing Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
	3. Mengembangkan usaha penanggulangan kemiskinan dan pengangguran secara berkeadilan (<i>pro poor dan pro job</i>)	1. Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin, miskin dan hampir miskin. 2. Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka menurunkan angka pengangguran terbuka.
Misi Ketiga : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Akuntabilitas, Profesionalitas dan Perluasan Patisipasi Publik	1. Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi pelayanan, pengaturan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi 2. Terwujudnya modernisasi penyelenggaraan pemerintahan kota didukung aparatur yang profesional dan amanah. 3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
	2. Meningkatkan bobot keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kota	1. Meningkatnya kualitas dan intensitas informasi program-program pembangunan bagi masyarakat. 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kota (Probolinggo Membara).
Misi Keempat : Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan	1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kota guna menunjang upaya peningkatan produktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur strategis dan ramah lingkungan bagi optimalisasi aktivitas perekonomian dan pelayanan dasar masyarakat kota. 2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat kota.
	2. Meningkatkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan kota.	1. Terwujudnya lingkungan permukiman kota yang semakin bersih, sehat, tertata, rapi dan indah. 2. Terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan lahan perkotaan guna kenyamanan kehidupan kota.

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi Kelima : Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal	1. Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam bingkai kearifan lokal.	1. Terlaksanakannya pemberian pelayanan perlindungan dan santunan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial. 2. Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.
	2. Mengembangkan tata nilai seni dan budaya yang berlandaskan ajaran agama dan tata kehidupan masyarakat.	1. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap perkembangan seni dan budaya daerah. 2. Meningkatnya gelarkarya dan kreativitas seni budaya daerah yang representatif.
	3. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta mengembangkan prestasi olah raga.	1. Meningkatnya aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri. 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas olah ragawan berprestasi secara berkelanjutan.

Sumber: Bappeda Litbang, 2018

Sasaran pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 sebagaimana diuraikan diatas adalah terkait erat dengan rencana operasionalisasi 10 (sepuluh) Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, yakni :

1. Program Pembangunan Prasarana Lingkungan Permukiman.
2. Program Probolinggo Membara (Membangun Bersama Rakyat).
3. Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
4. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Pembangunan Keluarga).
5. Program Pemantapan Ketepatan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan.
6. Program Padat Karya Untuk Penanggulangan Pengangguran.
7. Program Peningkatan Peran kelembagaan (Revitalisasi) POSYANDU.
8. Program Pembangunan Kota Jasa dan Investasi.
9. Program Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan.
10. Program Pemaantapan Pelaksanan 4 Pilar Kebangsaan.

RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Berdasarkan kondisi saat ini di Pemerintah Kota Probolinggo, maka perlu dibuat perencanaan strategis pengembangan teknologi informasi di Pemerintah Kota Probolinggo. Perencanaan strategis pengembangan teknologi informasi pada Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari visi, misi, dan *values*. Visi teknologi informasi dari Kota Probolinggo adalah

“Terwujudnya komunikasi dan informasi yang handal berbasis teknologi informasi menuju probolinggo kota berwawasan lingkungan” dan Misi teknologi informasi Kota Probolinggo adalah:

- a) Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan kearsipan serta peningkatan hubungan interaktif melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- b) Meningkatnya jumlah penyebaran informasi publik ke masyarakat Kota Probolinggo;
- c) Terwujudnya komunikasi yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan Kota Probolinggo maju dan sejahtera;
- d) Terwujudnya sumber daya telematika yang handal dan berdaya saing serta ramah lingkungan.

Sedangkan *values* di dalam Strategi Pengembangan teknologi informasi ini, yaitu:

- **Efektif.** Rencana Strategis Pengembangan teknologi informasi akan mendukung langsung pencapaian tujuan Pemerintah Kota Probolinggo serta mendukung langkah-langkah strategis dan program Pemerintah Kota Probolinggo.
- **Integritas.** Setiap bagian akan konsisten dengan bagian lainnya dan berada dalam batasan yang telah ditentukan seperti misalnya asumsi dasar.
- **Akuntabilitas.** Pengembangan dan pengoperasian pengembangan teknologi informasi akan mengikuti suatu standar yang dapat dipertanggungjawabkan.
- **Aksesabilitas.** *Value* ini berkaitan dengan *availability* dan *useability* dari Pengembangan teknologi informasi. Pengembangan teknologi informasi akan memiliki *high availability* dan bersifat *user-friendly* sehingga mudah diakses oleh orang yang berhak.
- **Privacy.** *Value* ini berkaitan dengan aspek sekuriti dan prinsip demokratis terutama prinsip rahasia.
- **Kooperatif.** Rencana Induk pengembangan teknologi informasi dibuat dengan bekerja sama dengan dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait.
- **Appropriate.** Pengembangan teknologi informasi akan mengikuti perkembangan teknologi, dapat memenuhi kebutuhan akan informasi yang lengkap, akurat, relevan tepat waktu, dan tersaji dengan baik.
- **Rightsize.** Pengembangan teknologi informasi akan memiliki skala yang tepat, namun harus fleksibel terhadap perubahan.
- **Inovatif.** Termasuk di dalam rencana strategis pengembangan teknologi informasi adalah pemanfaatan sumber daya yang ada secara inovatif.
- **Empowerment.** Pengembangan teknologi informasi akan memberdayakan berbagai macam pihak melalui penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

PRINSIP SMART CITY DI KOTA PROBOLINGGO

Prinsip-prinsip smart city di Kota Probolinggo sudah mulai ada sejak era e-government. Diantaranya adalah prinsip-prinsip mengurangi paper works (kertas), prinsip untuk mencoba mengintegrasikan semua aplikasi, dan prinsip untuk memudahkan warga menyampaikan aspirasi.

Implementasi TIK di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo secara umum sudah cukup baik terbukti dengan telah diraihnya penghargaan ICT Pura pada tahun 2012. Program ICT Pura merupakan program dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Kementerian Komunikasi & Informatika dengan melibatkan Dewan Tehnologi Informatika dan Komunikasi Nasional (Detiknas), Federasi teknologi Informasi Indonesia (FTII), dan Asosiasi Perguruan tinggi dan Informatika se-Indonesia (APTIKOM). Tujuannya untuk memetakan, mengukur, dan mengapresiasi kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Indonesia terkait dengan kesiapan masing-masing daerah untuk mewujudkan kota digital.

Sebagai wujud keseriusan mengimplementasikan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, pada tahun 2017, Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh penghargaan dan apresiasi dari Majalah I-tech. Wali Kota Probolinggo memperoleh penghargaan TOP Leader on IT Leadership 2017 yang diserahkan pada acara TOP IT dan TOP TELCO Award 2017. Selain itu, Pemerintah Kota Probolinggo juga menerima penghargaan TOP IT Implementation on City Government 2017.

Menjadi tidak mudah karena smart city di satu sisi dapat menjelma menjadi rimba belantara. Jika Kota Probolinggo tidak punya pegangan, tidak punya TOR (*Term of reference*), bisa tersesat. Dalam setiap perumusan kebutuhan, harus selalu diterapkan prinsip yang pertama adalah “mana/apa dulu”, yang kedua “memakai apa”, dan yang ketiga terkait dengan “alokasi anggaran,” Mengingat semua hal tersebut memerlukan anggaran, sementara kondisi APBD Kota Probolinggo belum bisa untuk mengkondisikan (smart city) secara maksimal. Kota Probolinggo harus giat untuk keluar mencari dukungan, baik dari program-program kementerian, CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) pihak swasta, maupun dari partisipasi masyarakat lainnya.

MENGUPAS PRIORITAS

Penetapan prioritas menjadi salah satu kunci sukses pembangunan smart city. Salah satu metode cerdas dan kritis dalam penetapan prioritas adalah melalui proses *brainstorming* dengan banyak pihak, seperti perguruan tinggi, sektor privat, kelompok masyarakat peduli, juga lembaga pemerintahan terkait.

Point pertama, “*smart city is not just cctv or free internet (free connection)*”, karena banyak yang menafsirkan seperti itu, melainkan jauh lebih kompleks dan dinamis dari hanya sekedar cctv atau koneksi gratis

Point kedua, smart city harus sesuai dengan kebutuhan Kota Probolinggo yang ingin dikedepankan dengan baik dikaitkan dengan karakteristik masing-masing daerah, dikaitkan juga dengan program prioritas Kota Probolinggo.

Point ketiga, smart city fokus kepada aspek yang dapat menjadi pioneer yang mendorong sektor-sektor lain untuk bisa bergerak dalam bidang reformasi birokrasi.

TANTANGAN UNTUK KOTA PROBOLINGGO MENJADI KOTA CERDAS

Tantangan yang utama adalah dalam menyusun suatu sistem (sumber daya manusia) yang kompatibel yang bisa menyesuaikan. Misalkan jika Kepala Diskominfo Kota Probolinggo pindah, sudah ada sistemnya dan kadernya, atau bagaimana kita memposisikan diri dalam hubungan dengan pihak ketiga, dengan konsultan, komunitas dan kampus yang terus menyambung (terhubung). Jika tidak, dikhawatirkan akan ada kemunduran. Jadi tantangan utama adalah di bidang SDM (sumber daya manusia), tentang bagaimana Kota Probolinggo dengan kondisi seperti ini (keterbatasan) tetap bisa konsisten berjalan (membangun smart city).

Tantangan kedua adalah anggaran. Dari sisi pemerintah, dukungan legislatif amat penting, dari sisi warga pun sama, smart city need smart people (kota cerdas membutuhkan warga yang cerdas) yaitu orang-orang yang bisa menggunakan layanan ini dengan baik. Tingkat melek teknologi warga kota Probolinggo cukup baik, literasi internet pun cukup baik. Tetapi, kebiasaan mereka untuk menggunakan teknologi untuk layanan publik masih harus terus dilakukan proses edukasi.

Terkadang, banyak informasi terkini (hal-hal yang dimiliki pemerintah) sangat sulit untuk sampai kepada mereka, banyak yang belum warga ketahui, walaupun masyarakat mengetahui, baru mereka ketahui belakangan. Seperti layanan pengaduan pelayanan publik (LAPOR! SP4N). Aplikasi yang diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah selaku penyelenggara layanan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Harapan untuk mendekatkan masyarakat kepada pemerintah masih belum terjadi. Masyarakat masih relatif enggan untuk memanfaatkan aplikasi pelaporan ini, baik karena keengganan untuk belajar sesuatu yang baru maupun adanya kekhawatiran adanya tekanan balik dari pihak terlapor. Pemanfaatan portal layanan pengaduan ini masih relatif rendah. Di samping kendala pemanfaatan TIK di masyarakat, layanan pengaduan yang diselenggarakan oleh OPD juga belum diperhatikan dan dilaksanakan dengan maksimal. Terdapat beberapa OPD yang masih belum memberikan respon secara cepat dan tepat terkait adanya pengaduan yang berkenaan dengan kinerja OPD masing masing. Ini tantangan bagi Kota Probolinggo untuk terus berinovasi.

Semangat tersebut dituangkan dalam strategi khusus pencapaian smart city dalam 4 (empat) paradigma :

1. Gagasan, konsep atau ide. Itulah relevansi dari master plan. *Driven by idea* (diarahkan oleh ide-ide) yang jelas.

2. Payung hukum. Contohnya untuk jaringan infrastruktur, kita membutuhkan perwali yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan transportasi jaringan. Contohnya microcell.
3. Sumber daya manusia (SDM). SDM yang terus ditingkatkan pemahaman teknisnya dan pengembangan SDM TIK yang kompeten.
4. Smart city pada dasarnya meminimalkan intervensi manusia, mengedepankan peran teknologi. Dengan asumsi intervensi manusia itu tidak bisa membebaskan faktor-faktor kepentingan. Ketika semua dikembalikan ke teknologi, jadi lebih transparan.
5. Penyediaan infrastruktur TIK yang baik, handal dan memenuhi kebutuhan di masa depan.
6. Pembangunan dan pengembangan aplikasi layanan yang berorientasi kepada manfaat dan memberi dampak positif yang luas.

Dari sejarah terbentuknya Kota Probolinggo, kondisi historis dan psikologis Kota Probolinggo, maka disusunlah visi smart city Kota Probolinggo yakni: **Kota Jasa yang Cerdas, Efisien, Transparan, Partisipatif, Impresif dan Bertanggung Jawab.**



impressive
PROBOLINGGO
C I T Y

GAP ANALYSIS MENUJU STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

Identifikasi Kekuatan

Kekuatan Sektor Pemerintah

Kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam upaya perwujudan Probolinggo Smart City dapat dipetakan dalam beberapa bidang sebagai berikut :

1. Kebijakan :

- 1) Visi dan misi yang dijabarkan dengan jelas dan terdokumentasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah direvisi terakhir pada tahun 2017.
- 2) Strategi penerapan kebijakan e-Government sebagai modal dasar pencapaian Probolinggo Smart City yang telah dituangkan dalam buku Perencanaan Induk Pengembangan e-Government Kota Probolinggo Tahun 2014-2019.
- 3) Kepala Daerah memiliki e-Leadership yang kuat yang mampu mendorong aparatur dan unit kerja untuk melakukan inovasi pelayanan publik.

2. Kelembagaan :

- 1) Dikembangkannya unit kerja Kantor Kominfo menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A.
- 2) Adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) serta uraian jabatan aparatur.
- 3) Telah terbentuknya Dewan Smart City Kota Probolinggo yang diketuai oleh Walikota dan Tim Pelaksana Smart City Kota Probolinggo yang diketuai oleh Kepala Diskominfo.

3. Infrastruktur (sarana dan prasarana) teknologi informasi dan komunikasi (TIK) :

- 1) Sudah tersedia jaringan 3G/4G di seluruh Kota Probolinggo dengan jangkauan akses sangat bagus.
- 2) Seluruh Perangkat Daerah di Kota Probolinggo sudah terhubung menggunakan 6 (enam) BTS backbone jaringan wireless dengan akses internet terpusat di Diskominfo yang didistribusikan ke 68 titik dimana 39 titik untuk OPD dan 29 titik untuk Kelurahan.
- 3) Kapasitas Bandwith jaringan akses di tahun 2017 sebesar 400 MBPS Up Too dan 100 MBPS Dedicated.
- 4) Data center dan Data Recovery Center (DRC) masih dalam tahap pengembangan. Sudah terdapat ruang server dengan kapasitas 8 server

- 5) Hot spot untuk publik di beberapa fasilitas publik yang menjadi aset Pemerintah Kota Probolinggo di tahun 2017 sebanyak 5 titik.
- 6) CCTV yang terpasang sebanyak 28 unit (8 unit CCTV untuk kepentingan Area Traffic Control System /ATCS yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, dan 20 unit terpasang di fasilitas umum terintegrasi dengan Command Center).
- 7) Sistem pendukung supply listrik menggunakan catu daya tambahan berbasis UPS (Uninterruptable Power Supply).

4. Aplikasi :

Layanan publik yang telah menggunakan Aplikasi TIK berbasis web (internet) secara online dan aktif ada dalam fungsi pelayanan :

- 1) Pelayanan publik :
 - a. SIAP, aplikasi untuk mengelola data pendidikan
 - b. Simpustronik, Sideka-PRO, Resepku-RSUD dan Siskia, aplikasi untuk mengelola data kesehatan
 - c. SITR dan GIS, aplikasi untuk mengelola pekerjaan umum dan tata ruang
 - d. SIAK dan BENROLL, aplikasi untuk mengelola administrasi kependudukan
 - e. LAPOR, e-Calalogue, Siakel, Sipaten, Cellplan, Siskaperbapo, Simaya, Sirup, Sippid dan SAPA, aplikasi untuk mengelola komunikasi dan informatika
 - f. SIM Pengujian, aplikasi untuk mengelola data uji kendaraan bermotor
 - g. Siti Kencana, aplikasi untuk mengelola data keluarga berencana
 - h. Sipadu ONLINE, aplikasi perizinan
 - i. SIMDA BMD dan SIP BMD, aplikasi pengelolaan aset
 - j. SIPO, aplikasi mengelola data perindustrian dan perdagangan
 - k. SATUDATA, aplikasi untuk mengelola data kelautan
- 2) Administrasi dan manajemen umum :
 - a. Sijinggo, aplikasi untuk mengelola pemerintahan kecamatan dan kelurahan
 - b. Aplikasi Manajemen Arsip (AMA), sektor kearsipan
- 3) Administrasi legislasi :
- 4) Manajemen pembangunan :
 - a. SMEP dan SIMRAL Perencanaan (manajemen informasi Musrenbang)
 - b. SIPD
- 5) Manajemen keuangan :
 - a. SIMRAL (sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban yang mendukung SAKIP)
 - b. Aplikasi Gaji yang terintegrasi dengan sistem gaji TASPEN
- 6) Manajemen kepegawaian :
 - a. SIMPEG (sistem informasi manajemen kepegawaian)

Kekuatan Sektor Privat

1. Di sektor privat, berdasarkan RTRW Kota Probolinggo Tahun 2009-2028, rencana sistem dan fungsi perwilayahan Kota Probolinggo diarahkan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing sebagai berikut :
 - a. SPPK A berpusat di Kecamatan Mayangan diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, perumahan, fasilitas umum, industri, pergudangan, parkir truk, kawasan lindung mangrove, pengembangan pelabuhan, permukiman nelayan, pengembangan pelabuhan perikanan pantai (PPP), jalur hijau, pariwisata dan sarana olahraga ;
 - b. PPK B dengan pusat di Kecamatan Kanigaran diarahkan mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, jalur hijau dan kawasan hankam ;
 - c. SPPK C dengan pusat di Kecamatan Kademangan diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas pendidikan, pertanian, industri pergudangan, perumahan, fasilitas umum, jalur hijau dan terminal regional;
 - d. SPPK D dengan pusat di Kecamatan Wonoasih diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, perumahan, fasilitas pendidikan, jalur hijau, pertanian dan sarana olahraga ; dan
 - e. SPPK E dengan pusat di Kecamatan Kedopok diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertanian, agro industri, industri kecil, fasilitas pendidikan, fasilitas umum, perumahan, jalur hijau.
2. Struktur ekonomi privat terbesar di Kota Probolinggo dibangun dari kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori industri pengolahan yang secara teoritis dan praktis sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat Kota Probolinggo sebagai kota urban.
3. Berdasarkan data Kota Probolinggo Dalam Angka tahun 2018, di Kota Probolinggo terdapat 41 perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Industri makanan dan minuman sebanyak 13 perusahaan
 - b. Industri tekstil sebanyak 5 perusahaan
 - c. Industri pakaian jadi sebanyak 11 perusahaan
 - d. Industri kulit, barang asli dari kulit dan alas kaki serta industri kayu, barang dari kayu dan gabus (bukan furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebanyak 4 perusahaan
 - e. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebanyak 2 perusahaan
 - f. Industri barang galian bukan logam sebanyak 4 perusahaan
 - g. Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer, industri alat angkutan lainnya serta furnitur sebanyak 2 perusahaan.
4. Berdasarkan data Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2018, nilai investasi selama tahun 2015 di Kota Probolinggo sebanyak 108,32 milyar rupiah dengan pendapatan selama tahun 2015 sebanyak 3,31 trilyun rupiah.

Terbatasnya pembiayaan pembangunan dari APBD membuat banyak program/kegiatan yang tidak terakomodir sehingga Pemerintah Kota Probolinggo sangat perlu mencari sumber pembiayaan alternatif dimana salah satunya adalah dengan bersinergi dengan program CSR. Berikut data program CSR perusahaan yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2017 di Kota Probolinggo.

Tabel 2. Rekapitulasi Kegiatan CSR Perusahaan di Kota Probolinggo Tahun 2017

No	Kegiatan	Dana (Rp)	Sumber CSR	Waktu Pelaksanaan
1.	Bidang Ekonomi Sosial Budaya (bantuan sembako, beras, uang parcel lebaran, dll) Bidang Kesehatan (Pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan susu,) Bidang Pendidikan (Bantuan buku, SPP, ATK, seragam sekolah)	607.786.300	PT. KTI	Januari s/d Desember
2.	Bantuan Sembako Gratis warga Miskin 180 paket @5kg	9.900.000	PT. Sumbertaman Keramik Industri	9 Juni 2017
3.	Sarana Pendidikan Sarana Ibadah Sarana Kesehatan MCK) Pasar Murah (Sembako)	582.041.000	PT. Pelindo III	
4.	Sponsorship HUT RI ke 72, Rotator Mobil Dinas PATWAL, Pembagian daging kurban 9ekor sapi & 2 ekor kambing, HUT POLANTAS 62, Bantuan renovasi masjid Zulfikar)	137.500.000	PT. Pamolite Adhesive Industri	Pebruari s/d Nopember
5.	Ambulance untuk RSUD Dr.Moh.Saleh, CSR kepesertaan BPJS TK untuk 129 petani, Pembukaan rekening SimpananPelajar ke 100 siswa SMKN 1 Probolinggo, Acara Hari Ibu PT. Eratex Djaja, Bantuan Musholla Alikhlas SMKN 1	207.917.000	BNI 46	Januari s/d Desember
6.	Program Bina Lingkungan (partisipasi keagamaan, Probolinggo Kota Ramah Ikan) Program langsung Masyarakat (Bantuan sembako, Bakti Sosial, Partisipasi rehab masjid, Paartisipasi HUT RI, dll)	40.030.000	PT. Amak Firdaus Utomo	Januari s/d Desember
7.	Bea Siswa 10 siswa SMP Pelita Probolinggo, Ramadhan berbagi berkah bersama Giant, Qurban, dll	26.800.000	PT. Hero Supermarket Tbk. (Giant Ekstra Probolinggo)	Januari s/d September
8.	Bantuan (Sembako, Keluarga meninggal, Operasi Karyawan,	9.450.000	PT. Rimba Sempana Indonesia	Januari s/d Nopember
9.	Donor Darah, Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan, Program Kebersihan sungai umbul, Kemitraan koperasi simpan pinjam dan pertokoan, Santunan yatim piatu, Khitanan massal, Pembagian hewan kurban, Jalan sehat hari ibu	250.000.000	PT. ERATEX DJAJA Tbk	Pebruari s/d Desember
10.	Savety riding, Inspeksi motor, Donor darah, Istighosah, Inspeksi bangunan gedung terkait program 5R, "Pakem" Pelatihan guru SD, MI, SMP & Dinas Kota Probolinggo	38,375.000	FIF GROUP	Maret s/d Juli
11.	Sponsorship, Donatur Santunan Anak Yatim, Gowes Community, Sponsorship Acara Pengajian Semipro, Acara Idul Adha, dll.	51.054.425	Bromo View Hotel dan Restaurant	Maret s/d Nopember
12.	Bantuan / Santunan Anak Yatim & Kaum Dhuafa, Pemb.Sembako (SPKP Kec.Wonoasih,	71.512.000	PDAM Kota Probolinggo	Januari s/d Desember

No	Kegiatan	Dana (Rp)	Sumber CSR	Waktu Pelaksanaan
	Kec. Kanigaran, Kedopok, Kademangan), Sponsorship,			
13.	Program Bina Lingkungan (Lomba Kelurahan Jati, Kaos untuk PMI, Pot bunga di Jl. PB. Sudirman), Pembagian Sembako	32.750.000	Bank Sentral Arta Jaya	Mei, Juni, Agustus
14.	Sosialisasi program gemar makan ikan untuk 78 anak (200 Kg ikan) Gerakan Makan Ikan Sumber Protein Hewani (Gema Insani) 150 paket Frozen Food	11.750.000	Himpunan Nelayan Pengusaha Perikanan (HNPP)	Pebruari dan April
15.	Bantuan Rehabilitasi MCK masyarakat kurang mampu 50 KK @ Rp7.000.000,-, Bantuan Modal Usaha kepada 18 UKM @ Rp 15.000,-	620.000.000	PT. Jasa marga	Juni s/d Desember
16.	Bantuan social Masyarakat (Produk dan uang), Bantuan sosial untuk 3 panti asuhan dan panti wreda (sembako)	21.645.308	PT. Sinar Mas Sejahtera (SSS)	April s/d Nopember
17.	Bantuan Langsung Masyarakat (Beras), Sumbangan 2 Masjid, Mengajak rekreasi anak yatim ke Jatim Park 3 unit bus (78 orang), Bantuan 50 ban bekas untuk tanggul Lisa Tembak Batalyon Zipur 10/2 Kostrat, Bantuan ban baru untuk mobil patrol	33.700.000	PT. Akas Mila Sejahtera	Januari s/d Desember
18.	Pembagian sembako, Santunan anak yatim, Partisipasi dalam HUT, Pemberian 1 unit computer, Penanaman Sengon, dll	178.422.900	PT. Bromo Falcata Indonesia (BFI)	Januari s/d Nopember
19.	Donasi (HUT RI ke 72, Panti Asuhan Asih Asuh, Ponpes, dll), Doorprize keg Semarak Prob Ramah Ikan 2017	5.750.000	PT. Southern Marine Products	Januari s/d Desember
20.	Bantuan (1 Unit mobil ambulan, 1 unit Bedah Rumah Veteran, Hadiah Hiburan HUT Kemenag Kota Prob., Kacamata untuk lansia (30 buah) Sunatan Massal HUT BRI ke 122, , Donor Darah HUT BRI ke 122	339.550.000	BRI	Oktober s/d Desember
21.	Program bina lingkungan dan bina social (CSR air mancur Gladak Serang), Bantuan 700 paket sembako gratis langsung masyarakat	380.697.000	Bank Jatim	Januari s/d Desember
22.	Bantuan (HUT, Dana untuk Nelayan Mayangan), Santunan anak yatim	3.950.000	PT. Sukses Lautan Indonesia (Sulindo)	Januari s/d Desember
23.	Renovasi sekolah (1 sekolah), Pembagian Beasiswa 110 siswa, Operasi Bibir Sumbing (3 org), Jalan sehat hari pahlawan	146.234.050	PT. Indomarco Prismatama	Januari s/d Desember
24.	Bantuan dana kematian dan kegiatan RW, Penayangan liputan kegiatan warga dan penayangan iklan social	36.000.000	PT. Probolinggo Visual Intermedia (ProTV)	Januari s/d Desember
25.	Bantuan sembako masyarakat sekitar, Santunan anak yatim	1.500.000	PT. Indonesia Abadi/ AKAS N 1	Juni
26.	Pembagian sembako (hari peduli sampah dan 4 bulan sekali), Pembagian daging kurban	17.500.000	PT. Pos Indonesia	Januari s/d Desember
27.	Sponsor(seragam badminton Pemkot, Pesta seni SMPN 1, Materdei, NapakTilas KNPI, HUT RI, dll), PMI, Event Electidoo, Tiket Hari Biasa, Tiket Sabtu dan Minggu, Kamis Gowes gratis	546.737.565	CV. Beejay Bakau Resort	Januari s/d Desember
28.	Sumbangan Dana (buat Gapura, Pensi SMA 4, HUT Satpam Kota, Kompetisi Futsal)	600.000	Lava-lava Hostel dan Resto	Januari s/d Desember
29.	Door Price, Hari Raya Qurban, dll	10.000.000	Keramik Paolo	
30.	Program buka bersama dan pemberian santunan anak yatim dan dhuafa	5.000.000	PT. Bank Syariah Mandiri KC. Probolinggo	
	TOTAL	4.423.152.548		

Sumber : BappedaLitbang Kota Probolinggo Tahun 2018

Kekuatan Sektor Publik/masyarakat/komunitas

Kekuatan sektor publik dibangun dari potensi masyarakat pada bidang :

1. Keberagaman Agama

Berdasarkan data BPS (2018), pada tahun 2017 sebanyak 228.346 jiwa beragama Islam, 3.319 jiwa beragama Protestan, 2.627 jiwa beragama Katolik, 112 jiwa beragama Hindu, 1.026 jiwa beragama Budha sedangkan 10 jiwa sisanya beragama lain.

2. Politik

Berdasarkan dokumen Kota Probolinggo Dalam Angka 2018, jumlah pemilih terdaftar untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 164.606 orang dengan perolehan suara sah sebanyak 133.533 suara (81,12%).

3. Ekonomi

a. Melalui penghitungan baru sesuai SNA 2008, angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Probolinggo Atas Dasar Harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 4 tahun terakhir masing-masing adalah pada Tahun 2013 adalah sebesar 6,56 trilyun rupiah, Tahun 2014 sebesar 7,26 trilyun rupiah, Tahun 2015 sebesar 8,07 trilyun rupiah dan tahun 2016 sebesar 8,88 trilyun rupiah. Tahun 2017 diestimasikan sebesar 9,83 trilyun rupiah. Perubahan tahun dasar dari 2000 ke 2010 menyebabkan perubahan nilai PDRB yang dihitung atas dasar konstan. Sementara angka PDRB Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Kontan (ADHK) Tahun 2010 selama kurun waktu 4 tahun terakhir adalah sebesar 5,91 trilyun rupiah di Tahun 2013, Tahun 2014 sebesar 6,26 trilyun rupiah, Tahun 2015 sebesar 6,63 trilyun rupiah dan Tahun 2016 sebesar 7,02 trilyun rupiah. Tahun 2017 diestimasikan sebesar 9,80 trilyun rupiah. Secara rinci Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2013- 2017

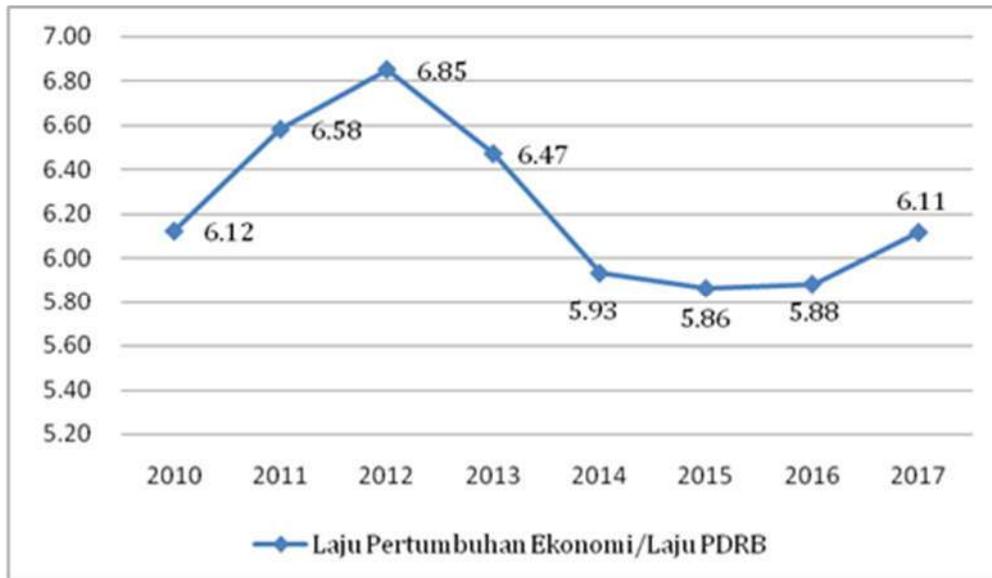
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB (ADHB) juta Rp	6.563.967,59	7.260.721,51	8.072.103,96	8.888.108,89	9.808.523,17*
PDRB (ADHK) juta Rp	5911290,95	6.261.886,47	6.628.754,75	7.018.290,81	7.446.025,33*
Laju Pertumbuhan Ekonomi/Laju PDRB	6,47	5,93	5,86	5,88	6,11*
Jumlah Penduduk (jiwa)	223.881	226.777	229.013	231.112	235.440
PDRB ADHB per kapita (Rp)	29.319.002	32.017.010	35.247.361	38.458.016	41.660.394*
Inflasi (persen)	7,98	6,79	2,11	1,53	3,18
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,48	5,16	4,01	3,72*	3,42*

Sumber : BPS, 2017

Keterangan : * Estimasi Bappeda Litbang Kota Probolinggo (belum ada rilis data BPS)

b. Menurut data dari BPS laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 4,10%, kemudian tahun 2013 perekonomian melambat pertumbuhannya menjadi sebesar 6,47 (menurun 5,54%) dan melambat kembali hingga sebesar 5,93 pada tahun 2014 dan 5,86 pada tahun 2015. Baru pada Tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 5,88 (mengalami peningkatan 0,34% dari tahun 2015. Untuk Tahun 2017 berdasarkan perhitungan sementara dikarenakan belum adanya rilis data dari BPS, laju pertumbuhan ekonomi

diestimasikan kembali meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 6,11. Estimasi peningkat pertumbuhan ekonomi dimaksud dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 – 2016. Untuk menggambarkan trend pertumbuhan ekonomi selama 8 (delapan) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



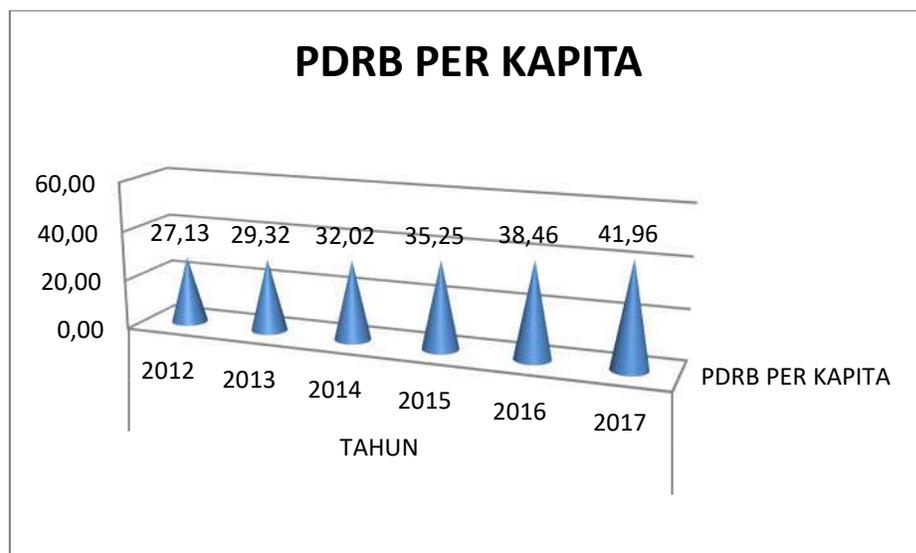
Gambar 9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2010 - 2017

- c. Menurut data dari BPS Kota Probolinggo inflasi di Kota Probolinggo pada tahun 2016 mencapai 1,53 % mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2017. Inflasi tahun 2017 mencapai 3,18 %. Terjadinya kenaikan karena ada komoditi transportasi pada bulan Juni menjelang Hari Raya Idul Fitri yang menyumbang inflasi cukup besar, juga disebabkan adanya penyesuaian tarif listrik dan biaya perpanjangan STNK. Berikut ini Inflasi Kota Probolinggo dan Propinsi Jawa Timur:



Gambar 10. Perbandingan Laju Inflasi Kota Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur

- d. Menurut data dari BPS Tahun 2014 - 2016 terdapat 7 sektor ekonomi yang tercatat mengalami pertumbuhan positif yang menunjukkan adanya perkembangan struktur perekonomian Kota Probolinggo dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Struktur perekonomian dominan Kota Probolinggo yaitu : (1) Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (24,36%), (2) sektor industri pengolahan (16,59%), dan (3) sektor transportasi dan pergudangan (13,59%). Berdasarkan hasil estimasi untuk Tahun 2017 mengingat belum adanya rilis dari BPS, laju pertumbuhan ekonomi masing-masing lapangan usaha masih tetap sama dengan Tahun 2014-2016 dengan pertumbuhan positif dari 7 sektor, yaitu : Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Asuransi, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
- e. Satu indikator yang dapat digunakan mengukur kesejahteraan masyarakat adalah besaran PDRB dan pendapatan perkapita. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kota Probolinggo mencapai 38,46 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 PDRB per kapita diestimasikan naik sebesar 41,96 juta rupiah.



Gambar 11. PDRB Perkapita (Juta Rp), 2012 – 2017

- f. Berdasarkan data dari BPS Kota Probolinggo, prosentase penduduk miskin di Kota Probolinggo mulai dari Tahun 2012-2016 terus berkurang secara signifikan, pada tahun 2012 sebesar 10,92 persen, tahun 2013 sebesar 8,55 persen, tahun 2014 sebesar 8,37 persen, tahun 2015 sebesar 8,17 persen dan pada tahun 2016 sebesar 7,93 persen dan jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo dari tahun 2011-2017 terus mengalami penurunan, hal ini karena adanya keterpaduan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, juga dilakukannya verifikasi dan validasi untuk perbaikan data kemiskinan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pemerintah Kota Probolinggo sehingga diperoleh keakuratan data kemiskinan, dengan harapan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin terus berkurang di Kota Probolinggo.

4. Sosial

- a. Jumlah penduduk Kota Probolinggo berdasarkan data dari konsolidasi bersih Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo pada Tahun 2017 sebanyak 235.440 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 yaitu sebanyak 232.285 jiwa. Dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 116.887 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 118.553 jiwa, maka jumlah penduduk Kota Probolinggo mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 3.155 jiwa dalam satu tahun. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Probolinggo pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 3.155 jiwa, yakni dari 1,04 % di tahun 2016 meningkat menjadi 1,35 % di tahun 2017. Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk Kota Probolinggo pada Tahun 2017 adalah 4.155 jiwa/Km² artinya setiap 1 km² terdapat 4.155 orang yang tinggal di area tersebut.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai oleh semakin meningkatnya capaian indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat dilihat dari tiga bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya (2012-2016). Disamping itu IPM Kota Probolinggo berada di atas rata-rata IPM Propinsi Jawa Timur. Peningkatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Dengan IPM Kota Probolinggo mengalami trend positif hal ini dapat menjadi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. IPM Kota Probolinggo tahun 2012-2016 disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo Tahun 2012-2016 (Metode Baru)

5. Budaya

- a. Sebagaimana posisinya sebagai kota penyangga ibukota yang mengemban fungsi sebagai kota pemukiman dan daerah tujuan urbanisasi terbatas, masyarakat Kota Probolinggo terdiri dari berbagai macam suku bangsa, yang membawa tradisi dan budayanya masing-masing. Berdasarkan sejarah berdirinya, Kota Probolinggo bukan

hanya diisi oleh beragam suku bangsa dari Indonesia, tetapi juga terdapat berbagai macam suku bangsa dari belahan lain di dunia. Keragaman khasanah budaya tersebut menyebar secara merata di Kota Probolinggo.

- b. Kultur yang berkembang di Kota Probolinggo adalah pendalungan yang merupakan akulturasi antara budaya Jawa dan Madura. Masyarakat pendalungan memiliki banyak keragaman kesenian daerah, karena masyarakat pendalungan merupakan perpaduan antara budaya yang berbeda. Salah satu identitas budaya pendalungan adalah seni budaya khas daerah yang bercorak Mataraman dan sekaligus berkarakter dasar nilai Islam yang sangat kuat seperti seni tari, seni suara, seni musik, seni rupa, bahasa sehari-hari (Percampuran Madura dan Jawa) dan baju adat Probolinggo dengan ciri khas baju berwarna hitam dengan atasan dan celana merupakan perpaduan budaya khas Jawa (Mataram) dan Madura.
6. Kesehatan
- a. Peningkatan pelayanan kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Menurut data dari Dinas Kesehatan, Kota Probolinggo memiliki 2 rumah sakit, 2 rumah sakit bersalin, 6 Puskesmas, 21 Puskesmas Pembantu, 24 Apotik, dan 4 toko obat berijin.
 - b. Terdapat kenaikan AHH di Kota Probolinggo sejak tahun 2013 s.d 2017 sebagai berikut : 69,5 (2013), 69,52 (2014), 69,72 (2015), 69,79 (2016) dan 69,86 (2017).
7. Tingkat pendidikan dan literasi
- a. Angka harapan lama sekolah (HLS) pada tahun 2017 mencapai 13,55 tahun, sedangkan angka rata-rata lama sekolah (RLS) mencapai 8,48 tahun.
 - b. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Probolinggo mengalami eskalasi sejak tahun 2013 s.d 2017 sebagai berikut : 8,42 (2013), 8,44 (2014), 8,46 (2015), 8,47 (2016), dan 8,48 (2017).

Kekuatan Sektor Pendidikan Tinggi

- a. Adapun gambaran penduduk berdasarkan pendidikan terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Penduduk berdasarkan pendidikan terakhir Tahun 2016-2017

No	Kelompok umur	2016	2017
1	Tidak/ belum sekolah	47.988	49.265
2	Belum tamat SD	19.586	20.436
3	Tamat SD	56.946	56.286
4	Tamat SLTP	31.189	31.625
5	Tamat SLTA	58.453	59.284
6	Diploma I/II	1.356	1.299
7	Diploma III	2.596	2.649
8	Sarjana (S1)	13.122	13.513
9	Sarjana (S2)	1.030	1.061
10	Sarjana (S3)	19	22
	Total	232.285	235.440

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2017

Identifikasi kelemahan dan Permasalahan Pemabangunan

Kelemahan utama yang teridentifikasi di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

a. Keterbatasan Luas Wilayah

Luasan Kota Probolinggo yang kecil (57 km persegi) dengan jumlah populasi yang diestimasi akan mencapai angka 234.110 jiwa di tahun 2035 dimana secara nasional proyeksi jumlah penduduk yang memilih untuk tinggal di perkotaan akan melambung sebesar 85% sedangkan jumlah penduduk di pedesaan hanya akan ada di kisaran 15% akan berdampak signifikan pada penambahan dan pertumbuhan ruang aktivitas terhadap ketersediaan dan penyusutan ruang terbuka di Kota Probolinggo. Kota Probolinggo memiliki 7,2% ruang terbuka hijau. Namun demikian, Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada cukup berfungsi sebagai sarana cadangan oksigen di perkotaan, beberapa ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo seperti taman manula, taman maramis, RTH Kedopok, Alun-alun RTH-IPLH juga dapat digunakan sebagai sarana rekreasi, sarana peningkatan ekonomi masyarakat Kota Probolinggo, dan sarana aktivitas sosial dan berinteraksi mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga manula.

b. Kelemahan Infrastruktur Trotoar dan Pedestrian.

Trotoar atau seksi median jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki tidak sepenuhnya fungsional dikarenakan banyaknya faktor pengganggu, antara lain :

- 1) Kondisi trotoar yang tidak laik fungsi secara fisik dan infrastruktur, antara lain karena kerusakan, ketinggian yang tidak standar, pembatas yang tidak dapat diakses oleh kaum difabel, dan sebidang dengan pohon peneduh.
- 2) Penyalahgunaan fungsi trotoar dalam bentuk :
 1. Dijadikan lapak para pedagang kaki lima
 2. Dijadikan halaman parkir tanpa ijin resmi
 3. Dijadikan tempat parkir liar
 4. Dibongkar dan dijadikan jalan masuk tanpa ijin resmi
 5. Dalam jam-jam tertentu dan ruas-ruas tertentu, trotoar banyak digunakan oleh pengendara motor yang menghindari kemacetan

c. Permasalahan Pendidikan

Beberapa permasalahan yang cukup mendasar di bidang pendidikan dan memerlukan perhatian adalah : (1) Belum tuntasnya penanganan masalah anak putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah karena bekerja membantu orang tua, (2) Belum terpenuhinya standar mutu, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, hal ini ditunjukkan dengan masih belum terpenuhinya semua indikator standar pelayanan minimal pendidikan dasar, (3) Kualitas dan relevansi serta tatakelola pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan, (4) Masih belum meratanya kualitas pendidikan, sehingga menyebabkan permintaan untuk masuk ke sekolah yang memiliki kualitas bagus semakin tinggi, disisi lain masih terdapat sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik, (5) Pendidikan moralitas, budi pekerti dan pendidikan karakter

semakin dirasakan diperlukan pada dunia pendidikan sekarang ini. Hal ini terkait dengan mulai lunturnya pengetahuan peserta didik mengenai kearifan lokal, serta moral dan perilakunya yang cenderung menurun. (6) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan bagi keberlanjutan pembangunan, dan (7) Masih rendahnya akses masyarakat terutama masyarakat miskin kepada layanan pendidikan yang berkualitas.

d. Permasalahan Kesehatan.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Probolinggo. Meskipun demikian beberapa masalah di bidang kesehatan yang masih dihadapi dan perlu penanganan dalam jangka menengah dapat diidentifikasi sebagai berikut : (1) Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan terutama untuk masyarakat miskin, penyeledikian epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesemuanya perlu disesuaikan dengan tuntutan standar pelayanan minimum bidang kesehatan (2) Terpenuhinya rasio jumlah penduduk dengan ketersediaan unit pelayanan kesehatan yang berkualitas, (3) Belum terpenuhinya tenaga medis, para med is dan peralatan medis yang sesuai dengan Standar Rumah Sakit Tipe B sehingga sulit dalam pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas, (4) Belum terpenuhinya ketersediaan tenaga kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang dipersyaratkan bagi terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas.

e. Permasalahan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota.

Permasalahan infrastruktur dan tata ruang kota terkait dengan laju perubahan penggunaan lahan, sistem drainase perkotaan, sistem transportasi, bangunan rumah layak huni dan sistem pengelolaan prasarana lingkungan, yang secara terinci permasalahannya dapat dielaborasi sebagai berikut:

- (1) Daerah perkotaan diidentikkan dengan jumlah penduduk yang tinggi dan penggunaan lahan didominasi oleh lahan terbangun. Tingginya jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan penduduk akan ruang yang semakin tinggi, terutama untuk lahan terbangun. Hal ini pada akhirnya akan menjadi pemicu terjadinya konversi lahan dari lahan non terbangun (kebanyakan lahan pertanian) menjadi lahan terbangun. Permasalahan laju perubahan penggunaan lahan yang tinggi terutama disebabkan tingkat pemanfaatan lahan kota relatif tinggi, sedangkan luas lahan kota relatif terbatas.
- (2) Secara umum pembangunan sistem drainase terutama saluran air hujan di Kota Probolinggo sampai saat ini terus mendapatkan perhatian. Meskipun demikian tetap saja masih terdapat lokasi-lokasi rawan genangan terutama pada saat curah hujan tinggi. Terdapatnya area genangan ini terutama disebabkan faktor alam (morfologi lahan), adanya wilayah cekungan yang menyebabkan limpasan air drainase, serta tersumbatnya saluran drainase.
- (3) Salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah perkotaan adalah aksesibilitas atau keterjangkauan. Aksesibilitas menjadi sangat penting dalam pembangunan

daerah perkotaan karena dengan aksesibilitas yang baik maka mobilitas penduduk, barang dan jasa di daerah perkotaan akan menjadi semakin lancar sehingga dapat mendorong peningkatan aspek perekonomian kota. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan aspek aksesibilitas adalah laju pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan ruas jalan yang ada, sehingga diprediksi akan menimbulkan adanya kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Kondisi tersebut diperberat dengan masih rendahnya perilaku tertib pengguna jalan berpengaruh terhadap angka kejadian kecelakaan lalu lintas. Karenanya masalah ketersediaan infrastruktur jalan yang berkualitas menjadi penting untuk mendapatkan perhatian sehingga mampu menunjang peningkatan aksesibilitas, pertumbuhan wilayah kota dan peningkatan kesejahteraan warga kota Probolinggo khususnya. Antisipasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Tembaga untuk melengkapi infrastruktur pendukung dan penunjangnya juga harus menjadi perhatian yang serius.

(4) Permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah permasalahan terkait dengan penyediaan fasilitas pelayanan umum di Kota Probolinggo. Permasalahan tersebut antara lain adalah penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan dan fasilitas air bersih baik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan sesuai kebutuhan masyarakat.

f. Permasalahan Perumahan Rakyat

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung kawasan perkotaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian beserta fasilitas penunjangnya. Permasalahan pokok yang dihadapi pembangunan kawasan permukiman perkotaan di Kota Probolinggo adalah : (1) Adanya kawasan permukiman yang belum tertata dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana standar yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut, (2) Diperlukannya perbaikan sarana dan prasarana dasar permukiman secara berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, (3) Masih adanya kawasan permukiman yang kurang layak huni khususnya dari aspek akses air bersih dan sistem sanitasi, (4) Penyediaan dan peningkatan kualitas rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah

g. Permasalahan Lingkungan Hidup.

Beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup wilayah perkotaan di Kota Probolinggo adalah berkaitan dengan masalah pencemaran udara, pencemaran air tanah dan permasalahan sampah.

(1) Pencemaran udara meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk kota, sebab dengan meningkatnya jumlah penduduk kota akan diikuti dengan peningkatan aktivitas, termasuk aktivitas yang menghasilkan emisi. Aktivitas yang menghasilkan emisi adalah aktivitas yang terkait dengan konsumsi bahan bakar fosil, listrik dan air. Peningkatan konsumsi bahan bakar fosil untuk transportasi dapat dilihat dari angka jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berimbas pada peningkatan konsumsi bahan bakar fosil, baik berupa bensin premium maupun solar. Padahal

berdasarkan penelitian, setiap liter bensin premium mengemisi 2,33 kgCO₂, dan solar 2,67 kgCO₂.

- (2) Pencemaran air permukaan terjadi karena kebiasaan warga dan beberapa pelaku usaha membuang limbah baik padat maupun cair langsung ke sungai (tujuh sungai yang melintasi Kota Probolinggo), sehingga menyebabkan kualitas air sungai menu run dari waktu ke waktu. Berdasarkan penelitian, penurunan kualitas air sungai ini ditunjukkan oleh kadarBio/ogica/ Oxygen Dimond (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) yang ada indikasi akan dapat melampaui ambang batas sebagaimana ketentuan standar baku mutu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.
- (3) Pencemaran air tanah yang terjadi mengakibatkan sumur-sumur penduduk menjadi tidak layak untuk dijadikan air minum karena rawan tercemar bakteri E-coli. Padahal hingga saat ini dengan kemudahan mendapatkan air tanah di Kota Probolinggo, warga cenderung untuk menggunakannya. Pencemaran tersebut bisa terjadi karena letak sumur warga berdekatan dengan saluran pembuangan limbah rumah tangga atau septic tank dan seringkali antara bak penampungan kotoran dan bak peresapan tidak dipisahkan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan atau sempitnya lahan yang tersedia, mengingat jumlah penduduk Kota Probolinggo terus meningkat. Sela in itu pencemaran terjadi karena bangunan septic tank tidak kedap air sehingga kotoran bisa merembes masuk ke tanah dan akhirnya ke air sumur. Untuk masa kedepan, penggunaan air tanah ini harus sangat dibatasi, karena dapat menyebabkan intrusi air laut masuk ke daratan. Warga diharapkan beralih menggunakan air untuk keperluan sehari-hari dari air yang berasal dari sumber mata air yang sangat tersedia.
- (4) Sebagaimana permasalahan kota pada umumnya, sampah juga menjadi permasalahan lingkungan yang sangat penting di Kota Probolinggo yang tidak bias diabaikan. Sampah yang bila tidak tertangani dengan baik akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap bahkan menjadi sumber penyakit. Meskipun hingga saat ini jumlah sampah yang ada di Kota Probolinggo masih dapat tertangani dengan baik, namun untuk masa mendatang jumlah sampah yang dibuang ke TPA harus dapat terkendali, dan mengedepankan pengelolaan sampah 4R (*Replace, Reuse, Reduce dan Recycle*).

Tabel 5. Data Kinerja Layanan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Volume Sampah Yang Masuk TPA (Kg/Th)	12.515.063	14.149.665	15.583.056	16.733.235	18.462.536
2.	Jumlah TPS per Satuan Penduduk	1 : 2.100	1 : 2.500	1 : 2.700	1:2700	1:2750
3.	Penegakan Hukum	10	12	31	18	8

Sumber : Badan Lingkungan Hidup, 2017

h. Permasalahan Ekonomi.

Permasalahan yang dihadapi di bidang ekonomi terkait dengan masalah ketenagakerjaan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, industri, perdagangan dan jasa, perikanan dan kalautan, pertanian dan ketahanan pangan, yang secara spesifik masing-masing permasalahannya dapat dielaborasi sebagai berikut:

- (1) Masalah ketenagakerjaan yang ada berawal dari masih tingginya angka pengangguran terbuka yang pada tahun 2012 masih sebesar 19.614 orang yang berarti sekitar 18,12% dari total angkatan kerja sebanyak 108.239 orang. Angkatan kerja baru yang terus meningkat adalah penduduk yang lulus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan, ini yang potensial memunculkan pengangguran baru. Terbatasnya kesempatan kerja, kurangnya ketrampilan, serta rendahnya jiwa kewirausahaan merupakan beberapa penyebab munculnya pengangguran baru di Kota Probolinggo. Terbatasnya lapangan perkerjaan formal yang mampu menyerap keahlian para pencari kerja juga menyebabkan banyak tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan kerja yang tersedia.
- (2) Masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi adalah masalah permodalan, pemasaran dan manajemen. Berbagai usaha telah ditempuh untuk menanggulangi masalah tersebut dan hasilnya memang telah mulai nampak baik dari segi meningkatnya jumlah pelaku usaha maupun dari omzet usahanya. Meskipun demikian masih diperlukan usaha yang bersifat komprehensif sehingga dapat memecahkan ketiga masalah tersebut secara permanen. UMKM-K di Kota Probolinggo masih memerlukan solusi yang lebih inovatif untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi agar mampu meningkatkan usaha dan daya saing mereka
- (3) Masalah yang dihadapi dibidang perdagangan adalah masih belum kuatnya daya saing produk lokal dipasar nasional dan internasional, terutama dalam menghadapi produk-produk berbiaya rendah. Penataan ritel/pasar modern perlu dilakukan untuk menciptakan persaingan sehat antar ritel maupun dengan pasar tradisional. Perhatian juga terarah pada belum kuatnya upaya perlindungan terhadap sarana dan prasarana perdagangan pasar tradisional.
- (4) Masalah yang dihadapi bidang perindustrian, baik industri kecil, menengah maupun industri kreatif, secara umum adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha industri yang masih kurang memadai, penciptaan iklim yang kondusif bagi berkembangnya sektor industri yang belum optimal, apresiasi terhadap insan industri khususnya industri kreatif yang masih kurang, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang belum optimal dan perlunya dorongan peran lembaga pembiayaan yang mendukung pengembangan industri secara optimal.
- (5) Beberapa permasalahan yang selama ini dianggap sebagai faktor penghambat pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal antara lain sebagian besar nelayan merupakan nelayan tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang belum kondusif untuk kemajuan usaha, sebagian besar struktur armada yang dimiliki masih didominasi

struktur skala kecil dan tradisional (berteknologi rendah), ketimpangan tingkat pemanfaatan stock ikan antara kawasan satu dengan kawasan lainnya, masih banyaknya praktek illegal, penegakan hukum masih belum optimal, masih terus terjadi kerusakan lingkungan ekosistem laut, terbatasnya sarana prasarana sosial dan ekonomi (transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang segmen pasar, harga dan pesaing. Sedangkan faktor eksternal yang ikut mempengaruhi lambatnya pembangunan kelautan dan perikanan adalah khususnya yang terkait dengan kebijakan moneter, fiskal dan investasi seperti suku bunga pinjaman dan penyediaan kredit perikanan.

- (6) Penanaman modal merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator penting yang dapat menunjukkan kemajuan perekonomian daerah. Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya upaya pemanfaatan sumber daya potensial yang ada melalui kegiatan pengembangan, pengawasan/pengendalian dan promosi investasi.
- (7) Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Menurut UU RI nomor 7 tahun 1996 tentang pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan hak asasi bagi setiap individu di Indonesia. Oleh karena itu terpenuhinya kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Selain itu pangan juga memegang kebijakan penting dan strategis berdasar pada penqartrn--yang dimilikinya secara sosial, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan di Kota Probolinggo adalah bagaimana menciptakan suatu kondisi dimana setiap individu dan rumahtangga memiliki akses secara fisik, ekonomi, dan ketersediaan pang an yang cukup, a man, serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan selera nya bagi kehidupan yang aktif dan sehat Selain itu aspek pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara merata dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
- (8) Pembangunan pertanian dalam arti luas dengan prinsip kemandirian dan berkelanjutan senantiasa harus diwujudkan dari waktu ke waktu. Permasalahan yang secara umum dihadapi dalam pembangunan pertanian antara lain adalah penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian. Dari segi kualitas, faktanya lahan pertanian terus mengalami degradasi yang luar biasa, dari sisi kesuburannya akibat dari pemakaian pupuk an-organik. Sementara itu, dari sisi kuantitasnya konfeksi lahan di daerah kita yang memiliki kultur dimana orang tua akan memberikan pembagian lahan kepada anaknya turun temurun, sehingga terus terjadi penciutan luas lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan bangunan dan industri. Masalah lainnya adalah terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian. Hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran dari para pemangku kepentingan untuk mempertahankan lahan pertanian produksi, menjadi

salah satu penyebab infrastruktur pertanian menjadi buruk. Permasalahan lainnya adalah adanya kelemahan dalam sistem alih teknologi. Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi, mutu dan kontinuitas pasokan yang terus menerus harus selalu meningkat dan terpelihara. Produk-produk pertanian baik komoditi tanaman pangan (hortikultura), perikanan, perkebunan dan peternakan harus menghadapi pasar dunia yang telah dikemas dengan kualitas tinggi dan memiliki standar tertentu. Tentu saja produk dengan mutu tinggi tersebut hanya dapat dihasilkan melalui suatu proses yang menggunakan muatan teknologi standar. Masalah lain adalah muncul dari terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan dan masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik, karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualannya.

i. Permasalahan Kemiskinan.

Kemiskinan perkotaan (*urban poverty*) mempunyai permasalahan yang kompleks baik dilihat dari akar permasalahannya maupun dari perspektif kebijakan untuk mengatasinya. Kemiskinan perkotaan mempunyai dimensi sosial ekonomi yang cukup beragam sehingga implikasi kebijakannya akan semakin rumit. Permasalahan kemiskinan di perkotaan tidak terlepas dari tiga ciri kehidupan perkotaan yaitu ketergantungan akan ekonomi uang (*commodization*), lingkungan tempat tinggal yang kurang memadai (*enviromental hazards*) dan kehidupan sosial yang individualisitis (*social fragmentation*).

Oleh karena itu, kemiskinan perkotaan mempunyai fenomena multi dimensi meliputi rendahnya tingkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan, kerawanan tempat tinggal dan pribadi, dan ketidakberdayaan. Hal tersebut mengakibatkan penduduk miskin perkotaan cenderung tinggal di pemukiman yang kumuh dan padat sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan dasar dan kesempatan kerja. Selain itu juga kurang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan keamanan pribadi. Rumah tangga miskin yang menempati lokasi kantong-kantong kemiskinan di Kota Probolinggo sebagian besar berada di sekitar daerah kumuh (slum area), daerah bantaran kali dan daerah pesisir. Daerah lingkungan miskin ini sangat akrab dengan sumber polusi, kurangnya sumber air bersih, kepadatan penduduk yang tidak sebanding dengan areal yang sempit dan penuh dengan sampah rumah tangga, pencemaran limbah beracun dengan kerawanan munculnya wabah penyakit. Tekanan kemiskinan yang melanda diperparah dengan rendahnya kesadaran warga untuk hidup sehat dan kondisi ini semakin memperburuk kualitas lingkungan.

j. Permasalahan Kesejahteraan Sosial.

Dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial, masalah yang masih dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian di Kota Probolinggo meliputi beberapa masalah utama yakni kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, korban bencana, dan korban tindak kekerasan. Di samping itu, juga terdapat beberapa masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial, diantaranya adalah anak balita terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan perempuan rawan sosial ekonomi. Meskipun

permasalahan tersebut di Kota Probolinggo telah mendapatkan penanganan dengan baik selama ini, namun intensitas penanganan terhadap masalah-masalah kesejahteraan sosial tersebut menuntut perhatian dan penanganan berkelanjutan. Berbagai permasalahan sosial tersebut memerlukan penanganan, yakni melalui (1) Rehabilitasi Sosial yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, (2) Jaminan Sosial yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, (3) Pemberdayaan Sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan (4) Perlindungan Sosial yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

k. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Secara spesifik, permasalahan yang dihadapi di Kota Probolinggo sampai dengan lima tahun kedepan dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Untuk memberdayakan masyarakat ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan yaitu :mobilisasi (community mobilization), partisipasi masyarakat (community participation), pembangunan berbasis masyarakat (community development). Ketiga pendekatan ini, tentunya akan diarahkan pada dua tujuan pemberdayaan, yaitu : melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, yang dikenal sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan, yang dikenal sebagai pemberdayaan politik masyarakat. Permasalahan yang dirasakan masih ada dan perlu mendapatkan perhatian di Kota Probolinggo adalah masyarakat harus diberikan ruang yang lebih luas lagi untuk masyarakat menjadi berdaya, baik berdaya dibidang ekonomi, bidang sosial maupun berdaya dibidang politik masyarakat.
- (2) Keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Sementara itu berdasarkan data yang ada, piramida penduduk di Indonesia mengindikasikan bahwa Indonesia akan menghadapi triple burden, yaitu meningkatnya jumlah

penduduk balita, remaja, dan lansia. Dari total penduduk, sebesar 28 persen atau 64 juta jiwa adalah remaja, dengan jumlah penduduk lanjut usia atau lansia sebesar 18 juta jiwa. Hal ini menunjukkan kemungkinan terjadinya peledakan penduduk dimasa mendatang sangat besar.

Oleh karena itu Revitalisasi Program KB adalah salah satu fokus dan prioritas yang diarahkan kepada penguatan supply dan demand secara seimbang. Dalam penguatan sisi supply, pemerintah daerah bersama masyarakat dituntut melakukan dengan sungguh-sungguh upaya-upaya yang mencakup memperkuat sistem pelayanan KB, memperkuat kerjasama dengan mitra pelayanan program KB, memastikan ketersediaan sarana-prasarana dan alat-obat kontrasepsi di semua sarana pelayanan kesehatan, meningkatkan kapasitas provider pelayanan KB. Sedangkan dalam penguatan demand creation perlu dilakukan pula dengan sungguh-sungguh upaya-upaya yang mencakup merubah pola pikir agar Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) benar-benar melembaga dengan merubah motto dari Dua Anak Lebih Baik ke motto Dua Anak Cukup, menumbuhkan sense of crisis dengan bekerja kreatif, tidak business as usual, dan berintegritas tinggi.

- (3) Pemberdayaan Perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumber daya, ekonomi, politik, social, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan perempuan adalah (a) belum optimalnya upaya penetapan kerangka pembiayaan, kelembagaan dan regulasi pemberdayaan perempuan, (b) kurang adanya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, (c) masih terbatasnya gerak peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan (d) kurang adanya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

I. Permasalahan Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Berbagai kegiatan pembangunan di Kota Probolinggo di bidang kepemudaan dan olah raga, kebudayaan dan kepariwisataan meskipun selama ini telah terarah pada pencapaian target kinerja, beberapa permasalahan yang masih harus mendapatkan perhatian untuk masa lima tahun kedepan dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Pemuda saat ini menghadapi tantangan berbeda untuk menemukan kembali perannya. Beberapa permasalahan yang dihadapi pemuda antara lain bersumber dari rendahnya nilai penghargaan atas keberagaman, menguatnya kecenderungan primordialisme dan radikalisme dari kasus - kasus kekerasan yang muncul, dan menguatnya konsumerisme dan hedonisme. Selain itu, juga menguatnya apatisisme terhadap persoalan masyarakat (bangsa), rendahnya jiwa kepemimpinan dan jiwa

patronisme, rendahnya etos kerja, kemandirian, dan kemampuan bersaing (Pusat Penelitian Politik UPI, Oktober 2011). Pemuda yang diharapkan membawa perubahan dalam pembangunan, banyak yang terjebak dalam berbagai perilaku yang kurang mempunyai nilai positif bagi pengembangan peran pemuda, bahkan ada yang bergabung dengan organisasi kepemudaan yang jauh berbeda dengan semangat pemuda yang memperjuangkan keadilan. Dengan kondisi demikian, pemuda seperti kehilangan identitasnya. Diperlukan proses pembentukan identitas pemuda yang berkelanjutan di tengah ketiadaan sosok pemimpin dan role model pemuda yang membanggakan. Oleh karena itu, upaya yang harus didorong bersama adalah bagaimana agar pemuda memiliki karakter yang kuat, terbangunnya kewargaan lewat pendidikan dan dialog terus-menerus. Bagaimana pemuda dapat memperjuangkan hak-haknya lewat pelibatan aktif sebagai warga. Dibukanya ruang yang lebih luas bagi pemuda lewat forum, kelompok dan komunitas untuk dapat berekspresi, menyuarakan pendapatnya serta ikut dalam kesempatan pengembangan diri. Tanggung jawab ini, tentu bukan hanya ada pada pemuda, tetapi semua pihak dituntut untuk ikut bertanggungjawab membentuk identitas kebangsaan dan menjamin ruang bagi anak muda dan pemuda lewat kebijakan.

- (2) Permasalahan keolahragaan pada saat ini menjadi semakin kompleks karena berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat serta tuntutan perubahan global. Keterbatasan sumber pendanaan masih merupakan permasalahan khusus dalam kegiatan keolahragaan. Hal ini semakin terasa dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan didukung oleh anggaran yang memadai. Oleh karenanya sesuai dengan kemampuan anggaran pada APBD Kota Probolinggo, diperlukan satu kebijakan dan upaya agar pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah dapat berjalan lancar. Selain itu, sumber daya dari masyarakat perlu dioptimalkan, antara lain, melalui peran serta masyarakat dalam pengadaan dana, pengadaan/pemeliharaan prasarana dan sarana, dan dalam industri olahraga. Sejalan dengan itu, sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah perlu ditata sebagai suatu bangunan sistem keolahragaan yang pada intinya dilakukan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diawali dengan tahapan pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Penahapan tersebut diarahkan untuk pemassalan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga. Semua penahapan tersebut diharapkan dapat melibatkan unsur keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga yang ada dalam masyarakat. Sesuai dengan penahapan tersebut, seluruh ruang lingkup olahraga dapat saling bersinergi sehingga membentuk bangunan sistem keolahragaan yang luwes dan menyeluruh. Sistem ini melibatkan tiga jalur, yaitu jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang diharapkan dapat saling bersinergi.
- (3) Pembangunan kebudayaan menuntut untuk terus diupayakan untuk menjawab persoalan budaya bangsa yang sesungguhnya memerlukan penyelesaian dalam

periode jangka menengah, bahkan jangka panjang. Pembangunan kebudayaan diharapkan dapat menyumbang peran dalam meredakan ketegangan antarkelompok masyarakat untuk memperkuat NKRI; mengembangkan nilai budaya baru yang positif, produktif, semakin memperkuat jati diri bangsa dan memantapkan budaya nasional serta meningkatkan pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan kekayaan budaya. Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan budaya bangsa antara lain adalah : (a) Masih juga dijumpai terjadinya ketegangan antar kelompok masyarakat yang menimbulkan konflik. Ini merupakan indikasi rendahnya saling percaya dalam masyarakat. Rasa saling percaya yang melemah dapat memunculkan sikap bermusuhan. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum terbangunnya cara berpikir positif dalam masyarakat. (b) Adanya indikasi munculnya krisis moral yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman, lemahnya sikap, dan makin melunturnya etika dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pada saat yang bersamaan, derasnya arus globalisasi juga mulai berpengaruh, dimana masyarakat memiliki kecenderungan lebih cepat mengadopsi budaya global yang negatif jika dibandingkan dengan budaya global yang positif dan produktif. Di sisi lain, globalisasi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi berpengaruh pada dinamika sosial dan budaya masyarakat sehingga nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahan, dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia cenderung makin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme.

- (4) Masalah pariwisata sekarang ini secara operasional disebabkan oleh tidak terlaksananya *sapta pesona* dengan baik, yaitu: aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah tamah, dan kenangan. Permasalahan demikian inilah yang dapat mengakibatkan menurunnya jumlah wisatawan. Disamping itu juga dikarenakan kurangnya mobilitas dan kualitas fasilitas yang lengkap serta terbatasnya atau kurangnya akses komunikasi yang baik. Untuk kota Probolinggo, ada beberapa potensi wisata yang prospektif untuk dikembangkan, salah satunya adalah wisata cagar budaya. Wisata cagar budaya sangat penting, karena dengan wisata cagar budaya dapat menjadi sebuah wisata pendidikan bagi masyarakat. Peninggalan-peninggalan ini memiliki potensi pariwisata. Permasalahannya, bangunan cagar budaya yang ada belum dioptimalkan keberadaannya. Hal ini membuat masyarakat kurang mengenali atau mengerti sejarah kotanya sendiri. Jika penanganan cagar budaya tersebut dikelola dengan bijak, maka akan mempunyai peluang untuk dikembangkan sebagai objek wisata, terutama objek wisata sejarah dan budaya, sekaligus sebagai sarana pendidikan, dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, tanpa merusak cagar budaya tersebut. Artinya, secara ekonomi pemberdayaan potensi wisata sejarah dan budaya merupakan aktifitas yang mendatangkan keuntungan yang tidak pernah habis (*never ending*) bagi daerah. Sebagai suatu aset yang mempunyai beragam kandungan nilai dan pemanfaatannya (*multivalue and using culture resources*), cagar budaya menjadi salah satu tumpuan harapan di dalam

peningkatan sumber pendapatan bagi masyarakat kedepannya. Namun demikian, pada kenyataannya upaya pelaksanaan menjadikan cagar budaya sebagai objek wisata sejarah dan budaya tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena upaya tersebut kerap menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah, masyarakat yang memanfaatkan, akademisi yang memiliki informasi, serta mungkin juga swasta yang bertindak sebagai pengelola.

SMART GOVERNANCE

Smart Governance memberikan tekanan pada peningkatan peran pemerintah sebagai pengayom dan pemberi pelayanan kepada masyarakat secara cerdas, yaitu dengan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Pengelolaan pemerintahan secara cerdas tidak dapat lepas dari peranan masyarakat yang mengambil posisi penting, bukan hanya sebagai obyek pembangunan dan pemerintahan, tetapi juga menampatkan dirinya sebagai subyek dan partisipan pemerintahan dan pembangunan itu sendiri. Budaya, nilai, moral etik dan tradisi yang ada di Kota Probolinggo turut menjadi faktor enabler smart governance sebagai pembentuk kearifan lokal yang membantu mengidentifikasi seberapa cerdas pemerintah dalam pengelolaan pemerintahannya.

Dari bab sebelumnya, smart governance akan bergerak pada 3 (tiga) area kerja dan 8 (delapan) indikator sebagai penciri utama sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik :
 - a. Layanan administrasi masyarakat
 - b. Layanan informasi publik
 - c. Layanan sosial masyarakat
2. Manajemen Birokrasi yang efisien
 - a. Akuntabilitas tata kelola e-birokrasi
 - b. Transparansi pemerintahan
 - c. Implementasi e-government
3. Manajemen kebijakan publik :
 - a. Partisipasi perencanaan publik
 - b. Akses informasi publik

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang telah diberikan. Pelayanan publik sebagai area kerja penciri utama pemerintah yang cerdas harus memenuhi 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan, yaitu :

1. Pelayanan haruslah berwujud dan terukur, yang diindikasikan oleh :
 - a. Penampilan petugas rapi dan bersih
 - b. Kenyamanan tempat pelayanan
 - c. Kemudahan dalam mengakses pelayanan
 - d. Kemudahan dalam proses pelayanan
 - e. Kedisiplinan petugas pemberi layanan

- f. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan yang memenuhi prinsip smart city yang mengedepankan inovasi
2. Pelayanan yang diberikan haruslah handal dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat, yang diindikasikan oleh :
 - a. Kecermatan petugas dalam pemberian layanan
 - b. Memiliki standar pelayanan yang jelas yang dibuktikan oleh adanya Standar Operating Procedur (SOP)
 - c. Kompetensi petugas dalam mengoperasikan alat bantu yang digunakan dalam layanan tersebut, baik alat teknis maupun peralatan yang berbasis aplikasi dan internet
3. Pelayanan harus cepat tanggap/responsif, yang diindikasikan oleh :
 - a. Petugas merespon konsumen/masyarakat sesuai dengan tuntutan/permintaan yang disampaikan sesuai dengan batas kewenangan yang ditetapkan
 - b. Petugas pelayanan dalam responnya dapat melakukan koordinasi baik secara horisontal maupun vertikal untuk dapat memberikan respon yang baik yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat
 - c. Respon yang dilakukan petugas haruslah memenuhi prinsip cepat, tepat, cermat, waktu yang terukur dan kehati-hatian.
4. Pelayanan harus memberikan jaminan layanan, yang diindikasikan oleh :
 - a. Jaminan ketepatan waktu buka/tutup pelayanan
 - b. Jaminan ketepatan waktu penyelesaian
 - c. Jaminan biaya pelayanan (jika ada penetapan biaya layanan)
 - d. Jaminan pasca layanan dalam hal penanganan koreksi/perbaikan produk layanan, keluhan, dan penyelesaian sengketa layanan
5. Pelayanan harus dilaksanakan dengan nilai moral, etika dan rasa empati, yang diindikasikan oleh :
 - a. Mendahulukan kepentingan pelanggan/konsumen/pemohon
 - b. Pelayanan dilaksanakan dengan ramah, sopan, santun, dan menghargai
 - c. Tidak diskriminatif (membeda-bedakan) dan mengedepankan kesetaraan gender

Untuk memperoleh Strategi yang tepat dalam upaya perwujudan smart governance (kepemerintahan yang cerdas) pemetaan terhadap kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threat*) dilakukan dengan memilih dan menetapkan strategi dan program smart city.

Tabel 6. Strategi dan Program Smart Governance

Strategi	Program dan Produk Smart City	Dinas Terkait
1. Meningkatkan Penerapan Pelayanan Publik	1. Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPADU)	DPMPSTP
	2. Pelayanan Kependudukan 3 in 1 (Akte Kelahiran, KK, KTP)	DISDUKCAPIL

	3. Pengintegrasian Sistem Pengaduan Pelayanan Publik	DISKOMINFO
	4. Penanganan Pengaduan Whatsapp Complain	DPMPSTSP
	5. Sistem Pelayanan Poli RSUDdr. Moh. Saleh Kota Probolinggo	RSUD dr. Moh. Saleh
	6. Sistem Pelayanan Puskesmas	Dinkes
	7. SIAKEL (Sistem Informasi & Administrasi Kelurahan)	Diskominfo dan Bagian Pemerintahan
	8. SiJinggo (Sistem Jaringan Informasi Good Governance)	Bagian Pemerintahan
	9. Integrasi Data Kependudukan dengan Pelayanan Publik di seluruh OPD	Semua OPD Pelayanan & Disdukcapil
2. Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah	1. Peningkatan Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengukuran, Pelaporan pada SIMRAL	Bappedalitbang, BPPKAD, Bagian Organisasi dan Inspektorat
	2. Peningkatan Sistem Tunjangan Kinerja PNS (TPP)	Bagian Organisasi dan BKPSDM
	3. Sinkronisasi Anjab, Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan dengan Indikator Kinerja Jabatan dan SKP	Bagian Organisasi dan BKPSDM
3. Meningkatkan sistem inventarisasi produk hukum daerah	1. Sistem Informasi dan dokumentasi produk hukum Kota Probolinggo	Bagian Hukum
	2. Inventarisir dan Kajian Produk Hukum Daerah Yang diperlukan	Bagian Hukum
4. Meningkatkan Profesionalisme ASN	1. Penerapan Sistem Pola Karier PNS	BKPSDM
	2. Penerapan Standar Kompetensi PNS	BKPSDM

SMART BRANDING

Strategi utama dalam mewujudkan smart branding adalah dengan melakukan :

1. Pengenalan Smart City Branding: Membangun Daya Saing Daerah melalui Pariwisata, Bisnis dan Wajah Kota
2. Masterplan Pembangunan Daerah berbasis Smart City Branding: Panduan Mewujudkan Daerah Yang Maju Dan Berkelas Dunia melalui Kerangka Smart City Branding
3. Membangun Arsitektur Daerah Berkelas Dunia: Panduan Mendesain Wajah Daerah Dengan Mengadopsi Nilai-Nilai Lokal Bercita Rasa Global
4. Strategi Pemasaran Daerah Melalui Brand Daerah yang Solid: Panduan Menyusun Strategi, Taktik, Dan Visualisasi Brand Daerah
5. Meningkatkan Investasi Daerah Melalui Strategi Branding: Panduan Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah melalui Strategi Pemasaran di Era Digital
6. Pelayanan Investasi Daerah untuk Mendukung Smart City Branding: Membangun Soft Skill Pelayanan Prima untuk Memperkuat Branding Daerah

Tabel 7. Strategi dan Program Smart Branding

Strategi	Program dan Produk Smart City	Dinas terkait
1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Tourism/ Pariwisata)	1. Mengembangkan objek wisata unggulan dan menciptakan objek wisata baru berbasis seni budaya	Disbudpar
	2. Pengembangan Promosi Pariwisata lewat Website dan Medsos	Disbudpar
	3. Mendorong Masyarakat untuk kreatif di Bidang Ekonomi dan Pariwisata	Disbudpar
	4. Mengembangkan pola navigasi wisata digital	Disbudpar
	5. Mengembangkan sistem promosi non data berbasis instant apps	Diskominfo, Disbudpar
2. Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Tourism/ Pariwisata)	1. Menerakan papan informasi nilai sejarah pada bangunan-bangunan kota pusaka	Disbudpar
	2. Mengoptimalkan kualitas kondisi Cagar Budaya	Disbudpar
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Business/ Bisnis)	1. Mendorong semangat wirausaha melalui komunitas pelaku usaha	DKUPP
	2. Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan	DKUPP, Disnaker, Disbudpar
4. Penataan Wajah Kota dengan Tata ruang yang berkualitas (Appearance/ Tampilan)	1. Pemusatan PKL dalam 1 (satu) lokasi	Bappeda, DKUPP
	2. Mewujudkan Taman Kota yang aman, nyaman, dan layak bagi anak, pemuda dan lansia	Bappeda, DLH, Satpol PP
	3. Meningkatkan layanan publik wifi yang mengedukasi <i>user</i>	Diskominfo
	4. Pengembangan Kampung Tematik atau Tematik Kewilayahan	Bappeda

SMART ECONOMY

Smart economy pada dasarnya dibangun untuk menciptakan daya saing daerah. Daya saing yang ingin dibangun di Kota Probolinggo adalah daya saing di bidang pariwisata dan pelayanan publik terkait investasi, penanaman modal, pelayanan perpajakan, pengendalian kebocoran pendapatan.

Penegakan regulasi, penghapusan pungutan liar, jaminan waktu dan kualitas layanan diupayakan dicapai melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses layanan publik di bidang perijinan, penanaman modal dan investasi serta perpajakan daerah. Layanan digital berbasis perbankan pun akan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran pemerintah dengan asumsi semakin transaksi

dibangun secara non tunai, maka akan semakin kecil peluang dan tingkat kebocoran anggaran yang dapat terjadi.

Penerapan teknologi dalam pelayanan publik tersebut diharapkan mampu menjadi *trigger* (pemicu) bagi pertumbuhan ekonomi kota yang secara nyata dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran serta menjadi faktor pendorong tumbuhnya wirausaha muda.

Tabel 8. Strategi dan Program Smart Economy

Strategi	Program dan Produk Smart City	Dinas Terkait
1. Mewujudkan tata kelola perencanaan, keuangan dan pelaporan yang terintegrasi	1. Penatausahaan Keuangan terintegrasi	BPPKAD LPSE – DISKOMINFO
	2. Pembayaran retribusi (e-retribusi) dan pajak daerah secara online (SIMPATDA)	BPPKAD
	3. Pengelolaan PBB terintegrasi	
	4. Pengelolaan aset daerah	
2. Mewujudkan pengadaan barang jasa yang transparan dan akuntabel	Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE)	LPSE – DISKOMINFO
3. Peningkatan Kualitas Perkoperasian	Manajemen Pengelolaan Perkoperasian di Kota Probolinggo	DKUPP
4. Peningkatan jumlah penduduk bekerja	Bursa Kerja Terintegrasi	Disnaker
5. Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat	Pelatihan Wirausaha Baru	
6. Peningkatan kualitas industri besar, kecil dan menengah	1. Penyediaan Probolinggo Mall UKM (e-business)	DKUPP
	2. Sistem Informasi Jenis Industri dan Hasil Produk bagi industri besar, menengah dan kecil	
	3. Pelatihan Kualitas produk dan berlegal bagi industri menengah dan kecil (IKM)	
	4. Akses Permodalan Dana Bergulir	
	5. Informasi Harga Bahan Pokok (aplikasi kemendag 2016)	
	6. Pemutakhiran database IKM/IKM/ KULINER dan aplikasi baru secara online tidak ada antar jemput PAK 2019	
	7. Fasilitasi Pembuatan KTA bagi IKMB,UKM	
	8. Fasilitasi Terulang efektif 2020	
	9. Informasi Berbasis Broadcast tentang produk olahan perikanan hasil laut berdasarkan wilayah per kecamatan	Dinas Perikanan

7. Meningkatkan fungsi lahan untuk budidaya ikan air tawar	Akselerasi pengembangan komoditas unggulan	Dinas Perikanan
8. Peningkatan akses informasi perikanan untuk meningkatkan pengetahuan nelayan	1. Nelayan Pintar	Dinas Perikanan
	2. Sistem Informasi Logistik Perikanan	
9. Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan	SPR Online	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10. Peningkatan populasi, kualitas dan produksi sapi potong	1. Penerapan SOP IB (Inseminasi Buatan) sekali inseminasi sekali kebuntingan	
	2. Sistem Identifikasi Perekaman Data Peternakan (Si-Pedet)	
11. Meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1. Pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian (pertanian vertikal)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2. Perbaikan lahan pertanian berbasis organik	
	3. Upsus komoditas pertanian	
	4. Penerapan mekanisasi pertanian	
	5. Fasilitasi sarana prasarana pertanian	
12. Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	1. Transfer teknologi pengolahan hasil pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2. Fasilitasi pemasaran hasil pertanian	
13. Meningkatkan ketentraman masyarakat konsumsi pangan asal hewan	Pelayanan keswan berbasis GIS (Geografis Informasi System)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14. Meningkatkan tertib tata ruang wilayah dan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau publik	Pemotongan yang ASUH	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

SMART LIVING

Pengembangan hunian dan pola kehidupan cerdas dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pada dasarnya dilaksanakan sebagai upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Strategi umum yang diterapkan yaitu meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan, informasi dan pengetahuan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat perkotaan. bukan hanya itu, kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan, informasi dan pengetahuann hidup sehat dan berkualitas bagi masyarakat diupayakan dengan menerapkan pola ruang terintegrasi yang memberikan kemudahan akses dan penyediaan sarana komunikasi publik terkait hal tersebut.

Pengembangan hunian cerdas tentunya memiliki kaitan yang erat dengan bagaimana cara manusia bergerak dari satu poin ke poin selanjutnya. Terbatasnya wilayah, kapasitas jalan, dan tingginya volume kendaraan menjadi faktor pendorong utama bagi pemerintah dan

swasta untuk bersama-sama bergerak dan membangun komitmen dalam menciptakan layanan transportasi publik yang berkualitas yang dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam mobilitasnya.

Tabel 9. Strategi dan Program Smart Living

Strategi	Program/Produk Smart City	Dinas Terkait
1. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	1. Pengembangan ATCS (<i>Area Traffic Control System</i>)	Dinas Perhubungan
	2. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi (Jalur Sepeda dan jalur pedestrian untuk disabilitas)	Dinas Perhubungan, DPUPR
	▪ Jalur Sepeda	Dinas Perhubungan, DPUPR
	▪ Jalur pedestrian untuk disabilitas	DPUPR
	3. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan angkutan pelajar	Dinas Perhubungan
2. Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan	4. Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan	DPUPR
	1. Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terpadu	DPUPR, Bappeda Litbang DPMPTSP, Satpol PP
	2. Peningkatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DLH
	3. Peningkatan konservasi kawasan lindung	DLH, Bappeda Litbang
	4. Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum, perumahan dan kawasan pemukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	5. Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	6. <i>Pilot Project Green Building</i>	DPUPR
	1. Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak (Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak / Siskia Cantik)	Dinas Kesehatan
	2. Sideka Pro (Sistem Informasi Pelaporan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo)	Dinas Kesehatan
	3. Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD
	4. Peningkatan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, RSUD
5. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan (air minum dan sanitasi)	DPUPR, Dinas Kesehatan PDAM	

SMART SOCIETY

Society atau masyarakat pada dasarnya dibangun dari individu-individu yang masing-masing memiliki ide, nilai moral dan etik, keyakinan, cara pandang, kebiasaan, dan pandangan masa depan yang sangat beragam. Dalam tatanan masyarakat cerdas, meningkatnya interaksi sosial masyarakat baik antar individu, antara individu dengan kelompok, ataupun antara kelompok dengan kelompok harus mampu membentuk sebuah tatanan yang produktif secara positif.

Secara luas, smart society yang disatukan oleh teknologi digital melalui layanan pemerintah dan institusi swasta, dapat mendorong perkembangan masyarakat ke arah yang lebih baik secara sosial, ekonomi dan membantu pemerintah dan institusi swasta mencapai efektivitas layanannya. Hal tersebut dapat tercapai jika terjadi perkembangan tiga arah, dimana literasi masyarakat, swasta dan pemerintah dalam hal teknologi informasi dan komunikasi berada dalam level yang sama.

Pemuda, diyakini sebagai bahan bakar perubahan dalam sebuah kota perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk diberdayakan dan dikembangkan karena pemuda pun diyakini sebagai sumber inovasi dan kreatifitas.

Sebagai aset serta subyek dari pembangunan sebuah kota, masyarakat harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Keamanan, keselamatan dan keberlangsungan hidupnya merupakan salahsatu tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan. Untuk dapat membantu pemerintah dan lingkungan tempat mereka berada, masyarakat berhak mendapatkan informasi, pengetahuan dan peningkatan kemampuan mitigasi bencana dalam mengantisipasi dan menghadapi hal-hal kebencanaan yang berpotensi muncul dan menimpa diri, keluarga, harta serta lingkungan mereka.

Pengembangan cerdas masyarakat kota yang inovatif dan kreatif dalam menciptakan daya saing dikembangkan dengan memanfaatkan potensi keragaman sosial-budaya sebagai modal dasar. Kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan perlu mendapat dukungan penelitian dan pengembangan dimana keterlibatan aktif masyarakat dibangun dengan semangat keterbukaan dan kerjasama.

Tabel 10. Strategi dan Program Smart Society

Strategi	Program dan Produk Smart City	Dinas Terkait
1. Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan dan Kearsipan	1. Melaksanakan perpustakaan keliling	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	2. Melaksanakan e-book	
	3. Melaksanakan restorasi arsip	
	4. Membentuk komunitas peduli arsip	
2. Peningkatan kualitas dan kemampuan PMKS melalui Upaya Rehabilitasi, Pemberdayaan dan	1. DITAMESRA (Disabilitas Tangguh Menuju Sejahtera)	Dinas Sosial
	2. Pendampingan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa)	

<p>Jaminan Perlindungan Sosial</p>	<p>3. Pelatihan Keterampilan Usaha dan Pemberian Bantuan Peralatan Usaha bagi Keluarga Miskin Produktif (termasuk KUBE)</p>	
	<p>4. Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia</p>	
	<p>5. Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Anak Terlantar dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)</p>	
<p>3. Peningkatan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta pelaporan pelaksanaan kegiatan intern secara online</p>	<p>Penyampaian informasi perda dan perkara melalui forum tatap muka, diskusi dan lomba pada program Duta Perda Perkada (DUDA), Sahabat Pol PP, Kelurahan Patuh Perda Perkada (KEPADA) serta pelaporan kegiatan anggota Satpol PP melalui e-lapor berbasis <i>live location</i></p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja</p>
<p>4. Peningkatan pemerataan pendidikan bermutu dan ekosistem pendidikan</p>	<p>1. Pengembangan system zonasi a. PPDB sistem zonasi on line, b. Redistribusi guru, c. Pemerataan sarana-prasarana</p>	<p>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</p>
	<p>2. Pengembang sekolah digital a. pembelajaran digital, b. evaluasi belajar digital, c. e-rapor (rapor digital) d. presensi digital</p>	
	<p>3. Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan/GTK a. E-gotik (data base GTK), b. Tes diagnostic kompetensi guru, c. Pelatihan guru berbasis hasil diagnostik, d. Pengembangan keprofesian berkelanjutan</p>	
	<p>4. E-planning dan E-budgetting sekolah</p>	
	<p>5. Penguatan manajemen berbasis sekolah berorientasi pelayanan publik berfokus pada mutu (MBS-BPP-BPM)</p>	
	<p>6. One school, one prominence (OSOP)</p>	
<p>5. Meningkatkan Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)</p>	<p>Mengadakan pelatihan Forum Pengurangan Resiko Bencana</p>	<p>BPBD</p>
<p>6. Meningkatkan Penanganan Tanggap Darurat saat Bencana</p>	<p>1. Melaksanakan pembinaan relawan penanggulangan bencana</p>	<p>BPBD</p>
	<p>2. Melaksanakan Penanganan Tanggap Darurat terpadu melalui Call Center 112</p>	<p>Satpol PP, BPBD dan Diskominfo</p>
<p>7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan pemberitaan yang positif</p>	<p>1. Pelatihan IT bagi kelompok KIM 2. Pelatihan Jurnalis bagi kelompok KIM</p>	<p>Diskominfo</p>

	3. Pelatihan Publik Speaking bagi kelompok KIM	
8. Memberikan perlindungan terhadap warga Negara dengan identitas kependudukan yang tunggal	1. Meningkatkan pelayanan pendaftaran kependudukan	Dispenduk Capil
	2. Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil	
	3. Sosialisasi administrasi kependudukan	
9. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang tentram dan tertib serta perlindungan masyarakat	1. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Bakesbangpol
	2. Program peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	

SMART ENVIRONMENT

Pengembangan lingkungan kota yang cerdas melalui pengelolaan sumber daya lingkungan menuntut strategi yang kuat dan mulai bergerak untuk memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang setiap saat.

Mengembangkan jaringan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan antara pemerintah, swasta, masyarakat dan kalangan akademisi sangatlah penting dalam memberi kekuatan dan daya dorong dalam upaya mengembangkan pengelolaan lingkungan udara dan air perkotaan berbasis teknologi.

Hal tersebut berlaku juga dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan hasil kegiatan perkotaan terkait dengan tingginya produksi sampah dan limbah dalam sebuah ekosistem kota. Pendekatan zero waste berbasis teknologi, penerapan konsep daur ulang dan skema circular economy berbasis sampah/limbah merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan.

Menyadari akan potensi berkurangnya sumber energi dunia berbasis fosil dan komitmen dunia untuk menekan tingkat polusi yang ditujukan untuk menghambat pemanasan global, mendorong dan memberi daya ubah bagi manusia untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya energi terbarukan, dengan mendorong seluruh potensi yang dimiliki kota.

Tabel 11. Strategi dan Program Smart Environment

Strategi	Program dan Produk Smart City	Dinas Terkait
1. Mengembangkan program proteksi lingkungan (Protection)	1. Program si Inol aja (Sistem Inovasi Layanan Arisan / angsuran Jamban Keluarga)	Dinas Kesehatan

	2. Meningkatkan pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	DLH
	3. Layanan Bebas Pulsa (Pengaduan, Pengangkutan sampah, sedot tinja, pemotongan pohon, pengambilan dan pengujian sampel lingkungan)	DLH
	4. Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan SDA	DLH
	5. Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau kota sebagai sarana rekreasi, paru-paru kota, mengurangi emisi	DLH
	6. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	DLH
2. Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah	1. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DLH
	2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui program Bank Sampah, TPST 3R, dan pemberdayaan komunitas peduli lingkungan	DLH
3. Mengembangkan tata kelola energy yang bertanggung jawab	1. Mengembangkan dan Memanfaatkan energi alternative dari persampahan dan limbah dari pabrik tahu	DLH
	2. Program Probolinggo Benderang (Revitalisasi PJU Kota)	Dinas Perhubungan



impressive
PROBOLINGGO
C I T Y

Rencana aksi smart city merupakan langkah awal dari suatu upaya perubahan yang sistematis. Perencanaan perubahan tersebut berangkat dari masalah yang jelas dan spesifik sehingga diharapkan mampu menciptakan rencana-rencana yang memiliki tolok ukur keberhasilan yang pasti. Oleh karena itu, rencana aksi smart city Kota Probolinggo disusun dengan menggunakan prinsip :

1. Spesific (spesifik)
2. Measureable (terukur)
3. Achievable (dapat dicapai)
4. Realistic (realistik)
5. Timebound (batas waktu)

Dalam rencana aksi ini, ditetapkan breakdown dari berbagai goal atau tujuan utama yang bertujuan untuk menjawab problem statement, aktivitas, objektif, hingga tugas-tugas (tasks) atau eksekusi kegiatan-kegiatan yang perlu dan akan dilakukan terkait perubahan yang akan dilakukan. Rencana aksi smart city dibagi dalam 5 (lima) Rencana, yaitu :

1. Penetapan Quick Wins Smart City
2. Pengembangan kebijaksanaan dan kelembagaan smart city
3. Rencana pembangunan infrastruktur pendukung smart city
4. Rencana pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung smart city
5. Rencana penguatan literasi smart city

Penetapan Quick Wins Smart City

Program Quick Wins adalah program yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD. Dari 6 elemen smart city, masing-masing elemen memilih dan menetapkan setidaknya satu quick wins. Quick wins yang dipilih merupakan program prioritas yang perlu dilakukan dengan segera dan berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, program quick wins ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Quick wins sendiri dibagi menjadi quick wins jangka pendek (tahun awal), quick wins jangka menengah (1-3 Tahun), dan quick wins jangka panjang (3-5 tahun).

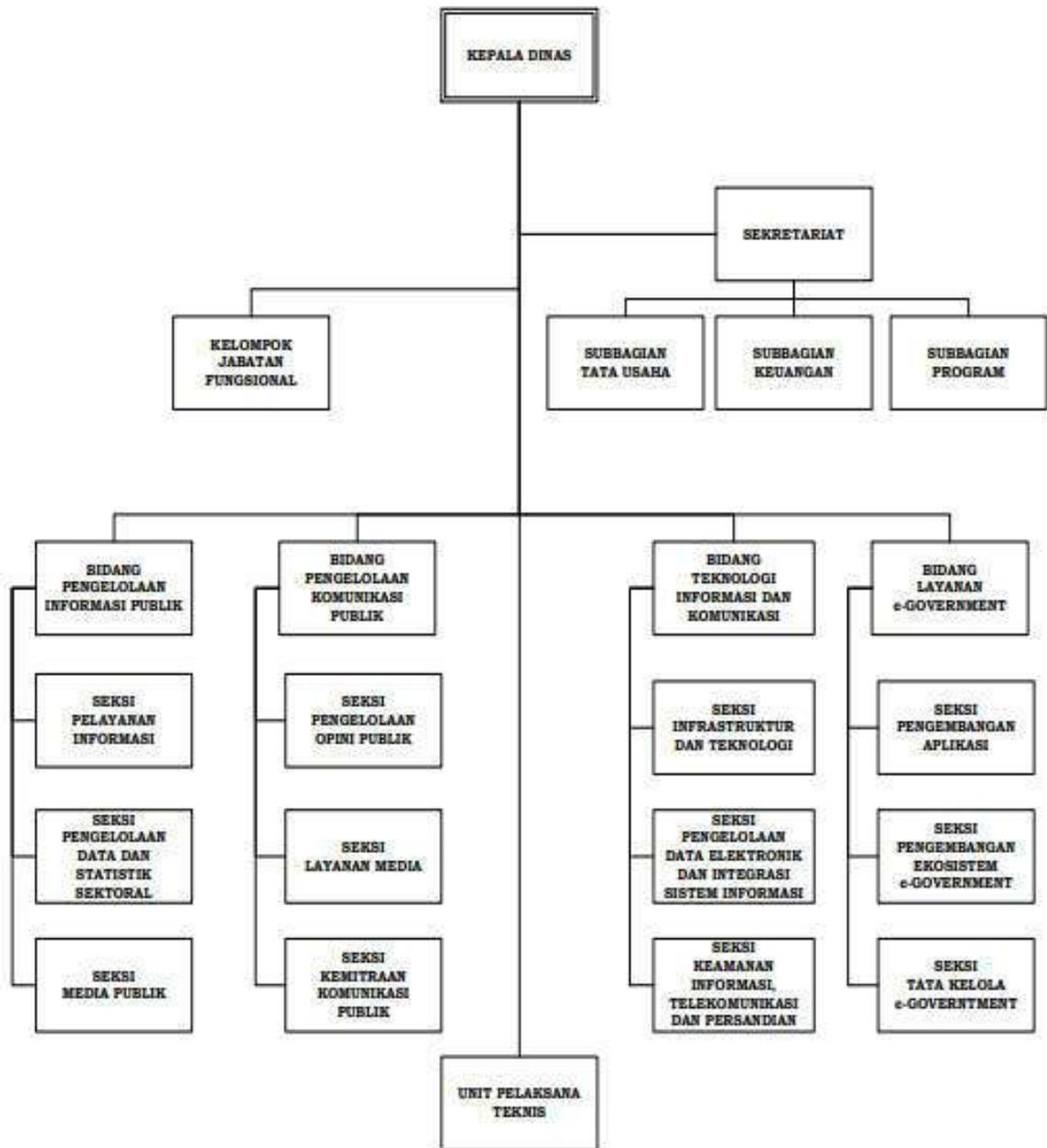
Berikut terdapat 12 program quick wins jangka pendek pada masing-masing Smart yaitu:

Tabel 12. Quicks Wins Smart City

NO	BENTUK	QUICK WINS	SKPD
1.	Smart Governance	1. Pelayanan Kependudukan 3 in 1 (Akte Kelahiran, KK, KTP)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPADU)	DPMPTSP
2.	Smart Branding	1. Pengembangan Kampung Tematik atau Tematik Kewilayahan	Bappedalitbang, PUPR, Perkim
		2. Mengembangkan Pola Promosi dan Navigasi Wisata Digital	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Smart Economy	1. SI-SAKA (Sekali Inseminasi Satu Kebuntingan)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2. SI-PEDET (Sistem Identifikasi Perekaman Data Peternakan)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.	Smart Living	1. Peningkatan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak)	Dinas Kesehatan
		2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi (Penyediaan Jalur Sepeda)	Dinas Perhubungan
5.	Smart Society	1. Pengembangan Sistem Zonasi (PPDB Sistem Zonasi Online, Redistribusi Guru, Pemerataan Sarana-Prasarana)	Dinas Pendidikan
		2. Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik Berfokus Pada Mutu (MBS-BPP-BPM)	Dinas Pendidikan
6.	Smart Environment	1. Peningkatan pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (e-portal samali)	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Program Probolinggo Benderang (Revitalisasi PJU Kota)	Dinas Perhubungan

Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Smart City Daerah

Pengelolaan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Struktur organisasi yang ada di Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:



Gambar 13. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo

Dalam Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo terdapat 4 Bidang dan 1 Sekretariat, yaitu:

1. Bidang Pengelolaan Informasi Publik
2. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
3. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Bidang Layanan e-Government

Pembangunan dan pengembangan Kota Probolinggo berwawasan smart city pada dasarnya merupakan salah satu upaya dalam rangka pembangunan wilayah dan sumber daya (manusia, alam, buatan, dan teknologi) secara optimal, efisien dan efektif. Pengembangan kebijakan dan kelembagaan smart city pada prinsipnya merupakan suatu bentuk daya dan upaya untuk :

1. Memberikan landasan, arah dan pedoman pelaksanaan pengembangan smart city;
2. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan smart city di Kota Probolinggo;

3. Memberikan kemudahan bagi kegiatan-kegiatan pengembangan smart city;
4. Mendorong kegiatan smart city untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien dan efektif;
5. Menjamin keberlangsungan program smart city yang tetap berwawasan lingkungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dari hasil survey di 39 OPD Pemerintah Kota Probolinggo yang telah dilaksanakan berhasil teridentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen TIK Kota Probolinggo yaitu:

- Pengolahan data hasil capaian masih bersifat manual.
- Kecepatan internet tidak stabil atau sering lemot.
- Data tidak terdistribusi dengan baik, sehingga OPD sering terlambat atau lama menerima informasi.
- Sumber Daya Manusia masih kurang berpotensi untuk mengaplikasikan TI dalam keseharian.
- Rencana kebutuhan terutama IT masih belum sempurna.
- Distribusi surat-menyurat masih manual.
- Komputer dan printer sering trouble dan penanganan kurang cepat.
- Koneksitas antara bidang dan OPD belum ada.
- Komputer banyak yang sudah tua.
- Instalasi jaringan internet kurang rapi.
- Banyak aplikasi yang sudah lama tidak diupdate.
- Beberapa OPD sudah memiliki Sistem Informasi manajemen namun belum dipergunakan.
- Beberapa sistem informasi yang ada sering drop, atau lambat loading.
- Beberapa sistem informasi yang ada tidak terintegrasi
- Beberapa OPD belum memiliki aplikasi yang mampu membantu pekerjaan tupoksi.
- Belum adanya informasi online tentang perubahan beberapa data.
- Pelatihan maintenance dan jaringan
- Pelatihan web, mySQL dan software microsoft
- Pelatihan SIM yang digunakan masing-masing OPD

Tabel 13. Analisa Kesenjangan Organisasi dan Manajemen TIK di Semua OPD

No	Kondisi Saat Ini di OPD	Target Mendatang	Analisa Kesenjangan
1	Pengolahan data hasil capaian masih bersifat manual	Terdapat SIM yang mampu mengolah data capaian.	Agar sistem informasi pengolahan data capaian dapat dibangun, maka perlu dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi aliran informasi secara detail pada OPD terkait. • Identifikasi pihak-pihak yang terlibat dengan aliran informasi

			<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kebutuhan tenaga operator dan staf yang diperlukan untuk menjalankan masing-masing aplikasi • Identifikasi seberapa efisien SIM membantu menjalankan aktivitas • Lakukan pemetaan antara pihak yang terlibat dengan staf yang tersedia di masing-masing OPD • Bangun SIM • Berikan pelatihan bagi pihak yang terlibat dalam pengoperasiannya.
2	Kecepatan internet tidak stabil atau sering lemot.	Stabilitas kecepatan internet pada seluruh OPD	<p>Ada beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan supaya kecepatan internet dapat stabil yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi jumlah SIM pada masing-masing OPD • Identifikasi tingkat kepentingan SIM bagi pelayanan masyarakat • Sampaikan kebutuhan stabilitasi internet pada DISKOMINFO beserta alasan • DISKOMINFO menyampaikan usulan peningkatan jumlah bandwidth secara bertahap kepada walikota • Pendistribusian bandwidth akan dimulai dari OPD yang lebih banyak membutuhkan internet dalam pelayanan terhadap masyarakat
3	Data tidak terdistribusi dengan baik, sehingga OPD sering terlambat atau lama menerima informasi	Terdapat SIM yang mampu terintegrasi dengan baik pada pihak-pihak terkait.	<p>Agar sistem informasi pengolahan data capaian dapat dibangun, maka perlu dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi aliran informasi secara detail pada OPD terkait. • Identifikasi pihak-pihak yang terlibat dengan aliran informasi • Identifikasi kebutuhan tenaga operator dan staf yang diperlukan untuk menjalankan masing-masing aplikasi • Identifikasi seberapa efisien SIM membantu menjalankan aktivitas • Lakukan pemetaan antara pihak yang terlibat dengan staf yang tersedia di masing-masing OPD • Bangun SIM

			<ul style="list-style-type: none"> • Berikan pelatihan bagi pihak yang terlibat dalam pengoperasiannya.
4	Beberapa SDM masih kurang berpotensi untuk mengaplikasikan TI dalam keseharian.	Peningkatan kualitas SDM dalam menguasai bidang TI sesuai kebutuhan	<p>Supaya SDM menguasai bidang TI sesuai dengan kebutuhan, maka perlu dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi jenis pelatihan TI yang diperlukan sesuai dengan jenis SIM yang digunakan • Identifikasi SDM pada masing-masing OPD yang perlu mendapat pelatihan TI • Laksanakan pelatihan TI sesuai kebutuhan
5	Rencana kebutuhan terutama IT belum sempurna	Menyempurnakan perencanaan IT	<p>Agar perencanaan IT dapat disempurnakan maka perlu dilakukan tahapan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi permasalahan dan harapan masing-masing seksi dan bidang tiap OPD • Klasifikasikan masing-masing permasalahan, apakah termasuk permasalahan jaringan, data, dll • Ambil permasalahan dengan klasifikasi terkait kebutuhan IT • Lakukan analisis permasalahan • Identifikasi pihak terkait permasalahan • Lakukan analisis aplikasi atau kebutuhan TI lain yang dapat menyelesaikan permasalahan • Lakukan pemetaan pengguna aplikasi dengan sumber daya yang ada • Lakukan pengusulan pembangunan atau kelengkapan kebutuhan IT pada kepala OPD masing-masing.
6	Distribusi surat menyurat masih manual	Pendistribusian surat menyurat dapat terotomatisasi	<p>Agar pendistribusian surat menyurat dapat terotomatisasi perlu dilakukan dengan tahapan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi aliran informasi secara detail pada OPD terkait. • Identifikasi pihak-pihak yang terlibat dengan aliran informasi • Identifikasi kebutuhan tenaga operator dan staf yang diperlukan untuk menjalankan masing-masing aplikasi • Ajukan pembangunan aplikasi surat-menyurat pada OPD dengan memanfaatkan hasil identifikasi sebagai alasan pendukung pembangunan aplikasi atau SIM

7	Komputer dan printer sering trouble dan penanganan kurang cepat	Mengurangi permasalahan komputer dan printer serta mempercepat penanganan permasalahan	<p>Agar permasalahan terkait komputer dan printer dapat berkurang dan diatangani dengan cepat, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi permasalahan apa yang sering terjadi pada komputer dan laptop • Jika permasalahan yang terjadi terbilang <i>simple</i>, ajukan penambahan atau penentuan PIC maintenance komputer atau laptop • Jika permasalahan sudah sering terulang dan sulit untuk diselesaikan, ajukan pengadaan inventaris baru berupa laptop dan komputer • Lakukan <i>maintenance</i> rutin setiap beberapa bulan sekali.
8	Koneksitas antara bidang dan OPD belum ada.	Terdapat SIM yang mampu terintegrasi dengan baik pada pihak-pihak terkait.	<p>Agar sistem informasi yang terintegrasi dapat dibangun, maka perlu dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi aliran informasi secara detail pada masing-masing bidang terkait. • Identifikasi pihak-pihak yang terlibat dengan aliran informasi • Identifikasi kebutuhan tenaga operator dan staf yang diperlukan untuk menjalankan masing-masing aplikasi • Identifikasi seberapa efisien SIM membantu menjalankan aktivitas. • Lakukan pemetaan antara pihak yang terlibat dengan staf yang tersedia di masing-masing OPD • Bangun SIM • Berikan pelatihan bagi pihak yang terlibat dalam pengoperasiannya.
9	Komputer banyak yang sudah tua	Pengadaan inventaris baru	<p>Supaya pengadaan inventaris baru dapat dilakukan maka perlu dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi permasalahan yang sering terjadi pada komputer • Identifikasi seberapa besar permasalahan yang diakibatkan oleh komputer tua dan kaitannya dengan aktivitas pelayanan masyarakat. • Identifikasi spesifikasi komputer yang sesuai dengan aktivitas yang dijalankan menggunakan komputer.

			<ul style="list-style-type: none"> • Ajukan pengadaan inventaris baru dengan hasil identifikasi sebagai pendukung alasan pengadaan
10	Instalasi jaringan internet kurang rapi	Perbaiki desain infrastruktur perkabelan pada masing-masing ruangan yang terhubung	<p>Dalam melakukan perbaikan ini, ada 2 alternatif yang dapat dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternatif pertama adalah dengan memanfaatkan SDM yang mengerti teknis jaringan untuk memindahkan dan menyusun kabel jaringan dengan rapi • Alternatif kedua adalah memanggil pihak provider untuk melakukan perbaikan desain infrastruktur pada masing-masing tempat yang terlibat.
11	Banyak aplikasi yang sudah lama tidak diupdate	Melakukan update aplikasi	<p>Agar update dapat dilakukan, maka beberapa hal yang dapat dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi spesifikasi komputer/laptop apakah tetap dapat menerima aplikasi jika diupdate atau tidak • Jika tidak, ada 2 alternatif yakni pertahankan aplikasi lama atau lakukan identifikasi SDM • Identifikasi kemampuan SDM dalam menjalankan aplikasi, apakah SDM tetap mampu memahami cara pengoperasian aplikasi jika dilakukan update atau tidak • Jika SDM tidak mampu maka pertahankan aplikasi, namun jika SDM mampu, maka lakukan upgrade dan sesuaikan komputer dengan spesifikasi kebutuhan update.
12	Beberapa OPD sudah memiliki sistem informasi manajemen namun belum dipergunakan	Menggunakan SIM yang sudah dimiliki	<p>Agar SIM dapat digunakan, maka yang perlu dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi alasan tidak dipergunakannya SIM • Jika permasalahan pada ketidak mampuan komputer atau laptop menampung aplikasi, maka ajukan pengadaan aset baru. • Jika permasalahan terdapat pada ketidakmampuan SDM, maka lakukan pelatihan terkait SIM yang dimiliki.
13	Beberapa sistem Informasi yang ada sering drop atau lambat loading	Sistem informasi yang ada dapat berjalan dengan lancar	<p>Agar sistem informasi dapat berjalan dengan lancar maka dapat dilakukan dengan tahap sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi apakah laptop/komputer aplikasi memiliki spesifikasi yang memadai atau tidak

			<ul style="list-style-type: none"> • Jika tidak, ajukan pergantian komputer atau laptop • Identifikasi versi aplikasi, apakah sudah diupdate atau belum. Jika belum, lakukan update. • Identifikasi bandwidth atau kecepatan internet yang tersambung. • Jika dibawah 1MB kemungkinan ini merupakan penyebab lambatnya SIM. Ajukan penambahan jumlah bandwidth.
14	Beberapa sistem Informasi yang ada tidak terintegrasi	Sistem informasi yang ada terintegrasi	<p>Untuk mengintegrasikan sistem informasi, hal yang dapat dilakukan antara lain adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tentukan tim integrator • Tentukan data yang perlu diintegrasikan • Undang pemilik data untuk koordinasi • Tentukan standar data dan mekanisme transfer data antar OPD • Buat aplikasi untuk mengelola integrasi data • Sosialisasikan mekanisme integrasi data ke semua OPD
15	Beberapa bidang OPD belum memiliki aplikasi yang dapat membantu pengerjaan tupoksi	Tersedianya aplikasi yang dapat membantu berjalannya tupoksi	<p>Agar aplikasi yang membantu berjalannya tupoksi dapat dibangun, maka perlu dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi aliran informasi secara detail pada OPD terkait. • Identifikasi pihak-pihak yang terlibat dengan aliran informasi • Identifikasi kebutuhan tenaga operator dan staf yang diperlukan untuk menjalankan masing-masing aplikasi • Identifikasi seberapa efisien SIM membantu menjalankan aktivitas • Lakukan pemetaan antara pihak yang terlibat dengan staf yang tersedia di masing-masing OPD • Bangun SIM • Berikan pelatihan bagi pihak yang terlibat dalam pengoperasiannya.
16	Belum adanya informasi online tentang perubahan beberapa data	Tersedianya website informasi online perubahan datan	<p>Untuk pembangunan website informasi online, perlu melakukan beberapa tahap berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi data apa saja yang memerlukan informasi secara online jika terjadi perubahan • Identifikasi pihak-pihak terkait

			<ul style="list-style-type: none"> • Ajukan pembuatan website informasi online kepada DISKOMINFO • Pemilihan admin yang akan menjadi pusat pengolah data dan manajemen aliran data pada website • Pembuatan website informasi yang dibutuhkan sesuai dengan data yang berkepentingan. • Lakukan seminar atau pelatihan penggunaan website • Berikasn penjelasan mengenai batasan hak akses website bagi masing-masing pihak disetiap OPD
17	Pelatihan maintainance dan jaringan	Terlaksananya pelatihan maintainance dan jaringan	<p>Untuk pelaksanaan pelatihan maintainance dan jaringan maka beberapa hal yang perlu dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cari tahu jenis jaringan yang dipakai • Cari tahu jenis kerusakan terkait IT yang sering terjadi • Identifikasi pengguna dan pihak yang bertanggungjawab atas jaringan maupun fasilitas IT tersebut • Identifikasi narasumber yang dapat memberikan pelatihan maintainance dan jaringan • Laksanakan pelatihan dengan cara in-house (di kantor Pemerintah Kota Probolinggo sendiri) atau di tempat lain
18	Pelatihan Web, mySQL dan software microsoft	Terlaksananya pelatihan web, mySQL dan software microsoft	<p>Untuk pelaksanaan pelatihan web, mySQL dan software microsoft maka beberapa hal yang perlu dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cari tahu tipe web, mySQL dan microsoft yang digunakan • Identifikasi pengguna dan pihak yang bertanggungjawab atas masing-masing tipe tersebut • Identifikasi permasalahan yang sering muncul terkait pelatihan yang diminta • Identifikasi narasumber yang dapat memberikan pelatihan maintainance dan jaringan • Laksanakan pelatihan dengan cara in-house (di kantor Pemerintah Kota Probolinggo sendiri) atau di tempat lain

			<ul style="list-style-type: none"> Laksanakan pelatihan dalam waktu yang berbeda-beda untuk setiap permasalahan, sehingga jika terdapat 1 pihak yang bertanggungjawab atas 2 masalah atau lebih, tetap dapat memegang tanggungjawab tersebut.
19	Pelatihan SIM yang digunakan oleh masing-masing OPD	Terlaksananya pelatihan SIM yang digunakan oleh masing-masing OPD	<p>Untuk pelaksanaan pelatihan SIM pada masing-masing OPD maka beberapa hal yang perlu dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cari tahu SIM apa saja yang digunakan pada masing-masing OPD Cari tahu tujuan pembangunan SIM tersebut Identifikasi pihak yang terkait atau terlibat dalam penggunaan SIM Identifikasi narasumber yang dapat memberikan pelatihan SIM tersebut Pelajari cara penggunaan SIM secara jelas dan Laksanakan pelatihan dengan cara in-house (di kantor Pemerintah Kota Probolinggo sendiri) atau di tempat lain.

Sedangkan di Dinas Komunikasi dan Informatika juga masih terjadi kesenjangan Organisasi dan Manajemen.

Tabel 14. Analisa Kesenjangan Organisasi dan Manajemen TIK di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo

No	Kondisi Saat Ini	Harapan Mendatang	Analisa Kesenjangan
1	Pemancar kadang trouble karena belum memakai fiber optik	Jaringan lebih memadai	<p>Untuk dapat menjadikan jaringan lebih memadai dengan menggunakan fiber optik maka langkah yang perlu dilakukan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Identifikasi masing-masing informasi terkait TI pada DISKOMINFO, baik software, hardware, jaringan, dll. Identifikasi SIM apa saja yang terdapat pada DISKOMINFO Identifikasi ruangan atau tempat keberadaan masing-masing SIM

			<ul style="list-style-type: none"> • Tentukan ISP dan bandwidth yang diinginkan • Lakukan penggambaran jaringan baru menggunakan fiber optik dengan mempertimbangkan, deskripsi SIM pada masing-masing ruangan dan jarak jangkauan router. • Ajukan perubahan jaringan menjadi fiber optik kepada kepala DISKOMINFO
2	Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang teknologi informasi	Sumber daya manusia ditambah	<p>Agar penambahan sumber daya manusia berlatar belakang IT bisa dilakukan maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi jumlah SDM yang mengerti IT saat ini • Identifikasi jumlah SDM yang dibutuhkan untuk memahami IT • Lakukan pelatihan penggunaan SIM sesuai dengan bidang masing-masing • Lakukan uji coba SDM setelah dilakukan pelatihan • Jika SDM belum mampu menguasai penggunaan SIM dan IT pada masing-masing bidang, lakukan pengusulan penambahan SDM dengan menjadikan hasil uji coba menjadi pendukung perlunya penambahan SDM
3	Belum adanya sarana dan prasaran untuk multimedia.	Pengadaan sarana dan prasarana untuk multimedia	<p>Untuk mengadakan sarana dan prasarana multimedia maka perlu dilakukan beberapa tahap :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kegiatan yang memerlukan multimedia • Identifikasi seberapa sering multimedia dibutuhkan dalam melakukan tupoksi • Lakukan perhitungan biaya sewa multimedia berdasarkan jumlah kebutuhan pertahun serta perhitungan pembelian sarana prasarana • Bandingkan hasil perhitungan

			<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kebutuhan pengadaan aset lain yang lebih mendesak • Bandingkan urgenitas aset lain dan multimedia • Ajukan pengadaan sarana dan prasarana multimedia kepada pimpinan
--	--	--	---

Landasan hukum yang ada saat ini masih memberikan panduan yang umum. Pada tahapan implementasi yang tertinggi, implementasi SI/TI harus mengakomodasi berbagai aktivitas-aktivitas elektronik termasuk tanda-tangan elektronik, pengarsipan elektronik, kebebasan informasi, perlindungan data, kejahatan komputer, dan masalah HAKI dan *copyrights*. Menggunakan aplikasi SI/TI berarti menandatangani kontrak atau perjanjian digital, yang harus dilindungi dan diakui oleh hukum formal, yang melindungi dan mengamankan aktivitas-aktivitas atau proses semacam ini. Perlindungan dan reformasi hukum perlu dilakukan untuk memastikan, diantaranya, privasi, keamanan dan pengakuan hukum dari interaksi elektronik dan tanda tangan elektronik.

Teknologi informasi baik yang bersifat sistem informasi biasa sampai aplikasi SI/TI yang terintegrasi membutuhkan seperangkat regulasi yang lengkap baik dari segi konseptual sampai operasional teknis di level terbawah. Pemikiran ini disebabkan selama ini teknologi informasi masihlah bersifat “rumit” bagi para birokrat dan jajaran pegawainya, terutama yang sudah berkaitan dengan perubahan proses bisnis.

Oleh karena itu dalam mengimplementasikan SI/TI ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Probolinggo yaitu sebagai berikut:

- Kesiapan seperangkat regulasi pendukung Undang–Undang untuk menjabarkan hal teknis.
- Koordinasi yang kuat antar lintas departemen atau lembaga negara, karena bagaimanapun juga setiap perubahan biasanya mengikutsertakan kerjasama antar departemen dan lembaga negara.
- Kemampuan dan kapabilitas yang mendalam mengenai proses bisnis dan teknologi informasi dari individu yang terlibat dalam penyusunan regulasi.

Berdasarkan uraian bagian sebelumnya maka jenis pekerjaan yang berkaitan dengan aspek Organisasi dan Manajemen TIK yang perlu dilaksanakan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 15. Jenis Pekerjaan Organisasi dan Manajemen TIK Mendatang

Kategori Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Deskripsi Pekerjaan
Pelatihan	Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen	Pelatihan ditujukan kepada staf/ operator yang masih merasa kesulitan mempergunakan sistem informasi tertentu
	Pelatihan maintenance	Pelatihan ini ditujukan kepada para karyawan bagian IT untuk memperbaiki permasalahan terkait software maupun hardware dalam skala menengah kebawah, termasuk pelatihan pengenalan bagian-bagian hardware komputer dan laptop, instalasi, dll.
	Pelatihan Jaringan	Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan infrastruktur TIK, setting jaringan, trouble shooting, instalasi dll
	Pelatihan TIK	Pelatihan TI yang diselenggarakan dapat bervariasi dan diikuti oleh staf untuk meningkatkan kompetensi TI staf yang ada di semua OPD. Jenis pelatihan TI dapat bervariasi seperti: Pelatihan pemrograman website, pelatihan mySQL, pelatihan software microsoft, pelatihan manajemen proyek TI, pelatihan audit sistem informasi, pelatihan tata kelola TI, dll
	Pelatihan SIM	Pelatihan ini diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada staf dalam menggunakan SIM yang terdapat pada OPD masing-masing. Pelatihan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, baik keuangan, surat-menyurat, arsip, dll. Sehingga SIM yang telah dibangun dapat dipergunakan se-efektif mungkin untuk membantu pelayanan pemerintah terhadap rakyat
Pengelolaan SDM	Rotasi Staf	Pekerjaan ini diperlukan dalam rangka menempatkan staf sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Selain itu rotasi staf diperlukan untuk menangani komplain dari website.
	Pembagian PIC	Pekerjaan ini diperlukan agar masing-masing SDM memiliki tanggungjawab. Sehingga dapat lebih fokus dan mendalami permasalahan terkait tanggungjawab masing-masing. Dan menghindari adanya 2 tanggungjawab besar atau lebih yang dipegang oleh 1 orang.
	Penambahan karyawan yang <i>qualified</i>	Pekerjaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas yang disediakan pada masing-masing OPD dapat dijalankan seefektif mungkin, sehingga jika dibutuhkan, diperlukan penambahan SDM yang qualified untuk mengelolanya.

Kategori Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Deskripsi Pekerjaan
	Pembentukan tim sinergi TI antar OPD	Tim ini bertugas untuk mengelola sinergi TI antar OPD. Tim berasal dari perwakilan Dinas Kominfo dan OPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
Dokumentasi	Penyusunan standar dokumen pengadaan TI	Target pekerjaan ini adalah menghasilkan berbagai template dokumen dapat dipergunakan oleh semua OPD yang akan melaksanakan pengadaan bidang Teknologi Informasi
	Penyusunan standar layanan TI	Target pekerjaan ini adalah menghasilkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk Manajemen Layanan TI untuk setiap layanan antara lain: Service Level Requirement, Service Level Agreement, dll. Untuk standarisasi dokumen dapat dipergunakan standar ITIL.
Peraturan dan Kebijakan	Penyusunan peraturan dan kebijakan untuk pengisian data LPSE	Pekerjaan ini adalah membuat peraturan pengisian data LPSE bagi. Peraturan ini diperuntukan semua OPD. Setelah peraturan dibuat perlu disosialisasikan ke semua OPD. Dan dimonitor pelaksanaannya.
	Penyusunan peraturan dan kebijakan evaluasi laporan secara reguler	Peraturan ini diperlukan supaya semua pihak yang berkaitan dengan evaluasi laporan dapat melakukan evaluasi secara reguler setiap 3,6 dan 12 bulan.
	Penyusunan peraturan dan kebijakan manajemen TI	Ada 4 jenis peraturan dan kebijakan yang harus dipersiapkan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian, perencanaan dan pengorganisasian • Pembuatan, Pengadaan dan Implementasi • Penyerahan, Pelayanan dan Dukungan • Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian
	Penyusunan peraturan dan kebijakan tata kelola TI	Peraturan dan kebijakan yang harus dipersiapkan berkaitan dengan proses: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi, pengarahan dan pengawasan
Sosialisasi	Sosialisasi Peraturan	Peraturan yang berkaitan dengan TI perlu disosialisasikan ke seluruh OPD. Pelaksanaan peraturan perlu dimonitor dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana OPD memahami peraturan yang sudah dibuat.
	Sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	Sosialisasi ini bertujuan memberikan pencerahan bagi seluruh staf perwakilan OPD mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberlakukan di Indonesia.
	Sosialisasi SIM	Pekerjaan ini untuk memberikan pencerahan bagi siapa saja yang terkait SIM tersebut agar mengetahui adanya fasilitas yang diberikan untuk

Kategori Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Deskripsi Pekerjaan
		mempermudah pekerjaan mereka sekaligus memperkenalkan bagaimana cara penggunaannya.
Pengembangan	Penyempurnaan rencana kebutuhan IT	Pekerjaan ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyimpulkan rencana kebutuhan IT secara lebih jelas dan detail untuk memperoleh suatu gambaran kebutuhan IT yang secara efektif dan efisien dapat membantu pekerjaan para karyawan dalam melayani masyarakat.
	Pembangunan aplikasi	Pekerjaan ini bertujuan untuk melakukan perencanaan hingga pembangunan aplikasi yang dibutuhkan oleh unit tertentu dengan tujuan mempercepat pelayanan masyarakat.
	Peningkatan bandwidth	Pekerjaan ini bertujuan untuk menambah kecepatan internet yang sering lambat atau lemot, hingga mengganggu pekerjaan karyawan.

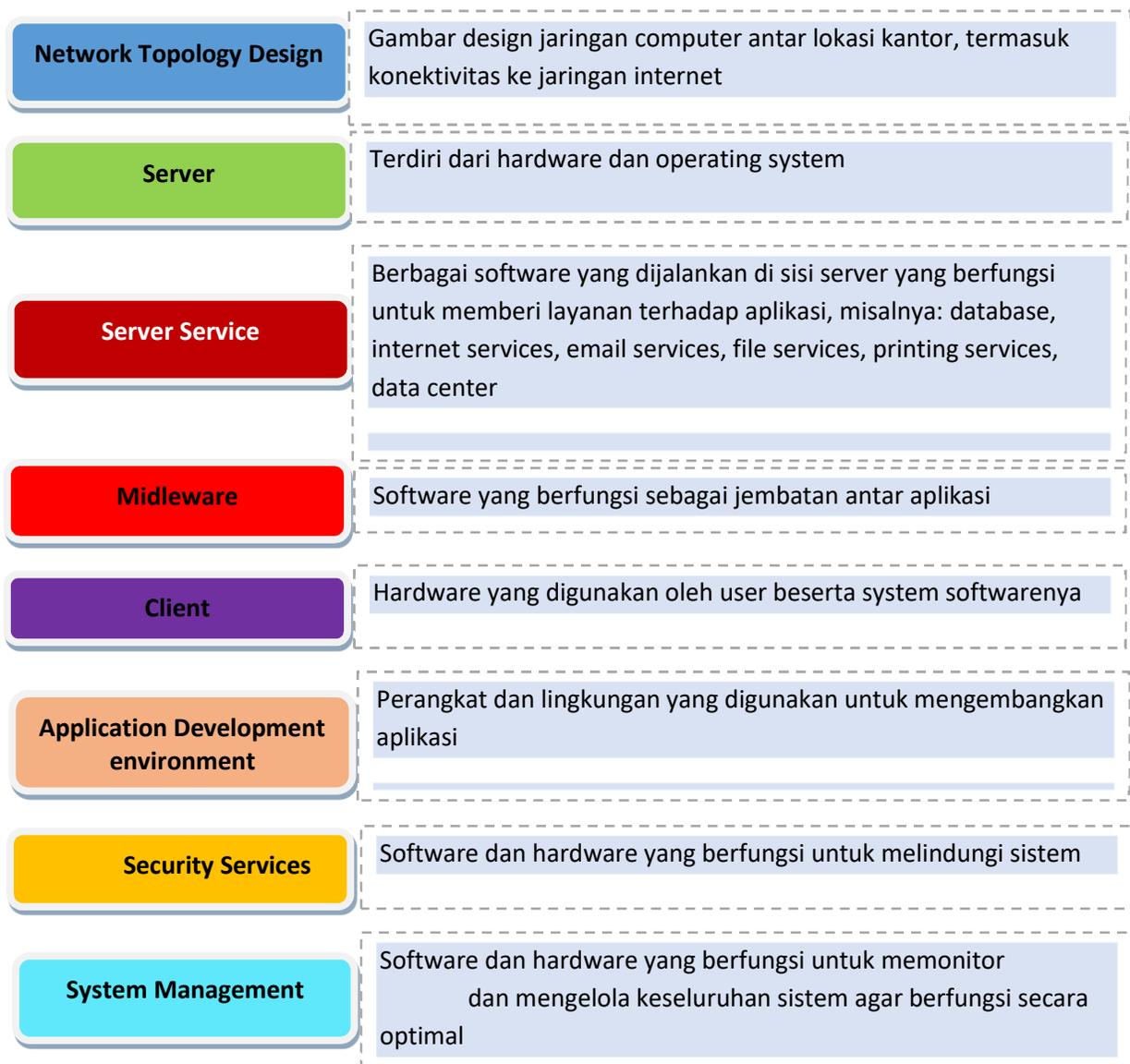
Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City

Untuk menerapkan e-Government pada pemerintahan Kota Probolinggo yang merupakan garis dasar modernisasi pemerintah dalam rangka menuju Pemerintahan yang transparan, *accountability* dan bersih, dibutuhkan penyesuaian, sentralisasi dan keterbukaan akses masyarakat serta pelaku usaha pada pelayanan Pemerintah yang efektif dan efisien dengan menggunakan Teknologi Informasi. Pemerintah kota harus mempunyai sebuah sistem jaringan komputer yang handal dan memadai dalam melayani proses pertukaran data dan informasi. Hal ini cukup penting mengingat kuantitas data yang harus diolah, banyaknya unit kerja yang harus dilayani, serta kecepatan data yang harus disajikan.

Dengan Wilayah pemerintahan Daerah yang cukup besar, Pemerintah Kota Probolinggo dituntut untuk dapat melayani Masyarakat dengan Baik, sampai pada daerah terjauh dengan pusat pemerintahan. Salah satu cara yang digunakan adalah Terhubungnya Seluruh Kelurahan/Desa dengan Jaringan Internet dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan pelayanan masyarakat

Komunikasi data baik itu suara, pertukaran data, maupun multimedia dapat dilakukan melalui jaringan, baik dalam skala lokal melalui LAN, skala regional melalui WAN maupun global melalui internet. Konektivitas LAN telah menjadi kebutuhan penting bagi sebuah organisasi karena dengan ketersediaan LAN tersebut, banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh organisasi baik melalui peningkatan efisiensi kerja maupun penghematan biaya yang cukup signifikan. Penghematan biaya dapat terjadi karena dengan ketersediaan konektivitas LAN, sebuah organisasi dapat melakukan optimalisasi proses bisnis.

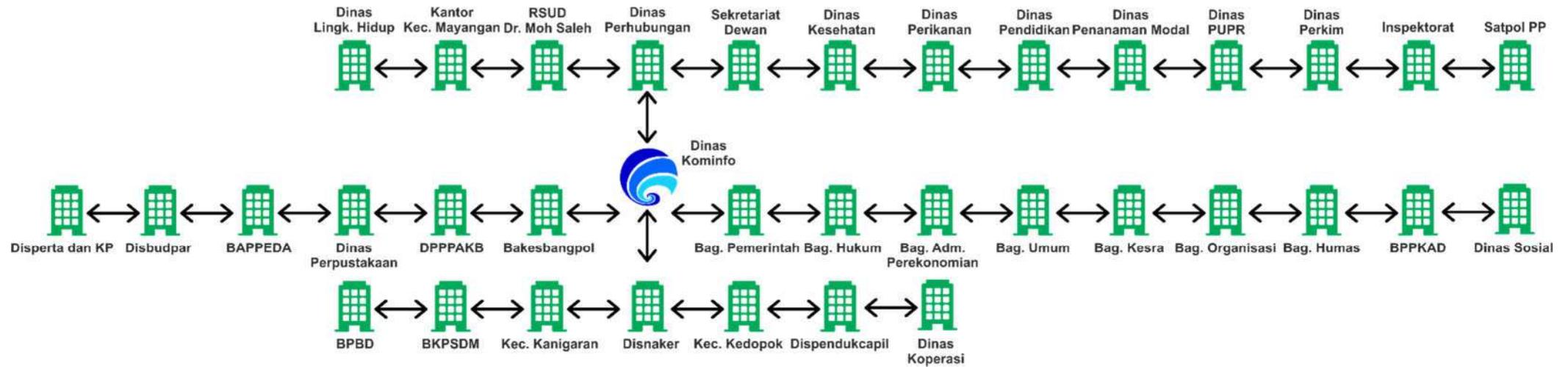
Tinjauan terhadap infrastruktur Jaringan TIK diperlukan untuk mengetahui tingkat kesiapan infrastruktur jaringan TIK yang dapat menunjang aplikasi-aplikasi yang diperlukan oleh instansi yang bersangkutan. Dan berikut ini adalah komponen pada Infrastruktur TIK yang merupakan penentu, agar infrastruktur jaringan TIK dapat berjalan dengan baik :



Gambar 14. Tinjauan Infrastruktur Jaringan TIK

Master Plan pengembangan infrastruktur jaringan pada tahapan persiapan, yang pertama harus dilakukan adalah : **Membangun jaringan fiber optik pada seluruh wilayah perangkat kerja (Dinas / Bagian / badan / Bidang / Kecamatan / kelurahan).**

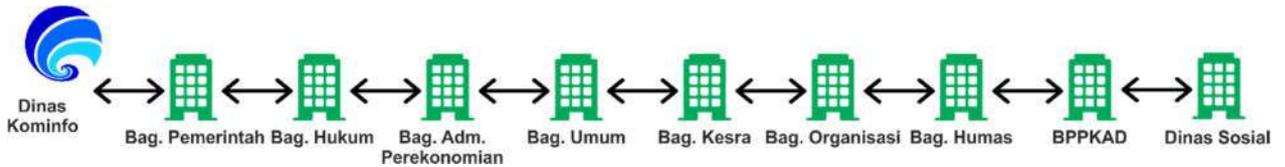
Membangun jalur Serat Optik sesuai dengan peta jaringan seperti gambar berikut ini :



Gambar 15. Jalur pembangunan serat optik pada tiap wilayah kerja Pemerintah

Perencanaan pembangunan jalur fiber optic dilakukan pada tahun pertama dan pada tahun kedua untuk menghubungkan seluruh titik jaringan yang ada di Kota Probolinggo. Pembuatan jalur serat optik untuk seluruh titik jaringan yang berjumlah 39 bagian tersebut dapat dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Wilayah Timur, Wilayah Selatan dan Wilayah Barat.

Untuk Wilayah Timur meliputi :



Gambar 16. Pembangunan serat optic wilayah Timur

1. Bagian Pemerintahan
2. Bagian Hukum
3. Bagian Administrasi Perekonomian
4. Bagian Umum
5. Bagian Kesejahteraan Masyarakat
6. Bagian Organisasi
7. Bagian Humas
8. BPPKAD
9. Dinas Sosial

Untuk Wilayah Selatan meliputi :



Gambar 17. Pembangunan serat optic wilayah Selatan

1. Kantor Kecamatan Kanigaran
2. Dinas Tenaga Kerja
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4. Dinas Koperasi
5. BKPSDM

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
7. Kantor Kecamatan Kedopok

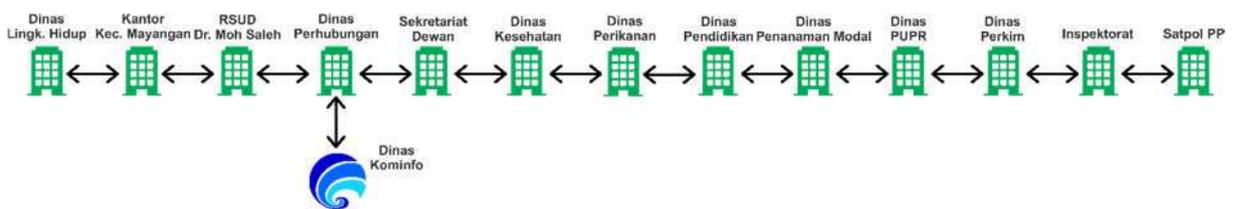
Untuk Wilayah Barat meliputi :



Gambar 18. Pembangunan serat optic wilayah Barat

1. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3. BAPPEDA
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5. DPPPAKB
6. BAKESBANGPOL

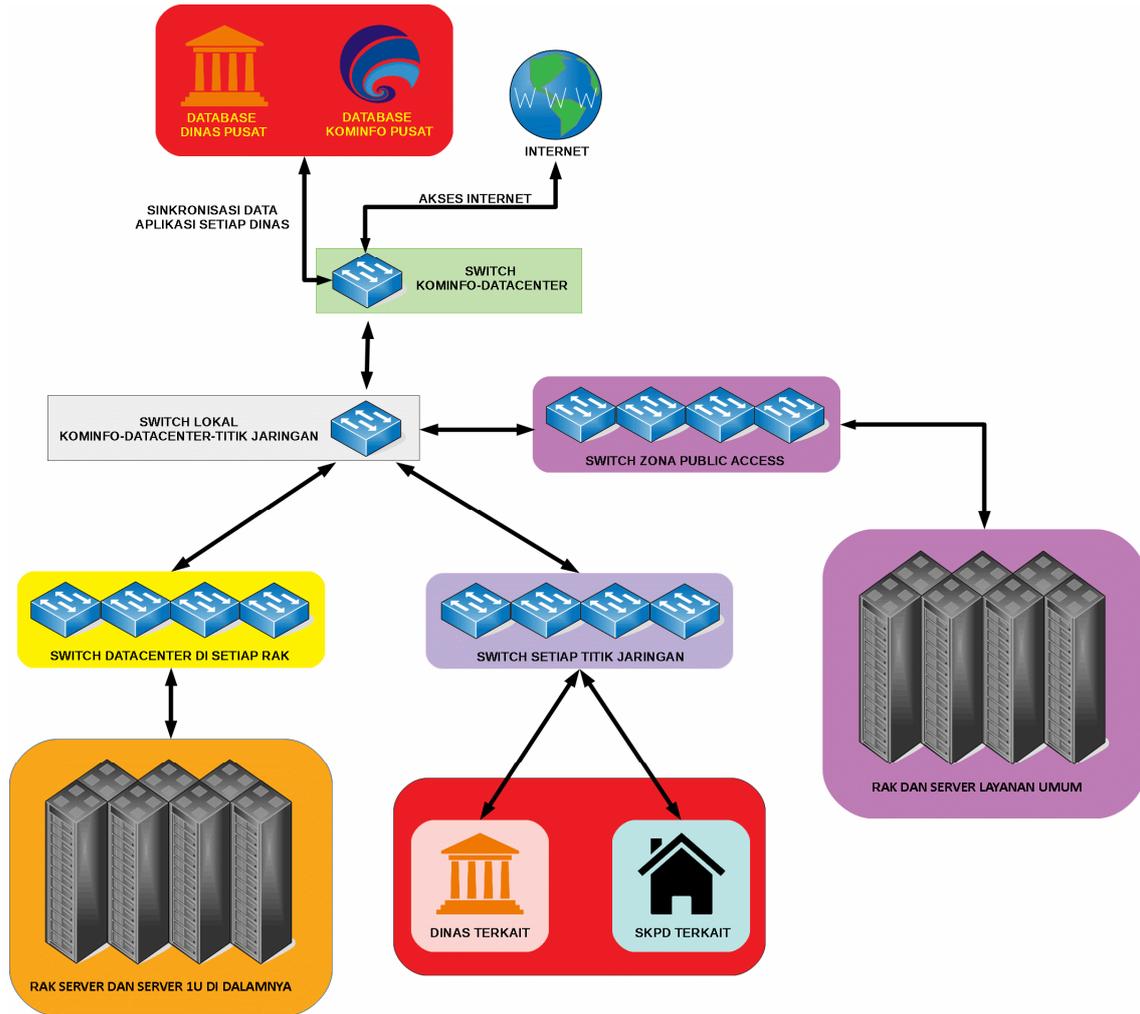
Untuk Wilayah Utara meliputi :



Gambar 19. Pembangunan serat optic wilayah Utara

1. Dinas Perhubungan
2. Sekretariat Dewan
3. Dinas Perikanan
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas PUPR
6. Dinas Perumahan Dan Permukiman (DISPERKIM)
7. Inspektorat
8. Satpol PP
9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
10. Dinas Kesehatan
11. RSUD dr Moh Saleh
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Kantor Kecamatan Mayangan

Setelah jalur internet dibangun, maka agar data dapat terpusat, dan tidak terjadi redundancy data maka Pemerintah Kota Kota Probolinggo akan membangun data center. Membangun datacenter di Dinas KOMINFO ditujukan untuk menghubungkan jalur intranet dan mempersiapkan migrasi layanan menjadi terpusat pada datacenter untuk seluruh perangkat kerja pemerintah Kota Probolinggo



Gambar 20. Rancangan topologi jaringan secara umum pada data centre dan seluruh titik jaringan

Tabel 16. Time Table Tahapan Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK–Pemerintah Kota Probolinggo Selama 5 (lima) Tahun

No	Uraian Kegiatan	Tahapan Implementasi																			
		Tahun ke1				Tahun ke 2				Tahun ke 3				Tahun ke 4				Tahun ke 5			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Membangun jaringan fiber optik pada seluruh wilayah perangkat kerja (OPD) Kota Probolinggo	■	■	■	■	■	■	■	■												
2	Membangun Pusat Data (Data Center) secara terpusat yang bertempat di Gedung Dinas Kominfo									■	■	■	■								
3	Membangun Disaster Recovery Center di Dinas Kominfo Jatim (Surabaya)													■	■	■	■				

4	Monitoring bandwidth untuk setiap aplikasi dan seluruh jaringan yang ada. Dan optimasi layanan yang ada di seluruh jaringan datacenter dan di seluruh titik jaringan.																				
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City

Secara ideal, Pemerintah Daerah harus memiliki aplikasi e-government yang dapat digunakan untuk mendukung semua aktifitas yang dijelaskan pada cetak biru informasi. Aplikasi-aplikasi tersebut disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan kondisi dari Pemerintah Daerah sendiri. Menurut Ely Sufianti (2006) perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah secara signifikan. Sejalan dengan berkembangnya penggunaan internet di lingkungan pemerintah dan masyarakat, maka pemerintah menyikapinya dengan menggunakan teknologi tersebut sebagai alat untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Untuk implementasi e-Government pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government yang dituangkan melalui INPRES No.3 tahun 2003. Sedangkan di tingkat pemerintah daerah (PEMDA), masing-masing mengembangkan situs resmi daerah yang berisi informasi mengenai daerah masing-masing. Terlebih masyarakat saat ini sudah menyadari pentingnya transformasi informasi secara cepat sehingga telah memiliki kesadaran yang baik dalam hal penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi. E-Government diyakini mampu mengoptimalkan kualitas layanan publik.

Adapun manfaat dari pengembangan e-Government adalah:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada *stakeholder* (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

Identifikasi aplikasi eksisting dan pemetaan aplikasi pada aktifitas pemerintah ditujukan untuk mengetahui dukungan aplikasi-aplikasi yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo terhadap aktifitas pemerintahan. Hasil pemetaan akan digunakan sebagai bahan analisis untuk menentukan target aplikasi yang akan dibangun mendatang. Dan sejauh ini, Pemerintah Kota Probolinggo saat ini memiliki 102 Aplikasi.

Tabel 17 Daftar Aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo

Nama Software Aplikasi	Versi Aplikasi	Tahun Beli/ Buat/ Hibah/ Lainnya	Status Aplikasi (Beli/ hibah/ sewa/ buat sendiri/ lainnya)	Sistem Manaje men Basis Data	Bahasa Pemrograman	Fungsi Software Aplikasi
1. Aplikasi Manajemen Surat	V2	-	Buat Sendiri	-	-	Menginput data surat masuk dan surat keluar
2. SIMRAL	V.2	2017	Pusat	My SQL	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian dan peyusunan kebijakan nasional dibidang pengkajian dan penerapan teknologi • Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT • Pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintahan dan swasta dibidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas serta membina alih teknologi

Nama Software Aplikasi	Versi Aplikasi	Tahun Beli/ Buat/ Hibah/ Lainnya	Status Aplikasi (Beli/ hibah/ sewa/ buat sendiri/ lainnya)	Sistem Manajemen Basis Data	Bahasa Pemrograman	Fungsi Software Aplikasi
						<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga
3. SMEP	V.1	2017	Pusat	--	PHP, HTML	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi untuk Monitoring dan Evaluasi hasil Pembangunan (realisasi fisik dan keuangan)
4. Quantum GIS	2.19	-	Open Source	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan Data Spasial (Peta) dan Atributnya
5. SIMDA BMD	V.2.0	-	Beli	-	Visual Basic	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui aset barang milik daerah
6. SIM Gaji PNS	-	2016	Beli	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk informasi Gaji PNS
1. SIM Persediaan Barang Daerah	V1.0.R.0.4	2017	Beli	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui ketersediaan persediaan barang daerah (atk, alat kebersihan, cetak, materai)
8. SI ALAY (Bagian Adm Pembangunan)	-	2017	Beli	My SQL	PHP, HTML, Java Script, Symphony Framework	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sistem dokumentasi berkas paket pengadaan beserta surat-menyurat
9. AMA (Aplikasi Management Arsip)	1.008	Tahun beli : 2016 (versi awal) Tahun 2017 versi 1.008	Beli	My SQL	Visual Basic	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk penyimpanan file arsip bagian humas dan protokol
10. SIMAYA	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk penginputan surat masuk, dan surat keluar
11. SIRUP	2.3	2017	Pusat	-	PHP	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Penginputan Pengadaan Barang pada Bagian Humas dan Protokol

Nama Software Aplikasi	Versi Aplikasi	Tahun Beli/ Buat/ Hibah/ Lainnya	Status Aplikasi (Beli/ hibah/ sewa/ buat sendiri/ lainnya)	Sistem Manajemen Basis Data	Bahasa Pemrograman	Fungsi Software Aplikasi
12. SIM KESRA	Versi 1.0	2017	Beli	My SQL	Codeigniter	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan informasi data yang dibutuhkan dalam bidang kesejahteraan masyarakat
13. Aplikasi Anjab	-	2014	Beli	My SQL	HTML , PHP	<ul style="list-style-type: none"> Untuk melakukan analisis jabatan tiap OPD diseluruh Kota Probolinggo
14. SAKIP	-	2015	Beli	My SQL	HTML , PHP	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
15. Web Bagian Umum	-	2014	Buat Sendiri	My SQL	HTML , PHP	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Saluran Informasi Bagian Umum kepada masyarakat
16. Si JinGGo (Sistem Jaringan Informasi Good Governance)	Apem 1.0	2017	Beli	My SQL	HTML , PHP	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan dan Pusat Data tentang Monografi Kelurahan, Evaluasi Perkembangan Kelurahan, dan Laporan Kependudukan
17. Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	-	2014	Buat Sendiri	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan
18. Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Pembangun	-	2014	Buat Sendiri	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai evaluasi hasil pembangunan
19. Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	2014	Buat Sendiri	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi memuat data-data statistik daerah
20. SIMKASDA	-	2016	Beli	MY SQL	PHP	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
21. APLIKASI PAJAK DTH RTH	-	2006	Beli	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Rekapitulasi Transaksi Harian dan Daftar Transaksi Harian

Nama Software Aplikasi	Versi Aplikasi	Tahun Beli/ Buat/ Hibah/ Lainnya	Status Aplikasi (Beli/ hibah/ sewa/ buat sendiri/ lainnya)	Sistem Manajemen Basis Data	Bahasa Pemrograman	Fungsi Software Aplikasi
22. SISMIOP	-	2013	Beli	-	-	• Sistem Administrasi pembayaran pajak pbb-p2
23. MAPINFO	-	2013	Beli	-	-	-
24. SMARTMAP	-	2013	Beli	-	-	• Berkaitan dengan pengelolaan peta sismiop dan sistem informasi geografis
25. PERDIN	-	2018	Beli	-	-	-
26. HIBAH BANSOS	-	2017	Beli	-	-	-
27. Website BPPKAD	-	2018	Beli	-	-	-
28. SIMPADA (Pajak Daerah) milik BPPKAD	-	2018	Beli	-	-	Sistem Informasi Pajak Daerah
29. Cell Plan	-	2013	Beli	-	PHP	Pengajuan Lokasi Pembangunan Menara Seluler
30. SIMPUSTRONIK Puskesmas	1.0	2015	Beli	PGSQL	PHP, HTML, Java	Perekaman pelayanan di puskesmas (UKP)
31. SISKIA	-	2017	Beli	MY SQL	PHP, HTML, Java	Catatan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas di seluruh fasyankes yang melayani
32. SIDEKA Pro	-	2018	Beli	MY SQL	PHP, HTML, Java	Pelaporan data kesehatan dari klinik dan rumah sakit
33. SIP	-	2017	Beli	MY SQL	PHP, HTML, Java	Pelaporan capaian data kesehatan untuk diluar gedung puskesmas (UKM)
34. SARAPATI (Kominfo)	-	-	Hibah Lamsaneg	-	-	Surat Menyurat
35. SIPADU	V.2	2017	Hibah	My SQL	PHP	Pelayanan Perizinan
36. DAPODIK	-	-	-	-	-	Data Pokok Pendidikan
37. Laporan Individu	-	-	-	-	-	Laporan Kondisi Sekolah
38. VERVAL PTK	-	-	-	-	-	Memperbarui Data Pendidik
39. SIM Tunjangan	-	-	-	-	-	Manajemen Tunjangan Profesi Guru
40. E-Gotik	-	-	-	-	-	Data Kepegawaian / ASN
41. SIM PMP	-	-	-	-	-	Mengetahui Ketercapaian Mutu Pendidikan
42. SIM BIOUN SD & SMP	-	-	-	-	-	Mendata Peserta UN SD & SMP
43. SIM PIP	-	-	-	-	-	Mendata Siswa Miskin Berprestasi
44. SIM Akreditasi	-	-	-	-	-	Mendata Akreditasi Sekolah
45. SIM BIOUN PAKET A B C	-	-	-	-	-	Mendata Peserta UN Paket A B C

Nama Software Aplikasi	Versi Aplikasi	Tahun Beli/ Buat/ Hibah/ Lainnya	Status Aplikasi (Beli/ hibah/ sewa/ buat sendiri/ lainnya)	Sistem Manajemen Basis Data	Bahasa Pemrograman	Fungsi Software Aplikasi
46. DAPODIK MASIF	-	-	-	-	-	Data Pokok Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif
47. Satu Data KKP	--	2017	Pusat		PHP	Data produksi perikanan secara nasional
48. INLIS LITE	III	-	Pusat	My SQL	-	Penyelenggaraan layanan perpustakaan mulai dari pengolahan bahan pustaka, pendaftaran anggota perpustakaan, peminjaman, sampai dengan pengembalian buku
49. Aplikasi Pemantau CCTV	1.0	2017	Beli	My SQL	-	Live streaming CCTV pada kota Probolinggo
50. SIM PKB (Penguji Kendaraan Bermotor)	1.0	2016	Beli	Delphi	-	Pengujian kendaan bermotor lebih cepat dan akurat serta mecegah human error
51. Sisko TLKN	1.0	2016	Pusat	-	PHP	Rekom/Mutasi paspor calon TKI
52. Aplikasi AKI	1.0	2010	Pusat	-	PHP	Kartu AKI / Kuning
53. BKOL	1.0	2012	Pusat	-	PHP	Bursa kerja online
54. KIOS 3IN1	1.0	2014	Pusat	-	PHP	Pelatihan , Sertifikasi
55. E-Formasi	-	-	-	-	-	Mengupate data kebutuhan pegawai
56. PUPNS	-	-	-	-	-	Mengupdate data pribadi PNS
57. SIP2DK	-	-	-	-	-	Mengupdate data ketenagakerjaan
58. Aplikasi Pendataan E-TLH	-	2017	Buat Sendiri	-	-	Mendata E-TLH
59. SIMLUHTANI	-	2014	-	-	-	Entry data-data kelompok petani dan gapoktan se-kota probolinggo
60. E-proposal Kementrian Pertanian	-	2015	-	-	-	Pengajuan Anggaran APBN di Kementrian Pertanian
61. SIPD	-	2014	-	-	-	Sebuah jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, realtime dan online di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien.

Nama Software Aplikasi	Versi Aplikasi	Tahun Beli/ Buat/ Hibah/ Lainnya	Status Aplikasi (Beli/ hibah/ sewa/ buat sendiri/ lainnya)	Sistem Manajemen Basis Data	Bahasa Pemrograman	Fungsi Software Aplikasi
62. Software Jembatan Timbang	-	2012	Beli	MS-Access	MS-Access	Menghitung dan Mencatat Berat Kendaraan Masuk TPA
63. Aplikasi Fingerspot	V 2.3.7	2017	Beli	-	-	Pencatatan absensi pegawai
64. SIAK	V.6.0	2015	Hibah Kemendagri	Oracle	Javascript	Untuk pencatatan administrasi kependudukan
65. SIMRAL e-Musrenbang	-	-	-	-	-	Entry data usulan hasil musrenbang baik di kelurahan maupun di kecamatan
66. Benroller	V.3.2	2012	Hibah Kemendagri	-	-	Perakaman E-KTP
67. BCardMGMT	-	2013	Hibah Kemendagri	-	-	Untuk pencarian biometric dan aktivasi e-KTP
68. SIPATEN	-	-	-	-	-	Untuk menerbitkan surat keterangan
69. LPSE Kota Probolinggo (http://lpse.probolingkokota.go.id/eproc4)	V.4.2	-	-	-	-	Upload rencana umum pengadaan dan proses pengadaan barang/jasa/lelang
70. SITI KENCANA	-	-	-	-	-	Sistem Informasi Keluarga Berencana Kota Probolinggo
71. Website Portal Kota Probolinggo (http://portal.probolingkokota.go.id/)	-	-	-	-	-	Sebagai Layanan Informasi Website Kota Probolinggo
72. Website http://bag-organisasi.probolingkokota.go.id/	-	-	-	-	-	Website Sekretariat Bagian organisasi Kota Probolinggo
73. Website http://perekonomian.probolingkokota.go.id	-	-	-	-	-	Website Sekretariat Bagian Administrasi Perekonomian Kota Probolinggo
74. Website http://bag-pemerintahan.probolingkokota.go.id/	-	-	-	-	-	Website Sekretariat Bagian pemerintahan Kota Probolinggo
75. Website http://bag-hukum.probolingkokota.go.id/	-	-	-	-	-	Website Sekretariat Bagian Hukum Kota Probolinggo
76. Website http://bag-kesra.probolingkokota.go.id/	-	-	-	-	-	Website Sekretariat Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Probolinggo
77. Website http://humasprotokol.probolingkokota.go.id/	-	-	-	-	-	Website Sekretariat Humasprotokol Kota Probolinggo

Nama Software Aplikasi	Versi Aplikasi	Tahun Beli/ Buat/ Hibah/ Lainnya	Status Aplikasi (Beli/ hibah/ sewa/ buat sendiri/ lainnya)	Sistem Manajemen Basis Data	Bahasa Pemrograman	Fungsi Software Aplikasi
78. Website http://bag-pembangunan.probolingkokota.go.id/web						Website Sekretariat Administrasi Pembangunan Kota Probolinggo
79. Website http://bappedalitbang.probolingkokota.go.id/						Website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo
80. Website http://bkpsdm.probolingkokota.go.id/						Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Probolinggo
81. Website http://bpbd.probolingkokota.go.id/						Website Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo
82. Website http://bakesbangpol.probolingkokota.go.id/						Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo
83. Website https://dinsos.probolingkokota.go.id/						Website Dinas Sosial Kota Probolinggo
84. Website http://dpu.probolingkokota.go.id/web/						Website Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo
85. Website http://dispenduk.probolingkokota.go.id/						Website Dinas Kependudukan dan Cakil Kota Probolinggo
86. Website http://dikpora.probolingkokota.go.id/						Website Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo
87. Website http://disnaker.probolingkokota.go.id/						Website Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo
88. Website http://dkupp.probolingkokota.go.id/						Website Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo
89. Website http://dkp.probolingkokota.go.id/						Website Dinas Perikanan Kota Probolinggo
90. Website http://dinkes.probolingkokota.go.id/						Website Dinas Kesehatan Kota Probolinggo
91. Website http://disbudpar.probolingkokota.go.id/						Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo

Nama Software Aplikasi	Versi Aplikasi	Tahun Beli/ Buat/ Hibah/ Lainnya	Status Aplikasi (Beli/ hibah/ sewa/ buat sendiri/ lainnya)	Sistem Manajemen Basis Data	Bahasa Pemrograman	Fungsi Software Aplikasi
92. Website http://dishub.probolingkokota.go.id/						Website Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
93. Website http://disperta.probolingkokota.go.id/						Website Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo
94. Website http://diskominfo.probolingkokota.go.id/						Website Dinas Komunikasi & Informatika Kota Probolinggo
96. Website http://blh.probolingkokota.go.id/						Website Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo
97. Website http://dpmptsp.probolingkokota.go.id/						Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo
98. Website http://perpus-arsip.probolingkokota.go.id/						Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo
99. Website http://dpppakb.probolingkokota.go.id/						Website Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana Kota Probolinggo
100. Website http://inspektorat.probolingkokota.go.id/						Website Inspektorat Kota Probolinggo
101. Website http://satpolpp.probolingkokota.go.id/						Website Satpol PP Kota Probolinggo
102. Website http://dprd.probolingkokota.go.id/						Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo

Permasalahan dan harapan aplikasi eksisting di Pemerintah Kota Probolinggo perlu diidentifikasi. Selanjutnya dari data tersebut akan digunakan untuk menentukan target portofolio aplikasi berdasarkan permasalahan dan harapan yang telah diidentifikasi. Tabel berikut menunjukkan permasalahan dan harapan berdasarkan aplikasi yang ada.

Tabel 18. Permasalahan dan Harapan Aplikasi Eksisting di Pemerintah Kota Probolinggo

Nama Software Aplikasi Yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Jika Ada) dan versi aplikasi	Fungsi Aplikasi	Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Software Aplikasi	Harapan Yang Berkaitan Dengan Software Aplikasi
SIMDA BMD	Untuk mengetahui aset barang milik daerah	Sering terjadi trouble dalam penginputan data	Stabil
SMEP	Monev Pembangunan	Input data terlalu detail	Data yang diinput sesuai S2PD
SIRUP	Mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumpulkan RUP	<ul style="list-style-type: none"> • Akses selalu penuh dengan kapasitas selalu terbatas • Aplikasi sering lambat di buka (meungkin karena jaringan internet lemot) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuota akses lebih sederhana • Lebih cepat dibuka aplikasinya (Internet dipercepat)
SMEP	Mengetahui realisasi fisik dan anggaran program kegiatan	Aplikasi ini sudah digunakan dan perlu penyempurnaan lagi	Dalam kedepan mempermudah rencana kerja program, kegiatan dan anggaran
AMA (Aplikasi Manajemen Arsip)	Pengelolaan arsip dimulai dari surat masuk dan surat keluar sampai dengan penyimpanan arsip	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan dana sehingga tidak bisa melakukan pengembangan aplikasi • Tidak adanya SDM IT (Pranata Komputer) apabila ada permasalahan IT (misal permasalahan pada PC, antivirus, dll) • Tidak semua Perangkat Daerah dan Kelurahan bisa menyediakan sarana dan prasarana serta SDMnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya tambahan anggaran sehingga bisa mengembangkan aplikasi • Tersedianya SDM IT (Pranata Komputer) • Terjalannya kerjasama dengan Diskominfo mengenai pengembangan aplikasi • Aplikasi ini dapat digunakan pada seluruh Perangkat Daerah dan Kelurahan Se-Kota Probolinggo • Adanya kelancaran dalam pendistribusian surat dan pencarian arsip surat bila diperlukan.
SIMRAL	Aplikasi yang di gunakan untuk perencanaan, penganggaran dan pelaporan penyusunan RKA/RAPBD, DPA, Anggaran Kas, penerbitan SPD, penatausahaan pendapatan dan belanja, penatausahaan kas daerah, akuntansi berbasis aktual	<ul style="list-style-type: none"> • Server ada di BPPT Tangerang sehingga terkadang lambat • Software tidak dapat memunculkan data 	<ul style="list-style-type: none"> • Server bisa berada di probolinggo

Nama Software Aplikasi Yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Jika Ada) dan versi aplikasi	Fungsi Aplikasi	Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Software Aplikasi	Harapan Yang Berkaitan Dengan Software Aplikasi
E-Formnsi	Mengupdate data kebutuhan pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Saat memasukkan data jaringan internet kurang lancar • Jaringan kurang lancar 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kelancaran internet
PUPNS	Mengupdate data pribadi PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Saat memasukkan data jaringan internet kurang lancar • Jaringan kurang lancar 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kelancaran internet
SIP2DK	Mengupdate data ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Saat memasukkan data jaringan internet kurang lancar • Jaringan kurang lancar 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kelancaran internet
Aplikasi AKI	Pembuatan kartu AK I/Kartu Kuning	<ul style="list-style-type: none"> • Semua database berdiri sendiri – sendiri sehingga kesulitan untuk di koneksikan datanya 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua aplikasi bisa sinkron dengan aplikasi lainnya terutama yang sifat dan fungsinya sejenis. sehingga akurasi data bisa terjamin.
BKOL (Bursa Kerja Online)	Website Lowongan Kerja		
SISKOTKLN	Rekom paspor calon TKI		
KIO 3IN1	Informasi pelatihan		
Quantum GIS 2.18	Pengolahan data spasial (peta) dan atributnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya ketersediaan sdm yang menguasai sistem informasi geografis 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia software GIS berbayar bagi OPD di lingkungan pemerintah kota probolinggo • Harus ada pelatihan atau bintek tentang SIG
SIM Gaji PNS	Untuk informasi gaji PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Sering terjadi trouble dalam penginputan data 	<ul style="list-style-type: none"> • Stabil
Aplikasi Anjab	Untuk melakukan analisis jabatan tiap OPD diseluruh Kota Probolinggo	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi banyak bug. data kadang masuk, data bisa hilang saat input 	<ul style="list-style-type: none"> • Bug diperbaiki
Si JinGGGo (Sistem Jaringan Informasi Good Governance)	Pelaporan dan Pusat Data tentang Monografi Kelurahan, Evaluasi Perkembangan	Masih dalam proses pengembangan	Terwujudnya basis data Kelurahan yang valid, lengkap dan dapat terukur
SIAM (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan versi 6.0)	Untuk pencatatan administrasi kependudukan	Koneksi sering putus	Koneksi dari pusat lancar
SIPATEN	Untuk menerbitkan surat keterangan	Tidak terpakai karena tidak pernah menerbitkan surat keterangan, kecamatan hanya legalisasi/rekomendasi	-
SIMRAL E-Musrenbang	Entry data usulan hasil musrenbang baik di kelurahan maupun di kecamatan	Lemahnya jaringan internet	-

Berdasarkan pemetaan aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo saat ini maka daftar Aplikasi yang akan dikembangkan pada periode 5 tahun adalah sebagai berikut.

Tabel 19. Daftar Target Aplikasi Yang Akan Dikembangkan

No	OPD	Nama Aplikasi	Aktifitas	Modul/Deskripsi	Prioritas	Skala
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengolahan Data Elektronik Terintegrasikan	Layanan	Sistem Pengolahan Data Terintegrasikan	Sangat Tinggi	Besar
2.	BPPKAD	Simral	Administrasi dan Manajemen	Sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan dan kinerja secara terintegrasi	Sangat Tinggi	Sedang
3.	Bagian Administrasi Pembangunan	Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan	Pembangunan	Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan	Sangat Tinggi	Besar
4.	Bagian Administrasi Pembangunan	Aplikasi Sistem Layanan Pengadaan	Pembangunan	Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	Tinggi	Sedang
5.	Bagian Organisasi	Update Aplikasi Anjab	Kepegawaian	Sistem Penilaian Kerja PNS	Tinggi	Sedang
6.	Bagian Umum Sekretariat	Aplikasi data bidang umum sekretariat	Layanan	-	Rendah	Sangat Kecil
7.	BAPPEDA	Aplikasi Geographic Information System (GIS) berbasis website	Sarana dan Prasarana	Transportasi, Jalan dan Jembatan, Terminal Pelabuhan	Sedang	Kecil
8.	BKPSDM	Aplikasi hasil capaian kinerja program dan kegiatan	ADM & MGM	Manajemen Pelaporan Pemerintahan	Tinggi	Sedang
9.	BPPKAD	Aplikasi Pelayanan dan Administrasi perkantoran	Layanan	-	Rendah	Sangat Kecil
10.	Dinas Kesehatan	Pengembangan Simpustronik	Kemasyarakatan	Kesehatan	Tinggi	Kecil
11.	Dinas Kesehatan	Pengembangan Smart SIP	Kemasyarakatan	Kesehatan	Tinggi	Kecil
12.	Dinas Kesehatan	Pengembangan Siskia Pro	Kemasyarakatan	Kesehatan	Sedang	Kecil
13.	Dinas Kesehatan	Aplikasi Pelaporan Fasyankes (RS dan Klinik)/Sideka Pro	Kemasyarakatan	Kesehatan	Sedang	Kecil
14.	Dinas Kesehatan	Jaringan Komunikasi Data Antara Dinas kesehatan dan Puskesmas serta Pustu	Kemasyarakatan	Kesehatan	Sedang	Sedang
15.	Dinas Kesehatan	Dashboard Data Kesehatan Online	Kemasyarakatan	Kesehatan	Rendah	Kecil
16.	Dinas Perikanan	Aplikasi persediaan internal	Kewilayahan	Potensi Daerah, Perikanan dan Kelautan	Rendah	Kecil
17.	Dinas PUPR	Aplikasi Sistem Pelayanan Perkantoran	Pelayanan	-	Rendah	Sangat Kecil
18.	Dinas Sosial	Aplikasi Sistem Pelayanan Perkantoran	Pelayanan	-	Rendah	Kecil

No	OPD	Nama Aplikasi	Aktifitas	Modul/Deskripsi	Prioritas	Skala
19.	Dinas Perhubungan	Aplikasi Akses CCTV berbasis Web	Sarana dan Prasarana	Sarana Umum	Rendah	Kecil
20.	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan	Aplikasi data tiap bidang dinas pertanian dan ketahanan pangan	Kewilayahan	Potensi Daerah , Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Rendah	Kecil
21.	Kecamatan Kanigaran	Aplikasi Pemandokan	-	-	Rendah	Kecil
22.	Kecamatan Kanigaran	Aplikasi Integrasi Data IMB	-	-	Sedang	Kecil
23.	Kecamatan Kanigaran	Aplikasi Mapping PPS dan Pemilih	Legislasi	Sistem Pemilu Daerah	Rendah	Kecil
24.	Kecamatan Mayangan	Aplikasi data di Seksi Pelayanan	Layanan	-	Rendah	Sangat Kecil
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Pemerintah	Sistem Integrasi OPD	Administrasi dan manajemen	Kolaborasi dan Koordinasi	Tinggi	Besar
26.	Dinas Perikanan	SIG – Potensi Ikan	Administrasi dan manajemen	Perikanan dan Kelautan	Sedang	Kecil
27.	Dinas Perikanan	Aplikasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Administrasi dan manajemen	Perikanan dan Kelautan	Sedang	Kecil
28.	Satpol PP	Sistem Informasi Pelaporan Kebakaran	Pelayanan	Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan	Tinggi	Kecil
29.	Sekretariat DPRD	E-Perda	Legislasi	Sistem Administrasi DPRD	Sedang	Kecil
30.	Sekretariat DPRD	E-Propemperda	Legislasi	Sistem Administrasi DPRD	Sedang	Kecil
31.	Dinas PUPR	Aplikasi Database Tanah Fasum	Sarana dan Prasarana	Sarana Umum	Rendah	Kecil
32.	Sekretariat DPRD	SIKELUH DPRD	Layanan	Pengaduan Masyarakat	Tinggi	Sedang
33.	BPBD	SI Pelaporan Bencana di daerah-daerah	Layanan	Manajemen Pelaporan Pemerintahan	Sedang	Kecil

Secara keseluruhan, jenis aplikasi yang akan dikembangkan di Kota Probolinggo dalam 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Jenis Aplikasi yang akan dikembangkan di Kota Probolinggo

No	Nama Aplikasi
1.	Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan
2.	Simral
3.	Pengolahan Data Elektronik Secara Terintegrasi
4.	Aplikasi Sistem Layanan Pengadaan
5.	Update Aplikasi Anjab
6.	Aplikasi data bidang umum sekretariat
7.	Aplikasi Geographic Information System (GIS) berbasis website
8.	Aplikasi hasil capaian kinerja program dan kegiatan
9.	Aplikasi Pelayanan dan Administrasi perkantoran
10.	Pengembangan Simpustronik
11.	Pengembangan Smart SIP
12.	Pengembangan Siskia Pro
13.	Aplikasi Pelaporan Fasyankes (RS dan Klinik)/Sideka Pro
14.	Jaringan Komunikasi Data Antara Dinas kesehatan dan Puskesmas serta Pustu
15.	Dashboard Data Kesehatan Online
16.	Aplikasi persediaan internal
17.	Aplikasi Sistem Pelayanan Perkantoran
18.	Aplikasi Akses CCTV berbasis Web
19.	Aplikasi data tiap bidang dinas pertanian dan ketahanan pangan
20.	Aplikasi Pemandokan
21.	Aplikasi Integrasi Data IMB
22.	Aplikasi Mapping PPS dan Pemilih
23.	Aplikasi data di Seksi Pelayanan
24.	Sistem Integrasi OPD
25.	SIG – Potensi Ikan
26.	Aplikasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan
27.	Silapor Kebakaran
28.	E-Perda
29.	E-Propemperda
30.	Aplikasi Database Tanah Fasum
31.	SIKELUH DPRD
32.	SI Pelaporan Manajemen Bencana di daerah-daerah

No	OPD	Nama Aplikasi	2019				2020				2021				2022				2023			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		2020																				
14	BAPPEDA	Aplikasi Geographic Information System (GIS) berbasis website									x											
15	BPPKAD	Aplikasi Pelayanan dan Administrasi perkantoran									X											
16	Dinas Perikanan	Aplikasi persediaan internal									X											
17	Dinas Sosial	Aplikasi Sistem Pelayanan Perkantoran									X											
18	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan	Aplikasi data tiap bidang dinas pertanian dan ketahanan pangan									x											
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aplikasi database tanah fasum									x											
		2021																				
20	Kecamatan Kanigaran	Aplikasi Pemonudukan													x							
21	Kecamatan Kanigaran	Aplikasi Integrasi Data IMB													X							
22	Kecamatan Kanigaran	Aplikasi Mapping PPS dan Pemilih													X							
23	Sekretariat DPRD	E-Perda													x							
24	Sekretariat DPRD	E-Propemperda													x							
		2022																				
25	Kecamatan Mayangan	Aplikasi data di Seksi Pelayanan																	x			
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Pemerintah	Sistem terintegrasi OPD																	x			
27	Dinas Perikanan	SIG Potensi Ikan																	x			
28	Dinas Perikanan	Aplikasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan																	x			
29	Satpol PP	Silapor Kebakaran																	x			
30	BPBD	SI Pelaporan Bencana di daerah-daerah																	x			

RENCANA PENGUATAN LITERASI SMART CITY DAERAH

Literasi smart city dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran (awareness) warga melalui ragam media, seperti informasi melalui media massa, sosialisasi melalui media sosial pemerintah kota dan komunitas online, serta melalui Camat, Lurah dan Ketua Rukun Tetangga. Kegiatan yang dilakukan diantaranya:

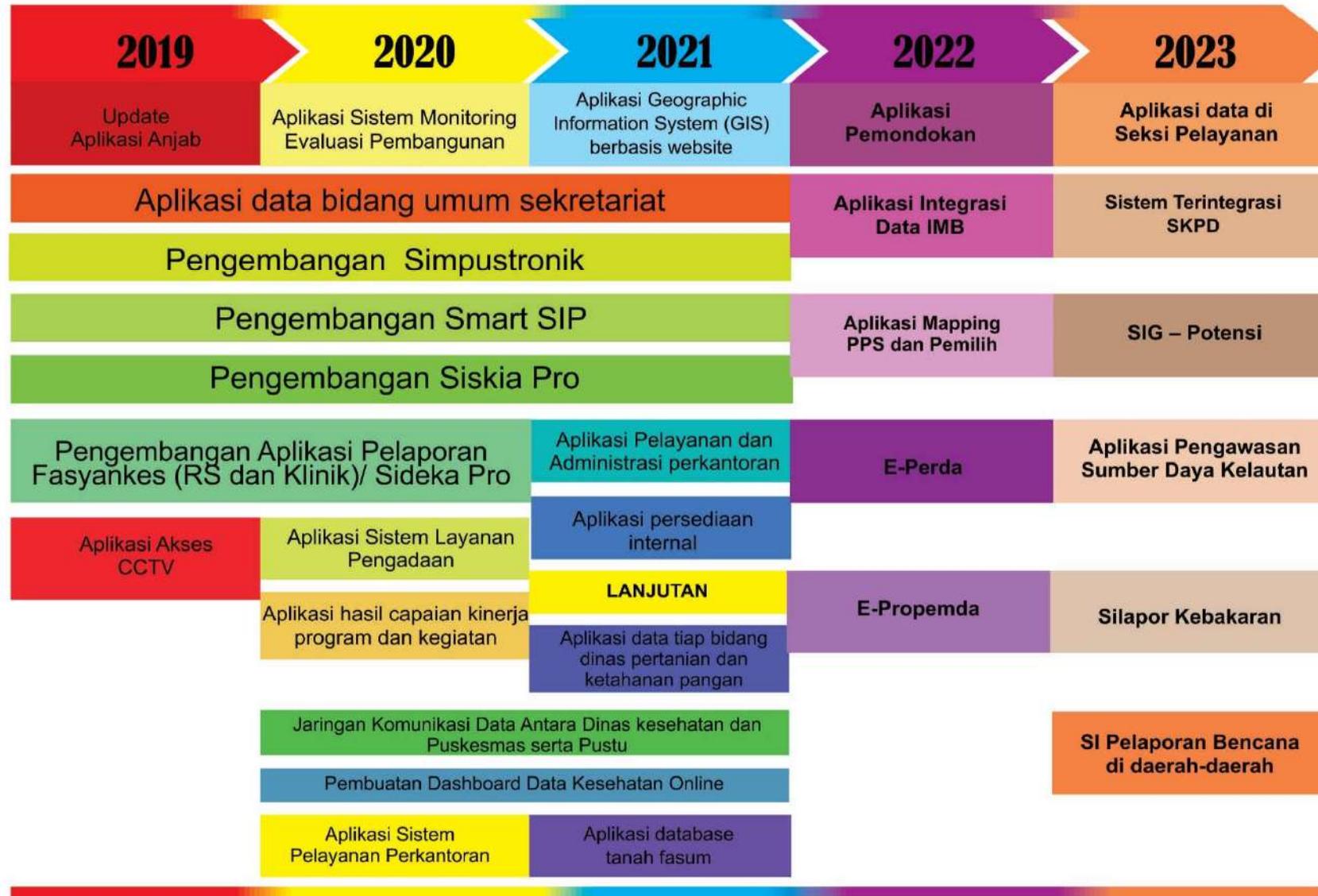
1. Sosialisasi kepada Camat, Lurah, Ketua RT-RW dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama.
2. Internalisasi dan penajaman program serta kegiatan yang berkaitan langsung dengan smart city antar Perangkat Daerah. Internalisasi melalui FGD (*Focus Group Discussion*) antar simpul perangkat daerah yang memiliki kesamaan tugas pokok dan fungsi.
3. Sosialisasi kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
4. Sosialisasi melalui Bakohumas
5. Sosialisasi melalui media kesenian tradisional seperti cangkru'an dan pertunjukan rakyat (pertura).
6. Publikasi melalui website resmi pemerintah.
7. Publikasi melalui media massa (koran, televisi dan radio).
8. Publikasi melalui media sosial (youtube, facebook, twitter dan instagram).
9. Seminar melalui perguruan tinggi dan sekolah.
10. Pemasangan baliho dan spanduk.

Selain bersifat penyebaran informasi, maka literasi dilakukan pula melalui pemberdayaan masyarakat di bidang TIK. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki lembaga pemberdayaan masyarakat bernama "Banger" Telecenter dimana masyarakat dapat memperoleh akses informasi khususnya di bidang TIK. Melalui lembaga ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya dalam pemanfaatan TIK. "Banger" Telecenter memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar TIK secara gratis misalnya pembuatan weblog/website, aplikasi berbasis mobile, internet marketing dan sinematografi/fotografi. "Banger" Telecenter juga mengajak pelaku ekonomi kreatif dan komunitas menulis (komunlis) untuk beraktivitas dan belajar.

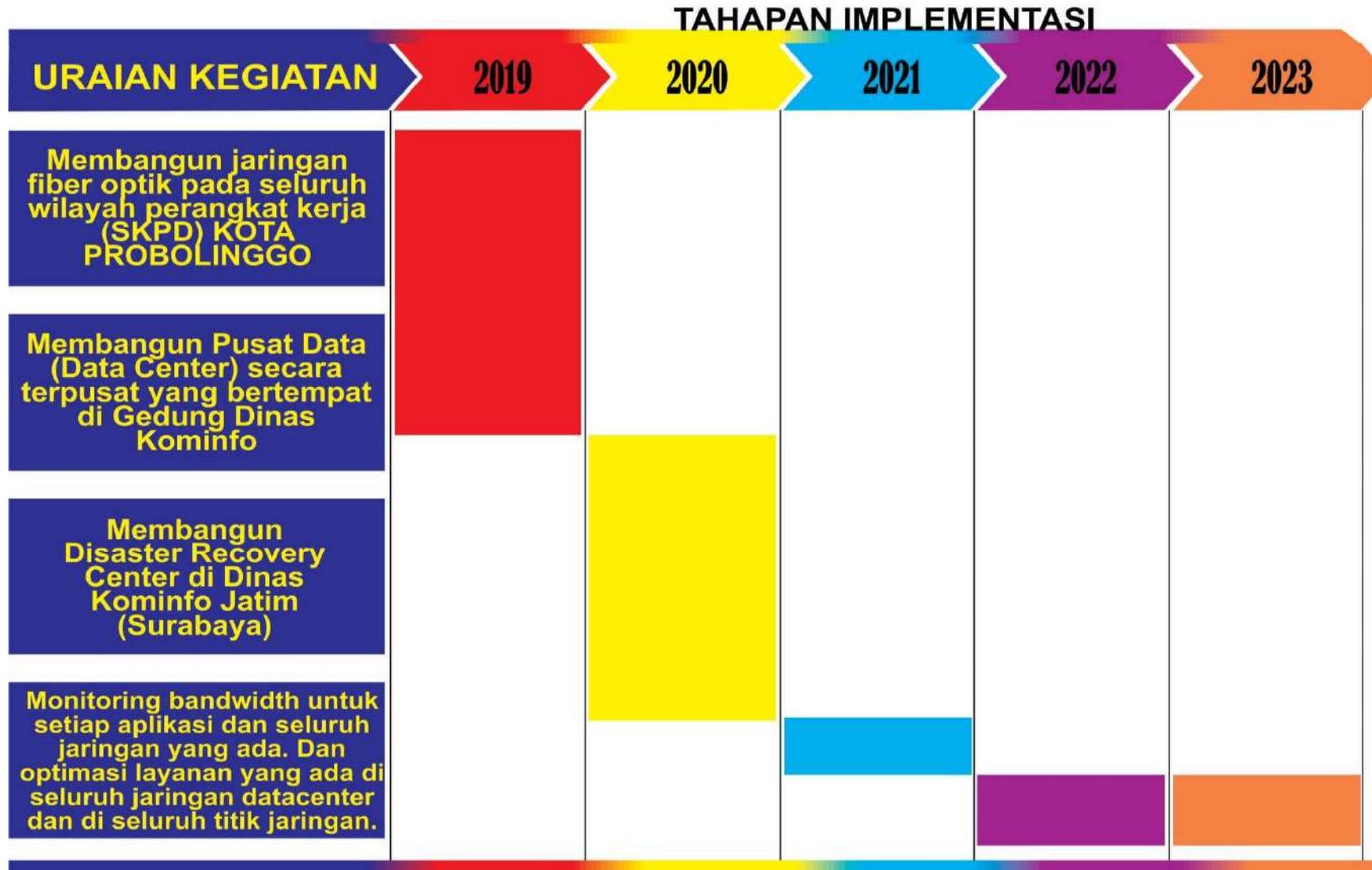


impressive
PROBOLINGGO
C I T Y

PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY DAERAH



PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY DAERAH



PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY DAERAH

JENIS PEKERJAAN	2019	2020	2021	2022	2023
A. PELATIHAN					
Pelatihan penggunaan sistem informasi yang sudah ada					
Pelatihan penggunaan Teknologi baru					
Pelatihan maintenance					
Pelatihan jaringan					
Pelatihan website					
Pelatihan software Microsoft					
B. PENGELOLAAN SDM					
Rotasi Staf					
C. DOKUMENTASI					
Penyusunan standar dokumen pengadaan TI					

JENIS PEKERJAAN	2019	2020	2021	2022	2023
Penyusunan standar layanan TI					
D. PERATURAN DAN SOP					
Penyusunan peraturan dan SOP untuk pengisian data LPSE					
Penyusunan peraturan dan SOP evaluasi laporan secara regular					
Penyusunan peraturan dan SOP manajemen TI – Proses Kesesuaian, Perencanaan dan Pengaturan					
Penyusunan peraturan dan SOP manajemen TI – Proses Pembangunan, Pengadaan dan Implementasi					
Penyusunan peraturan dan SOP manajemen TI – Proses Penyerahan, Pelayanan dan Dukungan					
Penyusunan peraturan dan SOP manajemen TI – Proses Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian					
Penyusunan peraturan dan SOP tata kelola TI - Proses Evaluasi, Pengarahan dan Penilaian					
E. SOSIALISASI					
Sosialisasi peraturan					
Sosialisasi E-office					



ROAD MAPS SMART GOVERNANCE

2018

- Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPADU)
- Pelayanan Kependudukan 3 in 1 (Akte Kelahiran, KK, KTP)
- Sistem Pelayanan Puskesmas
- SIAKEL (Sistem Informasi & Administrasi Kelurahan)
- SiJinggo (Sistem Jaringan Informasi Good Governance)
- Peningkatan Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengukuran, Pelaporan pada SIMRAL
- Peningkatan Sistem Tunjangan Kinerja PNS
- Sinkronisasi Anjab, Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan dengan Indikator Kinerja Jabatan dan SKP
- Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Kota Probolinggo
- Inventarisir dan Kajian Produk Hukum Daerah
- Penerapan Standar Kompetensi PNS

2019

- Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPADU)
- Pelayanan Kependudukan 3 in 1 (Akte Kelahiran, KK, KTP)
- Sistem Pelayanan Puskesmas
- SIAKEL (Sistem Informasi & Administrasi Kelurahan)
- SiJinggo (Sistem Jaringan Informasi Good Governance)
- Peningkatan Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengukuran, Pelaporan pada SIMRAL
- Peningkatan Sistem Tunjangan Kinerja PNS
- Sinkronisasi Anjab, Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan dengan Indikator Kinerja Jabatan dan SKP
- Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Kota Probolinggo
- Inventarisir dan Kajian Produk Hukum Daerah
- Penerapan Standar Kompetensi PNS

2020

- Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPADU)
- Pelayanan Kependudukan 3 in 1 (Akte Kelahiran, KK, KTP)
- Sistem Pelayanan Puskesmas
- SIAKEL (Sistem Informasi & Administrasi Kelurahan)
- SiJinggo (Sistem Jaringan Informasi Good Governance)
- Peningkatan Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengukuran, Pelaporan pada SIMRAL
- Peningkatan Sistem Tunjangan Kinerja PNS
- Sinkronisasi Anjab, Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan dengan Indikator Kinerja Jabatan dan SKP
- Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Kota Probolinggo
- Inventarisir dan Kajian Produk Hukum Daerah
- Penerapan Standar Kompetensi PNS
- Pengintegrasian Sistem Pengaduan Pelayanan Publik
- Sistem Pelayanan Poli RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo

2021

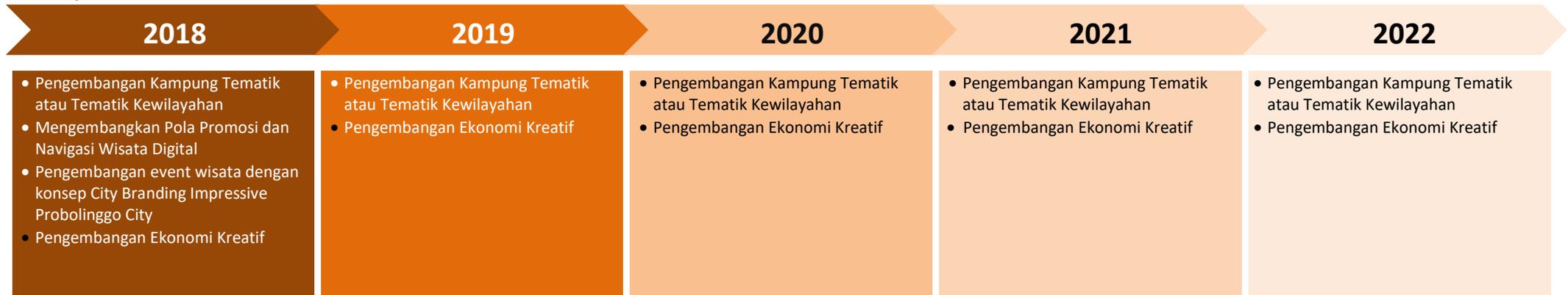
- Pengintegrasian Sistem Pengaduan Pelayanan Publik
- Sistem Pelayanan Poli RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo

2022

- Pengintegrasian Sistem Pengaduan Pelayanan Publik
- Sistem Pelayanan Poli RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo



ROAD MAPS SMART BRANDING





ROAD MAPS SMART ECONOMY





ROAD MAPS SMART LIVING

2018

- Pengembangan ATCS (*Area Traffic Control System*) dan ITCS (*Integrated Traffic Control System*)
- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi (Jalur Sepeda dan jalur pedestrian untuk disabilitas)
- Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Angkutan Pelajar
- Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terpadu
- Peningkatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Peningkatan Konservasi Kawasan Lindung
- Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum, perumahan dan kawasan pemukiman
- Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh
- Pilot Project Green Building
- Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak (Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak / Siskia Cantik)
- Sideka Pro (Sistem Informasi Pelaporan, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo)
- Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan
- Peningkatan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat
- Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan (air minum dan sanitasi)
- Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIMPUGSTRONIK Sistem Elektronik Pelayanan Puskesmas)

2019

- Pengembangan ATCS (*Area Traffic Control System*) dan ITCS (*Integrated Traffic Control System*)
- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi (Jalur Sepeda dan jalur pedestrian untuk disabilitas)
- Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Angkutan Pelajar
- Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terpadu
- Peningkatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Peningkatan Konservasi Kawasan Lindung
- Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum, perumahan dan kawasan pemukiman
- Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh
- Pilot Project Green Building
- Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak (Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak / Siskia Cantik)
- Sideka Pro (Sistem Informasi Pelaporan, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo)
- Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan
- Peningkatan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat
- Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan (air minum dan sanitasi)
- Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIMPUGSTRONIK Sistem Elektronik Pelayanan Puskesmas)

2020

- Pengembangan ATCS (*Area Traffic Control System*) dan ITCS (*Integrated Traffic Control System*)
- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi (Jalur Sepeda dan jalur pedestrian untuk disabilitas)
- Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Angkutan Pelajar
- Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terpadu
- Peningkatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Peningkatan Konservasi Kawasan Lindung
- Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum, perumahan dan kawasan pemukiman
- Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh
- Pilot Project Green Building
- Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak (Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak / Siskia Cantik)
- Sideka Pro (Sistem Informasi Pelaporan, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo)
- Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan
- Peningkatan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat
- Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan (air minum dan sanitasi)
- Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIMPUGSTRONIK Sistem Elektronik Pelayanan Puskesmas)

2021

- Pengembangan ATCS (*Area Traffic Control System*) dan ITCS (*Integrated Traffic Control System*)
- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi (Jalur Sepeda dan jalur pedestrian untuk disabilitas)
- Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Angkutan Pelajar
- Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terpadu
- Peningkatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Peningkatan Konservasi Kawasan Lindung
- Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum, perumahan dan kawasan pemukiman
- Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh
- Pilot Project Green Building

2022

- Pengembangan ATCS (*Area Traffic Control System*) dan ITCS (*Integrated Traffic Control System*)
- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi (Jalur Sepeda dan jalur pedestrian untuk disabilitas)
- Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Angkutan Pelajar
- Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terpadu
- Peningkatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Peningkatan Konservasi Kawasan Lindung
- Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum, perumahan dan kawasan pemukiman
- Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh
- Pilot Project Green Building



ROAD MAPS SMART SOCIETY

2018

- Pengembangan sistem zonasi melalui PPDB sistem zonasi online, redistribusi guru, dan pemerataan sarana-prasarana
- Pengembangan sekolah digital melalui pembelajaran digital, evaluasi belajar digital, e-rapor (rapor digital), dan presensi digital
- Penguatan manajemen berbasis sekolah berorientasi pelayanan publik berfokus pada mutu (MBS-BPP-BPM)
- Mengadakan pelatihan Forum Pengurangan Resiko Bencana
- Melaksanakan Penanganan kejadian bencana dan pembinaan relawan penanggulangan bencana
- Penanganan Tanggap Darurat terpadu melalui Call Center 112
- Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Diskokatana, Diseminasi dan Kolaborasi Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana)
- Menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan tenteram melalui si Deni Ceni (Melalui aksi Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan)

2019

- Pengembangan sistem zonasi melalui PPDB sistem zonasi online, redistribusi guru, dan pemerataan sarana-prasarana
- Pengembangan sekolah digital melalui pembelajaran digital, evaluasi belajar digital, e-rapor (rapor digital), dan presensi digital
- Penguatan manajemen berbasis sekolah berorientasi pelayanan publik berfokus pada mutu (MBS-BPP-BPM)
- Mengadakan pelatihan Forum Pengurangan Resiko Bencana
- Melaksanakan Penanganan kejadian bencana dan pembinaan relawan penanggulangan bencana
- Penanganan Tanggap Darurat terpadu melalui Call Center 112
- Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Diskokatana, Diseminasi dan Kolaborasi Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana)
- Menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan tenteram melalui si Deni Ceni (Melalui aksi Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan)

2020

- Pengembangan sistem zonasi melalui PPDB sistem zonasi online, redistribusi guru, dan pemerataan sarana-prasarana
- Pengembangan sekolah digital melalui pembelajaran digital, evaluasi belajar digital, e-rapor (rapor digital), dan presensi digital
- Penguatan manajemen berbasis sekolah berorientasi pelayanan publik berfokus pada mutu (MBS-BPP-BPM)
- Mengadakan pelatihan Forum Pengurangan Resiko Bencana
- Melaksanakan Penanganan kejadian bencana dan pembinaan relawan penanggulangan bencana
- Penanganan Tanggap Darurat terpadu melalui Call Center 112
- Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Diskokatana, Diseminasi dan Kolaborasi Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana)
- Pembentukan Kelurahan Sadar Perda dan Perkada
- Integrasi Layanan Perpustakaan
- Retorasi Arsip
- Menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan tenteram melalui si Deni Ceni (Melalui aksi Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan)

2021

- Pengembangan sistem zonasi melalui PPDB sistem zonasi online, redistribusi guru, dan pemerataan sarana-prasarana
- Pengembangan sekolah digital melalui pembelajaran digital, evaluasi belajar digital, e-rapor (rapor digital), dan presensi digital
- Penguatan manajemen berbasis sekolah berorientasi pelayanan publik berfokus pada mutu (MBS-BPP-BPM)
- Melaksanakan Penanganan kejadian bencana dan pembinaan relawan penanggulangan bencana
- Penanganan Tanggap Darurat terpadu melalui Call Center 112
- Pembentukan Kelurahan Sadar Perda dan Perkada
- Integrasi Layanan Perpustakaan
- Retorasi Arsip
- Menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan tenteram melalui si Deni Ceni (Melalui aksi Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan)

2022

- Pengembangan sistem zonasi melalui PPDB sistem zonasi online, redistribusi guru, dan pemerataan sarana-prasarana
- Pengembangan sekolah digital melalui pembelajaran digital, evaluasi belajar digital, e-rapor (rapor digital), dan presensi digital
- Penguatan manajemen berbasis sekolah berorientasi pelayanan publik berfokus pada mutu (MBS-BPP-BPM)
- Melaksanakan Penanganan kejadian bencana dan pembinaan relawan penanggulangan bencana
- Penanganan Tanggap Darurat terpadu melalui Call Center 112
- Pembentukan Kelurahan Sadar Perda dan Perkada
- Integrasi Layanan Perpustakaan
- Retorasi Arsip
- Menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan tenteram melalui si Deni Ceni (Melalui aksi Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan)



ROAD MAPS SMART ENVIRONMENT

2018

- Peningkatan Pengendalian, Pencemaran, dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Replikasi Pengolahan Limbah UKM Tahu Menjadi Energi Ramah Lingkungan
- Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Sumber Air
- Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Program Probolinggo Benderang (Revitalisasi PJU Kota)
- Program deteksi dini dan pengawasan pencemaran
- Program Open Space for Better Living and Better Productivity
- Pengembangan Database Pengolahan Sampah
- Pengembangan Regulasi Persampahan
- Program Pengolahan dan Pemanfaatan Ulang Sampah
- Program Pemanfaatan Energi Ramah Lingkungan

2019

- Peningkatan Pengendalian, Pencemaran, dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Replikasi Pengolahan Limbah UKM Tahu Menjadi Energi Ramah Lingkungan
- Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Sumber Air
- Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Program Probolinggo Benderang (Revitalisasi PJU Kota)
- Program deteksi dini dan pengawasan pencemaran
- Program Open Space for Better Living and Better Productivity
- Pengembangan Database Pengolahan Sampah
- Pengembangan Regulasi Persampahan
- Program Pengolahan dan Pemanfaatan Ulang Sampah
- Program Pemanfaatan Energi Ramah Lingkungan

2020

- Peningkatan Pengendalian, Pencemaran, dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Replikasi Pengolahan Limbah UKM Tahu Menjadi Energi Ramah Lingkungan
- Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Sumber Air
- Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Program Probolinggo Benderang (Revitalisasi PJU Kota)
- Program deteksi dini dan pengawasan pencemaran
- Program Open Space for Better Living and Better Productivity
- Pengembangan Database Pengolahan Sampah
- Pengembangan Regulasi Persampahan
- Program Pengolahan dan Pemanfaatan Ulang Sampah
- Program Pemanfaatan Energi Ramah Lingkungan

2021

- Peningkatan Pengendalian, Pencemaran, dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Sumber Air
- Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Program deteksi dini dan pengawasan pencemaran
- Program Open Space for Better Living and Better Productivity
- Pengembangan Regulasi Persampahan
- Program Pengolahan dan Pemanfaatan Ulang Sampah
- Program Pemanfaatan Energi Ramah Lingkungan

2022

- Peningkatan Pengendalian, Pencemaran, dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Sumber Air
- Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Program deteksi dini dan pengawasan pencemaran
- Program Open Space for Better Living and Better Productivity
- Pengembangan Regulasi Persampahan
- Program Pengolahan dan Pemanfaatan Ulang Sampah
- Program Pemanfaatan Energi Ramah Lingkungan



impressive
PROBOLINGGO
C I T Y

Masterplan Pengembangan Smart City Kota Probolinggo ini merupakan lanjutan atau rangkaian dari Buku 1 Analisis Strategis Smart City Kota Probolinggo, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen ini. Penyusunan masterplan ini juga telah mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014–2019. Ke depan, dokumen masterplan ini akan disesuaikan kembali berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2019–2024 mengacu kepada visi dan misi kepala daerah terpilih. Diharapkan tidak banyak dilakukan revisi atau penyesuaian mengingat visi dan misi kepala daerah terpilih saat ini tidak berbeda jauh dengan visi dan misi kepala daerah sebelumnya.

Dokumen ini diharapkan sebagai acuan dasar bagi pengambil keputusan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Probolinggo baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Master Plan Smart City Kota Probolinggo ini dapat menjadi panduan pengembangan Kota Probolinggo menuju Smart City dari tahun 2018 - 2024. Periode road map smart city Kota Probolinggo dibagi menjadi 3 (tiga) :

- Quick win (Tahun Anggaran 2018)
- Tahap Pertama (Tahun 2019-2022)
- Tahap kedua (Tahun 2022-2024)

Akhirnya, kepada seluruh stakeholder Kota Probolinggo, khususnya Perangkat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo untuk menjadikan masterplan smart city ini sebagai rujukan dalam penyusunan kegiatan di masing masing perangkat daerah. Dalam rangka mewujudkan Probolinggo Smart City harus didukung bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Probolinggo. Kota ini butuh banyak tangan untuk turut serta membangun kota, dengan gotong royong bergerak bersama dalam segala aspek kehidupan maka harapan kota lebih baik dan hebat akan terwujud.



impressive
PROBOLINGGO
C I T Y

LAMPIRAN

- Foto penghargaan TOP IT



SMART GOVERNANCE

Strategi	Program dan Produk Smart City	Dinas Terkait	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja-sama	Timeline
Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik (Public service)	Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPADU)	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Memberikan pelayanan terkait perijinan intern dengan lebih efektif	Masyarakat dan Seluruh OPD teknis	Efisiensi Waktu	Rp150,000,000	APBD	DPM PTSP	Diskominfo	1 - 3 tahun
	Pelayanan Kependudukan 3 in 1 (Akte Kelahiran, KK, KTP)	Dispenduk & Capil	Memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait perijinan dengan lebih efektif	Masyarakat dan Seluruh OPD teknis	Efisiensi Waktu	Rp100,000,000	APBD	Dispenduk & Capil	Diskominfo	1-3 Tahun
	Pengintegrasian Sistem Pengaduan Pelayanan Publik	Diskominfo	Memberikan pelayanan penanganan pengaduan terkait pelayanan publik dengan lebih efektif	Masyarakat dan Seluruh OPD teknis	Efisiensi Waktu	Rp150,000,000	APBD	Diskominfo	Diskominfo	3-5 Tahun
	Sistem Pelayanan Poli RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo	RSUD	Memberikan pelayanan rujukan dan antrian online dengan lebih efektif	Masyarakat	Efisiensi Waktu	Rp125,000,000	APBD	RSUD	Diskominfo	3-5 Tahun
	Sistem Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dengan lebih efektif	Masyarakat	Efisiensi Waktu	Rp100,000	APBD	Dinas Kesehatan	DISKOMINFO	1-3 Tahun
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	SIAKEL (Sistem Informasi & Administrasi Kelurahan)	Bagian Pemerintahan & Diskominfo	Mengoptimalkan pelayanan administrasi kelurahan dan kecamatan dengan lebih efektif	Masyarakat dan Seluruh OPD teknis	Efisiensi Waktu	Rp200,000,000	APBD	Bagian Pemerintahan	Diskominfo	1-3 Tahun
	SiJinggo (Sistem Jaringan Informasi Good Governance)	Bagian Pemerintahan	Mengoptimalkan pelayanan pelaporan data kelurahan dan kecamatan dengan lebih efektif	Masyarakat	Efisiensi Waktu	Rp150,000,000	APBD	Bagian Pemerintahan	Diskominfo	1-3 Tahun

	Peningkatan Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengukuran, Pelaporan pada SIMRAL	Bappeda & BPPKAD	Mengoptimalkan pelayanan Perencanaan, Penganggaran, Pengukuran, Pelaporan dan Penatausahaan Keuangan dengan lebih efektif	Seluruh OPD	Efisiensi Waktu	Rp450,000,000	APBD	Bappedalitbang, BPPKAD, Bagian Organisasi, Inspektorat	Diskominfo	1-3 Tahun
	Peningkatan Sistem Tunjangan Kinerja PNS	BKPSDM	Mengoptimalkan pelayanan pemberian tunjangan berbasis kinerja	Seluruh PNS	Peningkatan Kinerja PNS	Rp300,000,000	APBD	Bagian Organisasi, BKPSDM	Diskominfo	1-3 Tahun
	Sinkronisasi Anjab, Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan dengan Indikator Kinerja Jabatan dan SKP	Bagian Organisasi & BKP SDM	Mengoptimalkan pelayanan manajemen kepegawaian	Seluruh PNS	Akurasi kebutuhan PNS	Rp150,000,000	APBD	Bagian Organisasi, BKPSDM	Diskominfo	1-3 Tahun
Meningkatkan sistem inventarisasi produk hukum daerah	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Kota Probolinggo	Bagian Hukum	Mengoptimalkan pelayanan informasi produk hukum daerah	Masyarakat dan Seluruh OPD teknis	Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat	Rp100,000,000	APBD	Bagian hukum	Diskominfo	1-3 Tahun
	Inventarisir dan Kajian Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	Mengetahui produk hukum yang harus di update	Seluruh OPD	Produk hukum yang up to date	Rp100,000,000	APBD	Bagian hukum	Diskominfo	1-3 Tahun
Meningkatkan Profesionalisme ASN	Penerapan Standar Kompetensi PNS	BKPSDM	Meningkatkan kompetensi ASN	Seluruh PNS	PNS yang Profesional	Rp275,000,000	APBD	BKPSDM	Diskominfo	1-3 Tahun

SMART BRANDING

Strategi	Program dan Produk Smart City	Dinas Terkait	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja-sama	Timeline
Penataan Wajah Kota dengan Tata ruang yang berkualitas	Pengembangan Kampung Tematik atau Tematik Kewilayahan	Bappedalitbang, PUPR, Perkim	Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan (fasum dan fasos) yang lebih baik, dan tertata serta peningkatan kualitas pemukiman	Pengembangan tematik seluruh potensi di wilayah kota probolinggo	Pengembangan Sosial, Ekonomi, dan Infrastruktur	Rp400,000,000	APBD	Bappeda-litbang	PUPR, Perkim	1-5 tahun
Promosi Pariwisata	Mengembangkan Pola Promosi dan Navigasi Wisata Digital	Disbudpar	menyediakan alternatif sistem informasi objek wisata agar para wisatawan dapat mengetahui dengan tepat lokasi dan fasilitas yang tersedia di objek wisata yang ingin dituju	Wisatawan Lokal maupun Asing	seluruh fungsi yang ditampilkan di web browser dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan ketresediaan informasi dan ketepatan informasi kepada para pengguna	Rp50,000,000	APBD	Disbudpar	Diskominfo	1 Tahun
	Pengembangan event wisata dengan konsep City Branding Impressive Probolinggo City	Disbudpar	Menyediakan hiburan, atraksi, informasi, budaya, dan pagelaran kepada seluruh masyarakat	Masyarakat dan Wisatawan	Peningkatan kunjungan wisatawan dan Slogan Impressive Probolinggo City semakin dikenal	Rp200,000,000	APBD	Disbudpar	Diskominfo	1 Tahun
	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Disbudpar	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kreatifitas yang bernilai ekonomis	Masyarakat Kota Probolinggo	Tumbuhnya ekonomi kreatif	Rp200,000,000	APBD	Disbudpar	Diskominfo	1-5 tahun

SMART ECONOMY

Strategi	Program dan Produk Smart City	Dinas Terkait	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja-sama	Timeline
Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan	SPR Online	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Melayani peternak dan kelompok dalam memasarkan hasil peternakan	Peternak/ kelompok	Mata rantai pemasaran hasil peternakan menjadi pendek	Rp.362.037.000	APBD	Bidang P3HP	Pasar Hewan, Pelaku usaha, Bank, Disnak Prov, DKUPP	2-3 Tahun
Peningkatan Populasi, Kualitas dan Produksi Sapi Potong	SI-SAKA (Sekali Inseminasi Satu Kebuntingan)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Melayani pelayanan inseminasi buatan pada ternak sapi untuk menghasilkan suatu kebuntingan	Ternak sapi, peternak dan kelompok	Populasi ternak sapi meningkat, S/C Inseminasi Buatan 1,2-1,5	Rp. 75.000/ekor	APBD/ APBN	Bidang P3HP	Disnak Provinsi, Kelompok, Inseminator Swadaya, kecamatan dan kelurahan	1 Tahun
	SI-PEDET (Sistem Identifikasi Perekaman Data Peternakan)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Penandaan ternak sapi	Ternak sapi dan peternak	Ternak sapi terekording dan terdeteksi	Rp. 50.000/ekor	APBD	Bidang P3HP	Dinas provinsi, Diskominfo, Pihak ketiga, kecamatan, kelurahan, operator seluler dan kelompok	5 tahun
Meningkatkan produktivitas pertanian, tanaman pangan dan hortikultura	INTIM (Intensifikasi Lahan Sempit)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Melahirkan petani berbudidaya pertanian di lahan sempit (vertikultur dan hidroponik)	Kelompok tani, petani dan masyarakat	Menanam tanaman pot, hidroponik, KRPL, Karang kitri	Rp802,300,211	APBD	bidang TPHP dan KP	Dinas Provinsi, Dinas Perikanan, Kecamatan, Kelurahan, KWT, dasa wisma, ibu-2 PKK	1 Tahun
	GO-NIK (Probolinggo Berorganik)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pemanfaatan lahan pertanian organik untuk budidaya padi, jagung, sayuran, mangga dan anggur lebih konsisten	Kelompok tani, petani dan masyarakat	Tanaman berorganik	Rp179,249,999	APBD	bidang TPHP dan KP	Dinas Provinsi, Bappeda, DLH, kelompok tani, petani	2-3 Tahun
	UP-NIAN (Upsus komoditas pertanian)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Melaksanakan Upsus komoditas pertanian (Pajale, Siwab)	Kelompok tani, petani/ peternak	Meningkatkan produksi dan populasi	Rp165,000,000	APBD/APBN	Bidang TPHP dan P3HP	Kementrian, Dinas Provinsi, Satgas pangan, Kecamatan. Kelurahan dan Kelompok tani	1 Tahun

	Pekan-Tani (Penerapan Mekanisasi Pertanian)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Budidaya, panen dan pasca panen pertanian lebih berkualitas	UPJA, Kelompok tani, petani	Penggunaan mekanisasi pertanian secara optimal	Rp1,115,000,000	APBD/APBN	Bidang TPHP dan Sarpras	Kementrian, Dinas Provinsi, Kelompok tani	2-3 Tahun
	Fasilitasi sarana prasarana pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Menjaga kuantitas, kualitas dan pemeliharaan sarana prasarana pertanian	Gedung, jaringan, jalan, dan alat	Pembuatan dan pemeliharaan sarana prasarana	Rp1,500,000,000	APBD/APBN	Bidang Sarpras	Kementrian, Dinas Provinsi, DPU, Pihak Ketiga, Kelompok tani	1 Tahun
Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	Transfer teknologi pengolahan hasil pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Mentranfer teknologi pengolahan hasil pertanian	Kelompok, KWT, UKM	Terselenggaranya bimtek, pelatihan, sosialisasi	Rp1,040,143,050	APBD	Bidang TPHP, KP dan P3HP	Pihak ketiga, DKUPP, Dinkes	1 Tahun
	Fasilitasi pemasaran hasil pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pemasaran hasil pertanian lebih berkualitas	Pedagang, Asosiasi petani, kelompok, peternak, UKM	Terjalannya pemasaran hasil pertanian dengan pihak ketiga	Rp678,816,130	APBD	Bidang TPHP, KP, Keswan dan P3HP	Pihak ketiga, DKUPP, Dinkes	1 Tahun
Meningkatkan derajat kesehatan hewan dan ketentraman masyarakat konsumsi pangan asal hewan	Keswan ber-GISI (Geografis Informasi System)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Memberikan kepuasan pelayanan keswan ternak dan hewan piaraan	Peternak/ kelompok dan masyarakat	Penurunan angka kematian ternak dan hewan piaraan	Rp405,539,000	APBD	Bidang Keswan & Kesmavet	Dinas Provinsi, Dinkes, BPPD, dan kelompok	1 Tahun
	Produk hewan ASUH	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Memberikan ketentraman bathin masyarakat yang mengkonsumsi produk hewan	Pemotong di Rumah Potong, pelaku usaha	Menghasilkan produk hewan yang aman sehat utuh dan halal (ASUH)	Rp150,777,500	APBD	Bidang Keswan & Kesmavet	Dinkes, RPH/A Swasta, Pelaku Usaha Pemotongan	1 Tahun

SMART LIVING

Strategi	Program dan Produk Smart City	Dinas Terkait	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Timeline
Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Antar Wilayah	Pengembangan ATCS (<i>Area Traffic Control System</i>) dan ITCS (<i>Integrated Traffic Control System</i>)	Dinas Perhubungan	Meningkatkan pemantauan dan pengendalian lalu lintas	Kawasan Strategis Lalu lintas	Terkendalinya kelancaran lalu lintas	Rp1,000,000,000	APBD	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo, Polres	5 tahun
	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi (Jalur Sepeda dan jalur pedestrian untuk disabilitas)	Dinas Perhubungan, DPUPR	Menyediakan Prasarana bagi pengguna sepeda	Jalan-jalan protokol	Tersedianya jalur sepeda	Rp500,000,000	APBD	Dinas Perhubungan	DPUPR	5 tahun
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi - Jalur Pedestrian untuk Disabilitas	DPUPR	Menyediakan sarpras pejalan kaki dan disabilitas	jalan-jalan pusat kota	tersedianya pedestrian dan disabilitas	Rp10,000,000,000	APBD	DPUPR	Dinas Perhubungan	5 tahun
	Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Angkutan Pelajar	Dinas Perhubungan	Menyediakan angkutan umum dan pelajar yang menjangkau wilayah kota	Trayek angkutan umum	Tersedianya angkutan umum dan pelajar yang mudah dan menjangkau wilayah kota	Rp500,000,000	APBD	Dinas Perhubungan	ASAP	5 tahun
Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan	Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terpadu	DPUPR, Bappeda Litbang, DPMPTSP, Satpol PP	Terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan	Masyarakat dan OPD yang menangani penataan ruang	Berkurangnya pelanggaran pemanfaatan ruang	Rp300,000,000	APBD	DPUPR	Bappeda Litbang, DPMPTSP, Satpol PP	5 tahun
	Peningkatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DLH	Menyediakan ruang terbuka hijau publik bagi masyarakat	RTH Publik	Tersedianya RTH Publik 20%	Rp5,000,000,000	APBD/APBN	DLH	Kementerian LHK/PUPR	20 tahun
	Peningkatan Konservasi Kawasan Lindung	DLH	Melestarikan dan menjaga kawasan lindung	kawasan lindung Kota Probolinggo (sempadan Mata air, sempadan	kawasan lindung tetap terjaga	Rp3,000,000,000	APBD	DLH	Disperik, Satpol PP, DPMPTSP, DPUPR	5 tahun

				pantai dan sempadan sungai)						
	Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum, perumahan dan kawasan permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Menyediakan PSU Perumahan Permukiman yang berkelanjutan	Perumahan dan Permukiman	Perumahan Permukiman yang dilengkapi PSU	Rp500,000,000	APBD/Pengembang	DPKP	DPUPR, DLH, BAPPEDA, DPMPTSP	5 tahun
	Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan kualitas permukiman	kawasan permukiman	0% permukiman kumuh	Rp25,000,000,000	APBD/APBN	DPKP	DPUPR, DLH, Dinsos	5 tahun
	Pilot Project Green Building	DPUPR	Menyediakan percontohan bangunan gedung yang ramah lingkungan/Green Building	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	Jumlah Bangunan Gedung yang Ramah Lingkungan/Green Building	Rp10,000,000,000	APBD	DPUPR	OPD terkait	5 tahun
Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak (Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak / Siskia Cantik)	Dinas Kesehatan	Memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dari berbagai tenaga kesehatan secara terpadu	Institusi pemberi yankes, SPOG, Bidan.	Bumil Risti yg ditangani	Rp 100,000,000	APBD	DINKES	Kominfo	1-3 Tahun
	Sideka Pro (Sistem Informasi Pelaporan, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo)	Dinas Kesehatan, RSUD	Memberikan Pelayanan pelaporan yg terintegrasi dari berbagai unit pelayanan	RS, Puskesmas, Klinik	Compliance Rate Unit Pelayanan	Rp 25,000,000	APBD	DINKES	Kominfo	1-3 Tahun
	Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD	Meningkatkan Mutu Prasarana dan Sarana Yankes	Dinkes ,RSUD	Fakes terakreditasi	Rp 300,000,000	APBD	PUSKESMAS, RSUD	Bappeda	1-3 Tahun
	Peningkatan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, RSUD	Meningkatkan kualitas layanan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat	UHC (Universal Health Coverage)	Rp 1,728,000,000	APBD	DINSOS	DKUPP	1-3 Tahun
	Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan (air	DPUPR, Dinas Kesehatan, PDAM	Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan	Sarana Air Minum, IPAL, Jamban.	ODF (Open Defecation Free)	Rp 200,000,000	APBD	DINKES	DPUPR	1-3 Tahun

	minum dan sanitasi)									
	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIMPUSTRONIK Sistem Elektronik Pelayanan Puskesmas)	Dinas Kesehatan	Memberikan layanan berbasis pada elektronik di lingkungan Puskesmas	Masyarakat	Layanan kesehatan di puskesmas yang lebih mudah, cepat tersistem dan terdokumentasi	Rp.100,000,000,-	APBD	Dinkes	Diskominfo	1-3 Thn

SMART SOCIETY

Strategi	Program dan Produk Smart City	Dinas Terkait	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Timeline
Peningkatan pemerataan pendidikan bermutu dan ekosistem pendidikan	Pengembangan sistem zonasi melalui PPDB sistem zonasi online, redistribusi guru, dan pemerataan sarana-prasarana	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Meningkatkan pemerataan mutu pendidikan yang berkualitas	Siswa, guru, dan orang tua	Meningkatnya pemerataan mutu input siswa di seluruh sekolah negeri	Rp 100.000.000	DAU	Bidang Pendas	Dewan Pendidikan	1-5 th
					Meratanya kualitas guru di sekolah negeri					1-2 th
			Meningkatkan transparansi dalam seleksi PPDB		Orang tua dapat mengakses secara online proses pendaftaran sampai pengumuman hasil seleksi PPDB					1-5 th
			Meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana sekolah		Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana sekolah					Rp7.200.000.000
	Pengembangan sekolah digital melalui pembelajaran digital, evaluasi belajar digital, e-rapor (rapor digital), dan presensi digital	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Dinas Kominfo	Memberikan layanan sumber belajar online	Siswa, guru, dan orang tua	Meningkatnya layanan sumber belajar online pada setiap jenjang kelas, mata pelajaran dan kompetensi dasar	Rp 200.000.000	DAU	Bidang Pendas, Bidang Ketenagaan	Dinas Kominfo	1-5 th
			Meningkatkan transparansi penilaian guru terhadap siswa		Orang tua dan siswa dapat mengakses nilai setiap saat melalui web sekolah digital				Dinas Kominfo	1-5 th
			Memberikan kemudahan pengolahan nilai		Meningkatnya kemudahan dalam pengolahan nilai				Dinas Kominfo	1-5 th

			sampai penerimaan buku rapor		sampai penyelesaian buku rapor					
			Meningkatkan pengawasan terhadap presensi siswa dan warga sekolah		Meningkatnya pengawasan terhadap presensi siswa dan guru				Dinas Kominfo	1-5 th
			Mempercepat dan memudahkan penanganan siswa bolos		Meningkatkan disiplin siswa				Dinas Kominfo, Satpol PP	1-5 th
	Penguatan manajemen berbasis sekolah berorientasi pelayanan publik berfokus pada mutu (MBS-BPP-BPM)	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengelolaan pendidikan	Sekolah dan komite sekolah	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengelolaan pendidikan	Rp 150.000.000	DAU	Bidang Pendas	Dewan Pendidikan	1-5 th
Meningkatkan Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)	Mengadakan pelatihan Forum Pengurangan Resiko Bencana	BPBD	Meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi bencana dan terbentuknya Forum PRB di tingkat Kelurahan	Masyarakat Kelurahan se Kota Probolinggo	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	185,000,000	APBD	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi	Lurah, Camat, Dinkes, DLH, Dinsos, PUPR, Perkim, Satpol PP, Kodim, Polresta	1-3 th
Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat saat Bencana	Melaksanakan Penanganan kejadian bencana dan pembinaan relawan penanggulangan bencana	BPBD	Meningkatkan kecepatan penanganan Tanggap Darurat saat Bencana dan peningkatan kapasitas relawan dalam penanganan Tanggap Darurat	Lokasi Tanggap Darurat bencana dan Relawan	Prosentase penanganan tanggap darurat	230,000,000	APBD	Seksi Kedaruratan dan Logistik	Dinkes, DLH, Dinsos, PUPR, Perkim, Satpol PP, Kodim, Polresta, Polairud, PMI	1-5 th
	Penanganan Tanggap Darurat terpadu melalui Call Center 112	Diskominfo & BPBD	Meningkatkan kecepatan penanganan Tanggap Darurat melalui pengelolaan Command Center	Masyarakat Kota Probolinggo	Jumlah penanganan tanggap darurat	250,000,000	APBD	Seksi Kedaruratan dan Logistik	Dinkes, DLH, Dinsos (Tagana), PUPR, Perkim, Satpol PP (Damkar), Kodim,	1-5 th

			dengan nomer kontak 112						Polresta, Polairud, PMI	
	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Diskokatana, Diseminasi dan Kolaborasi Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana)	BPBD, Kecamatan, Kelurahan, Dinkes, PUPR, Satpol PP, Polresta, Kodim	Mewujudkan kelurahan yang tangguh dan siap dalam memberikan penanganan pertama adanya bencana	Kelurahan dan masyarakat	Terwujudnya kemampuan perangkat kelurahan dan masyarakat dalam memberikan penanganan awal adanya bencana	Rp.185,000,000,000	APBD	Seksi Kedaruratan dan Logistik	Lurah, Kecamatan, Dinkes, PUPR, Satpol PP, Polresta, Kodim	1-3 Thn
Pengendalian Masyarakat dalam Penegakan Perda an Perkada	Pembentukan Kelurahan Sadar Perda dan Perkada	Satpol PP, Dinas PUPR, DPMPTSP, Bagian Hukum	Mensosialisasikan pentingnya penerapan perda dan perkada agar masyarakat paham tentang hal-hal yang diatur di dalam perda dan perkada	Masyarakat dan kelurahan	Minimnya tingkat pelanggaran perda dan perkada oleh masyarakat	Rp.85,000,000	APBD	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Satpol PP, Dinas PUPR, DPMPTSP, Bagian Hukum	3-5 Thn
Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan dan Kearsipan	Integrasi Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat	Meningkatkan minat baca dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan masyarakat	Masyarakat, pelajar	Tingginya minat masyarakat dalam membaca	Rp.170,839,300	APBD	Bidang Pembinaan dan Pemasarakatan Perpustakaan Dan Kearsipan, dan Bidang Perpustakaan	Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat, Aksarmaya, Kampung Dongeng, komunitas penulis	3-5 Thn
	Restorasi Arsip	Dinas Perpustakaan, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat	Menginventarisir dan menyelamatkan yang bernilai guna tinggi dan memiliki sejarah	Masyarakat dan arsip instansi	Terselamatkannya arsip yang bernilai tinggi dan memiliki sejarah	Rp. 91,910,600	APBD	Bidang Pembinaan dan Pemasarakatan Perpustakaan Dan Kearsipan, dan Bidang Kearsipan	Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat	3-5 Thn
Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Mewujudkan kondisi lingkungan	Masyarakat dan kelompok masyarakat	Rendahnya konflik baik vertical maupun horizontal di antar	Rp. 150,000,000	APBD	Bidang Kewaspadaan	Badan Intelegen Daerah,	1-5 Thn

	aman dan tenteram melalui si Deni Ceni (Melalui aksi Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan)		masyarakat yang aman dan tenteram		masyarakat maupun antar lembaga/kelompok masyarakat			dan Integrasi Bangsa Kesbang	Intelejen Kodam, Korem, Kodim, Polres, Kejaksaan, Bea Cukai, KPP Pratama, FKUB, FKDM, Forum Pembauran Kebangsaan	
--	--	--	-----------------------------------	--	---	--	--	------------------------------	--	--

SMART ENVIRONMENT

Strategi	Program dan Produk Smart City	Dinas Terkait	Tujuan	Sasaran	Keberhasilan Indikator	Usulan Anggaran	Pembiayaan Sumber	Pelaksana	Kerjasama	Timeline
Mengembangkan program proteksi lingkungan	Peningkatan Pengendalian, Pencemaran, dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk menuju Probolinggo Kota Ramah Lingkungan	Masyarakat, Perusahaan dan Lembaga Pemerintah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rp. 200,000,000	APBD	DLH	Diskominfo, Dinas Pol PP, DKUPP, Dinas Kesehatan	1-5 Thn
	Replikasi Pengolahan Limbah UKM Tahu Menjadi Energi Ramah Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Memfaatkan limbah tahu menjadi energi alternatif	Masyarakat terdampak limbah tahu	3 Replikasi Pengelolaan Limbah Tahu	Rp. 500,000,000,	APBD	DLH	Kecamatan, Satpol pp, DKUPP	1-3 Thn
	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Sumber Air	Dinas Lingkungan Hidup	Menjaga kelestarian dan keberlangsungan 2 sumber mata air	2 Sumber mata air	Terpeliharanya 2 sumber mata air dari 8 mata air d yang ada	Rp.135,000,000	APBD	DLH	PUPR, Satpol PP, DPMPSTP, Diskan	1-5 Thn
Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengelolaan kebersihan kota yang berwawasan lingkungan	Seluruh Masyarakat Kota Probolinggo	Prosentase sampah tertangani	Rp. 250,000,000	APBD	DLH	Diskominfo, Dinas Pol PP, DKUPP, Dinas Kesehatan	1-5 Thn
Mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab	Program Probolinggo Benderang (Revitalisasi PJU Kota)	Dinas Perhubungan	Mengurangi pemakaian energy listrik (efisiensi energi)	Seluruh Ruas Jalan Protokol dan Arteri	Prosentase lokasi yang menggunakan Lampu hemat Energi	Rp. 200,000,000	APBD	DISHUB	PLN, DPPKAD, Diskominfo	1-3 Thn
meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH Publik	Program deteksi dini dan pengawasan pencemaran	Dinas Lingkungan Hidup	Menekan angka pencemaran lingkungan	29 Kelurahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Air, Tanah dan Udara)	Rp. 100,000,000	APBD	DLH	DLH, Kecamatan, Satpol PP	1-5 Thn
	Program Open Space for Better Living and Better Productivity		Peningkatan prosentase Ruang Terbuka Hijau	Wilayah Perkotaan	Prosesntase Luasan RTH se Kota	Rp. 150,000,000	APBD	DLH	DLH, Kecamatan, DPUPR	1-5 Thn

Meningkatnya kesadaran pengelolaan persampahan rumah tangga (3R)	Pengembangan Data Base Pengolahan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Mengurangi Potensi Timbulan Sampah	Wilayah Perkotaan	Prosentase Sampah tertangani	Rp. 50,000,000	APBD	DLH	DLH, Kecamatan, Satpol PP	1-3 Thn
	Pengembangan Regulasi Persampahan		Mengurangi Potensi Timbulan Sampah	Seluruh Masyarakat Kota Probolinggo	Prosentase Sampah tertangani	Rp. 100,000,000	APBD	DLH	DLH, Kecamatan, Satpol PP	1-5 Thn
	Program Pengolahan dan Pemanfaatan Ulang Sampah		Mengurangi Potensi Timbulan Sampah	Seluruh Masyarakat Kota Probolinggo	Prosentase Sampah tertangani	Rp. 50,000,000	APBD	DLH	DLH, PP Kecamatan, Satpol	1-5 Thn
Meningkatnya kualitas pengelolaan timbunan sampah publik	Program Pemanfaatan Energi Ramah Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Menekan Potensi Limbah cair ke Badan Sungai dan Sumber Mata Air	Wilayah Perkotaan	Indeks Kualitas Air	Rp. 300,000,000	APBD	DLH	DLH, Kecamatan, Satpol PP	1-5 Thn

PROFIL INOVASI SMART CITY

SMART GOVERNANCE

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	AKIK CEMERLANG (Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga Cepat Mudah, Efisien, Sekali Urus, Satu hari Langsung Jadi), Dinas Kependudukan dan Capil
2. Penjelasan singkat	<p>Deskripsi tentang inovasi yang menjelaskannya secara singkat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah/kebutuhan yang diatasi/dipenuhi Dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu Kartu Keluarga, Kartu Identitas anak dan Akte Kelahiran selama ini diproses secara terpisah dengan jangka waktu penyelesaian masing-masing 3 hari sehingga menimbulkan kesan pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah prosedur rumit, butuh waktu lama dan biaya besar 2. Pembaruan/ide/solusi apa yang diberikan untuk hal di atas Dengan pelayanan 3in1 Kelahiran maka dengan sekali mengurus akan diterbitkan 3 dokumen sekaligus yaitu Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak untuk bayi baru lahir sampai dengan usia 60 hari Pesalinan selesai, ibu dan bayi pulang dengan membawa akte kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga 3. Penjelasan lebih rinci dapat diberikan dalam dokumen lampiran (sesuai sistem online/offline yang dibangun) Penjelasan sesuai Aplikasi Usulan Inovasi Daerah (APUSIDA)
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	<p>Kode Status dalam siklus manajemen inovasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan 3in1 dilakukan secara online dan offline 2. Inovasi telah dilaksanakan 100% pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan fasilitas kesehatan swasta yang telah menandatangani perjanjian kerjasama 3. Rencana kedepan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan swasta dapat melaksanakan pelanana 3in1 kelahiran secara online, pengurusan akte kelahiran cukup di kelurahan saja 4. Inovasi ini membutuhkan penguatan SDM di fasilitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan sarana prasarana termasuk konektivitas jaringan SIAK dengan fasilitas pelayanan kesehatan 5. Implementasi Inovasi sedang berlangsung 6. Rencana pengembangan inovasi : seluruh fasilitas pelayanan kesehatan swasta dapat melaksanakan pelanan 3in1 secara online

	Persentase Penyelesaian (progres waktu/pekerjaan) 40% offline, 60% online
4. Manfaat dari inovasi	<p>Penjelasan singkat penerima manfaat, dampak/keuntungan/manfaat yang didapatkan dari inovasi baik secara langsung maupun tidak langsung, bersifat intern maupun ekstern</p> <p>Manfaat inovasi :</p> <p>Langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi waktu pengurusan dokumen 2. Kemudahan persyaratan dan prosedur pengurusan dokumen 3. Dokumen yang diperoleh lengkap untuk 1x pengurusan 4. Masyarakat memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap sesuai kondisi terkini 5. Masyarakat dapat mengakses pelayanan secara gratis <p>Tidak Langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Sipil sebagai penduduk terjamin karena memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap dan terupdate 2. Cakupan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil meningkat , data SIAK dimanfaatkan oleh Lintas Sektor sehingga kinerja layanan Dispendukcapil meningkat t 3. Kompetensi petugas pelayanan semakin meningkat 4. Masyarakat menjadi sadar haknya sebagai Warga Negara Indonesia, walau tanpa disuruh secara sadar akan melengkapi dokumen kependudukan yang dimiliki 5. Menunjang pelayanan publik lainnya karena sebagian besar akses pelayanan publik saat ini telah berbasis NIK
5. Keunikan / kreativitas	<p>Kreativitas, pemikiran baru, kekhasan yang diperkenalkan, originalitas, pembedaan dari inovasi sejenis lainnya</p> <p>Satu Kali mengurus langsung mendapat 3 Dokumen</p> <p>Bayi lahir langsung memiliki keabsahan sebagai anak secara hukum</p>
6. Kemitraan	<p>Pelibatan pihak lain dalam pembangunan, implementasi dan evaluasi (nama para pihak, peran, dan status progres kemitraan). Dapat berupa instansi pemerintah, sektor pendidikan, sektor usaha, organisasi profesi atau elemen masyarakat/komunitas yang dapat berkontribusi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah (RSUD , Puskesmas, Puskesmas Pembantu) 2. Fasilitas pelayanan kesehatan swasta (RS Swasta, Klinik Swasta) 3. Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tim Penggerak PKK Kota dan Kecamatan serta Kelurahan 5. Organisasi Kewanitaan (Fatayat , Aisyiyah, Persit Kartika Chandrakirana, Byayangkari) 6. Kader Kesehatan 7. RT, RW
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Peluang untuk pengembangan/peningkatan dari sisi produk inovasi, ruang lingkup/jangkaun, replikasi, penyebaran dan lain lain Pelayanan dilaksanakan diseluruh fasyankes swasta dan Bidan Praktek Mandiri
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	<p>Pilihan pendekatan/langkah yang diambil dalam rangka memastikan keberlangsungan (sustainability) implementasi dan pengembangan dari inovasi dapat terjadi melalui kebijakan/regulasi, kelembagaan, penyediaan infrastruktur, sumber daya dan kompetensi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Walikota tentang Inovasi Daerah 2. Adanya Kegiatan Laboratorium Inovasi pada Bappeda Litbang 3. Adanya kompetisi Inovasi Layanan Publik ditingkat Kota maupun Propinsi dan Nasional
9. Sumber daya yang digunakan	<p>Sumber daya yang diperlukan dalam perencanaan, pembangunan, implementasi dari inovasi. Bentuknya dapat berupa pendanaan, tenaga ahli, sarana dan bentuk lain. Pilihan pilihan sumber penyediaan yang ada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan didanai dari APBD dan DAK Non Fisik Kemendagri 2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi 3. Sarana pelayanan keliling
10. Analisa Risiko	<p>Uraian singkat dari perkiraan adanya dampak lain (selain manfaat dan keuntungan di atas) dari inovasi yang perlu diantisipasi, ditanggulangi, dimitigasi atau dikelola dengan cara cara lain sesuai kaidah manajemen risiko</p> <p>Dampak lain yang dimungkinkan terjadi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keabsahan data-data pendukung membutuhkan kecermatan dan keahlian karena data pendukung rawan dipalsukan 2. Gangguan konektifitas antara SIAK dengan fasilitas pelayanan kesehatan 3. Keamanan data 4. Untuk pelayanan yang masih offline diperlukan petugas khusus yang mengurus dokumen ke Kantor Dispendukcapil

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	SI-AKEL (Sistem Informasi Administrasi Kelurahan Terpadu Kecamatan), DISKOMINFO
2. Penjelasan singkat	<p>Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mindset / perilaku stakeholder staf Kelurahan dan Kecamatan dilingkungan Pemkot Probolinggo 2. Sistem dan mekanisme kinerja pelayanan administrasi persuratan pada Kelurahan dan Kecamatan masih manual belum on-line <p>Solusi/ide :</p> <p>Melakukan percepatan mekanisme kinerja pelayanan administrasi persuratan melalui sistem <i>online</i> berbasis teknologi informasi dengan mengubah mindset / perilaku seluruh <i>stakeholder</i> dengan memanfaatkan potensi organisasi yang dimiliki</p> <p>Percepatan kinerja pelayanan administrasi persuratan pada Kelurahan dan Kecamatan melalui sistem <i>online</i> adalah mempercepat proses pemberian pelayanan administrasi persuratan dan lainnya dalam bentuk dokumen yang sah dari Pemerintah / Pemerintah Daerah.</p>
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	<p>Kode Status : (1) pendaftaran izin masih dilakukan secara manual</p> <p>Persentase Penyelesaian : 50%</p> <p>Keterangan :</p>
4. Manfaat dari inovasi	<p>Penerima manfaat : Organisasi, Masyarakat, Stakeholder</p> <p>Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan administrasi persuratan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien; 2. Meningkatnya profesionalisme kinerja aparatur dalam melayani administrasi persuratan dari masyarakat 3. Terintegrasinya program dan kegiatan administrasi persuratan dengan NIK pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK); 4. Proses dan mekanisme pengurusan perizinan masyarakat menjadi mudah, transparan, pasti, cepat dan tepat waktu 5. Masyarakat dapat mengakses <i>tracking</i> informasi tentang proses administrasi persuratan secara <i>online</i>;

	<p>6. Masyarakat dapat berperan aktif memberi masukan/saran/kontribusi untuk perbaikan kinerja pelayanan perizinan secara <i>online</i>;</p> <p>7. Memperkuat kinerja program dan kegiatan <i>e-Government</i> pada Diskominfo Pemerintah Kota Probolinggo</p> <p>8. Camat dapat memonitor kinerja pelayanan administrasi persuratan pada Kelurahan di Kota Probolinggo</p>
5. Keunikan / kreativitas	<p>1. Dapat mendeteksi posisi proses permohonan;</p> <p>2. Setelah melakukan pendaftaran pemohon akan mendapatkan kode unik melalui SMS, untuk simpan sebagai bukti bahwa telah melakukan pendaftaran <i>online</i> sekaligus juga dapat digunakan untuk melakukan tracking perizinan;</p> <p>3. Selanjutnya permohonan perizinan akan ditindaklanjuti oleh petugas <i>backoffice</i> Kelurahan dan Kecamatan, untuk mengecek pendaftaran sementara. Apabila ada kekurangan persyaratan maka anda akan dihubungi melalui SMS/WA oleh petugas Kelurahan. Apabila sudah selesai maka pemohon akan menerima SMS dari SMS Center SIAKEL</p> <p>4. Fitur unggulan SIAKEL :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terintegrasi dengan SIAK; - Paperless; - Tanda Tangan Digital;
6. Kemitraan	<p>1. Diskominfo</p> <p>2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>3. Bagian Pemerintahan</p> <p>4. Bagian Organisasi</p> <p>5. Kecamatan</p> <p>6. Kelurahan</p>
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	<p>Penambahan Kapasitas Bandwidth Server dan Bandwidth Internet Kelurahan;</p>
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	<p>Penambahan jumlah SDM / Staf Operasional dan Pelatihan teknis pelayanan administrasi Kelurahan dan Kecamatan melalui sistem <i>online</i></p>
9. Sumber daya yang digunakan	<p>1. Pendanaan : APBD</p> <p>2. SDM : Kelurahan dan Kecamatan</p>
10. Analisa Risiko	<p>Operator dan Pejabat Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan belum melek IT</p>

SMART BRANDING

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	KAMU CENTIL (Kampung Tematik Kewilayahan), Bappedalitbang
2. Penjelasan singkat	<p>Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya perkembangan kondisi ekonomi, sosial dan budaya pada masing-masing kelurahan 2. Perbedaan potensi yang berkembang di masing-masing kelurahan 3. Lokasi kumuh di wilayah perkampungan 4. Masih kurang sadarnya masyarakat dalam menjaga lingkungan 5. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana lingkungan 6. Belum adanya program CSR yang bergerak dibidang pengembangan kampung tematik <p>Solusi/ide :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi potensi kewilayahan di masing-masing kelurahan 2. Perbaiki kondisi lingkungan dari kumuh menjadi tidak kumuh 3. Peningkatan penghijauan wilayah yang intensif 4. Pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif 5. Sosialisasi intensif kepada masyarakat dalam menjaga lingkungan 6. Mengangkat potensi social dan ekonomi masyarakat setempat 7. Mengidentifikasi sarana dan prasarana pada masing-masing kelurahan yang masih dibutuhkan
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	<p>Kode Status : Kampung Tematik masih dalam proses rencana dan kajian permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan</p> <p>Persentase Penyelesaian : 0%</p> <p>Keterangan : Kampung tematik akan dikembangkan oleh Bappedalitbang dan Dinas PUPR dalam memilih lokasi kampung yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kampung tematik percontohan.</p>

4. Manfaat dari inovasi	<p>Penerima manfaat : Masyarakat pada wilayah kampung masing-masing Kelurahan di Kota Probolinggo</p> <p>Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan (fasum dan fasos) yang lebih baik, dan tertata 2. Pertumbuhan dan peningkatan ekonomi lokal yang berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga . 3. Mendukung trademark wilayah tersebut menjadi ikonik, dapat memberikan pengaruh positif pada warga setempat seperti perubahan mindset dan perilaku warga, keberdayaan masyarakat, 4. Diharapkan juga dapat memberikan pengaruh positif dan daya tarik (magnet) bagi kampung-kampung lainnya di Kelurahan tersebut maupun Kelurahan lainnya agar terpicu dan terpacu untuk mewujudkan tematik serupa. 5. Munculnya titik – titik kunjungan baru di setiap Kecamatan / Kelurahan yang tidak semuanya tersentral di tingkat Kota (terbangunnya sentra-sentra, rumah galeri) yang mendukung pengembangan potensi dan ikon Kota Semarang 6. Diharapkan dapat menggugah Para Pemberi CSR untuk mereplikasi Kampung Tematik di Kampung / Kelurahan wilayah lain
5. Keunikan / kreativitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha masyarakat yang dominan dan menjadi mata pencaharian pokok sebagian besar warga di wilayah tersebut 2. Karakter masyarakat yang mendidik (budaya, tradisi, kearifan lokal) 3. Masyarakat dan lingkungan yang sehat 4. Home industri ramah lingkungan 5. Kerajinan masyarakat 6. Ciri khas setempat yang lebih kuat / tidak dimiliki kampung lain dan bisa menjadi ikon wilayah
6. Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappedalitbang 2. Dinas PUPR 3. Dinas Perkim 4. Camat 5. Lurah 6. BKM
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi daya tarik wisata buatan di Kota Probolinggo yang <i>Instagramable</i> 2. Mempromosikan berbagai aktifitas masyarakat yang unik dan menarik kepada para travel agent untuk dijual sebagai paket wisata kepada wisatawan 3. Membangun rasa memiliki bagi setiap anggota masyarakat di kelurahan 4. Mengembangkan citra kelurahan yang baik dan bersih serta ramah

8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. CSR 2. Peningkatan kapasitas SDM
9. Sumber daya yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendanaan : APBD, APBN, CSR 2. SDM : Perangkat Kelurahan, Kecamatan, BKM, Bappeda, PUPR, Perkim
10. Analisa Risiko	Kesenjangan Sosial dengan kampung yang belum tersentuh program Kampung Tematik

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	ONTA PROLING (Online Travel Assistant Probolinggo), Disbudpar
2. Penjelasan singkat	<p>Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daya Tarik Wisata, Hotel dan Restaurant yang belum tercakup dalam Google Maps dan Website 2. Belum adanya peta wisata digital Kota Probolinggo 3. Belum adanya paket-paket wisata Kota Probolinggo (City Tour Package) 4. Peluang berinvestasi pariwisata Kota Probolinggo serta insentif-insentif yang ditawarkan 5. Belum terbentuknya ASITA (Association of Indonesia Travel Agency) Kota Probolinggo yang membawahi Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata 6. Kurangnya informasi pemandu wisata di Kota Probolinggo <p>Solusi/ide :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memudahkan informasi bagi para wisatawan tentang daya tarik wisata, sarana akomodasi dan restaurant, peta wisata digital, paket-paket wisata Kota Probolinggo yang ditawarkan beserta tarifnya, peluang-peluang investasi, informasi tentang rute, jarak, biaya dan moda yang dapat digunakan untuk mencapai suatu lokasi wisata. 2. Membangun jaringan kerjasama promosi wisata, informasi dan investasi pariwisata di Kota Probolinggo secara terpadu
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	<p>Kode Status : Aplikasi ONTA PROLING masih dalam proses rencana dan kajian permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan</p> <p>Persentase Penyelesaian : 0%</p> <p>Keterangan : Aplikasi yang sudah ada saat ini adalah SI JUWITA MALAM (Sistem Informasi Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara), sehingga tinggal menambah dan melengkapi konten dalam aplikasi sesuai yang ada didalam ONTA PROLING. Sehingga kedepan aplikasi ini dapat direncanakan di tahun depan sambil mengkaji berbagai permasalahan yang ada di lapangan</p>
4. Manfaat dari inovasi	<p>Penerima manfaat : Wisatawan, travel agen dan investor dari berbagai daerah</p> <p>Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjang promosi pariwisata Kota Probolinggo dan branding Impressive Probolinggo City

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan informasi daya Tarik wisata, paket-paket wisata, serta sarana prasarana pendukung lainnya 3. Membangun kredibilitas kepariwisataan daerah yang layak untuk dikunjungi 4. Mengetahui <i>road map</i> sebaran potensi daya tarik wisata, peluang investasi dan dampak ekonomi berganda yang akan ditimbulkan dari pengembangan pariwisata 5. Memudahkan wisatawan dalam menemukan travel agen dan pramuwisata yang dapat membantu wisatawan saat berkunjung ke Kota Probolinggo 6. Membangun jaringan kerjasama antara pelaku wisata di Kota Probolinggo dengan pelaku wisata dari berbagai daerah 7. Memberikan kemudahan bagi pihak pemerintah atau pengelola suatu objek atau kawasan wisata dalam mempromosikan potensi-potensi wisata lainnya
5. Keunikan / kreativitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dengan website dan aplikasi playstore dengan basis data yang lengkap, akan memudahkan bagi para wisatawan dalam mengakses berbagai daya tarik wisata dengan sarana dan prasarana pendukungnya, peta wisata digital, informasi investasi pariwisata, travel agen dan pramuwisata Kota Probolinggo, rute, jarak, biaya dan moda yang dapat digunakan untuk mencapai suatu lokasi wisata
6. Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disbudpar 2. Diskominfo 3. Pengelola Destinasi Wisata 4. Camat 5. Lurah 6. Pelaku Pariwisata
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sama dengan Aplikasi lain yang terintegrasi dengan segala kebutuhan wisatawan saat berkunjung ke Kota Probolinggo 2. Menemukan jaringan kerjasama promosi dengan website dan aplikasi lain dalam memboost promosi wisata
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Up date data terkait berbagai informasi yang dibutuhkan oleh wisatawan 2. Mengakomodir berbagai saran dan masukan dari berbagai pihak, khususnya wisatawan dan travel agen
9. Sumber daya yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendanaan : APBD, APBN 2. SDM : Disbudpar, Diskominfo
10. Analisa Risiko	Adanya aplikasi yang telah berjalan dan atau lebih menarik dengan data base yang lebih besar

SMART ECONOMY

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	SI-SAKA (Sekali Inseminasi Satu Kebuntingan), Dinas Pertanian
2. Penjelasan singkat	<p>Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) capaian angka Servis per Conception (S/C) sebesar 2,39 artinya untuk memperoleh kebuntingan seekor ternak disuntik semen (straw) sebanyak 2,39 kali IB 2. Inseminator belum sepenuhnya menerapkan Operasional Prosedur (SOP) yang tertib dan benar <p>Solusi/ide :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Inseminasi Buatan dengan capaian angka Servis per Conception (S/C) sebesar 1,2 – 1,5 2. Menerapkan SOP IB yang tertib dan benar, agar tercapai kebuntingan dalam sekali penyuntikan. 3. Menyiapkan sistem informasi SI-SAKA berbasis mobile dan Geotagging GIS. <p>Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik merupakan program penerapan bioteknologi reproduksi yang bertujuan untuk meningkatkan populasi, produksi, produktivitas dan mutu genetik ternak, pelaksanaannya dipersyaratkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Dari populasi ternak sapi sebanyak 9.983 ekor tersebut telah dilaksanakan Inseminasi Buatan pada populasi sapi betina 2.204 ekor, realisasi pada tahun 2017 sebanyak 1.358 ekor atau 64,11 % dimana angka Conception Rate (CR) terjadinya kebuntingan pada IB pertama sebesar 52%.</p>
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	<p>Kode Status : (1) IB saat ini telah dilaksanakan dan akan dikembangkan dengan menerapkan SOP secara tertib dan benar (dalam perumusan berbasis mobile dan GIS)</p> <p>Persentase Penyelesaian : 0%</p> <p>Keterangan :</p>
4. Manfaat dari inovasi	<p>Penerima manfaat : Peternak dan kelompok yang memiliki ternak sapi</p> <p>Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh informasi yang akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelesaian pelayanan sesuai kebutuhan pemohon 3. Report dan record pelayanan secara otomatis terinput dalam data base server
5. Keunikan / kreativitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mendeteksi posisi pemohon pelayanan 2. Pengelolaan permasalahan dan solusi-solusinya dapat dilakukan dengan baik
6. Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pertanian 2. Diskominfo 3. Camat 4. Kelurahan 5. Inseminator Swadaya
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Penambahan komponen pelayanan pemeriksaan kebuntingan, gangguan reproduksi dan kelahiran pedet
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. CSR 2. Peningkatan kapasitas SDM
9. Sumber daya yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendanaan : APBD 2. SDM : Kementerian, Diskominfo
10. Analisa Risiko	Peternak, pengguna pelayanan belum melek IT

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	SI-PEDET (Sistem Identifikasi Perekaman Data Peternakan), Dinas Pertanian
2. Penjelasan singkat	<p>Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Populasi ternak sapi potong di Kota Probolinggo cukup tinggi, namun tidak tercatat dengan baik 2. Perputaran atau lalu lintas dan tingkat pencurian ternak cukup tinggi di kota transit <p>Solusi/ide :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendataan ternak secara baik dan benar. 2. Menyiapkan system informasi SI-PEDET berbasis mobile dan Geotagging GIS dalam perekaman data populasi ternak. <p>Pemilik ternak dapat mengakses SI-PEDET berbasis mobile dan GIS karena ternaknya telah dipasang microCHIPS sehingga posisi dan pergerakannya dapat diketahui. Petugas akan mengambil tindakan secara cepat dan sigap jika diinginkan apabila terjadi sesuatu pada ternaknya.</p>
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	<p>Kode Status : (1) Ternak sapi sudah didata populasinya secara konvensional namun tidak direkam menggunakan IT, (Kebutuhan/masalah dalam proses perumusan)</p> <p>Persentase Penyelesaian : 0%</p> <p>Keterangan :</p>
4. Manfaat dari inovasi	<p>Penerima manfaat : Peternak dan kelompok yang memiliki ternak sapi</p> <p>Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh informasi yang akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Penyelesaian masalah sesuai kebutuhan 3. Memudahkan dalam pelaksanaan recording untuk pembibitan, pengiriman dan pemotongan 4. Report dan record pelayanan secara otomatis terinput dalam data base server
5. Keunikan / kreativitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mendeteksi posisi ternak 2. Pengelolaan permasalahan dan solusi-solusinya dapat dilakukan dengan baik

6. Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskominfo 2. Camat 3. Polsek 4. Kelurahan
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Penambahan komponen pencatatan perkembangan ternak, pelayanan kesehatan hewan
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. CSR 2. Peningkatan kapasitas SDM
9. Sumber daya yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendanaan : APBD 2. SDM : Kementerian, Diskominfo
10. Analisa Risiko	Peternak, pengguna pelayanan belum Melek IT

SMART LIVING

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. SISKIA PRO CANTIK	Sistim Infomasi Kesehatan Ibu Dan Anak Probolinggo “Cermat Andal Teliti Informatif Kualitas”, “SISKIA PRO CANTIK”, Dinas Kesehatan
2. Penjelasan singkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kota Probolinggo menjdi kondisi yang harus segera diatasi guna meningkatkan status kesehatan masyarakat khususnya ibu hamil resiko tinggi 2. Solusi yang dapat diakukukan berkenaan masalah ibu hamil resiko tinggi adalah dengan menemukan dan penanganan secara dini bumil risti diperlukan sistim yg bisa secara real time dan koneksi data dari pemberi pelayanan pada bumil yg dilayani oleh beberapa profesi yg terintegrasi. 3. Penjelasan lebih rinci dapat diakses melalui...siskia.probolinggo.go.id (sesuai sistem online)
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	<p>Kode Status dalam siklus manajemen inovasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya kematian ibu di Kota Probolinggo. 2. Ide/konsep inovasi awal adalah memberikan informasi dan catatan lengkap kesehatan pada bumil dan anak resti yg bisa dibaca dan diakses oleh nakes yang lain secara real time (online) 3. Rencana implementasinya adalah dengan Aplikasi online yg terintegrasi terhadap pemberi penggunaan layanan KIA 4. Inovasi dan komponen disupport oleh Dinas Kominfo dalam hal pemberian akses. 5. Implementasi Inovasi sedang berlangsung 6. Evaluasi dan rencana pengembangan lebih lanjut sedang berlangsung 7. <p>Persentase Penyelesaian (progres waktu/pekerjaan) 75%</p>
4. Manfaat dari inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya system informasi terpadu ibu hamil dan bersalin serta bayi, melalui terintegrasinya data pelayanan KIA di Kota Probolinggo 2. Pemetaan dan Pendampingan Bumil Resiko Tinggi 3. Penurunan AKI dan AKB.
5. Keunikan / kreativitas	Pemikiran baru terhadap catatan dan rekam medis bumil dari manual buku KIA menjadi elektronik terintegrasi yg sulit terlaksana bila sistim manual,

6. Kemitraan	Organisasi Profesi : IDI, IBI, IDAI Dokter Obsgyn dan Bidan Praktek RSUD, Puskesmas, Klinik ynag memberikan layanan KIA Dinas Kominfo.
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dikembangkan/ditingkatkan dari sisi produk inovasi ini terkait isi info kesehatan yg ada (Raport Kesehatan), 2. Ruang lingkup/jangkaun dapat dimanfaatkan sesuai jenjang pelayanan, 3. Dapat direplikasi ke penggunaan di daerah lain karena buku KIA sebagai acuan nasional,
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka memastikan keberlangsungan (sustainability) implementasi dan pengembangan sedang berproses Penerbitan Perwali tentang Implementasi SISKIA PRO CANTIK di Faskes dan tempat praktek Mandiri, 2. Adanya Tim Koordinasi Pelaksana SISKIA di masing-masing Fasilitas Kesehatan, 3. Adanya penunjukan pelaksanan operator SISKIA 4. Adanya penghargaan dan sangsi terhadap kepatuhan impementasi SISKIA PRO CANTIK
9. Sumber daya yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM : Kabid dan Kasie yang menangani Program KIA Programer yg ada di Dinas. Tim IT di Dinkes Tenaga Ahli dari penyedia Aplikasi. 2. Sarana : Komputer (Server) dan jaringannya Perangkat Android Internet 3. Alokasi Dana APBD
10. Analisa Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemungkinan terkena Hacker sehingga diperlukan pengamanan data dan aplikasi yang kuat. 2. Kebocoran rahasia pasien perlu adanya manajemen password yang handal dan berlapis.

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Angkutan Pelajar, Dinas Perhubungan
2. Penjelasan singkat	<p>Deskripsi tentang inovasi yang menjelaskannya secara singkat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah/kebutuhan yang diatasi/dipenuhi <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan angkutan umum untuk menjangkau tempat-tempat tertentu dan sekolah-sekolah tertentu masih terbatas. Layanan angkutan umum masih seputaran pusat kota. - Keengganan angkutan umum untuk mengangkut pelajar 2. Pembaruan/ide/solusi apa yang diberikan untuk hal di atas <ul style="list-style-type: none"> - Penataan trayek angkutan umum - Penyediaan angkutan umum untuk pelajar <p>Penataan trayek angkutan umum ditata kembali disesuaikan dengan kondisi dan dinamika perkembangan Kota Probolinggo. Sehingga angkutan yang beroperasi dapat menjangkau pada seluruh wilayah-wilayah di Kota Probolinggo. Angkutan untuk pelajar disediakan melalui kerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan angkutan umum. Pemerintah memberikan subsidi kepada pelajar melalui penerbitan kartu transportasi pelajar. Disediakan piranti di angkutan untuk menggesekkan pembayaran oleh pelajar yang anik angkutan</p>
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode status : dalam tahap ide untuk penerbitan kartu transportasi pelajar 2. Persentase penyelesaian : 0% 3. Keterangan : <ul style="list-style-type: none"> Studi Penataan trayek akan dilakukan pada PAPBD 2018 Program transportasi pelajar masih dilaksanakan secara manual dengan memberikan subsidi kepada angkutan umum dengan mekanisme hibah melalui Asosiasi Sopir Angkot Probolinggo (ASAP)
4. Manfaat dari inovasi	<p>Penjelasan singkat penerima manfaat, dampak/keuntungan/manfaat yang didapatkan dari inovasi baik secara langsung maupun tidak langsung, bersifat intern maupun ekstern</p> <p>Penerima Manfaat : masyarakat dan pelajar</p> <p>Dampak :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan mobilitas masyarakat dan konektivitas antar wilayah kota - Memudahkan pelajar untuk pergi ke sekolah - Mewujudkan <i>green transpotation</i> → meningkatkan transportasi publik
5. Keunikan / kreativitas	Kartu transportasi pelajar, pemberian subsidi pembiayaan transportasi bagi pelajar
6. Kemitraan	Dinas Pendidikan, Lembaga Sekolah, Polres, ASAP, Dinas Kominfo, Dinas PUPR
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Kota Probolinggo 2. Program Walikota Terpilih
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan studi penataan trayek 2. Penataan trayek yang menjangkau seluruh wilayah 3. Penyusunan regulasi mekanisme pembayaran 4. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan 5. Penyediaan perangkat pembayaran
9. Sumber daya yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran APBD dan CSR 2. Perangkat pembayaran 3. Jaringan internet 4. SDM Supir
10. Analisa Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan kartu transportasi pelajar 2. Kemudahan dalam pembelian kendaraan sepeda motor

SMART SOCIETY

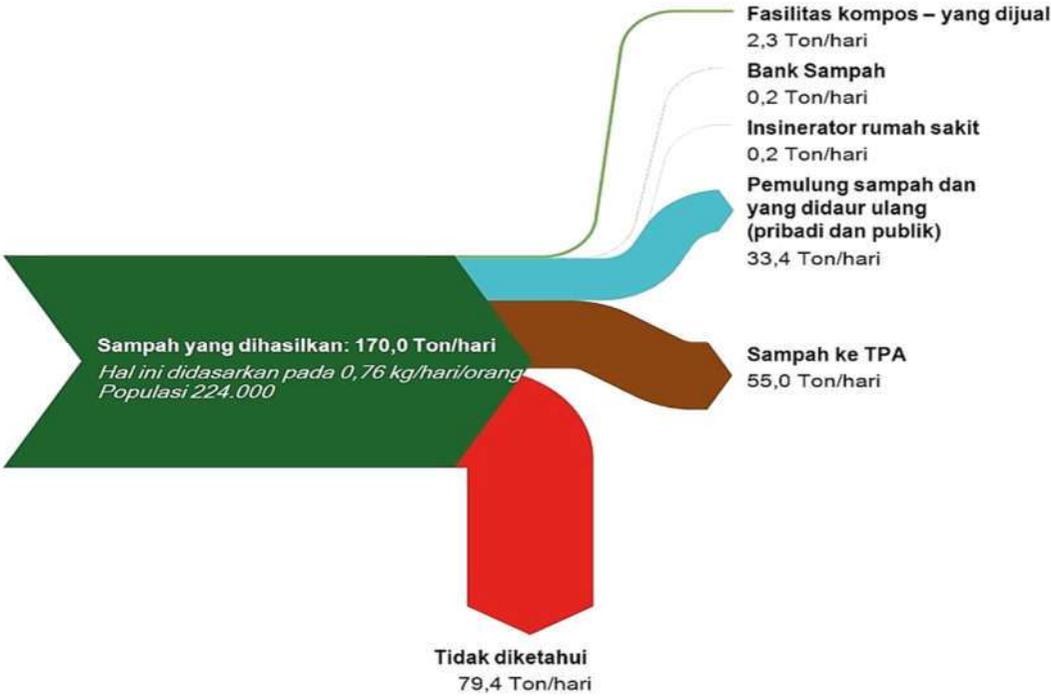
Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	DISCHOTIK, Dinas Pendidikan
2. Penjelasan singkat	<p>Dsichotik adalah singkatan dari digital school dengan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan rendahnya mutu pembelajaran, penilaian belajar, dan masalah leamhnya administrasi kehadiran siswa dan guru. Secara garis besar inovasi dapat diilustrasikan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran, materi pembelajaran dan model diversifikasi model pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; 2. Meningkatkan kualitas dan reliabelitas penilaian belajar baik penilaian harian, tengah semester, akhir semester dan ujian akhir nilai siswa mulai penilain harian, tengah semester sampai penilaian akhir; 3. Melakukan digitalisasi pada pengolahan nilai sampai dengan pencetakan buku rapor dan membuka akses nilai kepada pemangku kepentingan; 4. Melakukan digitalisasi pencatatan kehadiran atau ketidakhadiran siswa dan pelaporan real time kepada orang tua siswa dan pelaporan ktidak hadiran guru dan tebnaga kependidikan kepada kepala sekolah dan pengawas
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	<p>Kode Status Inovasi saat ini sudah berjalan tetapi masih perlu perluasan sasaran dan penyempurnaan. Saat ini dsichotik masih diterapkan ke 10 SMP Negeri. Pada tahun 2019, sasaran akan ditambah dengan 36 SD negeri. Dalam jangka 4 tahun diharapkan seluruh SMP dan SD negeri dan swasta sejumlah 112 akan tercover. Dari sisi program, saat ini inovasi sudah berjalan baik pada sisi laporan hasil belajar. Materi untuk perencanaan pembelajaran dan bahan ajar sudah terisi sekitar 40% untuk SMP dan terus dikembangkan. Pencatatan kehadiran, sudah berlangsung perlu menyempurnaan pada sisi pelaporan kehadiran ke orang tua. Jaringan intranet ke SMP Negeri sudah tersambung, perlu pengembangan ke SD negeri dilanjutkan ke sekolah swasta.</p> <p>Persentase Penyelesaian 50 %.</p>

4. Manfaat dari inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru terbantu dalam melaksanakan administrasi penilaian belajar dan pelaporan hasil belajar harian maupun rapor akhir semester 2. Guru terbantu untuk melakukan persiapan pembelajaran 3. Guru terbantu dalam mendapatkan materi pembelajaran digital sesuai kebutuhan 4. Orang tua siswa terbantu dengan mendapatkan laporan status kehadiran dan memperoleh akses ke nilai hasil belajar anaknya 5. Kepala Sekolah dan pengawas terbantu mendapatkan ,laporan status kehadiran guru dan tenaga kependidikan
5. Keunikan / kreativitas	<p>Banyak sekolah dan kabupaten/kota di daerah lain memiliki inovasi seperti ini, tetapi dischotik khas karena inovasi ini bersifat komprehensif: pencatatan dan laporan kehadiran siswa dan guru real time, penyediaan perangkat pembelajaran dan materi pembelajaran tertata menurut jenjang sekolah, tingkat kelas, semester, mata pelajaran, kompetensi dasar dan jenis file, sekaligus menyediakan aplikasi penilaian belajar, koreksi hasil belajar, administrasi hasil belajar dan pelaporan hasil belajar yang dapat diakses oleh guru, wali kelas, kepala sekolah pengawas, dinas dan orang tua sesuai dengan hak akses masing-masing</p>
6. Kemitraan	<p>Dinas kominfo untuk jaringan intranet ke sekolah, Pustekom Kemdikbud untuk sumber belajar, Seamolek untuk materi dan moda pembelajaran</p>
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	<p>Setelah SD-SMP dijangkau semua, inovasi ini dapat ditawarkan ke MI dan MTs negeri dan swasta</p>
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwali pelaksanaan dischotik 2. Penganggaran rutin untuk merawat dan mengembangkan program 3. Mengangkat tenaga IT programmer dan ahli jaringan 4. Menugaskan MGMP dan KKG untuk secara rutin mengisi dan mengembangkan materi
9. Sumber daya yang digunakan	<p>Dana: APBD, DID SDM: Tim pengembang dipimpin kabid, Tenaga permanen, outsourcing, guru dan tenaga kependidikan berkemampuan IT di masing masing sekolah Sarpras: Server/ pusat data, jaringan: tower, koneksi point to point, metropole omni, komputer terkoneksi internet dan intranet di sekolah</p>
10. Analisa Risiko	<p>Resiko tertinggi terletak pada gangguan jaringan intranet, back up internet</p>

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	MASIH SEKOLAH SI YANIK BERSEPATU, Dinas Pendidikan
2. Penjelasan singkat	<p>MASIH SEKOLAH SI YANIK BERSEPATU adalah singkatan dari Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pada Pelayanan Publik Berfokus Pada Mutu . Inovasi ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan manajemen sekolah becirikan akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik (good governance) yang diorientasikan kepada peningkatan pelayanan kepada pengguna layanan yakni siswa dan orang tua siswa dengan fokus pada peningkatan mutu yang terukur. Secara garis besar inovasi dapat diilustrasikan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, transparan, dan partisipatif dengan melibatkan penyedia dan pengguna layanan. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan manajemen dan kepemimpinan sekolah yang berpusat pada proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan dan menguatkan pendidikan karakter dengan menerapkan budaya mutu
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	<p>Kode Status Manajemen Berbasis Sekolah yang saat ini sudah diterapkan seluruh SD dan SMP Negeri/swasta berorientasi pada pelayanan publik. Akan dikembangkan MBS berorientasi pelayanan Publik Berfokus Pada Mutu.</p> <p>Persentase Penyelesaian: 0 %.</p>
4. Manfaat dari inovasi	<p>Penerima manfaat: Sekolah, Siswa dan Wali Murid</p> <p>Manfaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya partisipasi warga sekolah dalam kegiatan eds (evaluasi diri sekolah), penyusunan rks (rkjm, rkt, dan rkas), pengadaan/perbaikan sarana-prasarana sekolah, maupun kegiatan sekolah lainnya. 2. meningkatnya transparansi penyelenggaraan kegiatan sekolah dalam bentuk publikasi rks (rencana kerja sekolah), ipm (indeks pengaduan masyarakat), janji / maklumat perbaikan pelayanan, maupun laporan keuangan sekolah melalui papan informasi,

	<ol style="list-style-type: none"> 3. meningkatnya resposivitas stakehoders sekolah dalam mensikapi kebutuhan fasilitas sekolah yang dikeluhkan oleh warga sekolah. hal tersebut tercermin dari komitmen kepala sekolah untuk menerbitkan “janji perbaikan pelayanan” yang dipublikasikan melalui papan informasi, dan 4. meningkatnya kualitas pelayanan publik 5. Sekolah terbantu oleh semua warga sekolah dalam menyusun perencanaan kurikulum dan penganggaran sekolah 6. Kebijakan sekolah lebih mengarah pada peningkatan mutu pembelajaran.
5. Keunikan / kreativitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasi Pelayanan Publik 2. Perencanaan kurikulum dan penganggaran berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran
6. Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. MSF 2. Pengawas Sekolah 3. Warga sekolah
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Pengembangan bukan hanya perencanaan dokumen kurikulum dan penganggaran
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi warga sekolah 2. Peningkatan kapasitas SDM
9. Sumber daya yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendanaan : APBD 2. SDM : Tim pengembang dipimpin kabid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan wali murid
10. Analisa Risiko	

SMART ENVIRONMENT

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan																
1. Nama Singkat Inovasi	E- Portal Samali, DLH																
2. Penjelasan singkat	<p>Sebuah sistem pelaporan penanganan Sampah di Masyarakat dengan sistem online yang sinergi antara masyarakat dengan Pemerintah selaku penyedia layanan persampahan.</p> <p>Permasalahan kurang lebih 70 ton sampah yang tidak tertangani di masyarakat.. sebagai gambaran potensi sampah se Kota adalah 170 ton perhari dengan deskripsi sebagai berikut :</p>  <table border="1" data-bbox="568 683 1619 1380"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Jumlah (Ton/hari)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sampah yang dihasilkan</td> <td>170,0</td> </tr> <tr> <td>Sampah ke TPA</td> <td>55,0</td> </tr> <tr> <td>Tidak diketahui</td> <td>79,4</td> </tr> <tr> <td>Pemulung sampah dan yang didaur ulang (pribadi dan publik)</td> <td>33,4</td> </tr> <tr> <td>Insinerator rumah sakit</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>Bank Sampah</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>Fasilitas kompos – yang dijual</td> <td>2,3</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Hal ini didasarkan pada 0,76 kg/hari/orang Populasi 224.000</i></p>	Kategori	Jumlah (Ton/hari)	Sampah yang dihasilkan	170,0	Sampah ke TPA	55,0	Tidak diketahui	79,4	Pemulung sampah dan yang didaur ulang (pribadi dan publik)	33,4	Insinerator rumah sakit	0,2	Bank Sampah	0,2	Fasilitas kompos – yang dijual	2,3
Kategori	Jumlah (Ton/hari)																
Sampah yang dihasilkan	170,0																
Sampah ke TPA	55,0																
Tidak diketahui	79,4																
Pemulung sampah dan yang didaur ulang (pribadi dan publik)	33,4																
Insinerator rumah sakit	0,2																
Bank Sampah	0,2																
Fasilitas kompos – yang dijual	2,3																

	<p>Dari hal tersebut di atas perlu terbentuk sistem pelaporan quick response untuk mendeteksi potensi sampah yang tidak / belum tertangani dengan baik (TPS, Container serta lokasi lokasi lainnya seperti Sungai, TPS Liar,)</p> <p>Secara Teknis Sistem Pelaporan ini yang berbasis android dari level RT/ RW di masyarakat untuk optimalisasi sampah yang tertangani.</p> <p>Sistem Pengaduan / pelaporan penanganan persampahan yang terkoneksi dengan petugas armada/ kendaraan pengangkut sampah yang beroperasi di lapangan dengan pendekatan pembagian wilayah / area kerja layanan sehingga penanganan pengangkutan permasalahan persampahan bisa tertangani dengan quick response. Adapun pelaporan dengan real time dan real location (tag lokasi) sehingga penanganan bisa cepat dan tepat lokasi</p> <p>Tingkat urgensi menjadi pertimbangan dalam penentuan dalam penanganan sampah/limbah. Sinergitas diperlukan dengan melibatkan level kelurahan, kecamatan, DLH, Dians Pol PP, Dinas Permukiman, Dinas Perhubungan.</p>
<p>3. Status Saat Ini</p> <p>a. Kode status</p> <p>b. Persentase Selesai</p> <p>c. Penjelasan</p>	<p>Kode Status dalam siklus manajemen inovasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan pertimbangan tingginya sampah yang tidak tertangani di masyarakat maka inovasi e-portal samali menjadi kebutuhan dalam problem solving dan pelayanan kepada masyarakat 2. Sistem Pengaduan / pelaporan penanganan persampahan yang terkoneksi dengan petugas armada/ kendaraan pengangkut sampah yang beroperasi di lapangan dengan pendekatan pembagian wilayah / area kerja layanan sehingga penanganan pengangkutan permasalahan persampahan bisa tertangani dengan quick response. Adapun pelaporan dengan real time dan real location (tag lokasi) sehingga penanganan bisa cepat dan tepat lokasi 3. Aplikasi pelaporan online yang terintegrasi antara petugas dengan masyarakat 4. sarana server dan operator pengendali aplikasi oleh Diskominfo untuk akses kebutuhan koneksi internet dan data 5. Perlunya dukungan sarana armada yang memadai serta Jumlah dan kualitas SDM yang memadai 6. Implementasi masih belum dilaksanakan. <p>Persentase Penyelesaian 0%</p>
<p>4. Manfaat dari inovasi</p>	<p>Penerima Manfaat adalah masyarakat serta Membantu pemerintah dalam percepatan pelaksanaan layanan di bidang persampahan untuk mendukung program Kota Probolinggo ramah lingkungan</p>

5. Keunikan / kreativitas	Kreativitas, pemikiran baru , kekhasan yang diperkenalkan, originalitas, perbedaan dari inovasi sejenis lainnya
6. Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan – Kelurahan – RT/RW 2. Satpol PP (penegak Regulasi) 3. Komunitas Peduli Sampah
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	-
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	Sinergitas semua pihak terkait.
9. Sumber daya yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi 2. SDM petugas 3. Armada kendaraan 4. Anggaran
10. Analisa Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat yang rendah 2. Lemahnya koneksi internet bisa memperlambat layanan. 3. Kualitas SDM harus mendukung.

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	SMART PJU, Dinas Perhubungan
2. Penjelasan singkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya beban pembayaran listrik dalam penyediaan layanan PJU 2. Biaya operasional PJU yang masih tinggi 3. Tingginya angka kriminalitas dan kecelakaan di jalan 4. Validasi penggunaan beban listrik masih belum terstandart 5. Tingginya pencurian listrik liar oleh oknum masyarakat 6. Sinergitas diperlukan dengan melibatkan level PLN, Dinas Pol PP, Koramil, Polsek setempat
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	<p>Kode Status dalam siklus manajemen inovasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan pertimbangan tingginya anggaran yang dibutuhkan utk penyediaan layanan PJU, tingginya angka Kecelakaan Lalu Lintas dan biaya operasoinal yang tinggi, maka SMART PJU menjadi salah satu bentuk inovasi untuk mengatasi hal tsb. 2. SMART PJU merupakan sistem penerangan jalan umum yang menggunakan sensor untuk identifikasi kepadatan jalan baik pengguna kendaraan maupun pedestrian, sehingga kualitas penerangan akan meningkat sesuai dengan volume kepadatan lalu lintas tersebut dan dapat dipantau melalui aplikasi Android 3. Rencana implementasinya adalah dengan sistem sensor dan pendeteksian kerusakan dengan sistem android 4. Inovasi dan komponen disupport oleh PLN dan Diskominfo 5. Sarana PJU, Sistem sensor, SDM. Anggaran 6. Perlunya dukungan sarana armada yang memadai serta Jumlah dan kualitas SDM yang memadai 7. Impelementasi masih belum dilaksanakan. <p>Persentase Penyelesaian 0%</p>
4. Manfaat dari inovasi	Penerima Manfaat adalah masyarakat pengguna jalan raya/arteri
5. Keunikan / kreativitas	Kreativitas, pemikiran baru , kekhasan yang diperkenalkan, originalitas, pembedaan dari inovasi sejenis lainnya
6. Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satpol PP (penegak Regulasi) 2. PLN

7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	-
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	Sinergitas semua pihak terkait.
9. Sumber daya yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem sensor 2. SDM petugas 3. Armada PJU 4. Anggaran
10. Analisa Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan membutuhkan anggaran yang cukup besar 2. Faktor cuaca yang mempengaruhi elemen sensor dari PJU



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

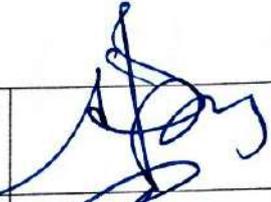
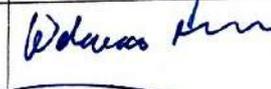
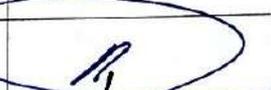
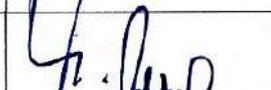
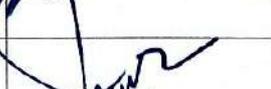
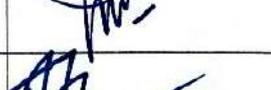
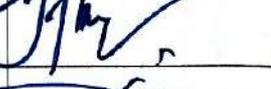
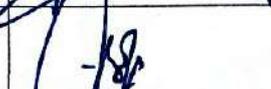
Jl. Panglima Sudirman No 19 (0335) 4214228 Fax 420155 Probolinggo
Website : probolinggokota.go.id
PROBOLINGGO 67211

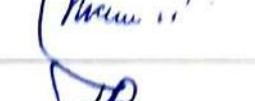
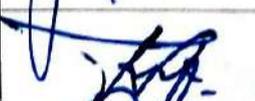
KOMITMEN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SMART CITY PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

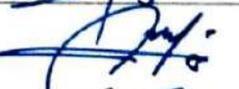
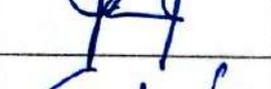
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyatakan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan *Smart City* di Kota Probolinggo, sebagaimana yang tertuang dalam buku I, II dan III *Master Plan* Pengembangan *Smart City* Kota Probolinggo, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran segenap masyarakat di Kota Probolinggo.

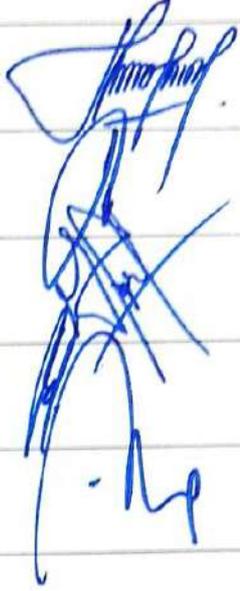
Semoga Tuhan Yang Maha Esa merestui segala upaya ini.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hj. RUKMINI, SH, M.Si	Walikota	
2	dr. BAMBANG AGUS SUWIGNYO, MM.Kes	Sekretaris Daerah	
3	BUDIONO WIRAWAN, S.Sos, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
4	Drs. SHOFWAN THOHARI, M.Si	Inspektur	
5	REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
6	WARSITO, S.Pd	Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
7	AMAN SURYAMAN, AP, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
8	Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
9	drg. NINIK IRA WIBAWATI, M.QIH	Kepala Dinas Kesehatan	

10	AMIN FREDY, ST, MT	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
11	AGUS HARTADI, SH, M.SI	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
12	Drs. ZAINULLAH,MM	Kepala Dinas Sosial	
13	WAHONO ARIFIN, SH. MM	Kepala Dinas Tenaga Kerja	
14	Drs. H. SUKAM, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	
15	Drs. TUTANG HERU ARIWIBOWO, M.Si	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
16	Drs. TARTIB GOENAWAN, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
17	Drs. SUMADI, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan	
18	Drs. GATOT WAHYUDI, M.Si	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	
19	DWI HERMANTO, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
20	SARIADI, SE, M.Si	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
21	Ir.BUDI KRISYANTO, M,Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
22	Ir. SUKARNING YULIASTUTI, M.Si	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
23	Ir. SUDIMAN, M.M	Kepala Dinas Perikanan	
24	Ir. IMANTO, MM	Kepala Badan Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
25	Drs. RACHMA DETA ANTARIKSA, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
26	Drs.TEGUH BAGUS SUJAWANTO, M.Pd	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
27	PRIJO DJATMIKO,S.Sos, M.M	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
28	AGUS EFFENDI, S.Sos, M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	

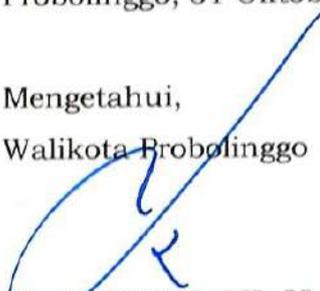
29	Dra. INA LUSILINAWATI, M.Si	Kepala Bagian Pemerintahan	
30	CHAIRUL ANAM, SE, M.Si	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
31	TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum	Kepala Bagian Hukum	
32	WAWAN SOEGYANTONO, SE, MM	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian	
33	GOFUR EFFENDY, ST. M.Si	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
34	SUGITO PRASETYO, S.STP, MM	Kepala Bagian Umum	
35	Dra. HERI ASTUTI, M.Si	Kepala Bagian Organisasi	
36	Dra. MARDI PRIHATINI	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	
37	Drg. RUBIYATI, MM.Kes	Plt. Direktur RSUD dr. Mohamad Saleh	
38	PUJO AGUNG SATRIO, S.STP, M.Si	Camat Kademangan	
39	PUDI ADJI TJAHJO WAHONO, S.Sos, M.Si	Camat Kanigaran	
40	IMAM CAHYADI, S.Sos, M.Si	Camat Kedopok	
41	MUHAMMAD ABAS, S.Sos, M.Si	Camat Mayangan	
42	DEUS NAWANDI, S.STP, M.Si	Camat Wonoasih	
43	BUDIYO KARTONO, S.H	Lurah Kademangan	
44	MOH. SLAMET EFFENDI	Lurah Pilang	
45	ZAINUL FARUK, S.Sos	Lurah Ketapang	
46	YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M	Lurah Triwung Lor	
47	MOH BUHAR, S.Sos	Lurah Triwung Kidul	

48	SUPARMO, S.Sos	Lurah Pohsangit Kidul	
49	MUHAMMAD GOZHALI, SH	Lurah Wonoasih	
50	RATIH SUDARMANTI, S.STP, MM	Lurah Jrebeng Kidul	
51	ZAINUL KHODIN, S.Sos, MM	Lurah Pakistaji	
52	SANAMO, S.Sos	Lurah Kedung Galeng	
53	NURHADI, S.Pt	Lurah Kedung Asem	
54	WAHJOE HARIJADI, S.Sos	Lurah Sumber Taman	
55	MUKHAMMAD YUNUS, S.Sos	Lurah Kedopok	
56	ERNI YUSNITA, S.Sos, M.Si	Lurah Jrebeng Kulon	
57	ABDUL HALIK, S.Sos	Lurah Jrebeng Wetan	
58	RUDJITO, S.Sos	Lurah Jrebeng Lor	
59	SUBANDRI, S.Sos	Lurah Sumber Wetan	
60	ALI MURTADLO	Lurah Kareng Lor	
61	SUWARNO	Lurah Mayangan	
62	ANANTO, SE, M.M	Lurah Sukabumi	
63	RISQI FADILLAH, SSTP, MM	Lurah Mangunharjo	
64	ENDAH DWI KUMALASARI, SSTP, M.M	Lurah Jati	
65	SURIANTO	Lurah Wiroborang	
66	DWI ARIANTO, S.Sos, M.M	Lurah Kanigaran	

67	SITI HOTIDJAH, S.Sos, MM	Lurah Tisnonegaran	
68	BAMBANG SUHERMAN, S.Sos	Lurah Curah Grinting	
69	GATOT HARI SUBAGYO, S.Sos	Lurah Kebonsari Kulon	
70	SUKARMAN, S.Sos	Lurah Kebonsari Wetan	
71	ARNIMAN, S.Sos	Lurah Sukoharjo	

Probolinggo, 31 Oktober 2018

Mengetahui,
Walikota Probolinggo


Hj. RUKMINI, SH, M.Si



BUKU #3

Masterplan Probolinggo Smartcity

**EXECUTIVE SUMMARY
SMART CITY KOTA PROBOLINGGO**

2018
DISKOMINFO KOTA PROBOLINGGO

LATAR BELAKANG

Permasalahan sebuah kota khususnya Kota Probolinggo sudah berkembang sangat kompleks sehingga solusi-solusi konvensional seringkali tidak lagi dapat mengejar kecepatan pertumbuhan permasalahan, diperlukan solusi-solusi yang lebih inovatif (*Smart City*) untuk menyelesaikan permasalahan kota TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) merupakan salah satu teknologi yang memiliki potensi inovatif yang sangat tinggi untuk menyelesaikan berbagai tantangan perkotaan. Meskipun demikian, *Smart City* tidak identik dengan Kota TIK (*Digital City*), karena TIK bukan satu-satunya kunci penyelesaian permasalahan perkotaan.

Pada saat yang sama, tren revolusi digital secara drastis telah mengubah cara hidup dan bahkan masa depan peradaban umat manusia. Dalam suatu penelitian menggambarkan bahwa gerakan digitalisasi telah membawa perubahan yang bersifat tidak hanya eksponensial tetapi juga kombinatorial. Mengantarkan manusia ke era dimana perubahan yang terjadi pada peradaban manusia untuk 20 tahun ke depan akan mengalahkan perubahan yang pernah terjadi sejak tiga ratus tahun yang lalu.

Salah satu fenomena perubahan yang bisa kita amati adalah terjadinya akselerasi proses urbanisasi di seluruh dunia. Pada tahun 2014, sebuah studi oleh PBB tentang tren urbanisasi dunia menunjukkan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah umat manusia, lebih dari setengah populasi manusia (54%) hidup di daerah urban. Sebagai gambaran pada tahun 1950 jumlah populasi urban dunia hanya 30%.

Masyarakat urban merupakan sebuah sistem kompleks dimana aktor-aktor penyusunnya yaitu manusia, teknologi, dan lingkungan saling terhubung dan mempengaruhi. Lahir dan berkembangnya pusat-pusat masyarakat yang bersifat urban akan selalu menghadirkan tantangan-tantangan baru seperti kemiskinan, kemacetan, kesenjangan sosial, kriminalitas, berkurangnya sumberdaya alam, polusi, masalah kesehatan dan tantangan-tantangan lainnya.

Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis *Smart City* telah menjadi tren pembangunan kota atau daerah di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah atau kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pembangunan *Smart City* tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau *enabler*.

Tren gerakan pembangunan kota atau daerah berbasis Smart City bisa kita saksikan di berbagai belahan dunia seperti Barcelona, Tokyo, London, Berlin, Amsterdam, Melbourne, Seoul, Shanghai, Mumbai, Singapura dan lain-lain. Di setiap kota di berbagai belahan dunia tersebut memiliki kisah sukses pembangunan Smart City yang berbeda-beda sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh setiap kota. Di Korea, sebuah kawasan reklamasi seluas 600 hektar dibangun dari nol sebagai sebuah Smart City, di Dubai menjadikan Masdar sebagai Kota yang membangun program kemandirian energi dengan energi surya dan terbarukan serta bertekad menjadi kota yang bebas emisi karbon, Amsterdam fokus pada pembangunan *Smart People*, *Smart Energy*, dan *Smart Waste Management*. Di Singapura, pembangunan Smart City langsung dikendalikan dibawah *Prime Minister Office* sebagai sebuah program untuk warga, pebisnis, dan pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dengan memanfaatkan teknologi, ide, aplikasi, dan big data.

Namun perlu dipahami bahwa konsep Smart City adalah konsep yang unik dan dinamis. Inisiasi-inisiasi yang muncul sebagai solusi akan permasalahan kota yang satu tidak serta merta bisa diaplikasikan sebagai solusi akan permasalahan yang muncul di kota yang lain. Hal ini terjadi karena Smart City menekankan pentingnya sebuah inovasi untuk menyelesaikan persoalan masing-masing kota dengan memanfaatkan teknologi TIK, sensor, dan *data analytic* sebagai faktor pendukung untuk mempermudah penyelesaian masalah (*enabling factor*). Pembangunan berbasis Smart City menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain. Jadi inisiasi Smart City yang muncul bukanlah solusi mutlak yang menutup pintu inovasi dan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu diperlukan adanya panduan agar pemerintah Kota Probolinggo mampu mempersiapkan dan mengimplementasikan konsep *Smart City* dengan baik sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki.

KONSEP SMART CITY YANG DIPILIH

Konsep smart city memfokuskan diri pada inovasi, solusi dan pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya teknologi secara optimal menjadi pilihan yang tidak dapat terelakkan. Gerakan e-Government di Kota Probolinggo yang mulai muncul dari tahun 2012 seiring dengan dibentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika yang sebelumnya merupakan perangkat daerah dengan tipe lembaga yang relatif kecil.

TUJUAN MASTERPLAN

Masterplan Smart City terdiri dari 3 buku. Buku 1 berisikan Analisis Strategis Smart City Kota Probolinggo dan buku 2 berisikan masterplan smart city Kota Probolinggo sedangkan buku 3 merupakan bagian akhir yang berupa executive summary. Maksud penyusunan Masterplan Smart City ini adalah untuk membuat acuan dan pedoman

perencanaan pembangunan dan pengembangan smart city yang berupa inisiatif-inisiatif program beserta peta jalannya bagi Organisasi Perangkat Daerah di Kota Probolinggo. Penyusunan Master Plan Smart City ini juga bertujuan untuk memberikan arahan percepatan strategi, kebijakan dan program pembangunan Kota Probolinggo yang telah tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo dengan pendekatan perencanaan 6 (enam) pilar smart city yaitu *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society* dan *smart environment*.

Ke depan, dokumen masterplan ini akan disesuaikan kembali berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2019–2024 mengacu kepada visi dan misi kepala daerah terpilih. Diharapkan tidak banyak dilakukan revisi atau penyesuaian mengingat visi dan misi kepala daerah terpilih saat ini tidak berbeda jauh dengan visi dan misi kepala daerah sebelumnya.

Smart city diharapkan dapat memberi solusi yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan (1) Kualitas hidup masyarakat; (2) Meningkatkan ekonomi masyarakat; dan (3) Meningkatkan keberlangsungan lingkungan hidup. Pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan 3 hal di atas adalah (1) Pendekatan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi; (2) Pendekatan pemberdayaan potensi kota; dan (3) Pendekatan pemberdayaan manusia yang berkesinambungan.

VISI SMART CITY DAERAH

Visi Kota Probolinggo berbunyi “**Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan**”. Sedangkan Rencana Strategis Pengembangan Teknologi Informasi memiliki Visi adalah “**Terwujudnya komunikasi dan informasi yang handal berbasis teknologi informasi menuju probolinggo kota berwawasan lingkungan**”

Implementasi TIK di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo secara umum sudah cukup baik terbukti dengan telah diraihinya penghargaan ICT Pura pada tahun 2012. Program ICT Pura merupakan program dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Tujuan Program ICT Pura adalah untuk memetakan, mengukur, dan mengapresiasi kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Indonesia terkait dengan kesiapan masing-masing daerah untuk mewujudkan kota digital.

Sebagai wujud keseriusan mengimplementasikan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, pada tahun 2017, Pemerintah Kota Probolinggo juga memperoleh penghargaan dan apresiasi dari Majalah I-tech. Wali Kota Probolinggo memperoleh penghargaan TOP Leader on IT Leadership 2017 yang diserahkan pada acara TOP IT dan TOP TELCO Award 2017. Selain itu, Pemerintah Kota Probolinggo juga menerima penghargaan TOP IT Implementation on City Government 2017.

Berdasarkan visi Kota Probolinggo dan rencana strategis teknologi informasi Kota Probolinggo serta semangat membangun TIK maka disusunlah visi smart city Kota Probolinggo yakni: **Kota Jasa yang Cerdas, Efisien, Transparan, Partisipatif, Impresif dan Bertanggung Jawab.**

KEKUATAN SEKTOR PEMERINTAH

1. Kebijakan :
 - 1) Visi 2014-2019
 - 2) Rencana Induk Pengembangan e-Government Kota Probolinggo Tahun 2014-2019.
 - 3) e-Leadership yang kuat
2. Kelembagaan :
 - 1) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe A.
 - 2) Dewan Smart City
 - 3) Tim Pelaksana Smart City.
3. Infrastruktur (sarana dan prasarana) teknologi informasi dan komunikasi (TIK) :
 - 1) Jaringan 3G/4G mencakup seluruh wilayah
 - 2) 6 (enam) BTS backbone jaringan wireless
 - 3) Kapasitas Bandwidth sebesar 400 MBPS Up To dan 100 MBPS Dedicated.
 - 4) Data center dan Data Recovery Center (DRC).
 - 5) Terdapat ruang server dengan kapasitas 8 server
 - 6) Hot spot untuk publik di beberapa fasilitas publik
 - 7) CCTV yang terpasang sebanyak 28 unit
 - 8) Sistem pendukung supply listrik menggunakan catu daya tambahan berbasis UPS (Uninterruptable Power Supply).
4. Aplikasi :

101 aplikasi (SIM dan web)

KEKUATAN SEKTOR PRIVAT

1. 5 (lima) wilayah pengembangan.
2. Struktur ekonomi privat terbesar di Kota Probolinggo dibangun dari kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori industri pengolahan yang secara teoritis dan praktis sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat Kota Probolinggo sebagai kota urban.
3. 41 perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Industri makanan dan minuman sebanyak 13 perusahaan
 - b. Industri tekstil sebanyak 5 perusahaan
 - c. Industri pakaian jadi sebanyak 11 perusahaan

- d. Industri kulit, barang asli dari kulit dan alas kaki serta industri kayu, barang dari kayu dan gabus (bukan furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebanyak 4 perusahaan
 - e. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebanyak 2 perusahaan
 - f. Industri barang galian bukan logam sebanyak 4 perusahaan
 - g. Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer, industri alat angkutan lainnya serta furnitur sebanyak 2 perusahaan.
4. Nilai investasi selama tahun 2015 di Kota Probolinggo sebanyak 108,32 milyar rupiah dengan pendapatan selama tahun 2015 sebanyak 3,31 trilyun rupiah.
 5. Pembiayaan alternatif CSR 4.423.152.548

KEKUATAN SEKTOR PUBLIK/MASYARAKAT/KOMUNITAS

Kekuatan sektor publik dibangun dari potensi masyarakat pada bidang :

1. Keberagaman Agama 228.346 beragama Islam, 3.319 beragama Protestan, 2.627 beragama Katolik, 112 beragama Hindu, 1.026 beragama Budha 10 jiwa sisanya beragama lain.
2. Politik, jumlah pemilih terdaftar untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 164.606 orang dengan perolehan suara sah sebanyak 133.533 suara (81,12%).
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi/Laju PDRB 6,11
4. PDRB ADHB per kapita 41.660.394
5. Inflasi 3,18
6. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,42
7. Perekonomian dominan Kota Probolinggo yaitu : (1) Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (24,36%), (2) sektor industry pengolahan (16,59%), dan (3) sektor transportasi dan pergudangan (13,59%).
8. Penduduk miskin 7,93 persen
9. IPM 71,5
10. Laju pertumbuhan penduduk 1,04 %
11. 2 rumah sakit, 2 rumah sakit bersalin, 6 Puskesmas, 21 Puskesmas Pembantu, 24 Apotik, dan 4 toko obat berijin.
12. AHH 69,86.
13. Harapan lama sekolah (HLS) 13,55 tahun
14. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) mencapai 8,48 tahun.

IDENTIFIKASI KELEMAHAN DAN PERMASALAHAN PEMABANGUNAN

Kelemahan utama yang teridentifikasi di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan Luas Wilayah dan RTH yang belum ideal (7,2% ruang terbuka hijau).
- b. Kelemahan Infrastruktur Trotoar dan Pedestrian.

- 1) Kondisi trotoar yang tidak laik fungsi secara fisik dan infrastruktur, antara lain karena kerusakan, ketinggian yang tidak standar, pembatas yang tidak dapat diakses oleh kaum difabel, dan sebidang dengan pohon peneduh.
 - 2) Penyalahgunaan fungsi trotoar dalam bentuk :
 - Dijadikan lapak para pedagang kaki lima
 - Dijadikan halaman parkir tanpa ijin resmi
 - Dijadikan tempat parkir liar
- c. Permasalahan Pendidikan
- (1) Belum tuntasnya penanganan masalah anak putus sekolah
 - (2) Belum terpenuhinya standar mutu, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan,
 - (3) Kualitas dan relevansi serta tatakelola pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan
 - (4) Masih belum meratanya kualitas pendidikan
 - (5) Pendidikan moralitas, budi pekerti dan pendidikan karakter semakin dirasakan diperlukan pada dunia pendidikan sekarang ini.
 - (6) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan bagi keberlanjutan pembangunan,
 - (7) Masih rendahnya akses masyarakat terutama masyarakat miskin kepada layanan pendidikan yang berkualitas.
- d. Permasalahan Kesehatan.
- (1) Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan terutama untuk masyarakat miskin, penyeledikian epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesemuanya perlu disesuaikan dengan tuntutan standar pelayanan minimum bidang kesehatan
 - (2) Terpenuhinya rasio jumlah penduduk dengan ketersediaan unit pelayanan kesehatan yang berkualitas,
 - (3) Belum terpenuhinya tenaga medis, paramedis dan peralatan medis yang sesuai dengan Standar Rumah Sakit Tipe B
 - (4) Belum terpenuhinya ketersediaan tenaga kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang dipersyaratkan.
- e. Permasalahan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota.
- (1) Terjadinya konversi lahan dari lahan non terbangun (kebanyakan lahan pertanian) menjadi lahan terbangun. Permasalahan laju perubahan penggunaan lahan yang tinggi terutama disebabkan tingkat pemanfaatan lahan kota relatif tinggi, sedangkan luas lahan kota relatif terbatas.
 - (2) Rawan genangan terutama pada saat curah hujan tinggi.

- (3) Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan ruas jalan yang ada, sehingga diprediksi akan menimbulkan adanya kepadatan dan kemacetan lalu lintas.
 - (4) Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan dan fasilitas air bersih baik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan sesuai kebutuhan masyarakat.
- f. Permasalahan Perumahan Rakyat
- (1) Adanya kawasan permukiman yang belum tertata dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana
 - (2) Perbaikan sarana dan prasarana dasar permukiman secara berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat,
 - (3) Masih adanya kawasan permukiman yang kurang layak huni khususnya dari aspek akses air bersih dan sistem sanitasi,
 - (4) Penyediaan dan peningkatan kualitas rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
- g. Permasalahan Lingkungan Hidup.
- (1) Pencemaran udara meningkat
 - (2) Pencemaran air permukaan terjadi karena kebiasaan warga dan beberapa pelaku usaha membuang limbah baik padat maupun cair langsung ke sungai
 - (3) Pencemaran air tanah yang terjadi mengakibatkan sumur-sumur penduduk menjadi tidak layak untuk dijadikan air minum karena rawan tercemar bakteri E-coli.
 - (4) Jumlah Volume Sampah Yang Masuk TPA (18.462.536 Kg/Th)
- h. Permasalahan Ekonomi.
- (1) Pengangguran terbuka 19.614 (18,12%)
 - (2) Masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi adalah masalah permodalan, pemasaran dan manajemen.
 - (3) Masalah yang dihadapi bidang perindustrian, baik industri kecil, menengah maupun industri kreatif, secara umum adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha industri yang masih kurang memadai, penciptaan iklim yang kondusif bagi berkembangnya sektor industri yang belum optimal, apresiasi terhadap insan industri khususnya industri kreatif yang masih kurang, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang belum optimal dan perlunya dorongan peran lembaga pembiayaan yang mendukung pengembangan industri secara optimal.
 - (4) Dalam pembangunan kelautan dan perikanan permasalahan antara lain karakteristik sosial budaya yang belum kondusif untuk kemajuan usaha,, ketimpangan tingkat pemanfaatan stock ikan antara kawasan satu dengan kawasan lainnya, masih banyaknya praktek illegal, penegakan hukum masih belum optimal, masih terus terjadi kerusakan lingkungan ekosistem laut,

terbatasnya sarana prasarana sosial dan ekonomi (transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang segmen pasar, harga dan pesaing.

- (5) Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan di Kota Probolinggo adalah bagaimana menciptakan suatu kondisi dimana setiap individu dan rumahtangga memiliki akses secara fisik, ekonomi, dan ketersediaan pangan yang cukup, aman, serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan selera untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Selain itu aspek pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara merata dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
- (6) Permasalahan yang secara umum dihadapi dalam pembangunan pertanian antara lain adalah penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian.
 - i. Permasalahan Kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan di perkotaan tidak terlepas dari tiga ciri kehidupan perkotaan yaitu ketergantungan akan ekonomi uang (*commodization*), lingkungan tempat tinggal yang kurang memadai (*enviromental hazards*) dan kehidupan sosial yang individualisitis (*social fragmentation*).
 - j. Permasalahan Kesejahteraan Sosial.

Dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial, masalah yang masih dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian meliputi kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, korban bencana, dan korban tindak kekerasan. Di samping itu, juga terdapat beberapa masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial, diantaranya adalah anak balita terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan perempuan rawan sosial ekonomi.
 - k. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - (1) Permasalahan yang dirasakan masih ada dan perlu mendapatkan perhatian adalah masyarakat harus diberikan ruang yang lebih luas lagi untuk masyarakat menjadi berdaya, baik berdaya dibidang ekonomi, bidang sosial maupun berdaya dibidang politik masyarakat.
 - (2) Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan perempuan adalah (a) belum optimalnya upaya penetapan kerangka pembiayaan, kelembagaan dan regulasi pemberdayaan perempuan, (b) kurang adanya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, (c) masih terbatasnya gerak peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan (d) kurang adanya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
 - l. Permasalahan Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

- (1) Beberapa permasalahan yang dihadapi pemuda antara lain bersumber dari rendahnya nilai penghargaan atas keberagaman, menguatnya kecenderungan primordialisme dan radikalisme dari kasus - kasus kekerasan yang muncul, dan menguatnya konsumerisme dan hedonisme. Selain itu, juga menguatnya apatisme terhadap persoalan masyarakat (bangsa), rendahnya jiwa kepemimpinan dan jiwa patriotisme, rendahnya etos kerja, kemandirian, dan kemampuan bersaing
- (2) Keterbatasan sumber pendanaan masih merupakan permasalahan khusus dalam kegiatan keolahragaan. Hal ini semakin terasa dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan didukung oleh anggaran yang memadai. Oleh karenanya sesuai dengan kemampuan anggaran pada APBD Kota Probolinggo, diperlukan satu kebijakan dan upaya agar pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah dapat berjalan lancar.
- (3) Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan budaya bangsa antara lain adalah : (a) Masih dijumpai terjadinya ketegangan antar kelompok masyarakat yang menimbulkan konflik. Ini merupakan indikasi rendahnya saling percaya dalam masyarakat. (b) Adanya indikasi munculnya krisis moral yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman, lemahnya sikap, dan makin melunturnya etika dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pada saat yang bersamaan, derasnya arus globalisasi juga mulai berpengaruh, dimana masyarakat memiliki kecenderungan lebih cepat mengadopsi budaya global yang negatif jika dibandingkan dengan budaya global yang positif dan produktif.
- (4) Masalah pariwisata sekarang ini secara operasional disebabkan oleh tidak terlaksananya sapta pesona dengan baik, yaitu: aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah tamah, dan kenangan.

SMART GOVERNANCE

Strategi dan Program Smart Governance

Strategi	Program dan Produk Smart City	DinasTerkait
1. Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik (Public service)	1. Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPADU)	DPMPTSP
	2. Pelayanan Kependudukan 3 in 1 (Akte Kelahiran, KK, KTP)	DISDUKCAPIL
	3. Pengintegrasian Sistem Pengaduan Pelayanan Publik	DISKOMINFO
	4. Penanganan Pengaduan Whatsapp Complain	DPMPTSP
	5. Sistem Pelayanan Poli RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo	RSUD dr. Moh. Saleh
	6. Sistem Pelayanan Puskesmas	Dinkes
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. SIAKEL (Sistem Informasi & Administrasi Kelurahan)	Diskominfo dan Bagian Pemerintahan
	2. SiJingga (Sistem Jaringan Informasi Good Governance)	Bagian Pemerintahan
	3. Peningkatan Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengukuran, Pelaporan pada SIMRAL	Bappedalitbang, BPPKAD, Bagian Organisasi dan Inspektorat
	1. Peningkatan Sistem Tunjangan Kinerja PNS (TPP)	Bagian Organisasi dan BKPSDM
	2. Sinkronisasi Anjab, Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan dengan Indikator Kinerja Jabatan dan SKP	Bagian Organisasi dan BKPSDM
3. Meningkatkan sistem inventarisasi produk hukum daerah	1. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Kota Probolinggo	Bagian Hukum
	2. Inventarisir dan Kajian Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
4. Meningkatkan Profesionalisme ASN	1. Penerapan Standar Kompetensi PNS	BKPSDM

SMART BRANDING

Strategi dan Program Smart Branding

Strategi	Program dan Produk Smart City	Dinas terkait
1. Penataan Wajah Kota dengan Tata ruang yang berkualitas	1. Pengembangan Kampung Tematik atau Tematik Kewilayahan	Bappedalitbang, Perkim, PUPR
2. Promosi Pariwisata	1. Mengembangkan Pola Promosi dan Navigasi Wisata Digital	Disbudpar
	2. Pengembangan event wisata dengan konsep City Branding Impressive Probolinggo City	Disbudpar
	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Disbudpar

SMART ECONOMY

Strategi dan Program Smart Economy

Strategi	Program dan Produk Smart City	Dinas Terkait
1. Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan	SPR Online (Sentra Perikanan Rakyat)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. Peningkatan populasi, kualitas dan produksi sapi potong	1. SI-SAKA (Sekali Inseminasi Satu Kebuntingan)	
	2. SI-PEDET (Sistem Identifikasi Perekaman Data Peternakan)	
3. Meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1. INTIM (Intensifikasi Lahan Sempit))	
	2. GO-NIK (Probolinggo Berorganik)	
	3. UP-NIAN (Upsus Komoditas Pertanian)	
	4. PEKAN-TANI (Penerapan Mekanisasi Pertanian)	
	5. Fasilitasi sarana prasarana pertanian	
4. Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	1. Transfer teknologi pengolahan hasil pertanian	
	2. Fasilitasi pemasaran hasil pertanian	
5. Meningkatkan derajat kesehatan hewan dan ketentraman masyarakat konsumsi pangan asal hewan	1. Keswan ber-GIS (Geografis Informasi System)	
	2. Produk hewan ASUH	
6. Meningkatkan ketentraman masyarakat konsumsi pangan asal hewan	1. Pelayanan keswan berbasis GIS (Geografis Informasi System)	
	2. Produk hewan ASUH	

SMART LIVING

Strategi dan Program Smart Living

Strategi	Program/Produk Smart City	Dinas Terkait
1. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	1. Pengembangan ATCS (<i>Area Traffic Control System</i>) dan ITCS (<i>Integrated Traffic Control System</i>)	Dinas Perhubungan
	2. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi (Jalur Sepeda dan jalur pedestrian untuk disabilitas)	Dinas Perhubungan, DPUPR
	3. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan angkutan pelajar	Dinas Perhubungan
2. Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan	1. Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terpadu	DPUPR, Bappeda Litbang DPMPTSP, Satpol PP
	2. Peningkatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DLH
	3. Peningkatan konservasi kawasan lindung	DLH, Bappeda Litbang
	4. Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum, perumahan dan kawasan pemukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	5. Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh (Pengembangan web GIS)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	6. <i>Pilot Project Green Building</i>	DPUPR
3. Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	1. Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak (Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak / Siskia Cantik)	Dinas Kesehatan
	2. Sideka Pro (Sistem Informasi Pelaporan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo)	Dinas Kesehatan
	3. Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD
	4. Peningkatan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, RSUD
	5. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan (air minum dan sanitasi)	DPUPR, Dinas Kesehatan PDAM
	6. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIMPUSTRONIK Sistem Elektronik Pelayanan Puskesmas)	Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo

SMART SOCIETY

Strategi dan Program Smart Society

Strategi	Program/Produk Smart City	Dinas Terkait
1. Peningkatan pemerataan pendidikan bermutu dan ekosistem pendidikan	1. Pengembangan system zonasi melalui PPDB sistem zonasi online, redistribusi guru dan pemerataan sarana-prasarana	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2. Pengembangan sekolah digital melalui pembelajaran digital, evaluasi belajar digital, e-rapor (rapor digital), dan presensi digital	
	1. Penguatan manajemen berbasis sekolah berorientasi pelayanan publik berfokus pada mutu (MBS-BPP-BPM)	
2. Meningkatkan Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)	Mengadakan pelatihan Forum Pengurangan Resiko Bencana	BPBD
3. Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat saat Bencana	1. Melaksanakan Penanganan kejadian bencana dan pembinaan relawan penanggulangan bencana	BPBD
	2. Penanganan Tanggap Darurat terpadu melalui Call Center 112	Satpol PP, BPBD dan Diskominfo
	3. Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Diskokatana, Diseminasi dan Kolaborasi Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana)	BPBD
4. Pengendalian Masyarakat dalam Penegakan Perda dan Perkada	Pembentukan Kelurahan Sadar Perda dan Perkada	Satpol PP
5. Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan dan Kearsipan	1. Integrasi Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2. Retorasi Arsip	
1. Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan tenteram melalui si Deni Ceni (Melalui aksi Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan)	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

SMART ENVIRONMENT

Strategi dan Program Smart Environment

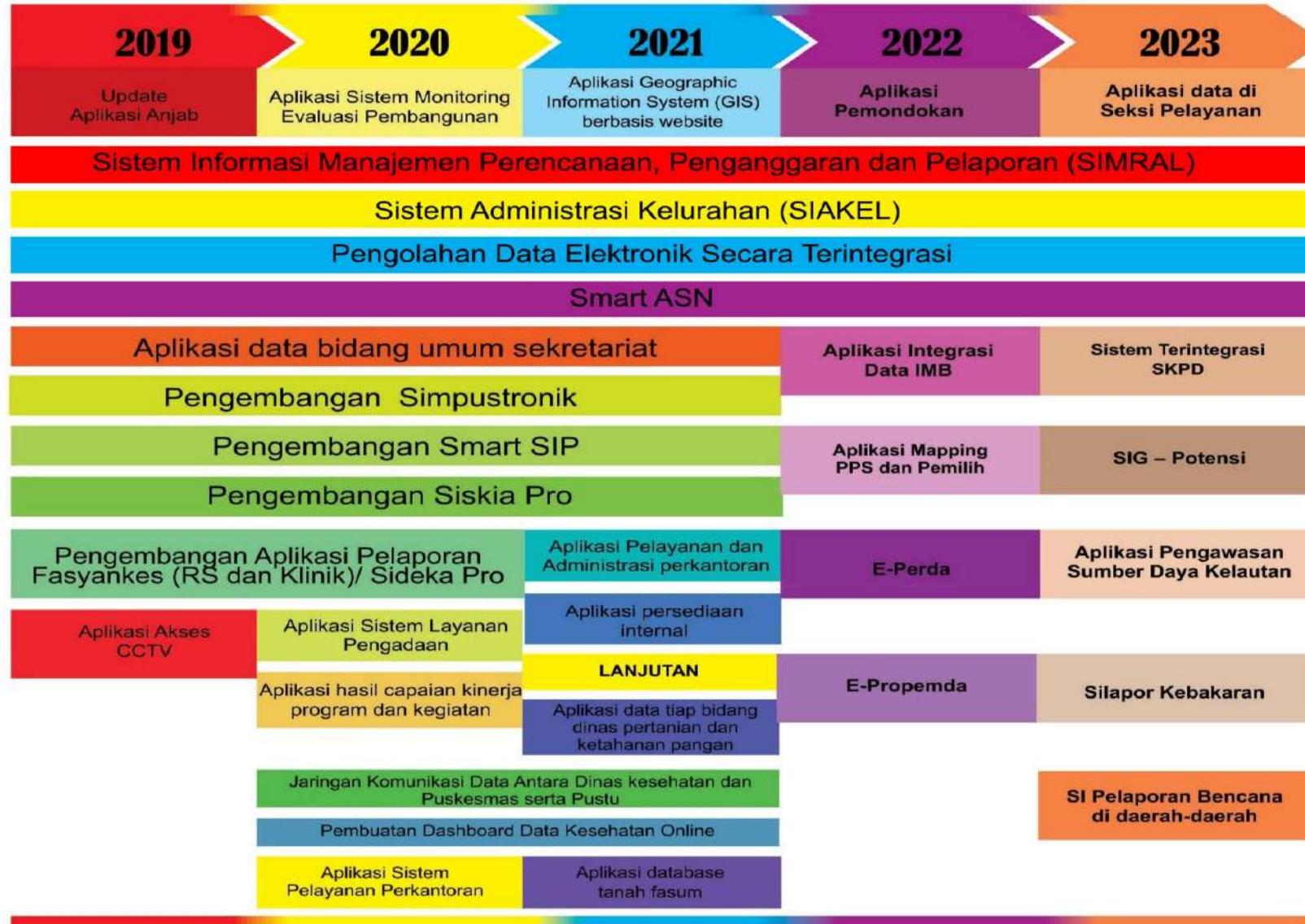
Strategi	Program dan Produk Smart City	Dinas Terkait
1. Mengembangkan program proteksi lingkungan	1. Meningkatkan pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	DLH
	2. Replikasi Pengolahan Limbah UKM Tahu Menjadi Energi Ramah Lingkungan	
	3. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Sumber Air	
2. Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah	1. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DLH
3. Mengembangkan tata kelola energy yang bertanggung jawab	1. Program Probolinggo Banderang (Revitalisasi PJU Kota)	DLH
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH Publik	1. Program deteksi dini dan pengawasan pencemaran	DLH
	2. Program Open Space for Better Living and Better Productivity	
5. Meningkatkan kesadaran pengelolaan persampahan rumah tangga (3R)	1. Pengembangan Database Pengolahan Sampah	DLH
	2. Pengembangan Regulasi Persampahan	
	3. Program Pengolahan dan Pemanfaatan Ulang Sampah	
6. Meningkatkan kualitas pengelo-laan timbunan sampah publik	1. Program Pemanfaatan Energi Ramah Lingkungan	DLH

Berikut terdapat 12 program quick wins jangka pendek pada masing-masing Smart yaitu:

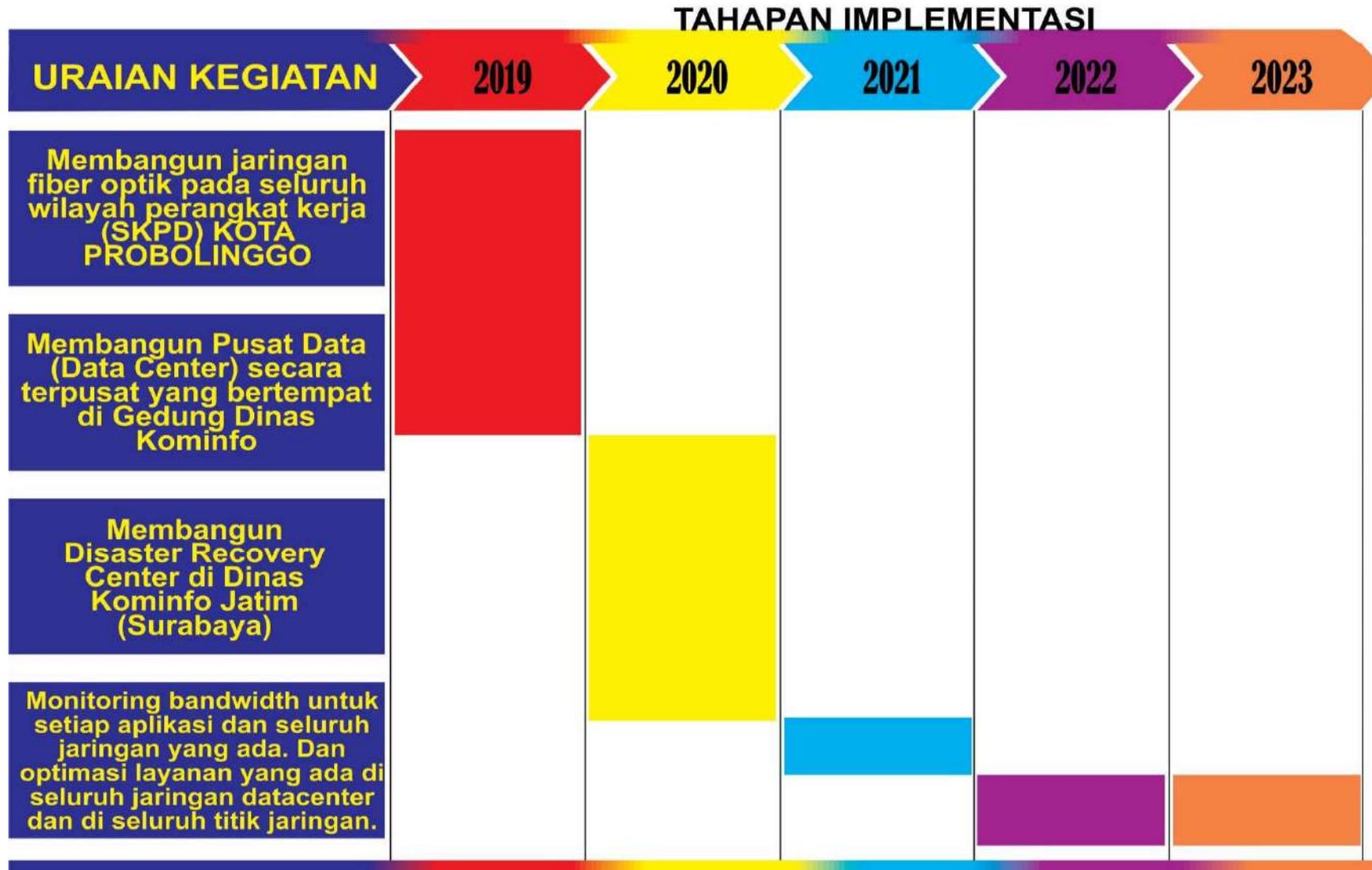
Quicks Wins Smart City

NO	BENTUK	QUICK WINS	SKPD
1.	Smart Governance	1. Pelayanan Kependudukan 3 in 1 (Akte Kelahiran, KK, KTP)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. Sistem Informasi Administrasi Kelurahan (Siakel)	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Smart Branding	1. Pengembangan Kampung Tematik atau Tematik Kewilayahan	Bappedalitbang, PUPR, Perkim
		2. Mengembangkan Pola Promosi dan Navigasi Wisata Digital	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Smart Economy	1. SI-SAKA (Sekali Inseminasi Satu Kebuntingan)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2. SIP DEH (Sistem Informasi Perikanan Daerah)	Dinas Perikanan
4.	Smart Living	1. Peningkatan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak)	Dinas Kesehatan
		2. Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Angkutan Pelajar (Penyediaan Jalur Sepeda)	Dinas Perhubungan
5.	Smart Society	1. Sekolah Digital (Pembelajaran, Penilaian Belajar dan Laporrannya, serta Pengendalian Kehadiran Guru dan Siswa)	Dinas Pendidikan
		2. Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik Berfokus Pada Mutu (MBS-BPP-BPM)	Dinas Pendidikan
6.	Smart Environment	1. Peningkatan pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (e-portal samali)	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Program Probolinggo Benderang (Revitalisasi PJU Kota)	Dinas Perhubungan

PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY DAERAH



PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY DAERAH



PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY DAERAH

JENIS PEKERJAAN	2019	2020	2021	2022	2023
A. PELATIHAN					
Pelatihan penggunaan sistem informasi yang sudah ada					
Pelatihan penggunaan Teknologi baru					
Pelatihan maintenance					
Pelatihan jaringan					
Pelatihan website					
Pelatihan software Microsoft					
B. PENGELOLAAN SDM					
Rotasi Staf					
C. DOKUMENTASI					
Penyusunan standar dokumen pengadaan TI					

JENIS PEKERJAAN	2019	2020	2021	2022	2023
Penyusunan standar layanan TI					
D. PERATURAN DAN SOP					
Penyusunan peraturan dan SOP untuk pengisian data LPSE					
Penyusunan peraturan dan SOP evaluasi laporan secara regular					
Penyusunan peraturan dan SOP manajemen TI – Proses Kesesuaian, Perencanaan dan Pengaturan					
Penyusunan peraturan dan SOP manajemen TI – Proses Pembangunan, Pengadaan dan Implementasi					
Penyusunan peraturan dan SOP manajemen TI – Proses Penyerahan, Pelayanan dan Dukungan					
Penyusunan peraturan dan SOP manajemen TI – Proses Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian					
Penyusunan peraturan dan SOP tata kelola TI - Proses Evaluasi, Pengarahan dan Penilaian					
E. SOSIALISASI					
Sosialisasi peraturan					
Sosialisasi E-office					

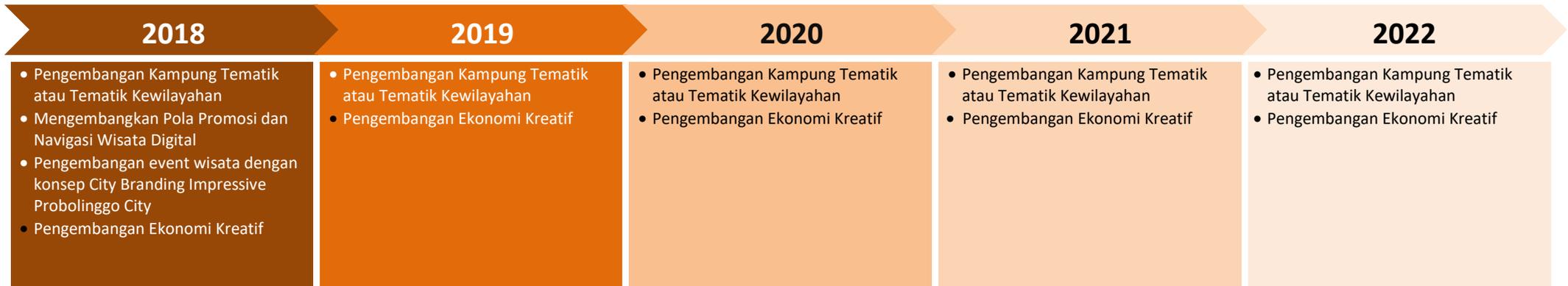


ROAD MAPS SMART GOVERNANCE

2018	2019	2020	2021	2022
<ul style="list-style-type: none">• Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPADU)• Pelayanan Kependudukan 3 in 1 (Akte Kelahiran, KK, KTP)• Sistem Pelayanan Puskesmas• SIAKEL (Sistem Informasi & Administrasi Kelurahan)• SiJinggo (Sistem Jaringan Informasi Good Governance)• Peningkatan Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengukuran, Pelaporan pada SIMRAL• Peningkatan Sistem Tunjangan Kinerja PNS• Sinkronisasi Anjab, Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan dengan Indikator Kinerja Jabatan dan SKP• Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Kota Probolinggo• Inventarisir dan Kajian Produk Hukum Daerah• Penerapan Standar Kompetensi PNS	<ul style="list-style-type: none">• Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPADU)• Pelayanan Kependudukan 3 in 1 (Akte Kelahiran, KK, KTP)• Sistem Pelayanan Puskesmas• SIAKEL (Sistem Informasi & Administrasi Kelurahan)• SiJinggo (Sistem Jaringan Informasi Good Governance)• Peningkatan Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengukuran, Pelaporan pada SIMRAL• Peningkatan Sistem Tunjangan Kinerja PNS• Sinkronisasi Anjab, Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan dengan Indikator Kinerja Jabatan dan SKP• Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Kota Probolinggo• Inventarisir dan Kajian Produk Hukum Daerah• Penerapan Standar Kompetensi PNS	<ul style="list-style-type: none">• Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPADU)• Pelayanan Kependudukan 3 in 1 (Akte Kelahiran, KK, KTP)• Sistem Pelayanan Puskesmas• SIAKEL (Sistem Informasi & Administrasi Kelurahan)• SiJinggo (Sistem Jaringan Informasi Good Governance)• Peningkatan Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengukuran, Pelaporan pada SIMRAL• Peningkatan Sistem Tunjangan Kinerja PNS• Sinkronisasi Anjab, Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan dengan Indikator Kinerja Jabatan dan SKP• Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Kota Probolinggo• Inventarisir dan Kajian Produk Hukum Daerah• Penerapan Standar Kompetensi PNS• Pengintegrasian Sistem Pengaduan Pelayanan Publik• Sistem Pelayanan Poli RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo	<ul style="list-style-type: none">• Pengintegrasian Sistem Pengaduan Pelayanan Publik• Sistem Pelayanan Poli RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo	<ul style="list-style-type: none">• Pengintegrasian Sistem Pengaduan Pelayanan Publik• Sistem Pelayanan Poli RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo



ROAD MAPS SMART BRANDING





ROAD MAPS SMART ECONOMY





ROAD MAPS SMART LIVING

2018

- Pengembangan ATCS (*Area Traffic Control System*) dan ITCS (*Integrated Traffic Control System*)
- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi (Jalur Sepeda dan jalur pedestrian untuk disabilitas)
- Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Angkutan Pelajar
- Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terpadu
- Peningkatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Peningkatan Konservasi Kawasan Lindung
- Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum, perumahan dan kawasan pemukiman
- Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh
- Pilot Project Green Building
- Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak (Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak / Siskia Cantik)
- Sideka Pro (Sistem Informasi Pelaporan, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo)
- Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan
- Peningkatan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat
- Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan (air minum dan sanitasi)
- Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIMPUSTOMRIK Sistem Elektronik Pelayanan Puskesmas)

2019

- Pengembangan ATCS (*Area Traffic Control System*) dan ITCS (*Integrated Traffic Control System*)
- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi (Jalur Sepeda dan jalur pedestrian untuk disabilitas)
- Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Angkutan Pelajar
- Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terpadu
- Peningkatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Peningkatan Konservasi Kawasan Lindung
- Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum, perumahan dan kawasan pemukiman
- Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh
- Pilot Project Green Building
- Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak (Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak / Siskia Cantik)
- Sideka Pro (Sistem Informasi Pelaporan, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo)
- Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan
- Peningkatan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat
- Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan (air minum dan sanitasi)
- Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIMPUSTOMRIK Sistem Elektronik Pelayanan Puskesmas)

2020

- Pengembangan ATCS (*Area Traffic Control System*) dan ITCS (*Integrated Traffic Control System*)
- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi (Jalur Sepeda dan jalur pedestrian untuk disabilitas)
- Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Angkutan Pelajar
- Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terpadu
- Peningkatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Peningkatan Konservasi Kawasan Lindung
- Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum, perumahan dan kawasan pemukiman
- Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh
- Pilot Project Green Building
- Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak (Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak / Siskia Cantik)
- Sideka Pro (Sistem Informasi Pelaporan, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo)
- Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan
- Peningkatan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat
- Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan (air minum dan sanitasi)
- Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIMPUSTOMRIK Sistem Elektronik Pelayanan Puskesmas)

2021

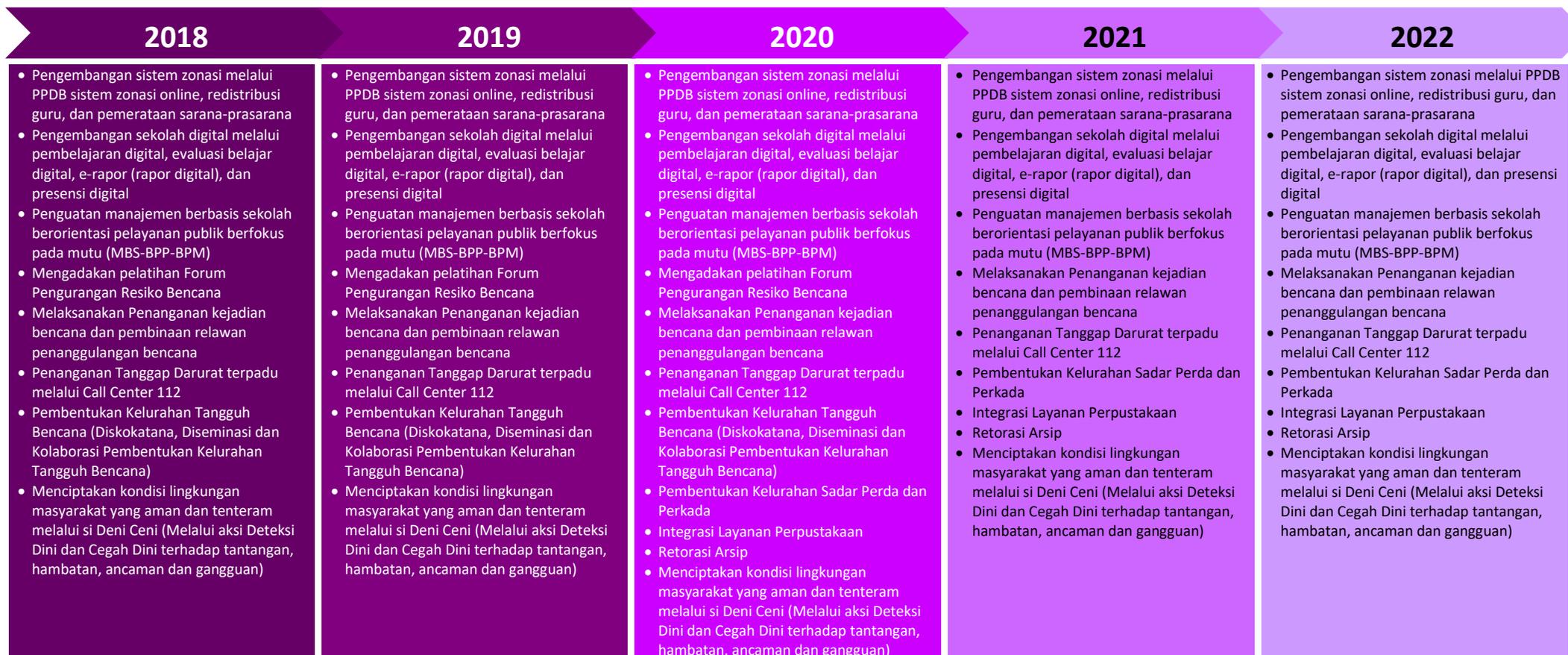
- Pengembangan ATCS (*Area Traffic Control System*) dan ITCS (*Integrated Traffic Control System*)
- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi (Jalur Sepeda dan jalur pedestrian untuk disabilitas)
- Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Angkutan Pelajar
- Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terpadu
- Peningkatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Peningkatan Konservasi Kawasan Lindung
- Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum, perumahan dan kawasan pemukiman
- Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh
- Pilot Project Green Building

2022

- Pengembangan ATCS (*Area Traffic Control System*) dan ITCS (*Integrated Traffic Control System*)
- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi (Jalur Sepeda dan jalur pedestrian untuk disabilitas)
- Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Angkutan Pelajar
- Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terpadu
- Peningkatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Peningkatan Konservasi Kawasan Lindung
- Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum, perumahan dan kawasan pemukiman
- Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh
- Pilot Project Green Building



ROAD MAPS SMART SOCIETY





ROAD MAPS SMART ENVIRONMENT



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
RUKMINI